SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

(2) Sistematika RKPD Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup, sebagaiman tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.
(2) RKPD Tahun 2022 sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi :
    a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
    b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan
    c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah (RAPBD) Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022:
(1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja, keluaran Sub-Kegiatan, hasil Kegiatan, serta Capaian Program.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan pada tahun rencana yang berkenaan.

Pasal 5

(1) Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2022, maka seluruh Perangat Daerah wajib mengalokasikan anggaran ke rincian Program dan Kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada Program Prioritas Daerah serta kinerja hasil yang inovatif.
(2) Keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2022 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Pemetaan dan pemutakhiran nomenklatur Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi bagian dari peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:
(1) Hasil pemetaan Program dan Kegiatan merupakan hasil kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan;
(2) Hasil pemetaan secara tersurat telah dituangkan ke dalam rencana program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah;
(3) Hasil pemetaan Program dan Kegiatan digunakan sebagai acuan dan bahan pembahasan pada tahapan penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan APBD Tahun 2022.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Juni 2021
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

**Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.**
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 Juni 2021
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 merupakan penjabaran tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022. RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam

perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar 1.1:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

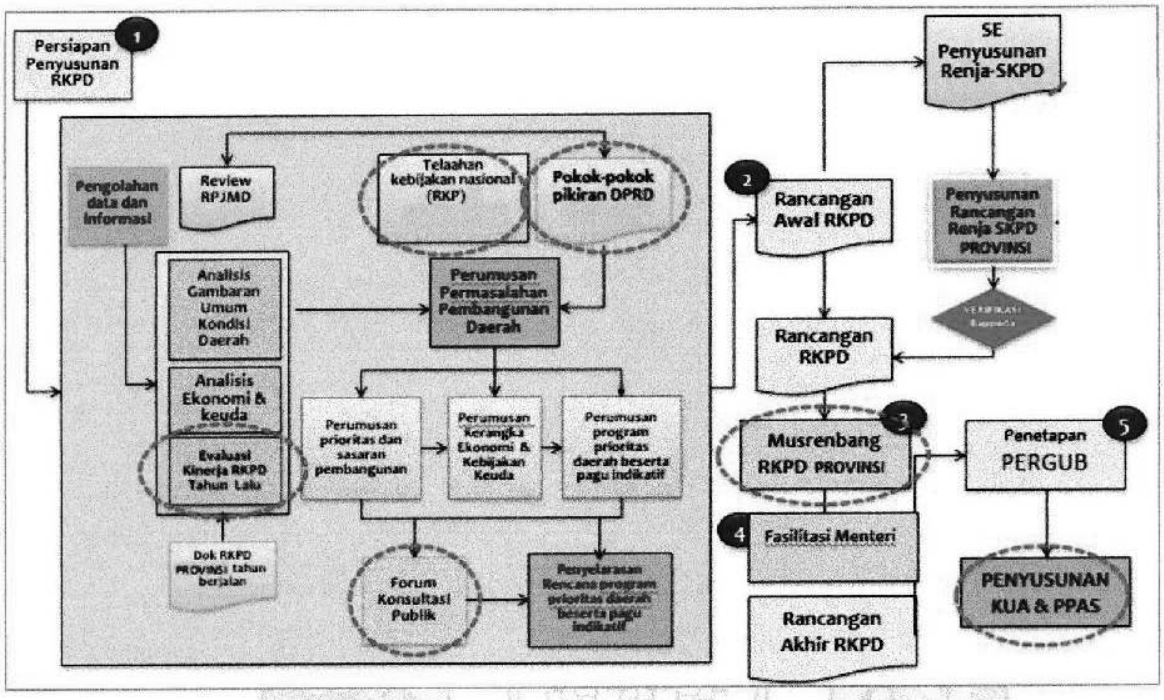


## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Ngara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomoe 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

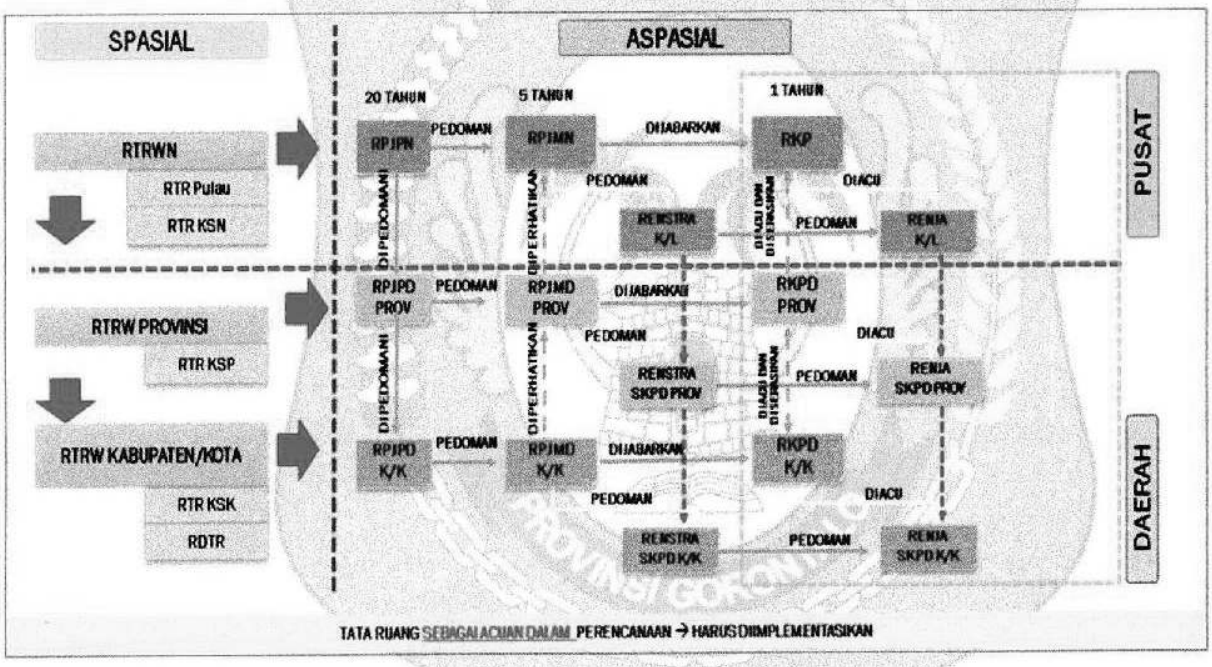


## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022
2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah
4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah:

1. Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2022
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

**BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan tentang kondisi terkini ditinjau dari perspektif geografi dan demografi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat (Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

2.3. Aspek Pelayanan Umum: Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4. Aspek Pelayanan Umum: Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

2.5. Aspek Pelayanan Umum: Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.6. Aspek Daya Saing Daerah

2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD

2.8. Permasalahan dan Rekomendasi

**BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2022 serta pendanaan pembangunan lainnya.

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2022.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat Isu Strategis, yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II, internalisasi isu-isu global dan nasional, Tema Pembangunan Tahun 2022, serta Program Prioritas dan keselarasan dengan Program Prioritas Nasional

**BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2022**

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2022.

**BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII. PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

#### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember 2000, dan menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 $Km^2$, atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.

**Tabel 2.1**
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

| Kode Wilayah | Wilayah | Jumlah Kecamatan | Kelurahan/Desa | | | Luas Wilayah ($Km^2$) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kelurahan | Desa | Jumlah | | |
| 75.01 | Kabupaten Gorontalo | 19 | 14 | 191 | 205 | 1.750,83 | 15,55 |
| 75.02 | Kabupaten Boalemo | 7 | - | 84 | 84 | 1.521,88 | 13,52 |
| 75.03 | Kabupaten Bone Bolango | 18 | 5 | 160 | 165 | 1.984,31 | 17,63 |
| 75.04 | Kabupaten Pohuwato | 13 | 3 | 101 | 104 | 4.244,31 | 37,70 |
| 75.05 | Kabupaten Gorontalo Utara | 11 | - | 124 | 124 | 1.676,15 | 14,89 |
| 75.71 | Kota Gorontalo | 9 | 50 | - | 50 | 79,59 | 0,71 |
| 75 | **Provinsi Gorontalo** | 77 | 72 | 657 | 729 | 11.257,07 | 100 |

*Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*

Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 $km^2$ atau sebesar 37,7%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 $km^2$ atau sebesar 0,71%.

### 2.1.1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

**Gambar 2.1**
Peta Provinsi Gorontalo,

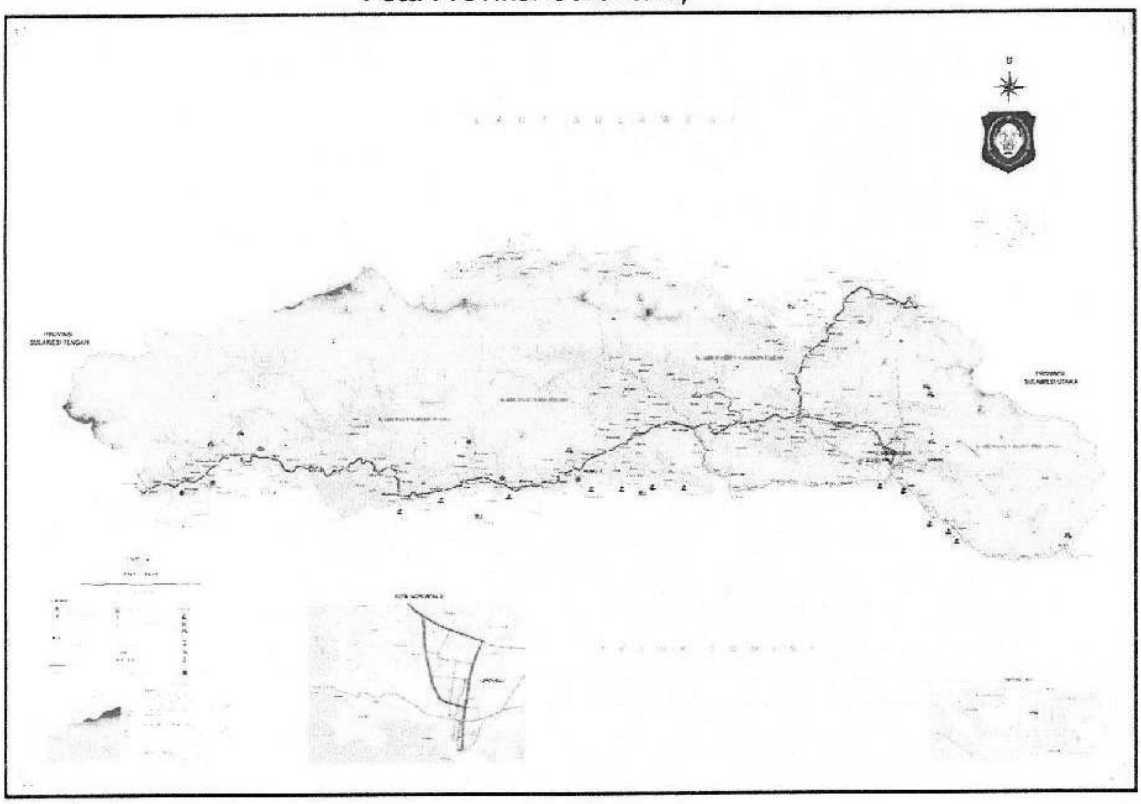

*Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.*

Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0° 19' – 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' – 125° 14' Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

### 2.1.1.3 Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo

Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

**Gambar 2.2**
Peta Topografi Provinsi Gorontalo,

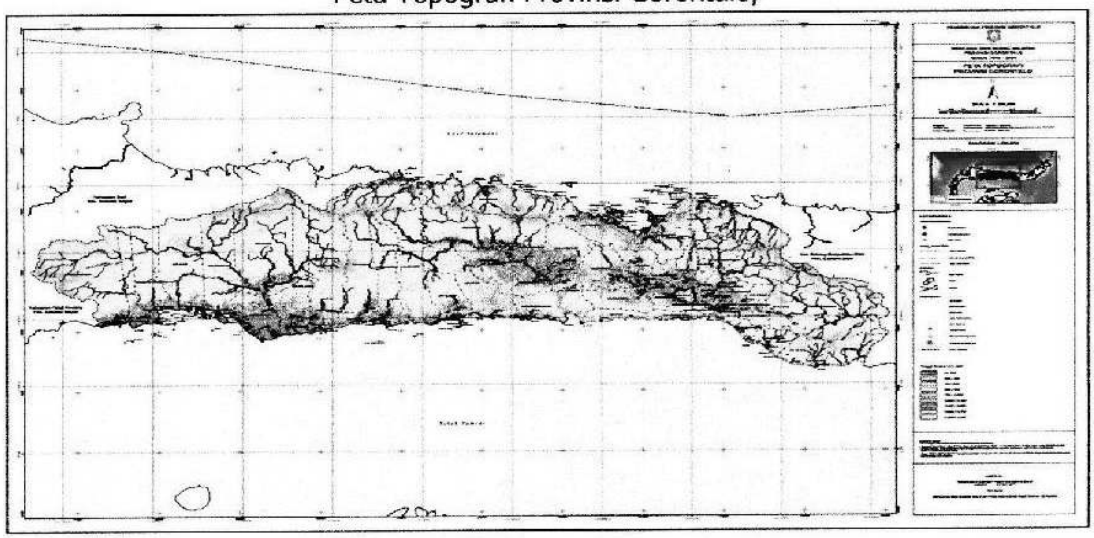

*Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.*

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

**Tabel 2.2**
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

| Kelas Lereng | Kemiringan (%) | Luas (ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| C | 8-15 | 66.528 | 5,45 |
| D | 15 – 40 | 113.997 | 9,33 |
| E | > 40 | 838.355 | 68,63 |
| **Jumlah** | | **1.221.544** | **100** |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo*

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

### 2.1.1.4 Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (*S. Bachri, dkk, 1993*) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen - Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik).

### 2.1.1.5 Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

**Tabel 2.3**
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

| NO | NAMA WILAYAH SUNGAI | KODE | LUAS ($Km^2$) |
|---|---|---|---|
| 1. | Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB) | WS No. 05.04.A2 | 6.888,7 |
| 2. | Wilayah Sungai Paguyaman | WS No. 05.05.A3 | 3.266,2 |
| 3. | Wilayah Sungai Randangan | WS No. 05.06.A2 | 4.179,4 |

*Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo*

**Tabel 2.4**
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

| DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | | | |
|---|---|---|---|
| **WS Paguyaman** | **WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)** | | **WS Randangan** |
| 1. DAS Paguyaman, | 1. DAS Limboto, | 38. DAS Samia | 1. DAS Moutong |
| 2. DAS Limba, | 2. DAS Tolinggula, | 39. DAS Tapaibuhu | 2. DAS Molosipat |
| 3. DAS Olibuhu, | 3. DAS Potanga, | 40. DAS Soklat | 3. DAS Dudewulo, |
| 4. DAS Tumba, | 4. DAS Biawu, | 41. DAS Saowea | 4. DAS Randangan, |
| 5. DAS Bolangga, | 5. DAS Bulolila, | 42. DAS Imana | 5. DAS Beringin, |
| 6. DAS Bubaa, | 6. DAS Bulontio, | 43. DAS Taludaa | 6. DAS Sukadamai, |
| 7. DAS Tumbihi, | 7. DAS Boliyohuto, | 44. DAS Sogitia | 7. DAS Wonggarasi, |
| 8. DAS Limbatihu, | 8. DAS Dulukapa, | 45. DAS Bilolatunga | 8. DAS Sidorukun, |
| 9. DAS Tabongo, | 9. DAS Deme 1, | 46. DAS Tombulilato | 9. DAS Patihu, |
| 10. DAS Dulupi, | 10. DAS Dunu, | 47. DAS Ombulo | 10. DAS Dinga Motolohu, |
| 11. DAS Sambati, | 11. DAS Bubalango, | 48. DAS Bangahu | 11. DAS Lemito, |
| 12. DAS Tilamuta, | 12. DAS Tengah, | 49. DAS Mopuya | 12. DAS Lomuli, |
| 13. DAS Lamu, | 13. DAS Monano, | 50. DAS Kaidundu | 13. DAS Milangodaa, |
| 14. DAS Botumoito, | 14. DAS Tudi, | 51. DAS Uabanga | 14. DAS Popayato |
| 15. DAS Tapadaa, | 15. DAS Tolanga, | 52. DAS Tongo | |
| 16. DAS Salilama, | 16. DAS Datahu, | 53. DAS Olele | |
| 17. DAS Tabulo, | 17. DAS Tolangio, | 54. DAS Oluhuta | |
| 18. DAS Bumbulan, | 18. DAS Pontolo, | 55. DAS Molotabu | |
| 19. DAS Libuo | 19. DAS Buda, | 56. DAS Botutonuo | |
| 20. DAS Marisa | 20. DAS Bubode, | 57. DAS Modelamo | |
| | 21. DAS Waluhu, | 58. DAS Buluango | |
| | 22. DAS Luluo, | 59. DAS Huangobutu | |
| | 23. DAS Tolotio, | 60. DAS Inengo | |
| | 24. DAS Bilungala, | 61. DAS Bolango-Bone | |
| | 25. DAS Momungaa, | 62. DAS Pohe | |
| | 26. DAS Leato, | 63. DAS Tanjung Kramat | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 29. DAS Baladu<br>30. DAS Mooti<br>31. DAS Sipatana<br>32. DAS Sogu<br>33. DAS Popalo<br>34. DAS Posso<br>35. DAS Sanbungo<br>36. DAS Tolopato<br>37. DAS Butoimola | 66. DAS Kayu Bulan<br>67. DAS Bilihu Timur<br>68. DAS Langgula<br>69. DAS Lamu<br>70. DAS Limo'o<br>71. DAS Lobuto Timur<br>72. DAS Lobuto<br>73. DAS Biluhu Barat<br>74. DAS Huango | |

*Sumber : BWS Sulawesi II, Gorontalo, 2016*

b) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

c) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

### 2.1.1.6 Klimatologi

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontaloselama tahun 2020 berkisar antara 27°c. Suhu terendah terjadi di bulan Februari yaitu 19,60°c. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan Desember dengan 35,90°c.

Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2020 sebesar 85 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan

selama tahun 2020 yaitu sebesar 1. 457,40 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September yaitu mencapai 223 mm.

Pada tahun 2020, rata-rata kecepatan angina tercatat sebesar 1,54 m/det.

### 2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di kabupaten bone bolango dan pulau monduli di kabupaten boalemo.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

   Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

   a) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :

   b) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten

c) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:

d) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 :

**Tabel 2.5**
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2019

| Kabupaten/Kota | Hutan Lindung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi dapat dikonversi | Jumlah luas hutan dan perairan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boalemo | 28.514,52 | 10.970,62 | 44.240,78 | 14.537,49 | 4.783,09 | 103.046,50 |
| Gorontalo | 13.124,94 | 24.777,84 | 41.899,34 | 17.714,06 | 2.395,33 | 99.911,51 |
| Pohuwato | 136.582,81 | 39.707,97 | 83.304,44 | 41.476,29 | 10.522,52 | 311.594,03 |
| Bone Bolango | 15.634,23 | 104.855,72 | 18.830,08 | 824,10 | - | 140.144,13 |
| Gorontalo Utara | 8.021,54 | 16.210,33 | 64.388,66 | 15.540,08 | 5.554,01 | 109.714,62 |
| Kota Gorontalo | 470,48 | - | - | - | - | 470,48 |
| **Provinsi Gorontalo** | **202.348,52** | **196.522,47** | **252.663,30** | **90.092,02** | **23.254,95** | **764.881,27** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

#### 2.1.2.1 Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 56.061 ha dan produksi 289.656 ton (produktivitas 51,67 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 25.104 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah

140.460 ha dengan 677.249 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato.

- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, daun bawang, bayam, buncis, kangkung, ketimun, cabai besar, cabai rawit, sawi, terong, kacang panjang, kubis, labu siem dan tomat) dan buah-buahan (durian, manga, nangka, nenas, papaya, pisang dan rambutan). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 2.065 hektar dengan produksi sebanyak 11.822 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 4.404 ton.

Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2018 (Ha)

| No | Jenis Lahan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahan Sawah | | | | |
| | a. Sawah Irigasi | 27.156 | 27.676 | 27.660 | 27.027 |
| | - Ditanami Padi | 27.066 | 27.614 | 27.598 | 26.642 |
| | - Tidak ditanami padi | 90 | 62 | 62 | 385,1 |
| | b. Sawah Non Irigasi | 7.843 | 8.011 | 7.104 | 7.067 |
| | - Ditanami padi | 4.988 | 5.135 | 5.083 | 4.864 |
| | - Tidak ditanami padi | 2.855 | 2.876 | 2.022 | 2.203,4 |
| | ***c. Total lahan sawah (a+b)*** | **34.999** | **35.687** | **34.764** | **34.094** |
| | - Ditanami padi | 32.054 | 32.749 | 32.681 | 31.506 |
| | - Tidak ditanami padi | 2.945 | 2.938 | 1.479 | 2.589 |
| 2 | Lahan Pertanian Bukan Sawah | **839.189** | **904.015** | **904.981** | **998.497** |
| | a. Tegal/Kebun | 151.480 | 191.939 | 239.313 | 244.829 |
| | b. Ladang/Huma | 59.878 | 37.399 | 41.382 | 39.996 |
| | c. Lahan yang sementara tidak diusahakan | 54.121 | 56.110 | 49.981 | 50.088 |
| | d. Lainnya (Perkebunan, Hutan Rakyat Tambak, Kolam/tebat/empang, dll) | 573.710 | 618.567 | 574.304 | 663.585,3 |
| 3 | Lahan Bukan Pertanian | **342.832** | **282.694** | **283.890** | **233.840** |
| | (rumah, bangunan & halaman, hutan negara, rawa-rawa dll) | 342.832 | 282.694 | 283.890 | 233.840,1 |
| | **Total** | **1.217.020** | **1.222.396** | **1.223.635** | **1.266.432** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020*

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2018 sebesar 1.266.432 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 34.094 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 998.497 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 233.840 Ha. Luas Lahan Sawah tahun 2018 mengalami penurunan 1,92 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara luas lahan pertanian bukan sawah mengalami peningkatan 10,33 persen dibanding tahun 2018.

**Tabel 2.7**
Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Di Provinsi Gorontalo tahun 2018

| .No | Wilayah | Penggunaan Lahan | | | Total Luas Lahan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sawah | Pertanian Bukan Sawah | Bukan Pertanian | |
| 1 | Kabupaten Boalemo | 5,396 | 238,701 | 12,629 | 256,726 |
| 2 | Kabupaten Gorontalo | 14,298 | 163,017 | 21,340 | 198,655 |
| 3 | Kabupaten Pohuwato | 6,685 | 336,205 | 81,541 | 424,431 |
| 4 | Kabupaten Bone Bolango | 2,221 | 85,531 | 76,072 | 163,824 |
| 5 | Kabupaten Gorontalo Utara | 6,242 | 76,100 | 88,515 | 170,857 |
| 6 | Kota Gorontalo | 843 | 4,463 | 2,597 | 7,903 |
| | **JUMLAH** | 35,685.0 | 904,017.0 | 282,694.0 | 1,222,396.0 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2019*

***Kota Gorontalo***, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 916 Ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 Ton/Ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.

***Kabupaten Boalemo***, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo masih di dominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman dan Wonosari. Kecamatan Dulupi masih merupakan penghasil jagung terbesar di Kabupaten ini. Komoditi unggulan Sektor Perkebunan yaitu, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete.

***Kabupaten Bone Bolango***, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

***Kabupaten Gorontalo***, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian Selatan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat dan Tibawa; sedangkan di bagian Utara meliputi Kecamatan Batudaa dan Bongomeme. Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah ini lebih mengedepankan Sektor Pertanian sebagai *prime mover* pembangunan daerah melalui program "revitalisasi pertanian" dengan potensi Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha. Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha.

***Kabupaten Gorontalo Utara***, Potensi Pertanian berupa padi, jagung dan Perkebunan berupa Cokelat, Cengkih, Kelapa dan Kopi. Sektor Pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB daerah. Luas lahan Pertanian: padi seluas 5.866 Ha, jagung seluas 4.841 Ha; Perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 Ha, kopi seluas 89,25 Ha, kakao seluas 1.000,15 Ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha.

***Kabupaten Pohuwato***, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 ha, bahkan tercatat masih ada seluas 19.000 ha lahan yang belum terkelola. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun.

Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar 50.556,73 Ha, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seluas 49.009,95 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 41,71 persen.

**Tabel 2.8**
Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

| No | Wilayah | Luas Panen | | Produktivitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020* | 2019 | 2020* |
| 1 | Kab. Boalemo | 8.277,53 | 8.927,89 | 43,79 | 44,28 |
| 2 | Kab. Gorontalo | 22,209,55 | 21.087,81 | 46,64 | 47,41 |
| 3 | Kab. Pohuwato | 6.383,21 | 5.682,89 | 52,58 | 53,66 |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 3.455,18 | 5.164,28 | 49,19 | 49,36 |
| 5 | Kab. Gorontalo Utara | 6.780,41 | 7.163,09 | 45,28 | 44,24 |
| 6 | Kota Gorontalo | 1.904,07 | 2.530,77 | 53,14 | 54,84 |
| | **Total – Provinsi Gorontalo** | **49.009,95** | **50.556,73** | **47,18** | **47,68** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial.

**Tabel 2.9**
Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019

| No | Wilayah | Tegal/Kebun | Ladang/Huma | Sementara tidak diusahakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Boalemo | 39.453,00 | 1.422,00 | 472,00 |
| 2 | Kab. Gorontalo | 51.062,00 | 11.976,00 | 3.868,00 |
| 3 | Kab. Pohuwato | 50.671,00 | 15.628,20 | 23.762,20 |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 12.716,70 | 3.987,00 | 11.971,20 |
| 5 | Kab. Gorontalo Utara | 26.786,00 | 8.602,00 | 7.948,00 |
| 6 | Kota Gorontalo | 145,00 | - | 4,00 |
| | **Provinsi Gorontalo** | **188.833,70** | **41.615,20** | **48.025,40** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2021*

Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah:

1. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung
2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung)
3. Pembangunan Industri makanan (Sari Buah)
4. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan
5. Pengembangan Industri Tepung Beras
6. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
7. Pengembangan lahan sawah
8. Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung

### 2.1.2.2 Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2020 mencapai 258.317 ekor, sementara populasi ternak kambing 2020 sebesar 105.089 ekor.

**Tabel 2.10**
Populasi Sapi dan Kambing (ekor)

| Wilayah | Sapi | | Kambing | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020* | 2019 | 2020* |
| Boalemo | 40.895 | 43.476 | 9.809 | 11.406 |
| Gorontalo | 92.774 | 96.548 | 49.728 | 50.982 |
| Pohuwato | 32.056 | 34.241 | 14.836 | 14.783 |
| Bone Bolango | 46.835 | 47.384 | 7.529 | 7.604 |
| Gorontalo Utara | 30.784 | 33.006 | 7.866 | 7.320 |
| Kota Gorontalo | 3.650 | 3.662 | 12.986 | 12.991 |
| **Provinsi Gorontalo** | **246.994** | **258.317** | **102.754** | **105.089** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2021*

Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 2.11**
Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020 (ekor)

| Wilayah | Ayam Kampung | | Ayam Petelur | | Ayam Pedaging | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020* | 2019 | 2020* | 2019 | 2020* |
| Boalemo | 422.856 | 433.902 | 17.242 | 18.319 | - | 134 |
| Gorontalo | 680.705 | 686.226 | 218.928 | 218.928 | 3.365.400 | 2.524.050 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone Bolango | 268.991 | 324.491 | 146.900 | 147.600 | 861.440 | 861.440 |
| Gorontalo Utara | 428.420 | 432.485 | 28.800 | 27.033 | 70.600 | - |
| Kota Gorontalo | 140.100 | 127.631 | 3.500 | 3.500 | 232.543 | 232.543 |
| **Provinsi Gorontalo** | **2.308.249** | **2.371.912** | **417.370** | **425.780** | **4.529.983** | **3.618.167** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2021*

*Kabupaten Bone Bolango* : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bone bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali.

*Kabupaten boalemo :* Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

*Kabupaten Gorontalo* : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di Kecamatan Biluhu dan Batudaa Pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di Kecamatan Batudaa, Tabongo dan bongomeme).

*Kabupaten pohuwato* : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi:

- Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi);
- Penggemukan sapi;
- Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging); dan
- Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan).

### 2.1.2.3 Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Luas Perairan Gorontalo mencapai 50.000 $Km^2$, yang terdiri dari

sulawesi serta panjang garis pantai yang meliputi pantai utara (laut sulawesi), dan wilayah pantai selatan (teluk tomini).

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2020 sebesar 147.070 ton. produksi perikanan terbesar berada di Kota Gorontalo yaitu 27.274 ton atau sekitar 19 persen.

Hasil Perikanan terbesar diperoleh dari Budidaya Perikanan Darat yaitu sebesar 15.477,39 ton atau sebesar 54,36% dari keseluruhan produksi yaitu 212.427,50 ton dan 95.991 ton dari hasil Perikanan Laut dengan 8.413 rumah-tangga perikanan. Luas areal Rumput Laut sekitar 14.250 ha dengan produksi 99.454,4 ton sedangkan luas areal Perikanan Tangkap adalah + 50.500 $km^2$ dengan potensi 92.171 ton/tahun.

***Kabupaten Bone Bolango,*** Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang.

***Kota Gorontalo,*** Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km2. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum.

***Kabupaten Boalemo,*** Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

***Kabupaten Gorontalo,*** Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha.

Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam

***Kabupaten Gorontalo Utara,*** Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

***Kabupaten Pohuwato,*** Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya.

Peluang Investasi di sektor ini adalah :

- Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/*cold storage* untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan);
- Industri Pengalengan Ikan/kemasan;
- Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar;
- Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan;
- Pengadaan Rumpon;
- Budidaya Kerang Mutiara;
- Budidaya Tambak Udang/Lobster;
- Pembangunan Industri Rumput Laut;
- Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.

### 2.1.2.4 Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

***Kabupaten Bone Bolango.*** Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).

- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

***Kabupaten Gorontalo*** Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembagadengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 $m^3$ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 $m^3$), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 $m^3$), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 $m^3$), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 $m^3$), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 $m^3$), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

***Kabupaten Gorontalo Utara,*** Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengaliri wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

***Kabupaten Pohuwato,*** Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 $m^3$); Batu Granit (> 100.000.000 $m^3$); Dasit (300.000.000 $m^3$); Sirtu (100.000.000 $m^3$); Andesit (10.000.000 $m^3$); dan Zeolit 5.000.000 $m^3$). Kesemuanya

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Ilota Kiri, Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

### 2.1.2.5 Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri mempu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan *(forward lingkage),* maupun keterkaitan kebelakangan *(backward lingkage).* Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo

***Kabupaten Gorontalo Utara***, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 $Km^2$. Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi

- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

***Kota Gorontalo,*** Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

***Kabupaten Gorontalo.*** Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut. Sebahagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

### 2.1.2.6 Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor

potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Taman Laut Pulau Limba, Pantai Pasir Putih Tilamuta, Pantai Teluk Tomini, Pantai Indah, Pantai Ratu, Pantai Karang Citra, Pantai Marisa, Pantai Boalemo Indah, Pasir Putih Leato dan Taman Laut Bitilia.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Laut Torosiaje (Pahuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Pulau Bitila, Pulau Asiangi, Pulau Raja dan Pulau Mohinggito.
3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Tumbilo Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Benteng Ota Mas Udangan, Menara Mulia, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), dan Pusat Kerawang.
5. *Wisata Kuliner* : Penggemar kuliner harus mencoba milu siram. Ini adalah sup jagung, ikan, garam, kelapa parut, cabai dan jeruk nipis. Jenis makanan ini dapat ditemukan hampir di mana saja di Gorontalo, terutama di warung sekitar pasar di malam hari. Pengaruh Belanda juga membuat Gorontalo menjadi salah satu kota roti terbaik di Indonesia. Kue dan kue kering yang lezat dan cocok dengan lidah para penyuka rasa manis.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

***Kabupaten Bone Bolango.*** Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam

daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha.

***Kota Gorontalo.*** Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

***Kabupaten Boalemo.*** Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo.

***Kabupaten Gorontalo.*** Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

***Kabupaten Gorontalo Utara.*** Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari.

***Kabupaten Pohuwato.***

Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

#### 2.1.3.1 Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempabumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

**Gambar 2.3**
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

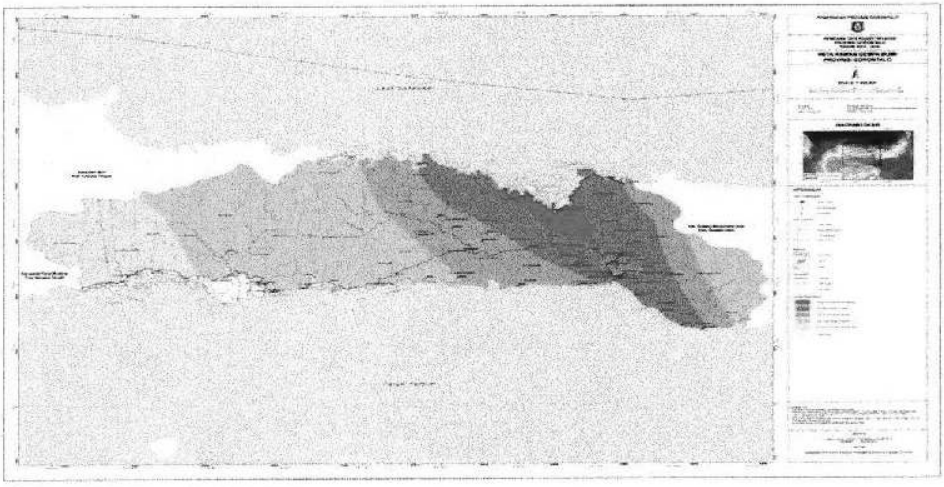

*Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030*

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.Tatanan tektonik geologi yang

kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

**Gambar 2.4**
Peta Patahan Provinsi Gorontalo

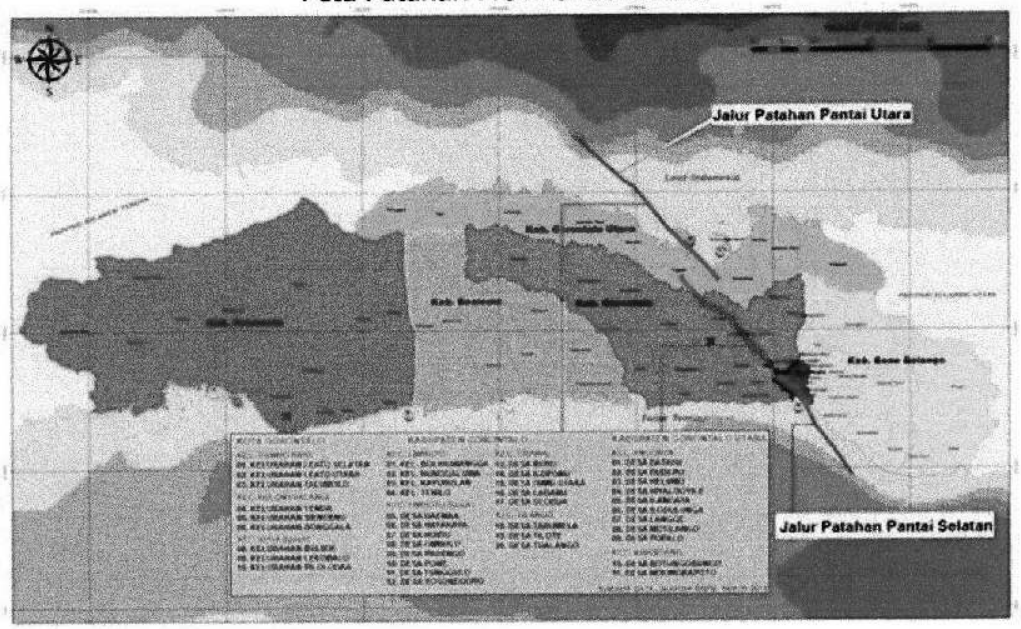


*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020*

### 2.1.3.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

**Gambar 2.5**
Peta Kawasan Rawan Longsor

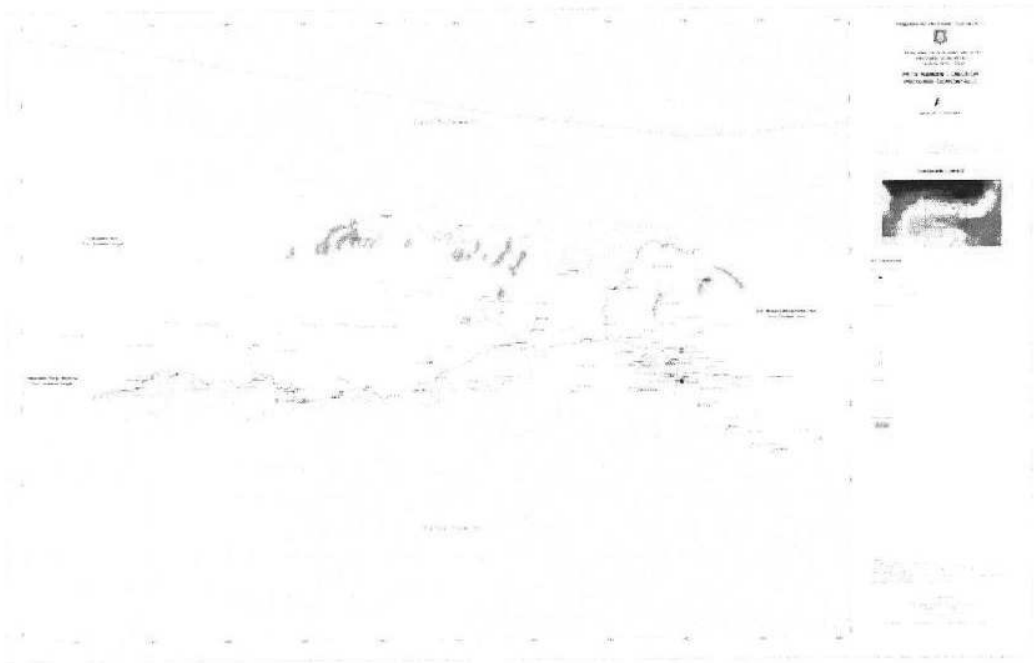

*Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030*

### 2.1.3.3 Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

**Gambar 2.6**
Peta Kawasan Rawan Tsunami

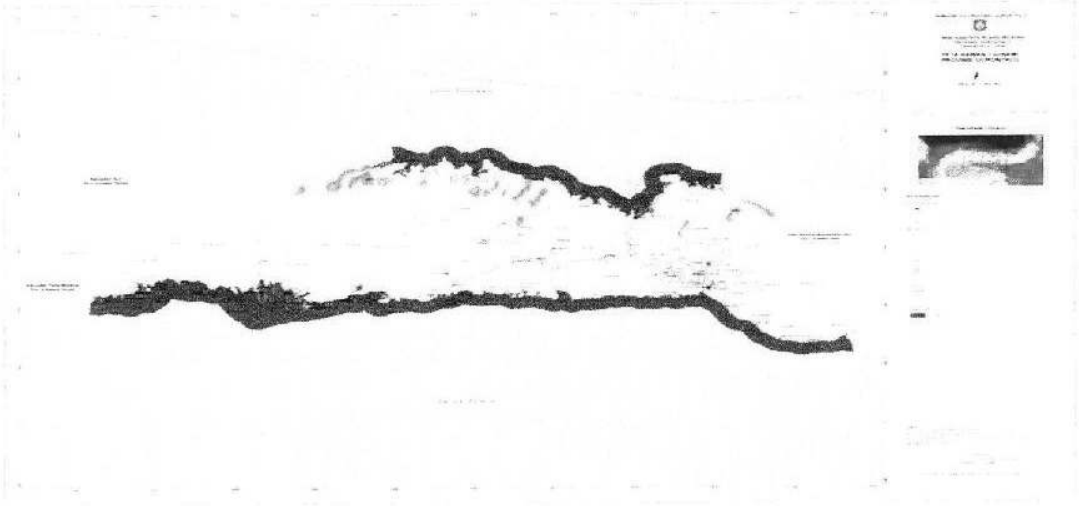

*Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030*

### 2.1.3.4 Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang

semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

**Gambar 2.7**
Peta Kawasan Rawan Banjir

*Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030*

### 2.1.4 Aspek Demografi

Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan pesebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,16 persen dari tahun 2010. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,90 dengan jumlah laki-laki sebanyak 591.349 jiwa dan perempuan sebanyak 580.332 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa.

## Tabel. 2.12

Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2010 dan 2020

| No | Nama Kabupaten/Kota | Tahun | | Laju pertumbuhan penduduk per tahun | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk 2020 (jiwa/km$^2$) | Rasio jenis kelamin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2020 | 2010-2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | Kab. Boalemo | 129.253 | 145.868 | 1,18 | 12,45 | 96 | 104,25 |
| 2 | Kab. Gorontalo | 355.988 | 393.107 | 0,96 | 33,55 | 225 | 101,43 |
| 3 | Kab. Pohuwato | 128.748 | 146.432 | 1,25 | 12,50 | 35 | 103,66 |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 141.915 | 162.778 | 1,34 | 13,89 | 82 | 101,23 |
| 5 | Kab. Gorontalo Utara | 104.133 | 124.957 | 1,78 | 10,66 | 75 | 104,38 |
| 6 | Kota Gorontalo | 180.127 | 198.539 | 0,95 | 16,94 | 2.495 | 98,89 |
| **Provinsi Gorontalo** | | **1.040.164** | **1.171.681** | **1,16** | **100,00** | **104** | **101,90** |

*Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2010 dan 2020*

## Tabel 2.13

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo, 2020

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin (jiwa) | | Jumlah Total (jiwa) |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| 0-4 | 49.090 | 47.217 | 96.307 |
| 5-9 | 47.402 | 45.755 | 93.157 |
| 10-14 | 53.916 | 51.281 | 105.197 |
| 15-19 | 54.595 | 51.985 | 106.580 |
| 20-24 | 54.526 | 52.236 | 106.762 |
| 25-29 | 52.064 | 50.108 | 102.172 |
| 30-34 | 48.081 | 46.522 | 94.603 |
| 35-39 | 44.701 | 43.520 | 88.221 |
| 40-44 | 42.004 | 41.191 | 83.195 |
| 45-49 | 37.407 | 36.996 | 74.403 |
| 50-54 | 32.285 | 32.298 | 64.583 |
| 55-59 | 26.236 | 26.653 | 52.889 |
| 60-64 | 19.287 | 20.139 | 39.426 |
| 65-69 | 13.399 | 14.564 | 27.963 |
| 70-74 | 8.570 | 9.826 | 18.396 |
| 75+ | 7.786 | 10.041 | 17.827 |
| **Provinsi Gorontalo** | **591.349** | **580.332** | 1.171.681 |

*Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020*

Berdasarkan rasio jenis kelamin *(sex ratio),* yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 101,90 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki.

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Gorontalo tahun 2020 terkontraksi *minus* 0,02 persen, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,40 persen seiring dengan kontraksi pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami kontraksi tertinggi sebesar *minus* 6,49 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar *minus* 6,84 persen.

**Gambar 2.8**
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2020

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

**Tabel 2.14**
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2018-2020 (Milyar Rupiah)

| Lapangan Usaha | | Harga Berlaku | | | Harga Konstan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019* | 2020** | 2018 | 2019* | 2020** |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 14.584,14 | 16.018,29 | 16.190,93 | 10.019,05 | 10.652,76 | 10.481,22 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 420,70 | 450,54 | 468,20 | 318,15 | 333,86 | 332,18 |
| C | Industri Pengolahan | 1.550,42 | 1.755,28 | 1.800,03 | 1.039,70 | 1.159,85 | 1.172,89 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 17,66 | 19,44 | 21,44 | 20,62 | 22,39 | 25,01 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang | 22,61 | 25,71 | 26,18 | 15,84 | 17,99 | 18,21 |
| F | Konstruksi | 4.195,48 | 4.391,21 | 4.399,36 | 2.992,64 | 3.065,06 | 3.059,83 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4.465,44 | 5.102,34 | 5.099,77 | 3.017,51 | 3.372,24 | 3.325,70 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 2.208,99 | 2.366,71 | 2.246,17 | 1.554,36 | 1.626,50 | 1.551,48 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 894,39 | 969,04 | 964,41 | 625,46 | 666,95 | 659,74 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1.016,32 | 1.099,90 | 1.145,00 | 863,00 | 930,48 | 997,07 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1.600,32 | 1.635,75 | 1.869,83 | 1.108,30 | 1.116,53 | 1.266,77 |
| L | Real Estate | 705,83 | 771,44 | 778,97 | 516,51 | 558,87 | 563,73 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 35,73 | 38,62 | 36,49 | 25,16 | 26,58 | 24,86 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | 2.489,27 | 2.594,04 | 2.621,61 | 2.017,51 | 2.072,15 | 2.072,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1.331,09 | 1.473,89 | 1.528,89 | 992,88 | 1.084,81 | 1.105,94 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 570,24 | 605,31 | 581,08 | 437,33 | 458,64 | 437,30 |
| **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** | | **37.731,39** | **41.143,56** | **41.725,90** | **26.719,27** | **28.428,44** | **28.422,29** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Perekonomian Gorontalo yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 mencapai Rp. 41.725,90 Miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 41.143,56 Milyar. Sementara PDRB Tahun 2020 yang diukur berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 28.422,29 Milyar.

**Tabel 2.15**
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2018-2020 (persen)

| Lapangan Usaha | | Laju Pertumbuhan | | | Sumber Pertumbuhan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019* | 2020** | 2018 | 2019* | 2020** |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,57 | 6,32 | -1,61 | 2,81 | 2,37 | -0,60 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,16 | 4,94 | -0,50 | 0,04 | 0,06 | -0,01 |
| C | Industri Pengolahan | 6,77 | 11,56 | 1,12 | 0,26 | 0,45 | 0,05 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 9,11 | 8,56 | 11,71 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0 | 12,90 | 13,61 | 1,19 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| F | Konstruksi | 2,47 | 2,42 | -0,17 | 0,29 | 0,27 | -0,02 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,11 | 11,76 | -1,38 | 1,10 | 1,33 | -0,16 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,67 | 4,64 | -4,61 | 0,28 | 0,27 | -0,26 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,70 | 6,63 | -1,08 | 0,18 | 0,16 | -0,03 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,82 | 7,82 | 7,16 | 0,31 | 0,25 | 0,23 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,12 | 0,74 | 13,46 | 0,17 | 0,03 | 0,53 |
| L | Real Estate | 5,59 | 8,20 | 0,87 | 0,11 | 0,16 | 0,02 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5,63 | 5,66 | -6,49 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,98 | 2,71 | 0,01 | 0,16 | 0,20 | 0,00 |
| P | Jasa Pendidikan | 9,34 | 9,31 | 5,17 | 0,39 | 0,40 | 0,23 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 8,53 | 9,26 | 1,95 | 0,31 | 0,34 | 0,07 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 3,89 | 4,87 | -4,65 | 0,07 | 0,08 | -0,08 |
| **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** | | **6,49** | **6,40** | **-0,02** | **6,49** | **6,40** | **-0,02** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Gorontalo selama tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar *minus* 0,02 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya kategori Jasa Perusahaan sebesar *minus* 6,49 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar *minus* 4,65 persen, serta kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar *minus* 4,61 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, diantaranya kategori Jasa Keuangan sebesar 13,46 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,71 persen serta kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,16 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2020, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki pertumbuhan negatif tertinggi sebesar *minus* 0,60 persen; diikuti kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar *minus* 0,26 persen serta kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar *minus* 0,16 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 1,00 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan IV-2020 terhadap kumulatif triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pada hampir semua komponen kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Pertumbuhan pada Komponen PK-RT sebesar 0,10 persen. Sedangkan kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar *minus* 6,84 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar *minus* 2,45 persen serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar *minus* 1,26 persen.

**Tabel 2.16**

Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2018-2020 (Milar Rupiah)

| Komponen | | Harga Berlaku | | | Harga Konstan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019* | 2020** | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1. | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 23.234,27 | 25.432,28 | 25.860,31 | 16.319,18 | 17.445,04 | 17.463,33 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 274,40 | 310,33 | 310,49 | 200,06 | 221,93 | 219,13 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 8.245,79 | 8.725,06 | 8.246,40 | 5.389,58 | 5.658,94 | 5.271,78 |
| 4 | Pembentukan odal Tetap Bruto | 11.043,47 | 11.653,27 | 11.691,59 | 8.285,51 | 8.559,36 | 8.474,68 |
| 5 | Perubahan Inventori | 869,64 | 913,02 | 731,45 | 460,25 | 470,44 | 372,74 |
| 6 | Ekspor Barang dan Jasa | 9.492,55 | 10.310,51 | 10.087,26 | 6.135,94 | 6.253,37 | 6.100,22 |
| 7 | Impor Barang dan Jasa | 15.428,75 | 16.200,90 | 15.201,61 | 10.071,25 | 10.180,63 | 9.479,59 |
| | **PDRB** | **37.731,39** | **41.143,56** | **41.725,90** | **26.719,27** | **28.428,44** | **28.422,29** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

**Tabel 2.17**

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Tahun 2018-2020

| Komponen | | Laju Pertumbuhan | | | Sumber Pertumbuhan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019* | 2020** | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 6,88 | 6,90 | 0,10 | 4,19 | 4,21 | 0,06 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 8,56 | 10,93 | (1,26) | 0,06 | 0,08 | (0,01) |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 4,10 | 5,00 | (6,84) | 0,85 | 1,01 | (1,36) |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 4,13 | 3,31 | (0,99) | 1,31 | 1,02 | (0,30) |
| 5 | Perubahan Inventori | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ekspor Barang dan Jasa | 13,98 | 1,91 | (2,45) | 3,00 | 0,44 | (0,54) |
| 7 | Impor Barang dan Jasa | 8,18 | 1,09 | (6,89) | 3,04 | 0,41 | (2,47) |
| | **PDRB** | **6,49** | **6,40** | **(0,02)** | **6,49** | **6,40** | **(0,02)** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*
**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

**Gambar 2.9**
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo
Tahun 2016-2020

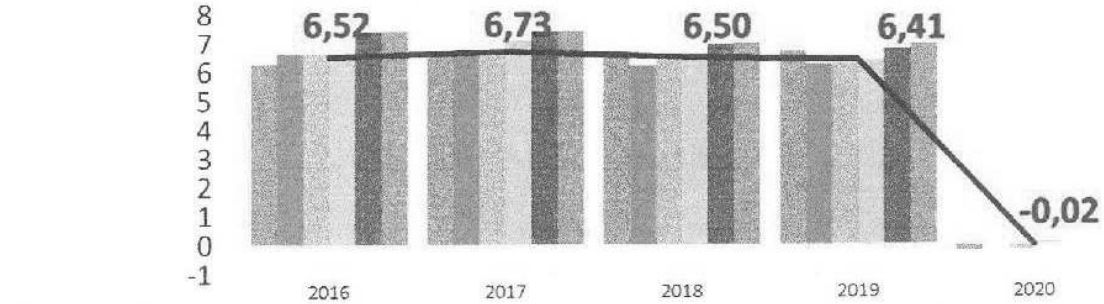


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab Boalemo | 6,29 | 6,66 | 6,70 | 6,72 | -0,21 |
| Kab Gorontalo | 6,62 | 6,78 | 6,22 | 6,24 | -0,01 |
| Kab Pohuwato | 6,64 | 6,78 | 6,48 | 6,29 | -0,18 |
| Kab Bone Bolango | 6,62 | 7,09 | 6,48 | 6,37 | 0,06 |
| Kab Gorontalo Utara | 7,39 | 7,41 | 6,94 | 6,79 | -0,02 |
| Kota Gorontalo | 7,41 | 7,43 | 7,01 | 6,97 | -0,02 |
| Provinsi Gorontalo | 6,52 | 6,73 | 6,50 | 6,41 | -0,02 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Pada tahun 2020, Kabupaten Bone Bolango merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif yaitu sebesar 0,06 persen. Sementara itu, Kabupaten/Kota lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kontraksi tertingi terjadi di Kabupaten Boalemo yaitu sebesar -0,21 persen.

### 2.2.2 Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/InflasiIndeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

Mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2018=100) dibandingkan IHK lama (2012=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:

**Gambar 2.10**
Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2016-2020

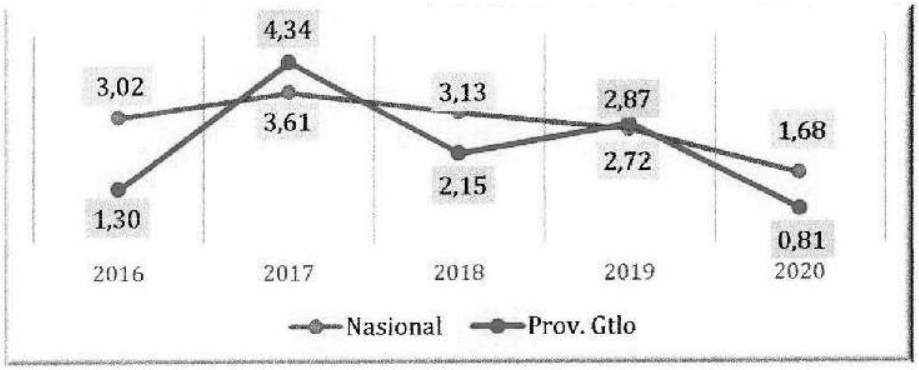


Selama sepuluh lima terakhir (Tahun 2016-2020), Inflasi Tahunan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,81 hal ini dikarenakan adanya pandemi covid19 yang berlangsung sejak Bulan Februari 2020 dan Inflasi Tahunan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 4,34.

**Gambar 2.11**
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Tahun 2020

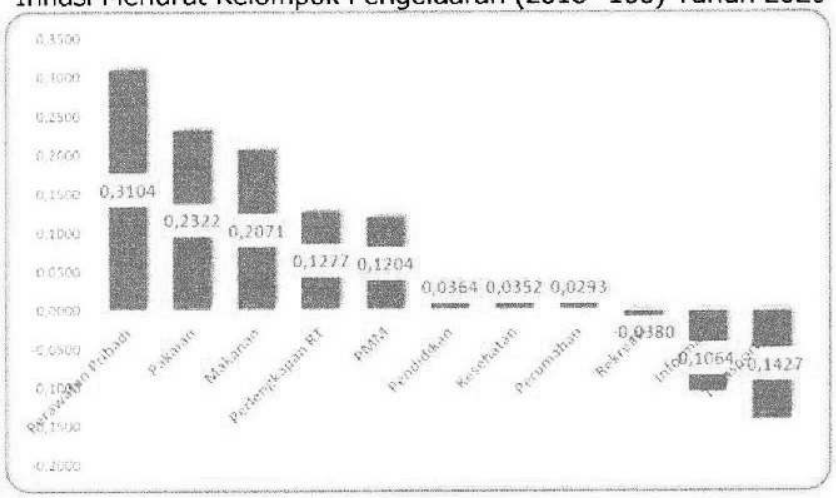


*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Selama tahun 2020 Kota Gorontalo mengalami empat kali deflasi bulanan dan delapan kali inflasi bulanan. Inflasi tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada Bulan Juni sebesar 0,37, Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada saat Hari Raya Idul fitri di Bulan Mei 2020, justru terjadi deflasi sebesar -0,33 persen, Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi covid19 yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2020, laju inflasi Kota Gorontalo (Januari-Desember) sebesar 0,81 persen, jauh lebih rendah daripada laju inflasi Kota Gorontalo tahun 2019 sebesar 2,87 persen, Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2020, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,46 persen, yang kemudian diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,86 persen, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin sebesar 2,07 persen, kelompok penyedia makan dan minum/restoransebesar 1,92 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,75 persen, kelompok

0,71 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,16 persen, Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -2,55 persen, yang kemudian diikuti oleh kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -1,64 persen, dan kelompok transportasi sebesar -1,23 persen.

### 2.2.3 PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Tahun 2020 PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo sebesar 34.213.450,12 Rupiah dan mencapai target 2020 sebesar 27.987.687,90 Rupiah.

**Gambar 2.12**

PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 s/d 2020 (Juta Rupiah)

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.2.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial mayarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar

Statistik menunjukkan bahwa Indeks Gini Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun masih berada pada level sedang/menengah. Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,406. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020.

**Gambar 2.13**

Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2020

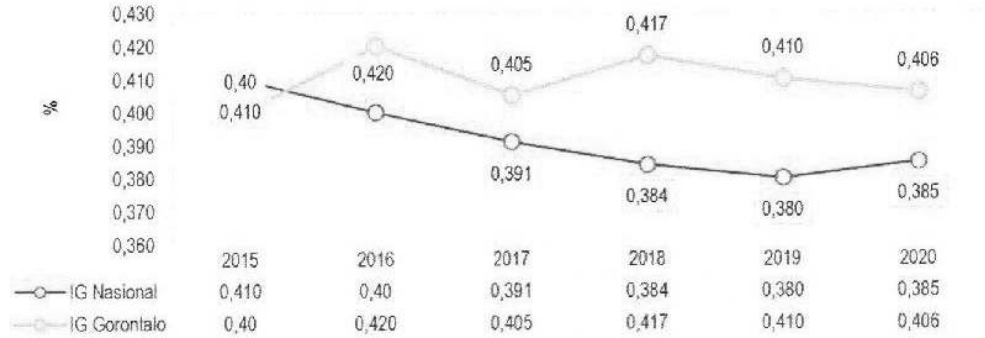


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IG Nasional | 0,410 | 0,40 | 0,391 | 0,384 | 0,380 | 0,385 |
| IG Gorontalo | 0,40 | 0,420 | 0,405 | 0,417 | 0,410 | 0,406 |

Keterangan :

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang

G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Kesenjangan pendapatan tersebut dapat terjadi diantaranya karena ketimpangan pembangunan antar wilayah yang disebabkan perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, maupun tingkat perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,390. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,393. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, terjadi penurunan yang lebih signifikan yakni sebesar 0,009 poin dari gini rasio sebesar 0,399. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2020 adalah sebesar 0,391, turun tipis sebesar 0,001 poin dibandingkan Maret 2020 dan 0,002 poin dibandingkan September 2019. Adapun Gini Rasio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,392 dan pada September 2019 tercatat sebesar 0,393.

### 2.2.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September 2020 sebesar 15,59 persen, naik 0,37 poin persen dibandingkan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 185,31 ribu jiwa, meningkat sebanyak lebih kurang 290 jiwa terhadap Maret 2020.

**Gambar 2.14**
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2016-2020

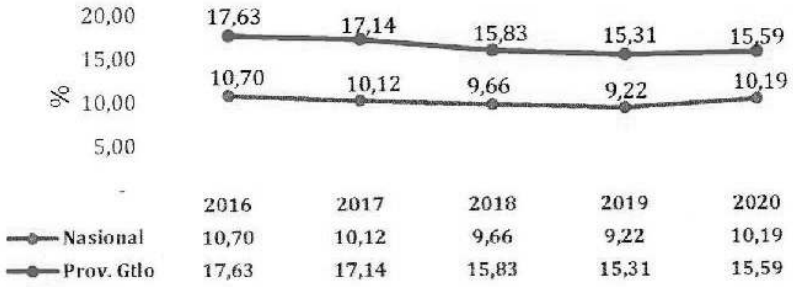


| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional | 10,70 | 10,12 | 9,66 | 9,22 | 10,19 |
| Prov. Gtlo | 17,63 | 17,14 | 15,83 | 15,31 | 15,59 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Jumlah penduduk miskin September 2020 di Provinsi Gorontalo sebanyak 185,31 ribu jiwa, sementara jumlah penduduk miskin Maret 2020 sebanyak 185,02 ribu jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo selama periode Maret 2020-September 2020 bertambah sebanyak lebih kurang 290 jiwa. Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2020 sebagian besar masih tinggal di perdesaan yaitu sebesar 88,37 persen dan sisanya 11,63 persen tinggal di wilayah perkotaan dari total jumlah penduduk miskin.

Garis Kemiskinan sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) itu sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2020 sebesar Rp368.990,- per kapita per bulan dan pada September 2020 menjadi Rp374.843,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp5.853,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 1,59 persen. Pada September 2020, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp281.726,- dan perdesaan sebesar Rp298.431,-. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp94.014,- dan perdesaan sebesar Rp75.481,- maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh konsumsi kebutuhan non makanan di perkotaan yang lebih banyak

perumahan, kesehatan, pakaian, perlengkapan, serta jasa. Bila dibedakan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka Garis Kemiskinan di perkotaan September 2020 sebesar Rp375.740,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di perdesaan sebesar Rp373.911,- per kapita per bulan.

Ukuran kemiskinan dalam bentuk persentase dan jumlah penduduk miskin sudah sering dijadikan dasar pengukuran kemiskinan. Namun, sebenarnya terdapat dimensi lain atau indikator lain dari kemiskinan itu sendiri, yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks. Periode Maret 2020-September 2020 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari 15,22 persen menjadi 15,59 persen. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2020 sebesar 2,863 yang mana sebelumnya pada Maret 2020 sebesar 2,674. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh selisihnya dengan garis kemiskinan.

Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 0,651 pada Maret 2020 menjadi 0,791 pada September 2020. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antar sesama penduduk miskin itu semakin melebar.

**Tabel 2.18**
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo tahun 2017-2020

| Tahun | | Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) | | | Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan + Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan + Perkotaan |
| 2017 | Maret | 0,87 | 5,29 | 3,68 | 0,21 | 1,46 | 1,01 |
| | Sept | 0,58 | 4,90 | 3,31 | 0,12 | 1,27 | 0,85 |
| 2018 | Maret | 0,78 | 4,50 | 3,06 | 0,16 | 1,13 | 0,75 |
| | Sept | 0,30 | 4,95 | 3,02 | 0,03 | 1,40 | 0,83 |
| 2019 | Maret | 0,43 | 4,26 | 2,64 | 0,07 | 1,05 | 0,63 |
| | Sept | 0,58 | 4,10 | 2,61 | 0,12 | 0,88 | 0,56 |
| 2020 | Maret | 0,39 | 4,32 | 2,67 | 0,06 | 1,08 | 0,65 |
| | Sept | 0,43 | 4,72 | 2,86 | 0,09 | 1,33 | 0,79 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 hingga September 2020 antara lain adalah:

a. Ekonomi Gorontalo triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar minus 0,08 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan capaian triwulan III-2019 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 5,71 persen;
b. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Juli 2020, Agustus 2020 dan September 2020 selalu berada di bawah 100 persen, dengan nilai berturut-turut sebesar 99,54; 99,32; dan 99,70.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,28 persen dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,76 persen. Sebanyak 118,19 ribu penduduk usia kerja (13,22 persen) terdampak Covid-19 pada Agustus 2020 dengan rincian:
   1) Sebesar 6,31 ribu penduduk menjadi Pengangguran akibat Covid-19;
   2) Sebesar 2,85 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja akibat Covid-19;
   3) Sebesar 5,73 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja akibat Covid-19;
   4) Sebesar 103,30 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (Shorter Hours) akibat Covid-19
d. Laju inflasi umum selama periode Maret 2020-September 2020 tercatat sebesar 0,01 persen. Namun jika dilihat dari kelompok pengeluarannya terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,12 persen. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pada periode Maret 2020-September 2020 terjadi pelemahan daya beli masyarakat untuk kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau.
e. Menurut desil pengeluaran per kapita per bulan (dari Susenas), rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk 10 persen terbawah (Desil 1) dan pada kelompok Desil 2 periode Maret 2020-September 2020 mengalami penurunan masing-masing sebesar minus 1,25 persen dan minus 0,72 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan GK pada periode tersebut yang sebesar 1,59 persen.

Berdasarkan data statistik kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 18,57 persen, sementara yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,59 persen.

**Tabel 2.19**
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019-2020

| No | Kab/Kota | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin (%) | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
| 1. | Kab. Boalemo | 31,31 | 18,87 | 31,63 | 18,57 |
| 2. | Kab. Gorontalo | 68,31 | 18,06 | 66,73 | 17,56 |
| 3. | Kab. Pohuwato | 29,13 | 18,16 | 28,92 | 17,62 |
| 4. | Kab. Bone Bolango | 25,91 | 16,12 | 25,72 | 15,81 |
| 5. | Kab. Gorontalo Utara | 19,46 | 16,95 | 19,56 | 16,88 |
| 6. | Kota Gorontalo | 11,91 | 5,45 | 12,46 | 5,59 |
| | **Provinsi Gorontalo** | **186,03** | **15,52** | **185,02** | **15,22** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.2.6 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah *(mean years school/mys)* merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan

kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

**Tabel 2.20**
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2020

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 7,46 | 7,69 | 7,82 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020*

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di provinsi gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah provinsi gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

### 2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life),* pengetahuan *(knowledge),* dan standard hidup layak *(decent standard of living).* Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli *(purchasing power parity).*

Hasil perhitungan IPM dengan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.21**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2020

| Provinsi/ Kab/Kota | Angka Harapan Hidup (tahun) | | Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) | | Rata-rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) | | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP) | | IPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Boalemo | 68,83 | 69,07 | 12,43 | 12,44 | 6,54 | 6,82 | 8.874 | 8.789 | 65,53 | 65,91 |
| Gorontalo | 67,45 | 67,58 | 12,94 | 13,17 | 7,11 | 7,13 | 9.361 | 9.277 | 66,69 | 66,92 |
| Pohuwato | 63,83 | 64,07 | 12,36 | 12,37 | 7,10 | 7,12 | 10.316 | 10.255 | 65,27 | 65,37 |
| Bone Bolango | 68,38 | 68,46 | 13,45 | 13,57 | 8,07 | 8,31 | 10.147 | 10.052 | 69,63 | 69,98 |
| Gorontalo Utara | 65,79 | 65,87 | 12,44 | 12,45 | 6,74 | 7,03 | 8.982 | 10.054 | 64,52 | 64,86 |
| Kota Gorontalo | 72,42 | 72,49 | 14,32 | 14,34 | 10,35 | 10,36 | 12.298 | 8.921 | 77,08 | 77,13 |
| **PROVINSI GORONTALO** | **67,93** | **68,07** | **13,06** | **13,08** | **7,69** | **7,82** | **10.075** | **10.020** | **68,49** | **68,68** |

*Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2021*

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Gorontalo mencapai 68,68. Angka ini meningkat sebesar 0,19 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 68,49. Status pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo mencapai level "sedang". IPM Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,28 persen dibandingkan tahun 2019.

Berdasarkan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota, terdapat 5 kabupaten yang berstatus "sedang" dan 1 wilayah (Kota Gorontalo) yang berstatus "tinggi" pada tahun 2020.

### 2.2.8 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada ususan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai

tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru.

**Tabel 2.22**
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo
Tahun 2019

| Provinsi/ Kab/Kota | Indeks Pembangunan Gender | | |
|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kabupaten Boalemo | 66,59 | 60,96 | 68,53 |
| Kabupaten Gorontalo | 65,76 | 66,42 | 62,91 |
| Kabupaten Pohuwato | 69,62 | 72,26 | 68,74 |
| Kabupaten Bone Bolango | 46,97 | 47,05 | 51,91 |
| Kabupaten Gorontalo Utara | 63,28 | 64,60 | 76,61 |
| Kota Gorontalo | 70,64 | 68,89 | 75,33 |
| **PROVINSI GORONTALO** | **71,09** | **71,23** | **70,67** |

**data 2020 belum rilis*
*Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2019*

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sudah cukup baik yaitu sebesar 70,67 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

**Tabel 2.23**
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo
Tahun 2019

| Provinsi/ Kab/Kota | Keterlibatan Perempuan di Parlemen | Perempuan sebagai Tenaga Profesional | Sumbangan Pendapatan Perempuan | IDG |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Boalemo | 24 | 63,60 | 29,21 | 68,53 |
| Gorontalo | 17,14 | 56,53 | 26,81 | 62,91 |
| Pohuwato | 16 | 61,28 | 36,70 | 68,74 |
| Bone Bolango | 4 | 58,35 | 29,65 | 51,91 |
| Gorontalo Utara | 40 | 60,71 | 28,16 | 76,61 |
| Kota Gorontalo | 29,17 | 52,87 | 30,80 | 75,33 |
| **PROVINSI** | **26,67** | **57,36** | **26,93** | **70,67** |

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 70,67, dengan indikator pendukungnya yaitu Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 57,36 persen, keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 26,93 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 76,61, dan terrendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 51,91 persen.

### 2.2.9 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi , khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Sementara itu, pandemi Covid19 yang terjadi tahun 2020, hampir seluruh sektor terdampak termasuk sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Kinerja ekonomi yang melemah turut berdampak pada situasi ketenagakerjaan. Tahun 2020, Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2020 sebanyak 593.973 orang, turun 1.250 orang dibandingkan kondisi Agustus 2019 sebanyak 595.223 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun 0,92 poin menjadi 66,46 tahun 2020.

Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator untuk mengukur penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau terserap oleh pasar kerja mengalami peningkatan. TPT tahun 2020 sebesar 4,28 persen, meningkat dibanding kondisi tahun 2019 sebesar 3,76 persen.

**Tabel 2.24**
Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

| STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN | TAHUN 2018 (ags) | TAHUN 2019 (ags) | TAHUN 2020 (ags) | TAHUN 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FEBRUARI | AGUSTUS |
| **Penduduk Usia Kerja** | **870.710** | **883.318** | **893.745** | **23.035** | **10.427** |
| Angkatan Kerja | 591.531 | 595.223 | 593.973 | 2.443 | -1.250 |
| Bekerja | 569.639 | 572.841 | 568.563 | -1.076 | -4.278 |
| Pengangguran | 21.892 | 22.382 | 25.410 | 3.518 | 3.028 |
| Bukan Angkatan Kerja | 279.179 | 288.095 | 299.772 | 20.593 | 11.677 |
| | | | | | |
| **Tingkat Pengangguran Terbuka** | **3,70** | **3,76** | **4,28** | **0,58** | **0,52** |
| Perkotaan | 4,70 | 5,28 | 6,42 | 1,72 | 1,14 |
| Perdesaan | 3,03 | 2,63 | 2,73 | -0,30 | 0,10 |
| Laki-laki | 2,94 | 3,08 | 4,53 | 1,59 | 1,45 |
| Perempuan | 4,94 | 4,91 | 3,86 | -1,08 | -1,05 |
| **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** | **67,94** | **67,38** | **66,46** | **-1,48** | **-0,92** |
| Perkotaan | 65,17 | 66,69 | 64,72 | -0,45 | -1,97 |
| Perdesaan | 69,94 | 67,91 | 67,77 | -2,17 | -0,15 |
| Laki-laki | 84,24 | 84,77 | 83,02 | -1,22 | -1,75 |
| Perempuan | 51,66 | 50,03 | 49,95 | -1,71 | -0,08 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2020 sebanyak 37,88 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal atau turun 3,46 poin dibandingkan keadaan Agustus 2019. Sedangkan sisanya sebanyak 62,12 persen bekerja pada kegiatan informal. Penurunanpekerja pada kegiatan formal diduga karena pandemi covid yang membuat banyak usaha yang melakukan penyesuaian tenaga kerja akibat ekonomi yang sedang lesu. Perkembangan selengkapnya tersaji pada

**Gambar 2.15**
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal-Informal
Provinsi Gorontalo, Agustus 2018 – Agustus 2020

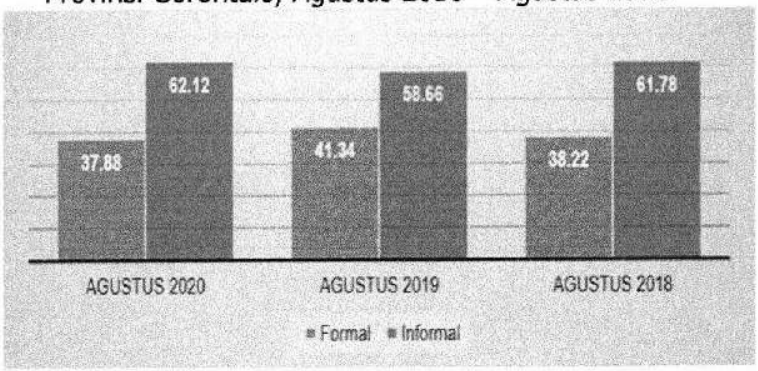


*Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2021*

Dari seluruh penduduk berkerja pada Agustus 2020, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (34,46 persen). Diikuti status berusaha sendiri (23,12 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (17,32 persen), pekerja keluarga (12,75 persen), pekerja bebas pertanian (4,57 persen).

Sementara penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,42 persen (Grafik 3).

Dalam setahun terakhir (Agustus 2019- Agustus 2020), peningkatan persentase penduduk bekerja terdapat pada status status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar (3,50 poin), pekerja bebas non-pertanian (0,34 poin), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (0,28 poin). Sedangkan penurunan terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai (3,17 poin), pekerja bebas pertanian (0,59 poin), berusaha dibantu buruh tetap (0,29 poin), berusaha sendiri (0,07 poin).

Jika dilihat dari kategori lapangan pekerjaan, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2020 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,08 persen; Perdagangan Akomodasi-Konsumsi dan Transportasi-Pergudangan sebesar 28,86 persen; dan Informasi-Komunikasi dan Jasa-Jasa sebesar 23,50 persen. Seperti terlihat pada grafik berikut :

**Gambar 2.16**
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Gorontalo, Agustus 2018 – Agustus 2020

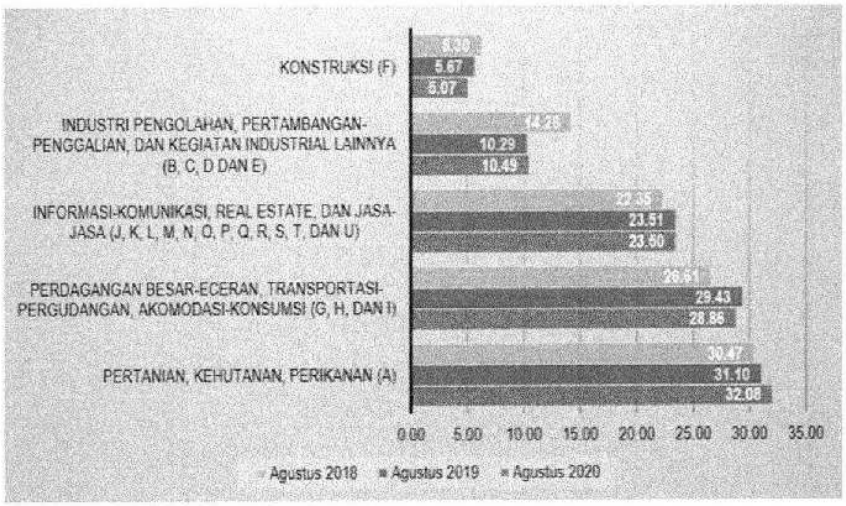


Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2019 - Agustus 2020, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk adalah kelompok Pertanian (0,98 poin) dan kelompok Industri-Pertambangan (0,20 poin). Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Konstruksi (0,60 poin) dan kelompok Perdagangan-Akomodasi (0,57 poin), sementara untuk kelompok Informasi-Komunikasi dan Jasa-Jasa relatif tidak mengalami perubahan.

### 2.2.10Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif

daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yanh masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata *"Halal Tourism"*. Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2019 sebanyak 8 jenis, dan sebanyak 455 jenis benda bersejarah tersimpan di museum.

Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu *Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo.*

Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2020 dibidang seni dan budaya yaitu :

1) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia Sertifikat Nasional
2) Penetapan Warisan Budaya tak benda Indonesia tahun 2020 (Turunani)
3) Pekan Budaya Jenis Lomba cabang Congklak Terbaik III Tingkat Nasional
4) Pekan Budaya Jenis Lomba Bakiak Kreasi Terbaik II Tingkat Nasional

Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2020 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga sebanyak 72 orang. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo memperoleh Prestasi dibidang olahraga pelajar sebanyak 12 medali tertimbang baik ditingkat Nasional dan Internasional, diatas target yang ditetapkan sebanyak 7 medali ditahun 2020.

Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2020 dalam bidang olahraga yaitu :

1) Kejuaraan Nasional antar club (Magaga Cup) Cabang Olahraga Sepak Takraw meraih 1 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu
2) Kejuaraan Nasional antar club (UMGO Cup) Cabang Olahraga Pencak Silat meraih 6 Medali Emas, 2 Medali Perak

Perunggu

## 2.11. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

### 2.2.11.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

#### 2.2.11.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.25**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalo tahun 2020

| Provinsi | APS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 – 12 | 13 – 15 | 16 - 18 | 19-24 |
| GORONTALO | 98,92 | 91,80 | 71,43 | 31,04 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Angka partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2020 APS Usia 16-18 Tahun sebesar 71,43 meningkat sebesar 0,72 persen dibanding APS tahun sebelumnya sebesar 70,92.

**Tabel 2.26**
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun
Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2020

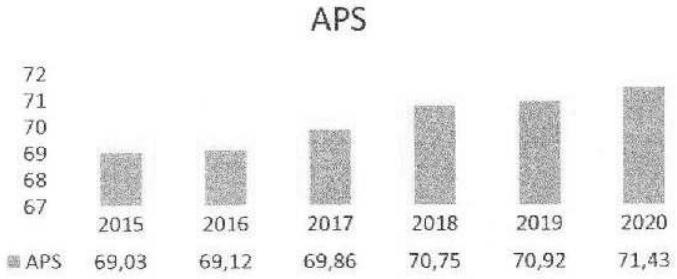


Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

### 2.2.11.1.2 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan *(key development milestones)* terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

**Tabel 2.27**
Angka Partsipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2019-2020

| Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) | | Angka Partisipasi Kasar (APK) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| SMA/ SMK/ MA/ Sederajat | 57,52 | 57,86 | 88,64 | 88,65 |

*Sumber : BPS 2021, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Angka Partisipasi Murni (APM) terkecil berada pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 57,86 menunjukkan bahwa hanya 57,86 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/ SMK/MA.

#### 2.2.11.1.3 Rasio Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2020 rasio siswa per kelas Sekolah Menengah khusus SMA/MA sebesar 1 : 29, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 21. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 29 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 21 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

Disamping itu, untuk menciptakan Kegiatan belajar mengajar yang kondusif, juga ditunjang dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas. Kondisi ruang kelas untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) dalam kondisi baik yaitu sebesar 59,38 persen.

#### 2.2.11.1.4 Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga untuk guru SMA Provinsi Gorontalo sebanyak kurang lebih 1979 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA tahun 2020 sebesar 1:15, sementara rasio guru SMK 1 : 10. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

### 2.2.11.2 Kesehatan

#### 2.2.11.2.1 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu melahirkan di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu masih tetap perdarahan selain hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan post partum juga komplikasi jantung dan paru yang yang masih menjadi masalah. Point penting pada permasalahan kematian ibu adalah 70% kematian ibu melahirkan (nifas) terjadi di rumah sakit. Penyebab ini dapat diminimalisir apabila kualitas Antenatal Care dilaksanakan dengan baik. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada Tahun 2020 mencapai 273,6 naik dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 180,7 per 100.000 Kelahiran Hidup. Terdapat kenaikan jumlah kematian ibu yang cukup signifikan sebanyak 16 orang di banding tahun 2019, berikut diuraikan pada Grafik 2.1 jumlah dan angka kematian ibu per kabupaten kota di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2020.

**Gambar 2.17**
Jumlah Kematian Ibu per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2020

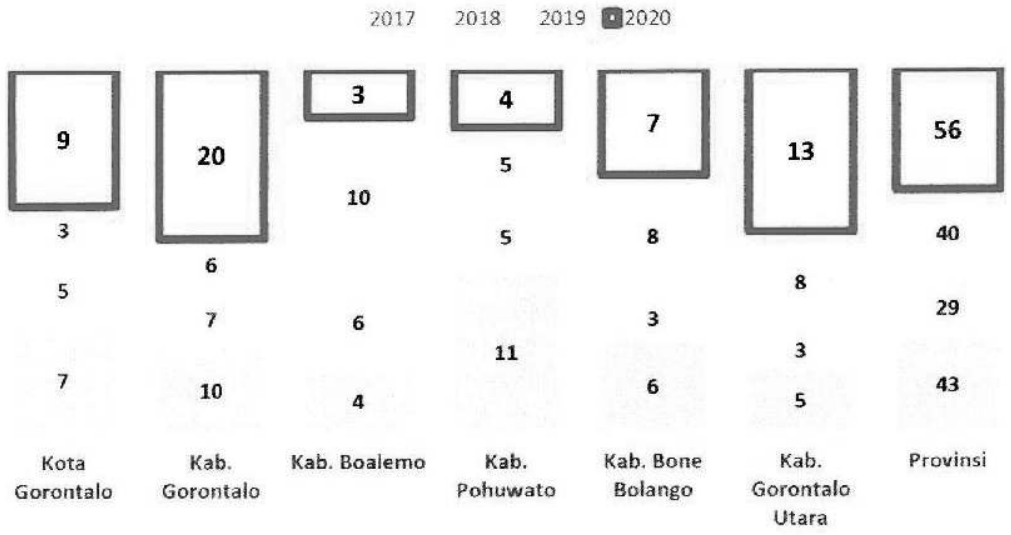


*Sumber : Seksi Kesga Dikes Provinsi Gorontalo 2020*

**Gambar 2.18**
Angka Kematian Ibu per Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2017- 2020

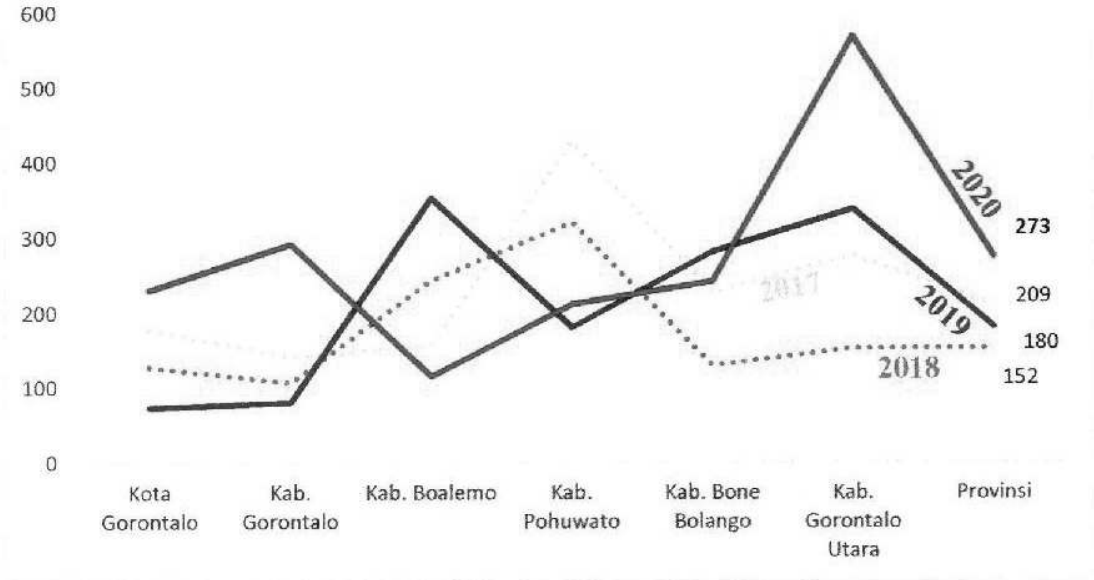


*Sumber : Seksi Kesga Dikes Provinsi Gorontalo 2020*

### 2.2.11.2.2 Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Provinsi Gorontalo selang Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi/Infan Mortality Rate (IMR) berumur kurang dari 1 (satu) Tahun. Pada tahun 2018 Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 11,8 menurun di tahun 2019 menjadi 10,5 per 1000 kelahiran Hidup, sedangkan tahun 2020 naik lagi menjadi 11,9 per 1000 kelahiran hidup. Perlu paya yang lebih fokus melalui intervensi dari hulu agar tetap berada di bawah batas tertinggi yang ditargetkan secara nasional yanitu 11 per 1000 kelahiran hidup. Gambaran Jumlah dan Angka Kematian Bayi Tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2.19**
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/ Kota
se- Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2020

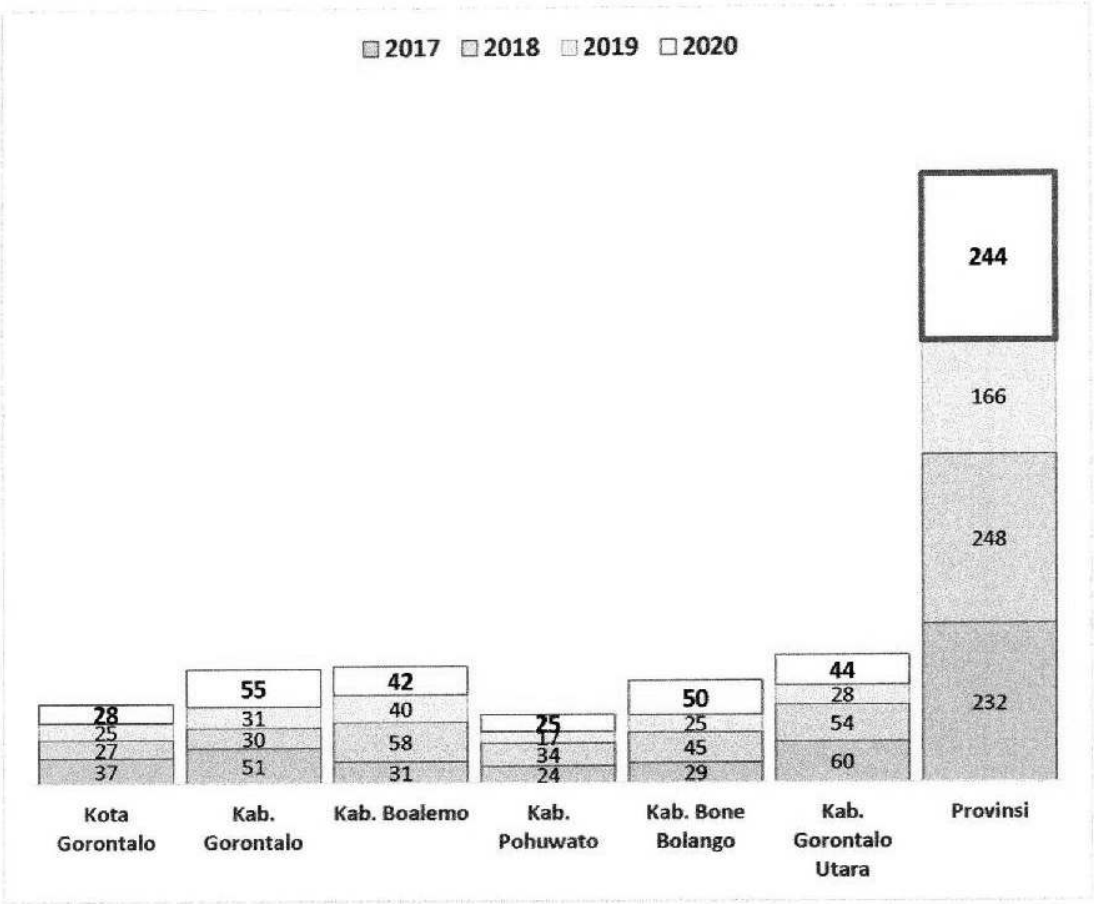


*Sumber data : Seksi Kesga Dikes Provinsi Gorontalo Tahun 2020*

**Gambar 2.20**
Angka Kematian Bayi di Kabupaten/ Kota
se- Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

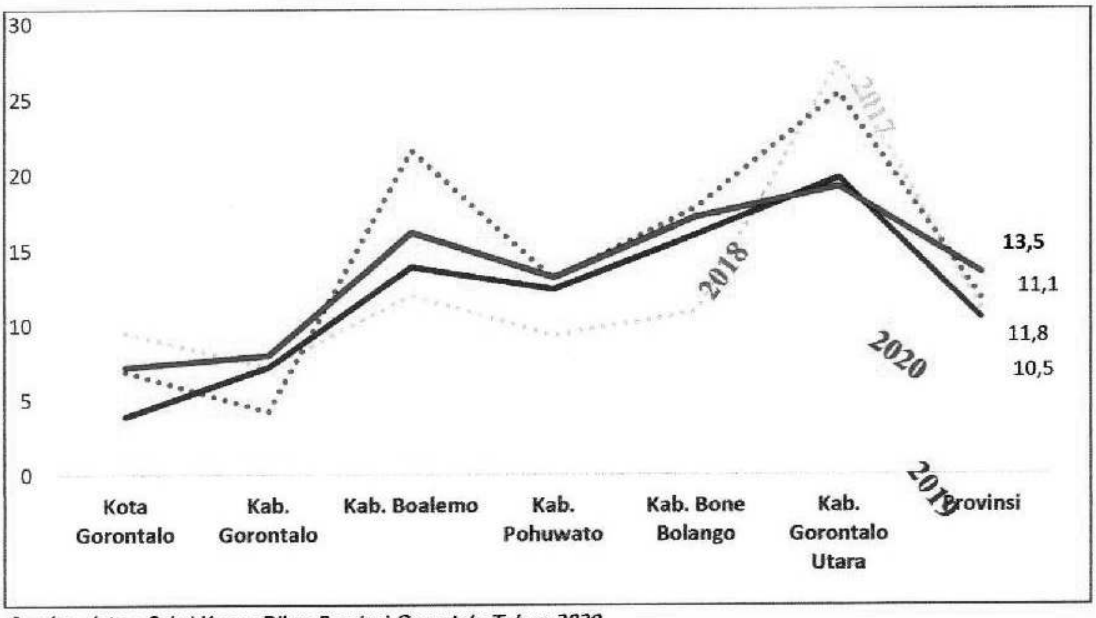


*Sumber data : Seksi Kesga Dikes Provinsi Gorontalo Tahun 2020*

Penyebab kematian pada kelompok umur ini terbesar disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 25%. Pada tahun 2020 dan persentase ini turun dari tahun 2019 sebesar 40,3% .Dampak program pemberian tablet tambah darah bagi ibu hami, PMT,

Tantangan kedepan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjamin agar kondisi kesehatan lingkungan tetap memenuhi standar kesehatan sehingga ibu dan bayi yang dilahirkan dapat terhindar dari infeksi.

Sebagai upaya meminimalkan jumlah kematian bayi dibutuhkan penanganan yang intensif baik, misalnya menyediakan SDM yang terampil dalam menolong persalinan, memastikan kemudahan akses ke fasyankes bagi bumil, peningkatan tata laksana bayi baru lahir melalui kunjungan neonatal, memberikan asupan gizi yang cukup, pemberian ASI dan imunisasi dasar lengkap.

Untuk indikator keberhasilan program imunisasi diukur melalui cakupan desa UCI *(Universal Child Immunization)*. Desa UCI adalah desa dimana 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap tepat waktu.

**Gambar 2.21**
Persentase Desa UCI di Kabupaten Kota
Se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2020

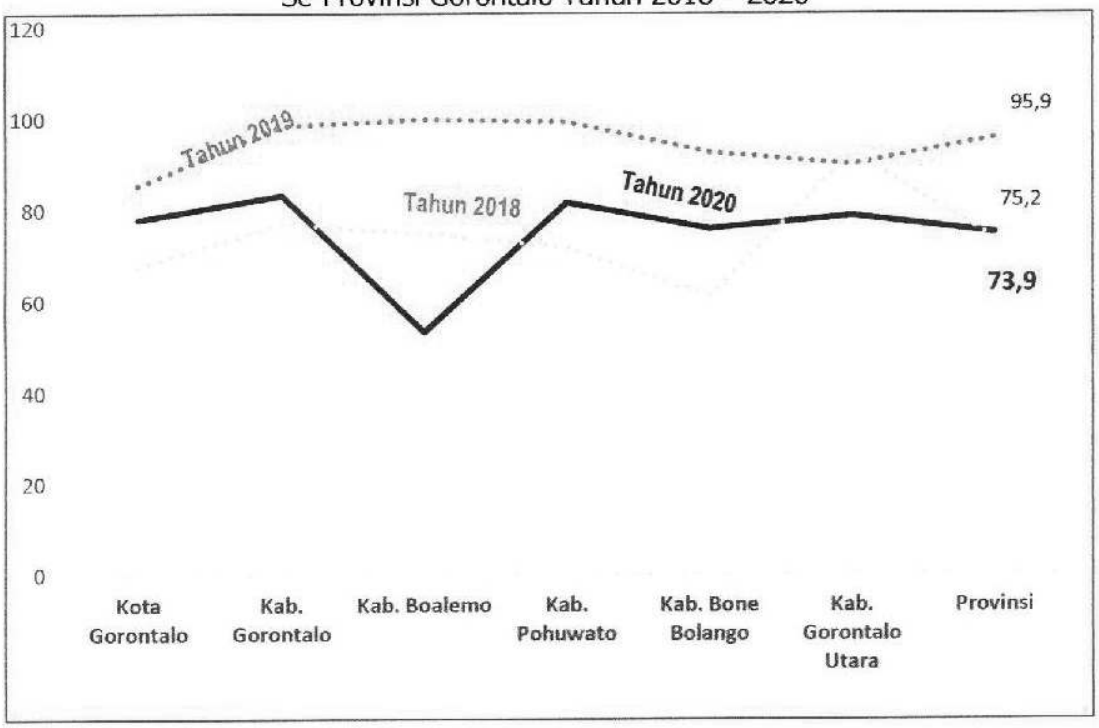


*Sumber data : Seksi Surveilans Imunisasi Dikes Provinsi Gorotalo Tahun 2020*

### 2.2.11.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.22**
Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 - 2020

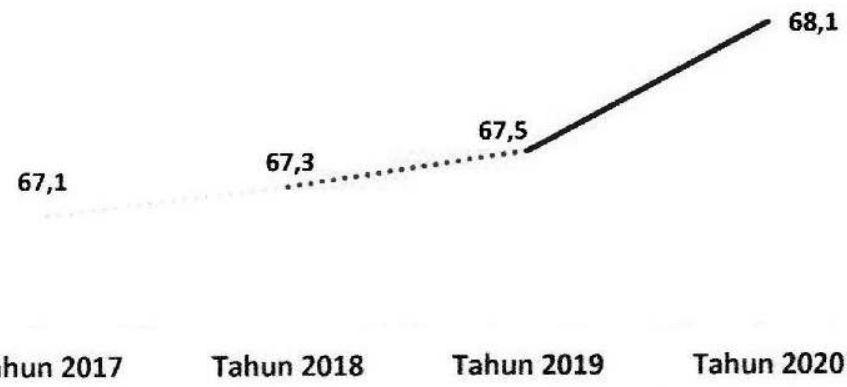


*Sumber data : Dikes Provinsi Gorontalo Tahun 2020*

Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

#### 2.2.11.2.4 Prevalensi Kekurangan Gizi

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi Underweight tahun 2019 mencapai angka 2,95% meningkat cukup tinggi menjadi 8,21 % pada tahun 2020. Data diambil berdasarkan aplikasi E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi dan Masyarakat) Keadaan status gizi anak balita khususnya jumlah kasus gizi buruk pada usia 0 – 2 tahun di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 meningkat menjadi 2532, jika dibandingkan tahun 2019 hanya berjumlah 349, Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.23**
Jumlah Balita Gizi Buruk + Gizi Kurang (Underweight)
per Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sd 2020

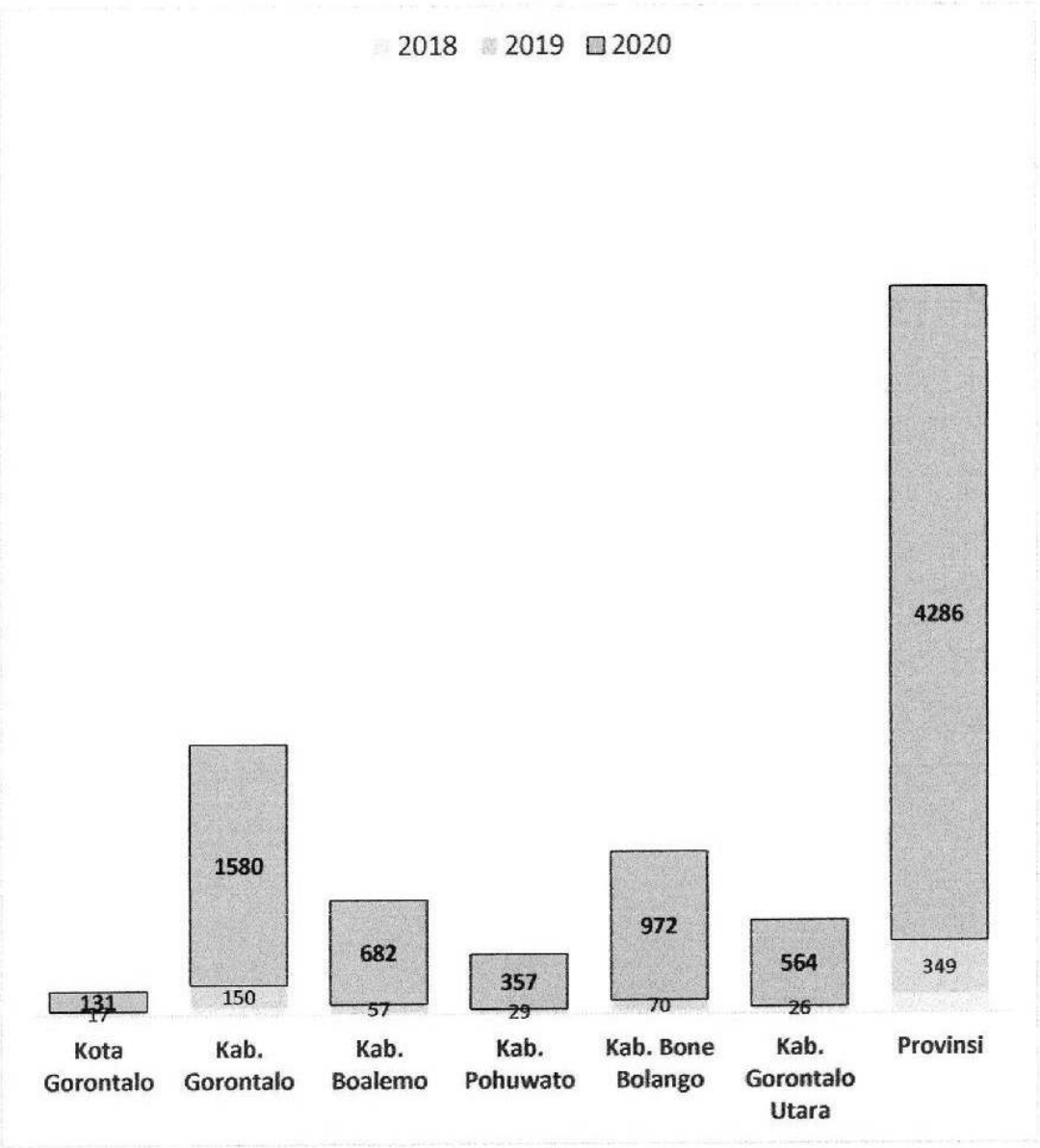


*Sumber data : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2020*

### 2.2.11.2.5 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

**Gambar 2.24**
Persentase Stunting di Kabupaten/ Kota
Se- Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2020

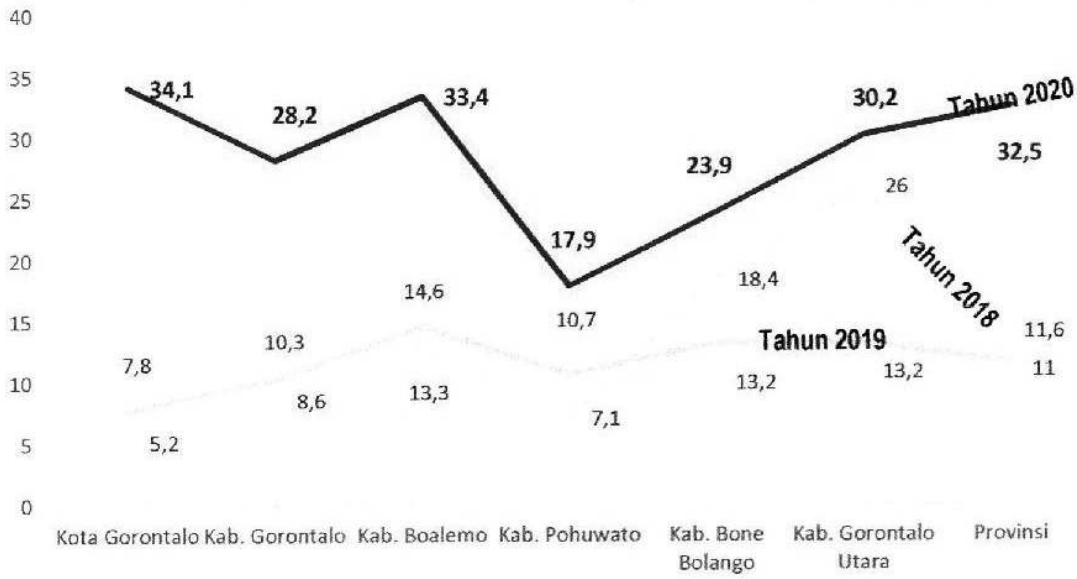


*Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2020*

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentasi stunting meningkat dibanding tahun 2019, data ini berdasarkan hasil inputan e PPGBM namun dapat dipastikan angka ini adalah underreporting, karena dari total sasaran balita yang di entry berjumlah 105.547 hanya 31,4% yang dilakukan pengukuran, jadi kurang lebih 68,6% balita yang tidak dilakukan pengukuran.

Penangangan kasus gizi buruk dan stunting selain intervensi spesifik oleh sektor kesehatan melalui pemberian makanan tambahan dan vitamin, pemantuan tumbuh kembang, tata laksana gizi buruk dan promosi kesehatan, juga dibutuhkan integrasi penanganan oleh sektor diluar kesehatan dengan intervensi sensitif melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, dan lain lain.

### 2.2.11.2.6 Angka kesakitan (Mordibitas)

Tingkat kesakitan merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD).

Untuk jumlah kasus TBC sensitive obat tahun 2020 yang ditemukan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2305 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 1186 kasus, dan

terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara hanya 279 kasus. Untuk lebih jelasnya data penemuan kasus TB sensitive obat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.25**
Jumlah Penemuan Kasus TB Sesnsitif Obat
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020

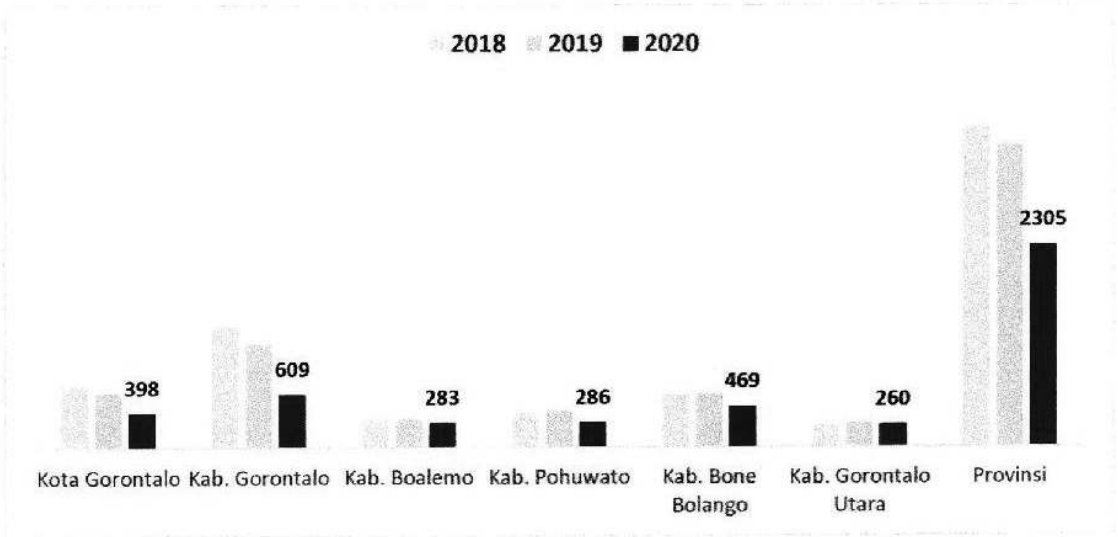


*Sumber : Seksi P2PM Provinsi Gorontalo 2020*

Permasalahan lain untuk kasus TBC adalah peingkatan jumlah kasus TBC Resisten Obat (RO), untuk tahun 2020 kasus TB RO mencapai jumlah 35 orang, menurun dari 2019 sebanyak 39 orang, dengan cakupna temuan yang masih dibawah target yaitu 54,9% (target > 60%) dan kasus yang ditangani 53,3% (target >70%) tentunya menjadi permasalahan baru karena jika seseorang tertular dengan TB RO maka orang tersebut akan menjadi penderita kasus TB RO dengan intervemsi program yang lebih sulit lagi. Hal yang perlu dilaksanakan di program adalah penemuan kasus sedini mungkin serta peningkatan kualitas tata laksana kasus untuk mencegah peningkatan TB resisten Obat.

Disamping itu, untuk angka kesakitan DBD tahun 2019, tertinggi berada di Kabupaten Pohuwato dengan angka kesakitan 182 per 100.000 penduduk dengan *Case Fatality Rate* (CFR) 2,5% , sedangkan untuk tahun 2020 angka kesakitan tertinggi di Kabupaten Gorontalo utara sebesar 145 per 100.000 penduduk dengan CFR nol dan total CFR provinsi Gorontalo 0,7% atau < 1%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam hal penemuan dan tata laksana penderita, khususnya di Kabupaten Gorontalo utara meskipun jumlah kasus tertinggi tetapi CFR nya nol.

Untuk Angka kesakitan Ispa / Pneumonia dapat dilihat cakupan penemuan kasus selama dua tahun terakhir sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu >86,8%. Seluruh Kabupaten kota tidak ada yang mencapai target penemuan kasus ispa / penumonia, yang tertinggi kinerja penemuan kasus adalah Kabupaten Boalemo dengan cakupan 86,6%, sedangakan untuk cakupan di Provinsi Gorontalo hanya berada pada capaian 52,2% pada tahun 2019, dengan adanya pandemi covid-19 cakupna penemuan pneumonia menurun sampai dengan 22% ditingkat Provinsi,

masyarakat yang harus tersedia dalam rangka penanganan pandemi covid yang terjadi sejak tahun 2020

Untuk Penyakit Diare masih sering menimbulkan KLB di beberapa daerah, Cakupan pelayanan diare pada balita sampai tahun 2020 di Provinsi Gorontalo baru mencapai 26,4%, akan tetapi satu hal yang baik adalah dari jumlah yang dilayani tersebut sebanyak 73% di tata laksana dengan oralit dan 90,3% di tata laksana menggunakan *zink*, meskipun jumlah penemuan menurun tetapi tata laksana meningkat sehingga CFR nya pun < 1% ( 0,08%).

Untuk penyakit malaria di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan indikator *Annual Paracite Incidence* (API) terus mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2017 dan sampai tahun 2020 semua kabupaten / kota API < 1 per mil. Saat ini indikator yang digunakan adalah indikator penemuan kasus baru menuju eliminasi yaitu tidak ditemukannya kasus indigenous atau penularan setempat. Gambaran penanganan pnyakit malaria dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.26**

Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD, ISPA/Penumonia Dan Diare
Di Kabupaten / Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

**Jumlah kasus penyakit malaria yang dilaporkan periode tahun 2019-2020**

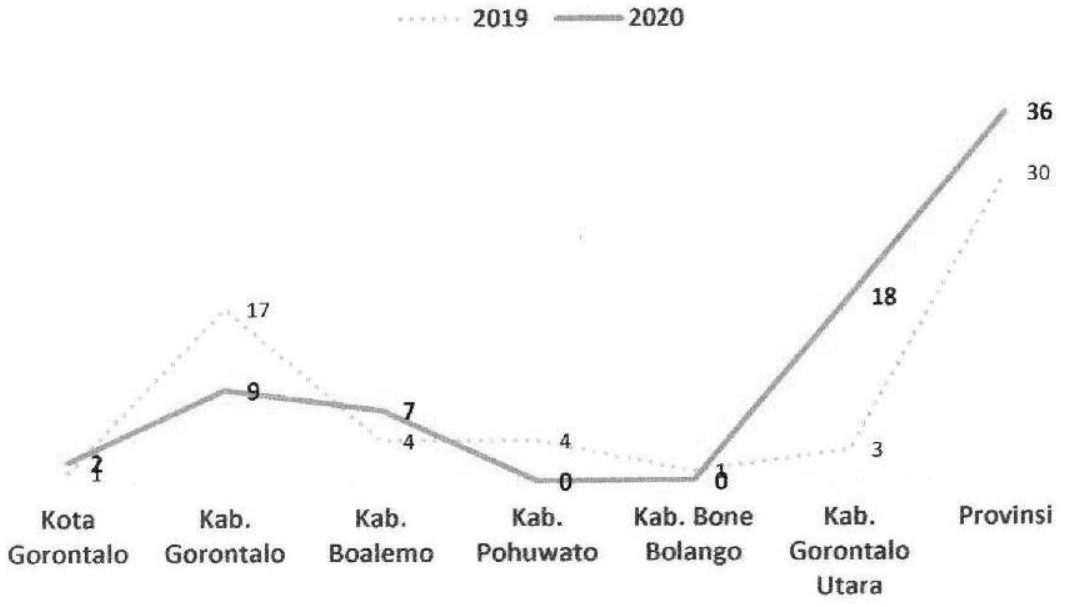


**Indikator : Incidence Rate (IR) per 1000 Penduduk Tahun 2018-2020**

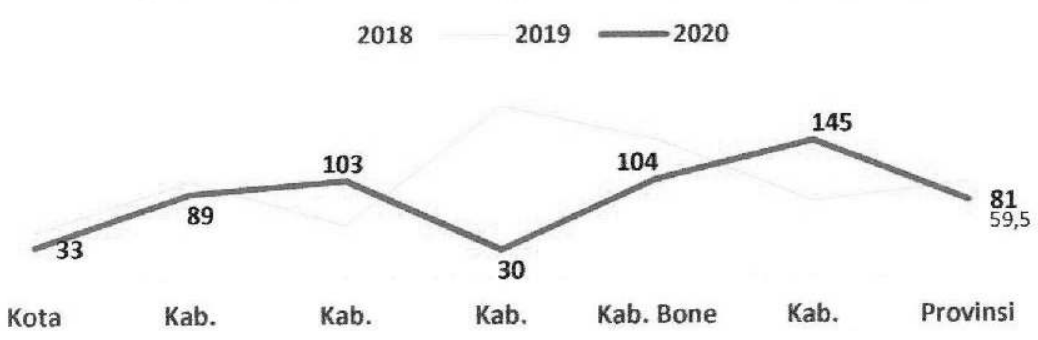

**Indikator : Persentase Penemuan Kasus ISPA / Pneumonia Tahun 2019-2020**

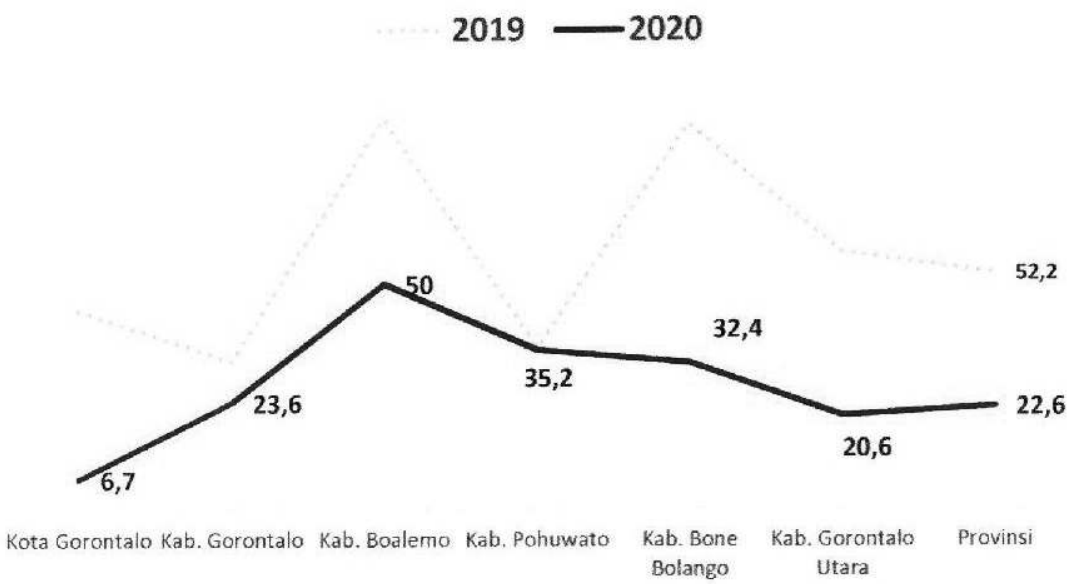


**Indikator Cakupan Pelayanan Diare per 1.000 penduduk Tahun 2018-2020**

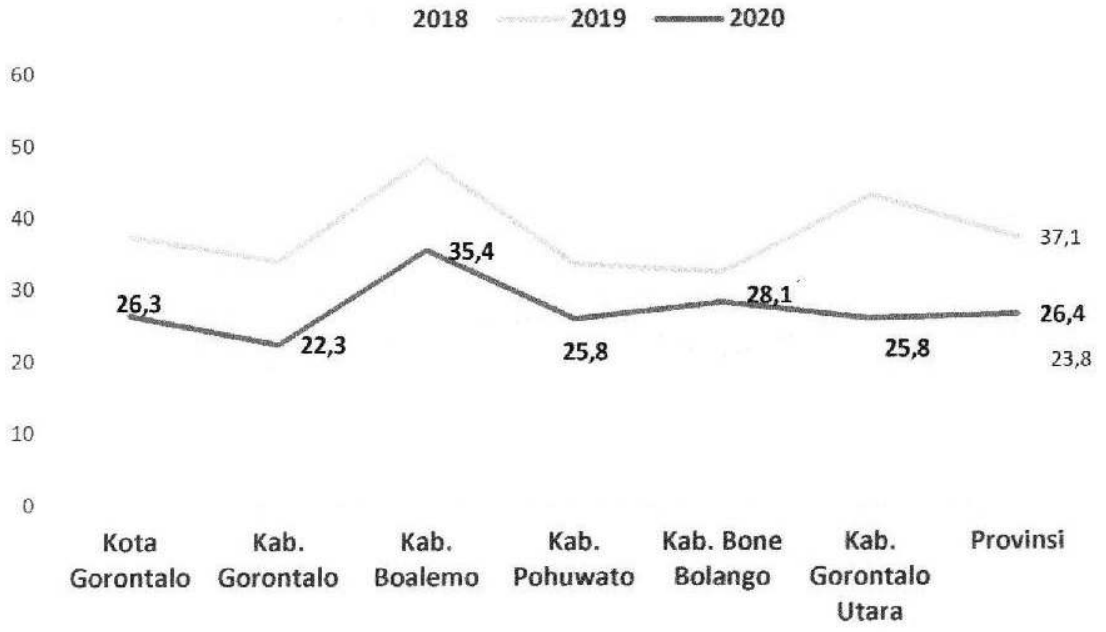


*Sumber : seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi*

Kecenderungan Jumlah kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2011, terus meningkat sampai dengan tahun 2018 jumlah kasus yang ditemukan mulai menurun sampai dengan 2020 dilaporkan 63 kasus baru HIV yang ditemukan, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.27**
Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 s/d 2020

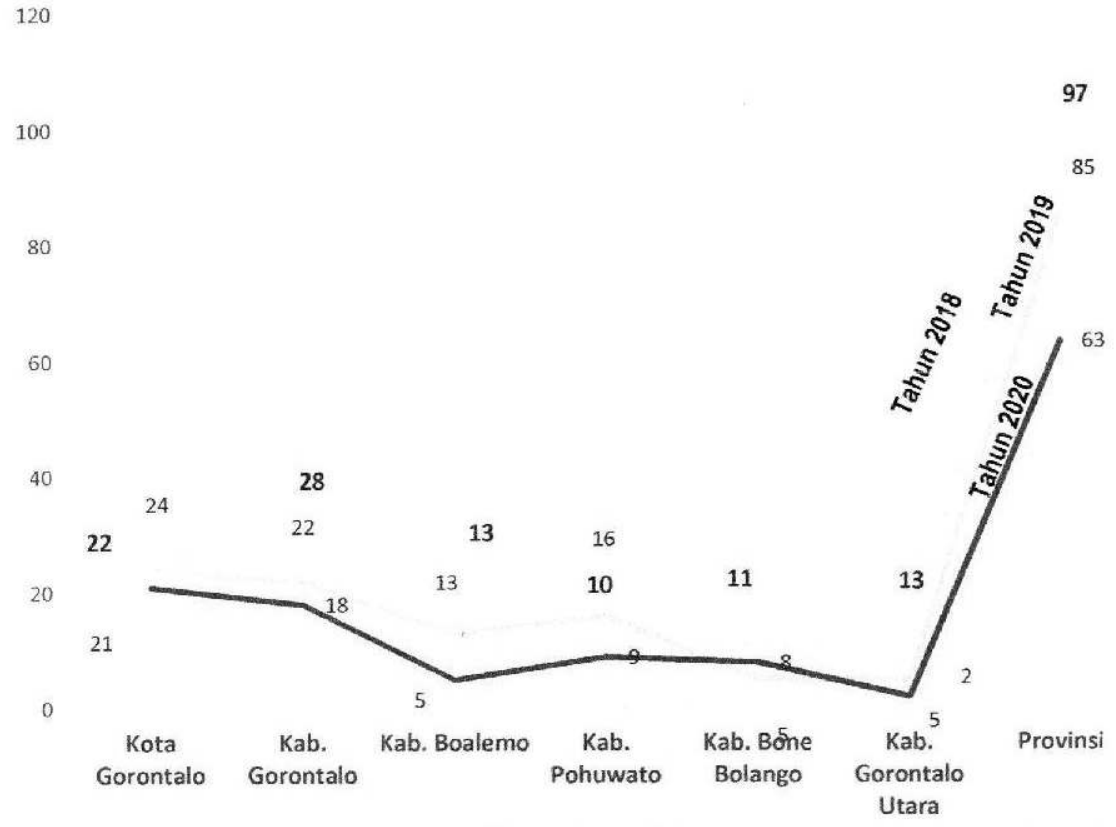


*Sumber : Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019*

Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, Penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi HIV AIDS melalui pendekatan berbasis masyarakat atau tokoh masyarakat, dengan penguatan pada intervensi di hulu untuk penemuan dini.

### 2.2.11.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017 panjang ruas

penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar 54,38 persen, menurun dibanding tahun 2019 sebesar 59,20 persen, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 90%.

**Gambar 2.28**
Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

*Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2020*

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 ketegori, sebagai berikut :

**Tabel 2.28**
Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2018-2020

| No | Kondisi | Panjang (km) / persentase (%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kondisi Baik | 196,94 km (42,15 %) | 197,02 km (42,17 %) | 220,600 km (47,22%) |
| 2 | Kondisi Sedang | 25,63 Km (5,49%) | 37,27 Km (7,98 %) | 33,460 km (7,16%) |
| 3 | Rusak Ringan | 54,17 km (11,59 %) | 56,48 km (12,09 %) | 104,660 km (22,40%) |
| 4 | Rusak Berat | 190,43 km (40,76%) | 176,4 km (40,76%) | 108,448 km (23,21%) |
| | Total Panjang Jalan Provinsi | 467,17 Km | 467,17 Km | 467,17 Km |

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (2021)*

### b. Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi

maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak. Tahun 2020 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 33.222 Ha. Jumlah panjang pengaman sungai sebesar 0 meter, dan jumlah pengaman pantai yang dibangun sebesar 191 meter.

**c. Air Minum dan Sanitasi**

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

- Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
- PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
- DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengembangan kinerja air minum dan sanitasi dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/ sanitasi dan penyediaan air bersih, sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

**Tabel 2.29**

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2017-2020

| Kabupaten/ Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Boalemo | 40,04 | 50,81 | 62,19 | 63,19 |
| Gorontalo | 56,93 | 64,48 | 76,32 | 78,18 |
| Pohuwato | 59,99 | 57,08 | 71,9 | 66,03 |
| Bone Bolango | 54,22 | 63,34 | 70,77 | 77,22 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kota Gorontalo | 84,99 | 84,02 | 86,77 | 87,61 |
| **Provinsi Gorontalo** | **59,04** | **64,59** | **74,57** | **75,68** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

**Tabel 2.30**
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2019-2020

| Kabupaten/ Kota | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Boalemo | 90,08 | 94,85 |
| Gorontalo | 97,72 | 95,56 |
| Pohuwato | 88,81 | 87,21 |
| Bone Bolango | 95,24 | 96,73 |
| Gorontalo Utara | 84,73 | 87,55 |
| Kota Gorontalo | 98,98 | 97,43 |
| **Provinsi Gorontalo** | **94,19** | **94,16** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.2.11.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program peningkatan kawasan pemukiman. Tahun 2020, Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin sebanyak 325 unit dengan lokasi wilayah sebagai berikut :

- Kota Gorontalo sebanyak 37 Unit RHIR
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 129 Unit RHIR
- Kabupaten Boalemo sebanyak 43 Unit RHIR
- Kab. Pohuwato sebanyak 43 Unit RHIR
- Kab. Bone Bolango sebanyak 39 Unit RHIR
- Kab. Gorontalo Utara sebanyak 34 Unit RHIR

Sedangkan Jumlah unit rumah yang terbangun/rehab bagi korban bencana alam provinsi dan dampak pembangunan Provinsi dengan target sebanyak 5 Unit, karena terkait adanya refocusing anggaran covid 19 pada triwulan 2 tahun 2020 maka anggaran Rehab rumah korban bencana di alihkan ke anggaran Covid 19. Namun demikian tahun 2017 s/d 2019 realisasi target rumah korban bencana sudah mencapai/ melewati target RPJMD 2022.

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, di tahun 2020 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana di 2 titik kawasan seluas 20 Ha , yaitu sebagai berikut :

1. Desa Piloliyanga Kab. Boalemo
   - Pekerjaan Paving Blok 1.166,28 M
   - Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 16 Unit

2. Desa Hungayonaa Kab. Boalemo
   - Pekerjaan saluran Air/drainase 175,8 M1
   - Pekerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 29 Unit
   - Pekerjaan Permbangunan Gapura 1 Unit

Selain itu dilaksanakan Sosialisasi pembinaan Masyarakat "Advokasi Sadar Kumuh" yang berlokasi di (1) Desa Tutulo Kec. Botumoito Kabupaten Boalemo, (2) Desa Polohungo Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo, (3) Desa Tangkobu Kec. Paguyaman Kabupaten Boalemo, (4) Desa Potanga Kec. Botumoito Kabupaten Boalemo.

### 2.2.11.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkada serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo :

- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 8 April 2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desiase* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo bersama jajaran unsur TNI, Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo
- Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 22 April 2020 dalam rangka

dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo bersama jajaran unsur TNI, Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo.

- Operasi Yustisi terkait dengan Penegakan Perda No. 41 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Desiase* 2019 (COVID-19). Pelaksanaan Operasi Yustisi dilaksanakan diwilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango serta Kabupaten Gorontalo,Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, bekerjasama dengan unsur TNI,POLRI dan Satpol PP Kabupaten/Kota.

Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut.

Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan kerjasama Intelejen dan pencegahan konflik social terorisme, rencana aksi penanganan konflik social, rapat forkopimda, pendataan/ pengawasan orang asing, fasilitasi pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat, dan fasilitasi cegah dini potensi konflik.

Selain itu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2020, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) sebesar 0,48-0,88 dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

### 2.2.11.6 Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak

(PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan pembangunannya adalah :

- Memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;
- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan sosial;
- Meningkatkan pelayanan dan penanganan fakir miskin, korban bencana alam dan sosial, serta
- Meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya program penanganan fakir miskin, program pemberdayaan social, program perlindungan dan jaminan kesejahteraan social serta program rehabilitasi social.

Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui :

a) penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP)
b) pemulangan orang terlantar
c) sosialisasi bahaya penyalahgunaan NAPZA
d) bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas
e) monitoring dan evaluasi program lansia
f) bantuan social permakanan ke LKSA se Provinsi Gorontalo
g) bantuan social permakanan untuk LKS Ummu Syahidah

Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus ke Kabupaten dan Kota dalam bentuk bantuan langsung pangan untuk jaring pengaman social yang merupakan salah satu upaya dalam percepatan penanganan *corona virus disease 2019* (COVID-19) di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan melalui berbagai program kegiatan dan bantuan sosial.

**Tabel 2.31**
Persentase Masyarakat yang memperoleh Layanan Bantuan dan Pemberdayaan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial | 70% | 70% |
| 2 | Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan | 80% | - |
| 3 | Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga | 95% | - |
| 4 | Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan rehabilitasi sosial termasuk KPO | 927 orang | - 3 orang terlantar<br>- 0 org penyandang disabilitas<br>- 6 LKSA |
| 5 | Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai | 32.000 jiwa | 154.640 KPM |

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2021*

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai.

## 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 2.3.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tahun 2020 Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 19,55 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 21,08 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui :

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 150 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, serta pemagangan luar negeri salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran guna penanganan covid-19. Meskipun demikian kegiatan ini telah merealisasikan anggaran untuk pengurusan Paspor bagi lulusan Peserta Magang Luar Negeri yang lulus di tahun 2019 sebanyak 5 orang.
d. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
e. Program pelatihan berbasis kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktifitas Daerah. Tahun 2020 persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebesar 33,12 persen dari target 28,10 persen. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini yakni : Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi tenaga kerja dan pencari kerja sebanyak 30 orang tenaga kerja yang dilatih yang terdiri dari paket pelatihan pembuatan minyak kelapa dimana masing-masing paket 15 orang di Desa Juria Kec. Bilato Kab. Gorontalo dan di Desa Bandungan Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango serta pelatihan dan pengembangan produktivitas sebanyak 5 UKM yang ada di Kabupaten Boalemo yang di bina pada kegiatan Bimbingan Konsultasi sebanyak 30 peserta, 25 peserta adalah perwakilan dari masing- masing UKM dan 5 Fasilitator yaitu Pimpinan dari masing-masing UKM.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan ketenagakerjaan, menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2020 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebanyak 4 kasus (100 persen). Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,01%. Tercatat sampai dengan tahun 2020 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.059 perusahaan.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di provinsi gorontalo. Tahun 2020 UMP Provinsi Gorontalo sebesar RP. 2.788.826, meningkat dibandingkan UMP tahun 2019 sebesar RP. 2.384.020, atau naik sebesar 8,03 persen, sementara untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16,98 persen. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 2.29**
Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

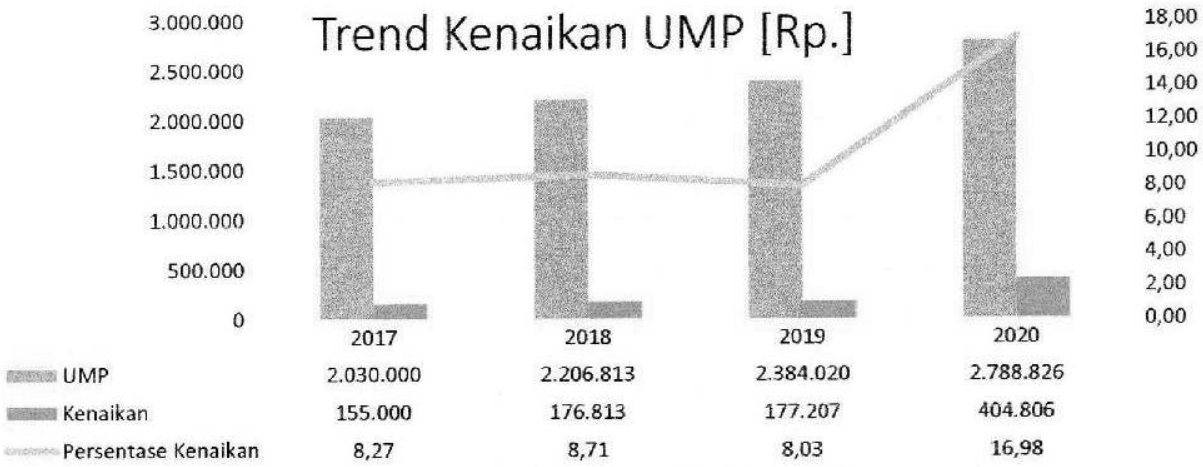


*Sumber : Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2021*

### 2.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *Human Traficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

**Tabel 2.32**
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta
Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Kasus | Korban | | Persentase Terlayani | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anak | Perempuan | %Anak | %Perempuan | %Total |
| 1 | Kab. Boalemo | 22 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Kab. Bone Bolango | 53 | 27 | 38 | 81,5 | 81,6 | 81,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kab. Pohuwato | 48 | 24 | 37 | 62,5 | 51,4 | 56,95 |
| 6 | Kota Gorontalo | 108 | 54 | 79 | 98,2 | 98,7 | 98,45 |
| | **Total (Provinsi Gorontalo)** | **338** | **190** | **249** | **82,6** | **81,5** | **82,05** |

*Sumber : Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2020*

Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen.

### 2.3.3 Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2020 sebesar 75,6, sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 90,7. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

**Tabel 2.33**
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Gorontalo tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Skor PPH Ketersediaan | 66,4 | 75,6 | 66,1 | 69,23 |
| 2. | Skor PPH Konsumsi | 82,8 | 90,7 | 81,2 | 89,3 |

*Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2021*

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka

program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup sehat, GERMAS dalam mengkonsumsi pangan lokal atau Go Pangan Lokal dan juga Model Pengambangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang bersumber dari pangan umbi-umbian untuk dijadikan pangan alternatif sebagi pangan pengganti beras, peningkatan produksi protein hewani terutama unggas, protein nabati, mineral dan serat dari sayuran dan buah menuju pangan yang beranekaragam, berkelanjutan, merata sesuai dengan karakteristik daerah serta kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilitasi harga dampak dari covid -19. Penyebab Pola konsumsi yang kurang beragam juga ditentukan oleh rendahnya daya beli masyarakat khususnya di daerah perdesaan. Oleh sebab itu konsep ketahanan pangan bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan itu sendiri yakni Tingkat Kesejahteraan Manusia.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan di 16 daerah rawan pangan dari 27 daerah rawan pangan yang ditargetkan melalui penyaluran 2.600 paket bantuan di daerah rawan pangan atau telah melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1.750 paket. Hal ini disebabkan karena adanya pandemic sehingga perlu adanya tambahan untuk penanganan daerah rawan pangan akibat pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebarluasan penularan Covid 19 di masyarakat se Provinsi Gorontalo. Selain itu dilakukan penyaluran bahan pangan pada 12 Lembaga keuangan desa (LKD) di 36 kios akses pangan yang tersebar di 6 Kabupaten/ Kota. Namun karena adanya pandemic Covid 19 sehingga anggaran untuk bantuan kios akses pangan di refocusing sehingga target tidak tercapai 100 persen. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversivikasi pangan dan penanganan keamanan pangan segar yang dilakukan melalui pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengembangan usaha pangan lokal dan tradisional. Dari program ini diperoleh persentase jumlah konsumsi energi per kapita per hari sebesar 2453 (Kcal/kapita/hari), persentase jumlah konsumsi protein per kapita per hari sebesar 71,9 (gram/kapita/hari) dan Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan sebanyak 18 sertifikat/registrasi.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan makanan, diantaranya melalui penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 10.000 Kg (10 Ton) bagi 10 Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang tersebar di 5 kabupaten, dan Bantuan Beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 5.000 Kg (5 Ton) bagi 10 Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang tersebar di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo

Coefisien Varian (Beras 5%, Cabe 25%, Bawang Merah 25%, Gula Pasir 25%, minyak goreng 5%), dan CPP 5 ton CPM 10 Ton.

### 2.3.4 Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menyiapkan lahan untuk pembangunan diantaranya Pembangunan Kantor Kehutanan dan Kantor Bawaslu seluas 18.017 M2, Pembangunan DI Lomaya – Pilohayanga seluas 13.081 M2, Blok Plan seluas 3.494 M2, TPU seluas 3.877 M2, Lapas Hutuo seluas 16.631 M2, dan TPA seluas 1.823 M2 dengan realisasi sebanyak 35 Bidang Tanah dari target 22 Bidang Tanah pada tahun 2020.

### 2.3.5 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan.Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan.

**Tabel 2.34**

Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2018-2020

| No | Indeks | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Kualitas Air | 42 | 47,0 | 43,5 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | 99,46 | 99,58 | 98,86 |
| 3 | Indeks Tutupan Lahan | 75,58 | 77,41 | 79,11 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan | 72,69 | 74,93 | 75,66 |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2021*

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2020, terjadi pencemaran dengan

sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

**Tabel 2.35**
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2020

| NO | NAMA SUNGAI | STATUS MUTU AIR SUNGAI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Hulu | Tengah | Hilir |
| 1 | Bone | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar SEDANG |
| 2 | Paguyaman | Cemar RINGAN | Cemar SEDANG | Cemar RINGAN |
| 3 | Bionga | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN |
| 4 | Buladu | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN |
| 5 | Taluduyunu | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar SEDANG |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Sementara Indeks Kualitas Udara pada 24 titik pantau yang mewakili permukiman, transportasi dan perkantoran di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup masih dinilai kurang signifikan. Upaya prakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan dinilai masih rendah. Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualifikasi lingkungan yang terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto, masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangrove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata disetiap Kabupaten/Kota, longsor dan banjir yang masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pogram 3R, Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Provinsi Gorontalo.

### 2.3.6 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Legalisasi Rencana umum dan Rencana Rinci Tata Ruang. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

Tahun 2020 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW sebesar 52 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 45 persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW, maka kesenjangan antar wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya pengembangan infrastruktur wilayah memberikan dampak distribusi ekonomi dan investasi menjadi lebih optimal.

### 2.3.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui kegiatan diantaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota, Koordinasi dan

### 2.3.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta kawasan perdesaan, program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi pendayagunaan TTG, Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat Desa, Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Pedesaan Lintas Kabupaten/Kota, Pengembangan Kapasitas Kerjasama Lembaga Desa/Kelurahan, Pembinaan dan Pembangunan Desa Tata Kelola Pemerintahan, serta Pengembangan Ekonomi Inklusif Berbasis Teknologi bagi Masyarakat Miskin di Pedesaan *(Smart Farming).*

Tahun 2020 Jumlah desa tertinggal yang dientaskan sebanyak 5 desa dari 94 desa yang ditargetkan.

Dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam membangun perekonomian masyarakat desa tersebut, maka sebagaimana data BPS melalui penghitungan indeks pembangunan desa (IPD) menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang, dan tertinggal. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu, yang terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, 3) aksesibilitas/transportasi, 4) pelayanan umum, dan 5) penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 jumlah desa mandiri sebanyak 34 desa (5,18 persen), desa berkembang 599 desa (91,17 persen), dan desa tertinggal 24 desa (3,65 persen).

Dari 5 (lima) dimensi pembangunan desa, dimensi tertinggi berada pada layanan transportasi sebesar 87,07 persen, selanjutnya pemerintahan desa sebesar 75,50 persen, pelayanan dasar 61,10 persen, pelayanan umum sebesar 51,33 persen, sedangkan terendah adalah kondisi infrastruktur sebesar 50,48 persen.

### 2.3.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,16 persen.

**Tabel 2.36**
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020

| No | Nama Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | Laju Pertumbuhan Penduduk (persen) |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | |
| 1 | Kab. Gorontalo | 378.527 | 393.107 | 0,96 |
| 2 | Kab. Boalemo | 167.024 | 145.868 | 1,18 |
| 3 | Kab. Pohuwato | 161.373 | 146.432 | 1,25 |
| 4 | Kab. Bone Bolango | 161.236 | 162.778 | 1,34 |
| 5 | Kab. Gorontalo Utara | 115.072 | 124.957 | 1,78 |
| 6 | Kota Gorontalo | 219.399 | 198.539 | 0,95 |
| **Provinsi Gorontalo** | | **1.202.631** | **1.171.681** | **1,16** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas.

Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita.

### 2.3.10 Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan kinerja Pelayanan Transportasi, Peningkatan Layanan Transportasi, Program Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2020, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 4 lintasan yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo –

NKRI melayani 2 koridor yakni koridor 1. Suwawa-Kota Gorontalo Via City Mall Dan Pasar Sentral dan koridor 2. Suwawa-Kota Gorontalo via Rumah Sakit Aloei Saboe. Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahun 2020 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 3 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut :

1. Traffic Light Sp.4 1 Unit pada lokasi persimpangan Jl. Toto Tengah, Jl. Sawah Besar Tapa – Kabila, Jl. Bachruddin Yusuf Habibie, Jl. Noho Hudji (KM. 7 Bypass Bone Bolango).
2. Traffic Light Sp.4 1 Unit pada Jl. Sultan Botutihe, Jl. Matolodula dan Jl. Prof. Dr. Aloe Saboe (Sp.4 Pasar Moodu).
3. Rambu lalu lintas 37 buah, ruas jalan Kabila - Tapa.

Sedangkan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL.

Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan di sektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 43 persen tahun 2019 menjadi 65,8 persen ditahun 2020. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 58 persen tahun 2020 dibanding tahun 2019 sebesar 48 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 39,3 persen tahun 2019, menjadi 62,7 persen ditahun 2020.

### 2.3.11 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2020 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 290 titik akses dan 34 layanan internet, serta Pemetaan Aplikasi E-Government tahun 2019 sebanyak 50 Domain.

Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta E-Report, e-Monep (*electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan),* e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan elektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat. Disamping itu Radio Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.

Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakelola (manajemen dan governance). Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e-government menunjukkan adanya penurunan dari 3,41tahun 2019 turun menjadi 3,18 ditahun 2020.

**Tabel 2.37**

Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Indeks e-government | 3,78 | 3,41 | 3,18 |

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2020*

### 2.3.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;(4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengembangan Koperasi dan UKM, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah,

Tahun 2020 total Koperasi Aktif mencapai 909 koperasi aktif dari target 693 koperasi aktif sementara untuk target 10 jumlah koperasi berprestasi tidak dapat dicapai karena adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak terlaksana.

Disamping itu, dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM, juga dilakukan Peningkatan akses permodalan dan efektifitas bagi KUKM melalui Bimtek Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 31.574 dengan nilai kredit sebesar Rp. 726.943.187.047,- dan pelaku usaha di sector pertanian, perburuan dan kehutanan adalah yang tertinggi dalam pengajuan kredit usaha rakyat yaitu sebanyak 11.440 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp. 247.856.080.344.

sementara untuk target 10 jumlah koperasi berprestasi tidak dapat dicapai karena adanya refocusing anggaran sehingga kegiatan ini tidak terlaksana.

Untuk Program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Pembinaan UMKM Naik kelas, serta promosi dan pemasaran produk UMKM.

**Tabel 2.38**

Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

| Indikator | Capaian Kinerja Program Tahun 2020 | | Capaian Kinerja Program Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| - Jumlah UKM yang dibina/ naik kelas | 50 UKM | 50 UKM | 50 UKM | 70 UKM |
| - Jumlah Koperasi Aktif | 693 Kop | 909 Kop | 678 Kop | 866 Kop |
| - Jumlah Koperasi Berprestasi | 10 Kop | - Kop | 10 Kop | 6 Kop |

*Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan*

### 2.3.13 Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan investasi yaitu melalui program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Tahun 2020 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 482 izin yang terdiri atas izin di sektor perikanan dan kelautan sebanyak 243 izin, sector pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 2 izin, perhubungan sebanyak 70 izin, kesehatan sebanyak 6 izin, kehutanan sebanyak 47 izin, ESDM sebanyak 107 izin dan lingkungan hidup sebanyak 7 izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2020 terdapat 2 PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Pani Bersama Tambang (PMDN di Kab. Pohuwato)
2. PT. [illegible] (PMDN di Kab. Pohuwato)

Dari ketambahan 2 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo adalah 223 PMA/PMDN. Sedangkan jumlah PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi sebanyak 40 PMA/PMDN, dengan Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp.9.122.566.250.983,- dari target Rp. 8.945.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 968.736.099.654,- PMDN sebesar Rp 647.981.288.999,- dan Non Spipise 6.918.802.239.305,-. Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 19,53 persen dari target 20 persen, terlihat tidak memenuhi target hal ini dikarenakan realisasi investasi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019 sudah melampaui nilai realisasi investasi yang ditargetkan. Target jumlah realisasi investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 8,945 Triliun dan capaian jumlah realisasi investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 9,123Triliun, dengan demikian nilai target jumlah realisasi investasi tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan.

### 2.3.14 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, buday prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus di dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut.

Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui pembinaan dan pemasyarakatan

para siswa dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 68 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 12 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang pencak silat, sepak takraw, dan karate. Perolehan medali tahun 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 28 medali.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

### 2.3.15 Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik.Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik hanya program pengembangan data/ informasi.

Dalam menyelenggarakan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika merancang aplikasi satu data dengan system data statistik e-data bekerja sama dengan Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Daerah. Aplikasi e-data dibuat dalam rangka menjaga konsistensi dan terintegrasinya data dari berbagai sumber data khususnya data sektor.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistik lainnya adalah melalui penyusunan Buku Provinsi Gorontalo Dalam Angka yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang

Provinsi Gorontalo menyusun buku PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang juga diterbitkan setiap tahun.

### 2.3.16 Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah, maka Dinas Kominfo dan Statistik melakukan Peningkatan Layanan Infrastruktur TIK, Pengelolaan dan Layanan Data Informasi Sistem E-Government, membangun infrastruktur persandian daerah, serta melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi daerah.

### 2.3.17 Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan.

Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo, Apresiasi seni dan Budaya dan Pelatihan/ Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Gorontalo.

Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2020 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut :

**Tabel 2.39**

Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realiasi | Target | Realisasi |
| 1 | Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo | 2 Jenis | 1 Jenis | 2 Jenis | 7 Jenis |
| 2 | Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum | 6 Jenis | 455 Koleksi (8 Jenis) | 6 Jenis | 455 Jenis |
| 3 | Dokumen Budaya Daerah Gorontalo | 2 Jenis | 5 Jenis | 2 Jenis | 5 Jenis |

*Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021*

### 2.3.18 Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi – fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui program peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan baik tingkat desa, sekolah maupun pengelola perputakaan daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan menyediakan akses informasi yang bermutu. Hal ini dilakukan melalui program Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Kemah Bakti Literasi, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Pustakawan, kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling, serta Pelestarian Karya Cetak dan Penelusuran Bibliografi/Katalog Induk (BID/KID) .

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan.

Berbagai langkah pemerintah Provinsi dalam rangka menunjang layanan perpustakaan di Provinsi Gorontalo, seperti peningkatan jumlah buku, untuk tahun 2020 sebanyak 23.768 judul/ 70.753 eksemplar. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2020 sebanyak 5.451 pengunjung, mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2019 sebanyak 81.124 pengunjung akibat adanya pandemic

### 2.3.19 Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2020, daerah didesain sedemikian hingga rancangan sistem layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui program penyelenggaraan kearsipan, dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip berbasisi TIK sebanyak 34 dokumen, penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) dan akuisisi arsip kepada 18 OPD, serta bimtek pengelolaan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) sebanyak 78 peserta.

## 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

### 2.4.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan

Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai , serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM pariwisata.

Merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat didunia. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-19 ini. Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara hanya mencapai 1.226 orang dengan target 7.199 orang atau selisih 5.973 Orang. Untuk wisatawan Nusantara terdapat selisih 257.098 Kunjungan dengan target 688.456 dengan realisasi hanya mencapai 431.468 kunjungan. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan domestic sampai dengan bulan November hanya mencapai 1,5 hari dengan persentase sebesar 51.66 %.

**Tabel 2.40**
Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara)
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2020

| Wisman/Wisnus | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Wisatawan Mancanegara (Wisman) | 8.532 | 11.173 | 1.226 |
| Wisatawan Nusantara (Wisnus) | 957.802 | 1.304.254 | 431.468 |
| Total Jumlah Wisatawan | 966.334 | 1.315.427 | 432.694 |

*Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2020*

### 2.4.2 Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2020 mencapai 16.190,93 Milyar Rupiah. Sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 38,80 persen terhadap ekonomi daerah. Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dampak dari adanya pandemic.

**Tabel 2.41**
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo
Tahun 2015-2019

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah) | 11.799,31 | 13.127,27 | 14,580,02 | 16.018,29 | 16.190,93 |
| Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%) | 37,22 | 38,01 | 38,64 | 38,93 | 38,80 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian | 6,43 | 9,06 | 7,57 | 6,32 | -1,61 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2020 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitaPOTENSI lisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

**Tabel 2.42**
Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian
Provinsi Gorotalo tahun 2017 - 2020

| No | Indikator | Tahun (Ton) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1 | Produksi Padi (Ton) | 344.166 | 377.317 | 304.644 | 297.536 |
| 2 | Produksi Jagung (Ton) | 1.481.628 | 1.580.367 | 1.820.830 | 1.333.715 |
| 3 | Produksi Kedelai | 255 | 5.349 | 171 | 126 |

*Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, BPS Provinsi Gorontalo (GDA) 2021*

Pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2020 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2020 (ASEM) sebesar 297.536 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 373.298 ton dan mengalami penurunan 2,33 persen dibanding tahun 2019. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2020 sebesar 1.333.715 Ton, menurun 26,75 persen dibanding produksi tahun 2019, dan jauh melampaui target

sebesar 803.790 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2020 sebesar 126 ton, belum mencapai target sebesar 4.069 ton.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha berupa bufferstock dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 3.000 Ha (bufferstock). Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari benih Benih Penjenis (BS) 10 kg Hasil benih Dasar 1,540 kg varietas Ciherang.

Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2020 mencapai 7.554 ton , diatas target sebesar 4.493 ton, mengalami peningkatan dibanding produksi tahun 2019 sebesar 1.054 ton. Sementara untuk produksi buah tahun 2020 mencapai 26.687 ton melampaui target sebesar 24.068 ton, mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2019 sebesar 35.553 ton.

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 500 pohon buah kelengkeng, 100 pohon jambu dan 400 pohon alpukat.

Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2020 produksi kelapa sebesar 57.907 ton, menurun dibanding produksi tahun 2019 sebesar 57.974 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 57.093 ton. Produksi komoditi kakao tahun 2020 sebesar 4.438 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2019 sebesar 4.592 ton. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi, serta penyediaan benih cengkeh 2.750 pohon dan benih kelapa dalam 2.750 pohon.

Pembangunan sub sektor peternaka n juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi.

**Tabel 2.43**

Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020 (ekor)

| Komoditi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi Sapi | 236.027 | 236.788 | 251.003 | 253.960 |
| Populasi Kambing | 95.086 | 99.106 | 102.585 | 103.777 |
| Populasi Unggas | 2.178.235 | 1.514.683 | 1.866.762 | 2.293.299 |

*Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2021*

Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing dan Sapi mengalami peningkatan. Tahun 2020

251.003 ekor, dan melampaui target sebesar 233.968 ekor. Sementara populasi kambing tahun 2020 sebanyak 103.777 ekor meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 102.585 ekor, dan melampaui target sebesar 100.963 ekor. Untuk populasi unggas juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 455 ekor, dan bibit ternak kambing sebanyak 341 ekor dan bibit ternak unggas sebanyak 54.596 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis dengan penyediaan 10.000 dosis obat ternak, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak sapi sejumlah 352.919 kg, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak kambing sejumlah 55.532 kg dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak ayam sejumlah 2.000 ekor.

### 2.4.3 Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2020, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 178 Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya dalam bentuk penanaman bibit hutan, MPTS dengan jumlah bibit 24.787 batang. Selanjutnya pembuatan areal model agroforestry dan hutan rakyat melalui penanaman bibit tanaman hutan, tanaman produktif pembuatan terasering dengan jumlah bibit 14.580 batang dan pengadaan ternak kambing kaligesing sebanyak 10 ekor yang dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat/kelompok tani hutan.

Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari aspek pengawasan dan perlindungan hutan juga dilakukan melalui program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari kebijakan pemerintah di sektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2020 sebanyak 79,11 persen, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 77,41 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 178 Ha, menurun dibanding tahun 2019 seluas 2.860 ha.

**Tabel 2.44**
Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Indeks Tutupan Lahan/Hutan | 75,81 | 79,11 | 75,73 | 77,41 |
| 2 | Luas Lahan kritis yang direhabilitasi | 1000 Ha | 178 Ha | 1000 Ha | 2.860 Ha |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.4.4 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Pengembangan ketenagalistrikan daerah, sebanyak 45 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 150 unit lampu penerangan jalan umum, Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi yakni 30 SPBU, 13 Agen LPG, serta 1 dokumen laporan hasil pengawasan kelembagaan PLTS Terpusat di Desa Sandalan, Desa Tapaluluo, Desa Pilolaheya dan Desa Pangea Wonosari.

Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya.

Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan pertambangan mineral, diantaranya dengan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan. Dari 82 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo, 60 usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar atau sebesar 76,81%.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2020 sebanyak 130 RTS dengan 4 titik sumbur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdiri dari 1 titik di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo, 1 titik di Desa Sidomukti Kec. Mootilango Kab. Gorontalo, 1 titik di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo dan 1 titik di Desa Kayubulan Kec. Batudaa Pantai Kab. Gorontalo

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2020 sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 11,63 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melalukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagai berikut :

**Tabel 2.45**

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2016-2019 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah)

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Berlaku | 380,96 | 399,98 | 420,36 | 450,54 | 468,20 |
| Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Konstan | 294,53 | 308,41 | 318,15 | 333,86 | 332,18 |
| Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan | 0,08 | 4,71 | 3,16 | 4,94 | -0,50 |
| Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB | 1,20 | 1,16 | 1,11 | 1,10 | 1,12 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.4.5 Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaranKegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri, Program peningkatan dan pengembangan ekspor daerah, serta program peningkatan standarisasi Mutu Barang.

Tahun 2020 sejumlah 13 Komoditi eksport, yaitu : jagung, ikan, udang, palam acid oil, kelapa parut, arang, kopi bubuk, kopi biji, kopra, cengkeh, fytomaxx vegetable fruit, molase. Jumlah Perdagangan antar Pulau sebanyak 3.553 kali, meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 3.308 kali.

Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 2.46**

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2020

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1 | Laju Pertumbuhan | 9,91 | 9,59 | 10,11 | 11,76 | -1,38 |
| 2 | Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp) | 3.481,16 | 3.938,42 | 4.465,44 | 5.102,34 | 5.099,77 |
| 3 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 10,98 | 11,40 | 11,83 | 12,40 | 12,22 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

### 2.4.6 Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan Peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Pengembangan Agro Industri dan Industri Pangan daerah, Kegiatan Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka, Kegiatan Pembinaan Teknologi Industri Logam Mesin dan Elektronika, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi IKM dan Kegiatan Pengembangan Sentra Industri Agro Terpadu. Tahun 2020 sebanyak 15.226 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.47**
Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2020

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| 1 | Laju Pertumbuhan | 6,58 | 3,46 | 6,77 | 11,56 | 1,12 |
| 2 | Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp) | 941,23 | 973,80 | 1.550,42 | 1.755,28 | 1.800,03 |
| 3 | Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB | 4,21 | 4,09 | 4,11 | 4,27 | 4,31 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,31 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2020 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.800,03 Miliar Rupiah.

### 2.4.7 Transmigrasi

Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu provinsi tujuan transmigran. Terdapat 8 kawasan pemukiman transmigrasi provinsi gorontalo meliputi kimtrans bukit aren di Kabupaten Gorontalo, dengan total 150 KK, kimtrans Pangea Sp3 yang berlokasi di Kabupaten Boalemo sebanyak 150 KK, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 125 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2020, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui program pengembangan di kawasan masyarakat transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan ekonomi, sosial budaya, dan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2020 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 250 warga.

### 2.4.8 Kelautan Dan Perikanan

dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Pembangunan sektor perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya : Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Dari berbagai program yang dilaksanakan tersebut, capaian pembangunan bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.48**
Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2020

| No | Indikator Pembangunan | 2020 | | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Produksi perikanan tangkap (ton) | 124.168,00 | 117.587,00 | 122.333,00 | 146.724,43 |
| 2 | Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (ton) | 28.596,00 | 33.863,27 | 28.422,00 | 52.824,48 |
| 3 | Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (juta/ekor) | 13,00 | 30,40 | 11,00 | 12,70 |
| 4 | Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn) | 57,30 | 63,44 | 56,40 | 59,84 |
| 5 | Persentase kepatuhan (compliance)pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 78,00 | 80,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6 | Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha) | 4.364,00 | 2.264,13 | 1.130,00 | 2.261,27 |
| 8 | Pendapatan nelayan (Rp./bln) | 3.236.654 | 2.833.173 | 2.958.820 | 5.255.083,12 |
| 9 | Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln) | 3.059.331 | 2.935.592 | 2.768.625 | 3.190.651,26 |
| 10 | Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln) | 3.725.261 | 3.799.000 | 3.559.734 | 4.429.241,61 |
| 11 | Produksi ikan yang di antar pulaukan/daerah/eksport (Ton) | 2.241 | 4.218 | 2.114 | 15.877 |

*Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2021*

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. Produksi Perikanan Tangkap menurun 19,85 persen tahun 2020, sementara Produksi Perikanan Budidaya mengalami penurunan sebesar 35,89 persen di tahun 2020. Peningkatan produksi juga seiring dengan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang juga mengalami peningkatan tahun 2020 mencapai 63,44 (kg/kapita/tahun).

Selain itu, upaya peningkatan produksi perikanan tangkap, juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dengan mengaplikasikan teknologi Zona Potensi Penanggkapan Ikan (ZPPI) yang dikemangkan oleh LAPAN dalam menghasilkan citra satelit lokasi potensi (koordinat) titik kumpul ikan dan informasi kondisi perairan yang dmanfaatkan oleh nelayan dalam penangkapan ikan sehingga mampu memberikan keakuratan lokasi penangkapan ikan yang berdampak pada efektifitas hasil tangkapan yang maksimal dan efisiensi biaya operasional penangkapan ikan.

## 2.5. ASPEK PELAYANAN UMUM: Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

### 2.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Untuk Mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, Memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah, Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya maupun Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam bidang Fisik Prasarana.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen

daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD.

Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RKP 2020. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Partisipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek)
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Selain fungsi Perencanaan, Bapppeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan :

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
b. hasil rencana pembangunan daerah;
c. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
d. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
e. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
f. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2020

**Tabel 2.49**
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD PD | 100% | 95,60% | 100% | 97,03% |
| 2 | Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti | 100% | 98,16% | 100% | 98,50% |

*Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021*

### 2.5.2 Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui Pajak, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Tahun 2020 dalam upaya pengelolaan pajak dan retribusi, Badan Keuangan mengeluarkan regulasi yang dikelola pemerintah provinsi berjumlah 5 peraturan daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selain pajak, sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah melalui retribusi yang merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

**Tabel 2.50**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar) Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah / PAD (Rp. Trilyun) | 311,22 | 348,27 | 381,51 | 436,28 | 412,39 |
| Persentase Kenaikan | 7,48 | 11,90 | 9,54 | 14,36 | -4,85 |

*Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020 *Data Per 31 Desember 2020 (Unaudited BPK)*

Kinerja pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar 412.391.352.196 atau sebesar 122,05% dari target yang ditetapkan 377.882.553.091. Realisasi penerimaan bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar 85,38% dari total PAD, Hasil Retribusi Daerah sebesar 1,99%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,78% dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 11,84 % dari total PAD.

Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan minus 4,85% dibanding realisasi penerimaan PAD tahun 2019. Penurunan terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang mengalami penurunan sebesar minus 63,13 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah minus 43,12%, dan penurunan penerimaan pajak daerah sebesar minus 9,11 %.

Penurunan penerimaan PAD diantaranya disebabkan oleh Pandemi Covid19 yang terjadi ditahun 2020, yang berpengaruh signifikan terhadap sektor-sektor perekonomian.

2. Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2020 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 2.51**
Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020

| Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nilai Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

*Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020*

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance.*

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2020 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

### 2.5.3 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Pengembangan Riset Daerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2020 antara lain :

- Penyusunan Jurnal Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo
- Penyusunan Dokumen Kajian tentang Prasarana Wilayah
- Pelaksanaan Diskusi Tematik Prasarana Wilayah
- Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Kelitbangan Bidang Sosial Budaya
- Riset pada Sektor Ekonomi Pembangunan
- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Riset Daerah

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2020 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,16 persen.

### 2.5.4 Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi : Pengawasan atas akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and Clean Government).* Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasan nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Tahun 2020 Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD dengan kategori BB sebanyak 19 OPD meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 15 OPD.

Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja hingga tahun 2020 mencapai predikat B, dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat B.

### 2.5.5 Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat diantaranya :

1. Program Pengembangan kompetensi Manajerial, dengan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II dan Lemhanas; Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; dan Diklat Prajabatan/ Pelatihan Dasar CPNS Gol III. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial tahun 2020 sebesar 79,61% dari target 20,6%.
2. Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur, dengan kegiatan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Persentase peserta yang memiliki sertifikat kompetensi teknis, fungsional dan structural tahun 2020 sebesar 16,43% dari 18,31% yang ditargetkan.
3. Program Pengembangan Kapasitas, Mutu dan Kerjasama Kediklatan, dengan kegiatan fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat; penyusunan dokumen analisis kebutuhan diklat; serta penjaminan mutu, pemeliharaan dan peningkatan akreditas lembaga kediklatan. Persentase peningkatan kapasitas mutu dan kerjasama kediklatan tahun 2020 hanya sebesar 10% dari 100% yang ditargetkan.
4. Program Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Jurnal Ilmiah Kediklatan.

Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19 sehingga berlaku aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul yang membatasi seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang mewajibkan tatap muka dalam setiap pelaksanaannya.

**Tabel 2.52**
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2020

| No | Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2020 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN | 50% | 57.14% | 40% | 46% |
| 2 | Akreditasi Lembaga Diklat | B | A | B | A |

*Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021*

### 2.5.6 Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas

layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, Meningkatkan sistem pelayanan melalui pemanfaata teknologi informasi kepegawaian.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya :

1. Program Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan pemberian bantuan Studi S2 sebanyak 7 orang ASN untuk penyelesaian studi dan bantuan tugas belajar dokter spesialis sebanyak 4 orang, Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi, Kegiatan Ujian Dinas, Penyesuaian Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 33 orang ASN, serta Kegiatan Pelaksanaan seleksi Jabatan Struktural sebanyak 6 jabatan. Tahun 2020, persentase pengembangan aparatur sebesar 95% dari target 92%.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur, dengan kegiatan diantaranya Pelayanan Kesejahteraan Pegawai sebanyak 3439 orang, Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin, Penilaian, Penghargaan ASN Berprestasi. Tahun 2020, persentase peningkatan kesejahteraan dan pembinaan aparatur sebesar 98% dari target 92%.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Manajemen PNS, berupa kegiatan kenaikan pangkat dan pensiun ASN, pengangkatan dalam jabatan JPT, Administrator, Pengawas dan Fungsional , pelayanan mutasi dll.

Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2020 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN (skala 50%-100%) dan Indeks Reformasi Birokorasi berada pada kategori B (Baik).

### 2.5.7 Kesekretariatan Daerah

#### 2.5.7.1 Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil *(outcome)*. Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2018-2020 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2020 mencapai 68,05 meningkat dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengalami perbaikan dan meningkat dari tahun ketahun.

**Tabel 2.53**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018-2020

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Nilai SAKIP | 63,22 | 67,70 | 68,05 |
| Predikat | B | B | B |

*Sumber : Menpan-RB, 2021*

Selain Penilaian SAKIP, Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah maupun K/L. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan Sumber Daya Aparatur.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

**Tabel 2.54**
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo

| No | Komponen | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Reformasi Birokorasi | 63,71 | 63.36 |
| 2 | Predikat IRB | B | B |

*Sumber : Menpan-RB 2021*

Secara umumnya, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, dan perbaikan dari semua aspek penilaian mulai dari komponen pengungkit yang terdiri dari : (1) Pemenuhan, (2) Hasil antara area perubahan, (3) Reform, dengan total skor 33,79 persen. Selanjutnya untuk komponan hasil, yang terdiri dari (1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, (2) Kualitas Pelayanan Publik, (3) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, (4) Kinerja Organisasi, dengan skor 32,57. Sehingga total skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 63,36 atau predikat B.

Peningkatan Indeks Reformasi Birkorasi tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tahun 2020, salah satunya melalui komitmen untuk melakukan berbagai perubahan serta memperbaiki sistem pemerintahan. Namun hasil evaluasi Kemenpan-RB, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta berbasis reformasi birokrasi, diantaranya :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), sudah mulai berjalan di Pemerintah Provinsi Gorontalo namun masih lebih focus dilaksanakan di tingkat Pemda, belum menyeluruh di tingkat OPD.
2. Monitoring dan Evaluasi atas rencana aksi reformasi birokrasi belum dilakukakan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo.

3. Identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta monitoring dan evaluasi atas system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara optimal.
4. Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyeteraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh.
5. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baikdi tingkat Pemda maupun di tingkat OPD, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja.
6. Penerapan *e-Gov* di lingkungan Pemerintah Provinsi sudah mulai dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi; mengingat belum adanya *Grand Design* pengembangan aplikasi antar OPD, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu diantaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu.
7. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM antara lain mengenai, tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi.
8. Implementasi system akuntabilitas kinerja di Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *reward and punishment.*
9. Evaluasi atas program yang dilaksanakan belum berfokus pada efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan, dikarenakan penentuan program masih melihat pada struktur organisasi yang ada, belum mengacu pada kinerja utama. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakefektivan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja organisasi yang seharusnya.
10. Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun harus lebih ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut.
11. Pembangunan zona integritas belum cukup massif dan intensif dilakukan pada unit kerja yang memberikan layanan utama dan strategis, sehingga belum dapat

mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilyah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBMM)

12. Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan public sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar OPD. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survey tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

### 2.5.7.2 Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.55**
Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019* |
| Skor LPPD | 2,7765 | 2,9663 | n/a |
| Peringkat secara Nasional | 21 | 11 | n/a |

*Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2020*

### 2.5.7.3 Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2020 hasil survey kepuasan masyarakat oleh Lembaga Survey Internal mencapai 84 persen.

### 2.5.7.4 Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2020 ini hanya bisa memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 5 (lima) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda dikarenakan adanya Covid 19, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas berkerumun dan mengumpulkan banyak orang.

rekomendasi, 84 laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan, 29 kali pelaksanaan rapat Paripurna, melaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD.

## 2.6. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 2.6.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB gorontalo sebesar 61,98 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya.

**Tabel 2.56**

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

| Indikator | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp) | 18.176,57 | 23.234,27 | 25.432,28 | 25.860,31 |
| Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB | 61,48 | 61,58 | 61,81 | 61,98 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terdiri dari pengeluaran berupa

(1) makanan, minuman dan rokok
(2) Pakaian dan Alas Kaki
(3) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
(4) Kesehatan dan Pendidikan
(5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
(6) Hotel dan restoran
(7) Lainnya

#### 2.6.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal

dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.

**Tabel 2.57**
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2020

| Uraian | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
| Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB | 7.804,16 | 8.245,79 | 8.725,06 | 8.246,40 |
| Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK | 5.177,15 | 5.389,58 | 5.658,94 | 5.271,78 |
| Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK | 4,60 | 4,10 | 5,00 | 6,84 |
| Kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB | 22,60 | 21,85 | 21,21 | 19,76 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021*

Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,76 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 6,84 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.246,40 Miliar Rupiah.

### 2.6.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan It terhadap Ib yang digunakan untuk menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi ntp, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Mulai januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dari tahun dasar 2012=100 menjadi tahun dasar 2018=100. Kedua jenis indekstersebut merupakan komponen penting dalam penghitungan nilai tukar petani (NTP). Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan pola produksi, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan. Pada tahun dasar 2018=100 terjadi peningkatan cakupan jumlah komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib dibandingkan dengan tahun dasar 2012=100.

**Tabel 2.58**
Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo 2018-2020

| Indikator | Tahun | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| NTP | 104,03 | 103,44 | 99,43 |
| NTP – TP | 107,28 | 106,80 | 96,93 |
| NTP – H | 108,68 | 109,15 | 105,62 |
| NTP – R | 99,13 | 97,14 | 105,28 |
| NTP – T | 101,79 | 102,33 | 103,37 |
| NTN | 101,30 | 97,1 | 95,54 |

*NTP – H : Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura*
*NTP – R : Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat*
*NTP-T : Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan*
*NTN : Nilai Tukar Nelayan (NTN)*
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

NTP Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2020 sebesar 99,43, menurun dibanding NTP tahun sebelumnya sebesar 103,44. NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 96,93 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 105,62 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 105,28 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 103.37 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T), dan 95,54 untuk Subsektor Perikanan (NTN).

Peningkatan NTP tahunan terjadi pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Sub sektor Peternakan. Sementara jika dlihat dari NTP bulanan, NTP desember mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen dibandingkan NTP November 2020, yaitu dari 100,56 menjadi 101,13. Kenaikan NTP pada Desember 2020 disebabkan oleh naiknya indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pada indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Kenaikan NTP Desember 2020 dipengaruhi oleh naiknya NTP di empatsubsektorpertanian, yaitu NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,72 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,69 persen, subsektor peternakan sebesar 0,12 persen dan subsektor perikanan sebesar 2,81 persen. Sementara subsektor mengalami penurunan NTP yaitu, subsektor tanaman hortikultura sebesar -4,02 persen.

### 2.6.2 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.6.2.1 Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan,dan korupsi.

Berdasarkan laporan kasus kriminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2020, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo sebesar 1.415 tindak pidana.

**Tabel 2.59**
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, 2018-2020

| Kepolisian Resort | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Polda Gorontalo | 290 | 272 | 294 |
| Polres Kota Gorontalo | 1228 | 966 | 829 |
| Polres Gorontalo Utara | - | - | 229 |
| Polres Bone Bolango | 568 | 482 | 347 |
| Polres Pohuwato | 615 | 511 | 390 |
| Polres Gorontalo | 1195 | 1013 | 1415 |
| Polres Boalemo | 510 | 378 | 271 |
| **Provinsi Gorontalo** | **4406** | **3622** | **3775** |

*Sumber : Kepolisian Daerah Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka BPS 2021*

Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2020 sebanyak 3775 kasus, meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya 3622 kasus.

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

### 2.6.2.2 Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi para investor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realiasasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

Selain itu dalam rangka peningkatkan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan mobile service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat, dan pelaku usaha, serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah melaksanakan mobile service perizinan dan non perizinan di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari hasil mobile service perizinan di Kabupaten Pohuwato, sebanyak 30 izin berhasil diterbitkan yang terdiri dari 13 layanan izin bidang perikanan (SIUP/SIPI), 11 layanan izin bidang ketenagalistrikan (IO Genset), serta 6 layanan izin bidang perhubungan (izin trayek AKDP). Dari hasil mobile service di Kabupaten Gorontalo Utara melayani 26 izin yang terdiri dari izin genset, izin pengusahaan/pemakaian air tanah, SIUP SIPI, Trayek AKDP. Disamping itu, Tim Mobile Service juga memfasilitasi permasalahan antara pemilik Koperasi Perikanan dan Pengelola Kapal terkait pengurusan SIPI Perpanjangan 2 unit kapal.

Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun sistem yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).

### 2.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.6.3.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2.60**

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

| Wilayah | Rasio Ketergantungan | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 * |
| Kab. Boalemo | 50,80 | 50,50 | 46,22 | n/a |
| Kab. Gorontalo | 48,90 | 48,60 | 45,91 | n/a |
| Kab. Pohuwato | 49,60 | 49,30 | 43,04 | n/a |
| Kab. Bone Bolango | 49,00 | 48,80 | 44,40 | n/a |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Utara | | | | |
| Kota Gorontalo | 41,10 | 40,90 | 38,84 | n/a |
| Prov. Gorontalo | 48,20 | 47,90 | 44,32 | n/a |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Proyeksi SP2010)*
** Data belum tersedia*

Tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Provinsi Gorontalo sebesar 44,32, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, rasio ketergantungan mengalami penurunan. Meskipun penurunannya tidak signifikan, namun kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

### 2.6.3.2 Persentase Penduduk berumur 5 Tahun keatas dalam status Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

**Tabel 2.61**
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas berdasarkan status Pendidikan menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018

| Wilayah | Tidak/ Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | | | | | Tidak Sekolah Lagi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD/MI/ paket A | SMP/MTs/ Paket B | SMA/SMK/MA/ Paket C | Perguruan Tinggi | Jumlah yg masih sekolah | | |
| Boalemo | 4,53 | 14,09 | 5,79 | 3,73 | 1,52 | 25,13 | 70,34 | 100,00 |
| Gorontalo | 4,72 | 13,04 | 5,53 | 5,09 | 3,06 | 26,72 | 68,57 | 100,00 |
| Pohuwato | 5,49 | 13,64 | 4,50 | 5,46 | 1,13 | 24,73 | 69,78 | 100,00 |
| Bone Bolango | 3,50 | 12,66 | 4,97 | 5,16 | 4,64 | 27,43 | 69,07 | 100,00 |
| Gorontalo Utara | 4,13 | 14,10 | 5,79 | 3,73 | 1,92 | 25,54 | 70,32 | 100,00 |
| Kota Gorontalo | 3,19 | 11,99 | 4,48 | 3,94 | 8,01 | 28,42 | 68,39 | 100,00 |
| **Provinsi Gorontalo** | **4,30** | **13,12** | **5,19** | **4,62** | **3,60** | **26,53** | **69,17** | **100,00** |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Susenas Maret 2018)*

## 2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2020 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator

dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2020, diuraikan sebagai berikut :

# Tabel 2.62
## Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Interpretasi 2017 belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| **Fokus Kesejaheteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi % | 6,74 | 7,18 | 6,51 | 7,19 | 6,41 | 7,21 | -0,02 | < |
| 1.2 | IPM | 67,01 | 67,38 | 67,01 | 67,93 | 67,71 | 68,49 | 68,68 | = |
| 1.3 | PDRB per kapita ADHB (juta Rp) | 29.570.000 | 27.820.514,43 | 31.840.000 | 27,903,975.97 | 34.220.000 | 27.987.687,90 | | |
| 1.4 | Laju Inflasi Provinsi | 4,34 | 3,80 | 2,15 | 3,67 | 2,87 | 3,54 | | |
| 1.5 | Indeks Gini | 0,41 | 0,39 | 0,417 | 0,39 | 0,410 | 0,38 | 0,406 | < |
| 1.6 | Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun) | 1,78 | 1,82 | 1,75 | 2,02 | 1,94 | 2,27 | | |
| 1.7 | Persentase Penduduk Miskin | 17,14 | 16,59 | 16,81 | 16,09 | 15,31 | 15,61 | 15,59 | = |
| 1.8 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,28 | 3,65 | 4,03 | 3,44 | 4,06 | 3,23 | 4,28 | < |
| **Fokus Kesejahteraan Sosial** | | | | | | | | | |
| **2. Pendidikan** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Melek Huruf (%) | 99,44 | 99,86 | 99,44 | 99,90 | 99,86 | 99,94 | 99,89 | > |
| 2.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 7,28 | 7,20 | 7,46 | 7,35 | 7,69 | 7,50 | 7,82 | > |
| 2.3 | Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK | 78,11 | 76,50 | 78,71 | 76,88 | 78,75 | 77,25 | 77,3 | > |
| **3. Kesehatan** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Usia Harapan Hidup | 67,14 | 67,38 | 67,14 | 67,59 | 67,45 | 67,76 | 68,07 | > |
| **Fokus Seni Budaya** | | | | | | | | | |
| **4. Kebudayaan** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | < |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | |
| **Pelayanan Urusan Wajib** | | | | | | | | | |
| **5. Keluarga Berencana** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Angka Kelahiran Total *(Fertility Rate)* | 2,5 | 2,56 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,48 | 2,50 | > |
| **6. Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Kondisi Mantap Jalan (%) | 53,01 | 50,77 | 47,64 | 55,58 | 59,2 | 60,39 | 54,38 | < |
| 6.2 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) | 212,5 | 237,52 | 196,94 | 247,52 | 252,00 | 257,52 | 220,60 | < |
| **7. Perumahan** | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase cakupan akses air minum layak (%) | 73,38 | 75,21 | 79,20 | 77,09 | 86,43 | 79,02 | 94,16 | > |
| 7.2 | Persentase cakupan akses sanitasi layak (%) | 61,35 | 62,88 | 64,30 | 64,45 | 76,71 | 66,06 | 75,68 | > |
| 7.3 | Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%) | - | 100 | 100 | 80 | 86 | 60% | 65% | > |
| **8. Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | |

| No | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Interpretasi 2017 belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| **9. Sosial** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Penduduk Miskin (orang) | 200,910 | 196.876 | 188.300 | 193.902 | 186.030 | 191,033 | 185,31 | > |
| **11. Pemerintahan** | | | | | | | | | |
| 11.1 | Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat) | CC | B | B | B | B | B | B | = |
| 11.2 | Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja | CC | B | B | B | B | B | BB | > |
| 11.3 | Opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | = |
| 11.4 | Survey Kepuasan Masyarakat | 55 | 60 | 72,48 | 65 | 75,24 | 70 | 84 | > |
| 11.5 | Indeks Tata Kelola Pemerintahan | 5,71 | 5,8 | N/a | 5,89 | N/a | 5,98 | | = |
| **12. Ketahanan Pangan** | | | | | | | | | |
| 12.1 | Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | 65,5 | 65,8 | 65,8 | 66,1 | 69,23 | 66,4 | 75,6 | > |
| 12.2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 76,2 | 79,5 | 79,5 | 81,2 | 89,3 | 82,8 | 90,7 | > |
| **13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | | | | | | |
| 13.1 | Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal) | 0 | 100 | 24 | 97 | 32 | 94 | 5 | < |
| **14. Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | |
| 14.1 | Indeks e-government | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,80 | 3,41 | 3,82 | 3,18 | < |
| **15. Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | |
| 15.1 | Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00 | 0.66 – 0.94 | 0,54 – 0,88 | 0,54 – 0,88 | 0,48 – 0,83 | 0,48 – 0,83 | 0,47-0,77 | 0,48-0,83 | = |
| **Pelayanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | |
| **16. Pertanian** | | | | | | | | | |
| 16.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 106,0 | 103,32 | 104,03 | 104,09 | 103,44 | 104,86 | 99,43 | < |
| 16.2 | Persentase Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah) | 13.130,02 | 12.641,74 | 14.580,02 | 13.020,99 | 16.018,29 | 13.411,62 | 16.190,93 | > |
| 16.3 | Nilai Tukar Petani subsector peternakan (NTPT) | 102,21 | 103,22 | 101,30 | 103,52 | 98,21 | 103,82 | | < |
| **17. Kehutanan** | | | | | | | | | |
| 17.1 | Luas Lahan Kritis (Ha) | 1.087 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.860 | 1.000 | 178 | < |
| **18. Pariwisata** | | | | | | | | | |
| 18.1 | Wisatawan Mancanegara (orang) | 6.240 | 6,530 | 8.532 | 6,856 | 11.173 | 7.199 | 1.226 | < |
| 18.2 | Wisatawan Nusantara (orang) | 779.729 | 624.450 | 957.802 | 655.672 | 1.304.254 | 688.456 | 431.468 | < |
| **19. Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | |
| 19.1 | Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN) | 102,21 | 101 | 101,30 | 101,20 | 98,21 | 101,40 | 95,54 | < |

## 2.8 Permasalahan dan Rekomendasi

### A. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan. Permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi fokus pelaksanaan pembangunan kedepan. Beberapa target pembangunan yang belum tuntas, seperti kemiskinan, dan masalah pelayanan dasar yang sampai dengan saat ini menjadi focus perhatian utama pembangunan Provinsi Gorontalo. Disamping itu, delapan program prioritas pembangunan Provinsi: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, Pariwisata, Lingkungan, Agama dan Budaya, serta pemerintahan yang lebih melayani.

Permasalahan pada setiap Sasaran yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara**

1. Kurangnya promosi menggunakan media online dan pusat informasi
2. Destinasi wisatawan focus pada pengembangan Geopark
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, Pembangunan infrastruktur dasar dan TIK pada destinasi wisata.
4. Penataan amenitas pada destinasi wisata prioritas dan geopark (focus pada wisnus)
5. Inventarisasi Keragaman Geologi dan Geoherittage (Litbang)
6. Terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata yang bersertifikasi (*Guide, Tour Operator, dsb*)
7. Lomba Desa Wisata
8. Peningkatan Atraksi kearifan local
9. Belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti pelayanan kesehatan di destinasi wisata

**Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**

1. Mendorong Produksi dan Produktivitas Pertanian
2. Mendorong Produksi Perikanan dan Kelautan
3. Mendorong pasca panen pertanian
4. Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan (Pelaku Utama Pelaku, Usaha Pertanian dan korporasi petani)
5. Paket Korporasi Petani : identifikasi gapoktan dan komoditas, sosialisasi, pendampingan (Pembentukan kelembagaan yg berbadan hukum, penguatan manajemen kelembagaan, teknis budidaya, promosi dan pemasaran)
6. Penyediaan bibit dikurangi, realokasi ke peningkatan kapasitas penyuluh

**Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan**

1. Pengadaan Pupuk, Mekanisasi
2. Pengadaan Bibit ditiadakan
3. Mempertahakan populasi melalui IB (Inseminasi Buatan)
4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pembangunan Gudang)
5. Pekarangan Pangan Lestari (PPL)

**Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana**

1. Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang pada daerah bantaran sungai dan hulu
2. Percepatan RTRW
3. Penyusunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (dilaksanakan kolaborasi bidang Litbang dan BPBD)
4. Pelatihan SDM Kebencanaan (Fokus lokasi rawan banjir)
5. Desa Tangguh Bencana
6. Pelatihan Evakuasi Bencana
7. Mendorong peran multi sektor dalam penanganan bencana (CSR)
8. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
9. Pengelolaan Limbah B3
10. Penataan Manajemen Persampahan dan TPA (Evaluasi dan Pendampingan)
11. Amdal, KLHS, Adipura, dst
12. Pengendalian dan Pemanfaatan Galian C di badan sungai prioritas
13. Pengembangan Informasi Geologi untuk Pengembangan Geopark
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15. Penguatan Kapasitas Desa Rawan Bencana

**Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah**

1. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi (Talumolo-Buata-Duano, Wonggarasi-Taluditi, Tapa-Atinggola, Labanu-tolongio, Molombulahe-Bubaa, Tangkobu-Pentadu)
2. Perencanaan Jalan Provinsi
3. Penunjang Operasional Bus Perintis
4. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
5. Pembagunan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan
6. Penertiban Bidang Transportasi Jasa angkutan
7. Desa Internet (Untuk mendukung pariwisata)

9. Penyediaan Lahan untuk Infratruktur Strategis Nasional dan Provinsi (Perluasan Bandara Djalaludin, GORR Segmen 1-2, Destinasi Prioritas Botubarani, dan Secaba, Islamic Center, Blok Plan, dst)

**Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan**

1. Penguatan SDM, Pengawasan dan Pembinaan UKM dan Koperasi
2. Peningkatan kemitraan, memperluas promosi dan pemasaran usaha, sosialisasi kredit perbankan bagi UMKM
3. Pameran Dagang Internasional/Nasional ditiadakan
4. Perampungan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lanjutan)
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dekranasda)
6. Pembangunan UMKM Mart
7. Pembinaan terhadap pengusaha retail
8. Pemagangan Dalam Negeri
9. Balai Latihan Kerja (BLK)
10. Pengembangan Desa sesuai potensi (Desa Wisata, Smart Farming)
11. Revitalisasi Profil Desa
12. Pendampingan Desa Wisata

**Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**

1. Identifikasi
2. Penguatan terhadap Lulusan (Database Alumni, Sertifikasi kompetensi)
3. Penguatan terhadap Proses Pembelajaran (Silabi, Metode Belajar, Sarpras Pendukung, Layanan Konseling, Assessment peserta didik, Revitalisasi Perpustakaan, Language center, Pembinaan rutin kepada orang tua peserta didik)
4. Penguatan terhadap Manajemen Sekolah
5. Regulasi Perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus
6. Sarpras SLB (Asrama, dst)
7. Ketersediaan Guru SLB (Rekrutmen; spesifikasi ahli dalam mengajar anak berkebutuhan khusus)
8. Tunjangan/insentif Guru SLB
9. Dua SMA Unggulan di Dua Zona (Pilot Project)
10. Bantuan operasional sekolah dihentikan
11. Penguatan Prakerin
12. Rekrutmen guru produktif
13. Sertifikasi Kompetensi
14. Piloting persiapan BLUD SMK (Kesiapan Administratif, Business Plan, Unit Produksi)

16. Penguatan terhadap Guru
17. Buka 24/7
18. Pramuka, Paskibraka, Kirab Pemuda
19. Pembinaan Pemuda Bermasalah
20. Pembinaan Pemuda melalui organisasi kepemudaan
21. Latihan Dasar Kepemimpinan
22. Penguatan PPLP, KONI
23. Kemitraan dengan pendidikan tinggi dalam keberlanjutan pembinaan olahraga
24. Beasiswa atlit berprestasi

**Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat**

1. Upaya Promotif dan Preventif, Penguatan dan Pemerataan SDM Kesehatan (kegiatan promotif, preventif, dan kuratif), Akreditasi Puskesmas, Updating PISPK
2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
3. Sosialisasi penggunaan teknologi dan alat kesehatan non-mercury
4. Pembinaan karakter SDM Puskesmas
5. Sarpras dan SDM
6. Penguatan Manajemen Rumah Sakit
7. Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Sistem Rujukan Tingkat Lanjut
8. Penguatan Labkesda
9. Kemitraan dalam standarisasi fasilitas kesehatan mandiri
10. Dukungan dan Fasilitasi terhadap pengembangan RS Tombulilato (Skema Hibah Barang/Uang/Penguatan Kapasitas)
11. Penguatan Germas (Isu Lintas Sektor)
12. Penguatan Stunting (Isu Lintas Sektor)
13. Penguatan KKS (Isu Lintas Sektor)
14. Identifikasi kesiapsiagaan (SDM, Kesiapan masyarakat, Sarpras, dst)
15. Buffer stock obat-obatan, Sarana prasarana, ketersediaan SDM, Puskesmas Pembantu (Pustu)
16. Mendorong restrukturisasi OTK Dinas Kesehatan dengan menempatkan urusan KB dikelola oleh satu Bidang
17. Pemanfaatan Grand Design Kependudukan
18. Orientasi KB pasca melahirkan
19. Dukungan terhadap Pelatihan Pra Nikah
20. Penguatan Koordinasi dalam rangka implementasi RA Kependudukan

**Sasaran 9 : Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq**

1. Identifikasi (Delineasi Kawasan)
2. Pelestarian budaya yang sesuai dengan geoheritage

**Sasaran 10 : Menurunnya tingkat kemiskinan**

1. Kemandirian Pangan (Rumah Pangan) di setiap mahyani
2. BOSDA atau Bansos Pendidikan (Kebutuhan pendidikan non-keperluan sekolah)
3. Penguatan pengelolaan Database Fakir Miskin (dorong pemanfaatan e-JPS)
4. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS
5. Baksos NKRI per bulan (Total 12 Bulan)
6. Perahu Fiber 3 GT bermesin tempel (Target Keluarga Miskin)
7. Penyediaan Motor Cool Box untuk masyarakat dikurangi
8. Penyediaan prasarana budidaya perikanan air laut dan tawar (danau)

**Sasaran 11 : Meningkatknya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman**

1. Penyediaan Mahyani
2. Pengurangan Kawasan Kumuh
3. Air Minum dan Sanitasi
4. Drainase pemukiman, persampahan, jalan kawasan pemukiman (Kawasan Kumuh)

**Sasaran 12: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih**

1. Peningkatan kualitas budaya kerja
2. Penataan kembali Organisasi PD
3. Pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta)
4. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran
5. Penataan jabatan fungsional tertentu (JFT)
6. Pelatihan Assessor
7. Penyelenggaraan Diklat Teknis terpusat
8. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kediklatan
9. Dukungan pelatihan untuk Pengelola Barang/Jasa
10. Perbaikan tata kelola perizinan
11. Penguatan SDM teknis

**Permasalahan Daerah yang Berkaitan Dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan. Permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan

belum tuntas, seperti kemiskinan, dan masalah pelayanan dasar yang sampai dengan saat ini menjadi focus perhatian utama pembangunan Provinsi Gorontalo. Disamping itu, delapan program prioritas pembangunan Provinsi: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, Pariwisata, Lingkungan, Agama dan Budaya, serta pemerintahan yang lebih melayani.

Permasalahan dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut :

**Permasalahan pada Misi Pertama :**

***Kepariwisataan.*** Misi pertama ini menitikberatkan pada pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang cukup strategis dan memadai. Namun demikian pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah :

1. daya saing pariwisata yang masih rendah,
2. Kurangnya konektivitas pariwisata
3. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
4. belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, dalam hal ini infrastruktur, sarana prasarana pendukung untuk melayani wisatawan
5. masih kurangnya amenitas di destinasi wisata.
6. belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata,
7. pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif,
8. terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata, seperi pemandu wisata bahasa asing.

Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah :

a. menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata,
b. meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi.
c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendukung pariwisata.

***Pertanian (secara luas).*** Selain pengelolaan pariwisata, misi ini diorientasikan pada pengelolaan Sumber daya alam pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada permasalahan diantaranya menurunnya produktivitas disektor pertanian khusus untuk komoditi padi dan jagung. Untuk itu tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas pertanian, serta menjaga stabilisasi harga kebutuhan pra dan pasca panen yang implikasinya pada peningkatan Kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan Nilai Tukar Petani.

Tantangan disektor pertanian lainnya adalah tidak ada surplus usaha yang berarti bagi

PDRB sub sektor pertanian yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi dihampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk seiring berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin menyempit.

Dalam rangka pengembangan sektor pertanian secara luas seperti peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

**Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam,** persoalan lingkungan hidup dan bencana alam merupakan masalah global yang sifatnya universal. Masalah lingkungan hidup dapat terjadi karena dinamika alam itu sendiri maupun proses interaksi dengan manusia. Berbagai pemasalahan lingkungan hidup dan kebencanaan antara lain

1. Dampak perubahan iklim seperi pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola alami musim dan curah hujan. Akibatnya produksi pertanian sering gagal panen, peluang terjadinya kebakaran hutan sangat besar karena musim kemarau berkepanjangan, serta banjir dan lainnya. Perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo.
2. Masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan

3. Belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir.
4. Pembuangan dan pengelolaan Limbah dan sampah. Pencemaran laut dan makin meningkatnya sampah plastik yang disebabkan oleh Sampah Rumah Tangga dan Limbah Industri menjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan lingkungan.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

***Permasalahan pada Misi II :***

***Infrastruktur.*** Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat. Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan akses pendidikan, kesehatan, maupun sentra perekonomian. Pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan percepatan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrasrtuktur.

***Perhubungan.*** Pembangunan sector perhubungan dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara yang berkualitas untuk pelayanan transportasi maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup darah, nasional maupun internasional.

Permasalahan yang dihadapi sektor perhubungan, antara lain (i) Masih tingginya tingkat kejadian kecelakaan khususnya pada transportasi jalan (ii) Masih tingginya kesenjangan antar daerah dan minimnya konektifitas transportasi, khususnya dalam pergerakan barang dan jasa; (ii) masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum; (iii) belum efisiennya angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama di pelabuhan anggrek dan pelabuhan tilamuta; dan (iv) masih rendahnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan yang ada.

***Infrastruktur Pertanian.*** Rencana pembangunan Bendungan Bulango Ulu menjadi

ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

***Pertambangan dan Energi.*** Permasalahan energi dan Sumberdaya Mineral di Provinsi Gorontalo adalah (i) masih terbatasnya potensi dan pasokan/suplai energi (ii) Masih belum meratanya pasokan energi listrik, (iii) masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai ketentuan.

***Perumahan dan Pemukiman.*** Permasalahan dibidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya adalah : (i) terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, (ii) Masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di perdesaan dengan kondisi rumah tidak layak huni, (iii) Masih banyaknya permukiman kumuh di perkotaan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman.

***Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih.*** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga tahun 2019, persentase cakupan akses sanitasi yang layak mencapai 76,71 % dan cakupan layanan air minum sebesar 86,43 persen. Kondisi ini sudah cukup baik, namu masih jauh dari target pemerintah melalui Program 100 0 100 (100 % akses air minum, 0 % luas kawasan kumuh, dan 100% sanitasi : air limbah, persampahan dan drainase).

Ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo dan belum memiliki sanitasi yang baik.

Permasalahan dalam pelayanan akses sanitasi dan air bersih diantaranya adalah

(i) Pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas sebagian besar masih berada di kawasan perkotaan dengan target capaian air minum aman sebesar 100 %,

(ii) Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) secara lintas kabupaten/kota (regional),

(iii) Rendahnya cakupan pelayanan sanitasi layak dalam rangka mendukung target akses 100 %, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(iv) Belum terfasilitasinya pengelolaan sanitasi secara lintas Kabupaten/Kota.

**Perekonomian,** Perekonomian Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami pelambatan. Tahun 2019 Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo berada di angka 6,41 persen. Permasalahan paling mendasar dalam perkonomian adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Gorontalo masih bertumpu pada sektor Primer, yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca dan alam. Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi pertumbuhan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa perusahaan, pertambangan dan sector pariwisata masih perlu menjadi perhatian, pembangunan sudah harus mendorong meningkatnya kinerja sektor-sektor sekunder.
2. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.
3. Daya saing produk menurun, yang menyebabkan ekspor mengalami penurunan, karena permintaan global menurun. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing pertanian semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi pertanian.
4. Pertumbuhan ekonomi belum didukung dengan pemerataan wilayah.

   Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit. Ketersediaan sumber daya alam belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

   Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

**Investasi Daerah,** struktur perekonomian dibentuk oleh investasi pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah

penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal-hal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

**Pengembangan UMKM dan Koperasi,** Permasalahan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM diantaranya (i) Rendahnya daya saing Koperasi dan UKM, (ii) Rendahnya produktivitas koperasi dan UKM (iii) Minimnya ketersediaan bahan baku, (iv) Lemahnya SDM koperasi dan uKM. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif, (v) Lemahnya kelembagaan koperasi, (vi) Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM, (vii) Minimnya akses pemasaran bagi koperasi dan UKM. Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari *pseudo-entreprenuer* menjadi *pure entreprenuer*; memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku *Agent of Development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

***Permasalahan pada Misi IV :***

**Pendidikan.**Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM disemua jenjang pendidikan. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal, pemberian *soft skill* untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kesehatan,** permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas

penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

**Sosial,**

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan

Selain itu Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan sosial.

**Kemiskinan**. Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun angka ini masih berada diatas rata-rata Nasional, dan 5 tertinggi se-Provinsi di Indonesia. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

**Permasalahan pada Misi V :**

**Pemerintahan Umum,** dalam upaya optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan baik dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia, serta mekanisme prosedur pelaksanaan pembangunan serta memperbaiki standar pelayanan. Hal ini dilakukan dalam upaya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka pelayanan pada masyarakat yang masih mengemuka adalah:

1. Perbaikan Pelayanan Publik melalui prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas dengan Revolusi Mental;
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
3. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah;
4. Kualitas aparatur daerah belum memadai;
5. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;
6. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;
7. Jumlah peneliti belum memadai;
8. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;
9. Tenaga fungsional perlu ditingkatkan;
10. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia;

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2021 dan Perkiraan 2022

Perkembangan kondisi makro ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 berada pada kontraksi yang cukup dalam, dimana sepanjang Provinsi ini berdiri untuk pertama kalinya Pertumbuhan Ekonomi berada pada capaian minus, yaitu -0,02%. Capaian tersebut lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada -2,07 yoy. Pandemi Covid-19 telah menghantam hampir semua sektor, pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) memaksa aktivitas masyarakat seperti pendidikan, ritual keagamaan, perkumpulan sosial menjadi sangat terbatas dan akibatnya roda perekonomian berjalan tersendat.

Semua proyeksi, rencana dan pelaksanaan kegiatan yang selama waktu normal dibuat harus menyesuaikan dengan pandemi yang melanda, refocusing dan realokasi anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun DAK dilakukan untuk mendukung penanganan Covid-19 yang dialihkan menjadi Jaring Pengaman Sosial, bantuan untuk masyarakat miskin dan stimulus perekonomian. Pemerintah dibuat memilih langkah yang paling tepat dimana harus bisa menjaga pandemi tidak terlalu menyebar dan roda perekonomian tetap bisa berjalan.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi Gorontalo tahun 2020 terkontraksi minus 0,02 persen, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,40 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami konstruksi tertinggi sebesar minus 6,49 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar minus 6,94 persen.

Struktur Ekonomi Gorontalo Tahun 2020 dari sisi produksi didominasi oleh Kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,98 persen.

**Kinerja Sektor**

*Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha masih didominasi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2020. Kategori ini memiliki pertumbuhan negatif tertinggi sebesar minus 0,60 persen. Time series untuk capaian dari 3 tahun ke belakang, sumber pertumbuhan kategori ini pada 2018 sebesar 2,81%, 2019 sebesar 2,37% dan 2020 sebesar -0,60%. Dilihat dari distribusi PDRB ADHB sektor ini tetap berada pada kisaran 38%. Kontraksi pada sektor ini dikarenakan panen raya jatuh pada triwulan

III sehingga untuk triwulan IV masih pada masa tanam dan nantinya hasil panen akan terhitung pada Triwulan I tahun 2021. Dari sisi pegeluaran, pertumbuhan ekonomi TW IV-2020 terhadap kumulatif TW-2019 mengalami kontraksi pada hampir semua komponen, kecuali Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Kontraksi terdalam ada pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mencatatkan minus 6,84% diikuti oleh komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar -2,45% serta komponen PK-LNPRT minus 1,26%.

*Jasa Keuangan*

Kategori Jasa Keuangan merupakan salah satu dari 3 sektor yang masih tumbuh positif di Tahun 2020, selain pengadaan listrik dan gas dan informasi dan komunikasi. Meskipun ketiga sektor tersebut tumbuh positif tetapi karena kontribusi pada PDRB masih memiliki share yang kecil, hal tersebut tidak bisa mengangkat kontraksi perekonomian Gorontalo menjadi positif. Pada tahun 2020 sektor ini tumbuh 13,46% dengan distribusi 4,48%. Sedangkan untuk Triwulan IV sumber pertumbuhan jasa keuangan menempati posisi paling tinggi untuk pertumbuhan dengan 12,98% dibandingkan TW IV 2020 *(yoy)*. Kinerja sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan disebabkan karena pada masa pandemi di tahun 2020 banyak sektor lapangan kerja yang mengalami perlambatan, beberapa harus ada yang merumahkan karyawan ataupun cuti tanpa dibayar sehingga banyak masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan sehingga mengakses pinjaman melalui perbankan dan jasa keuangan lainnya.

**Gambar 3.1**

Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha

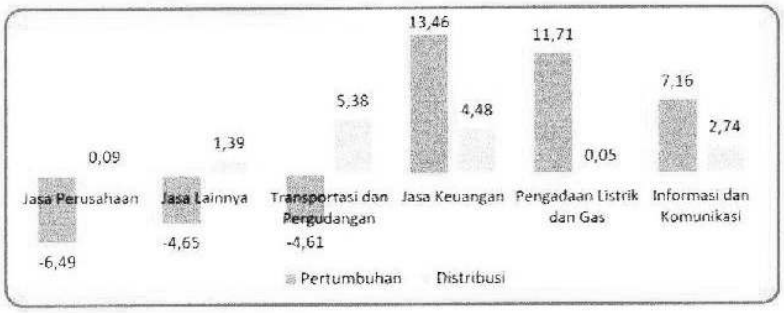


*Sumber : BPS, 2020*

*Pengadaan Listrik dan Gas*

Kategori Listrik dan Gas menempati urutan kedua kumulatif Tahun 2020 yang memiliki sumber pertumbuhan terbesar dan mencatatkan nilai positif dengan nilai 11,71% tetapi dengan share yang masih sangat kecil yaitu 0,05% dari total distribusi PDRB. Sektor ini mencatatkan hasil yang progresif tercatat dari 2018 laju pertumbuhannya selalu naik dari 6,98%, 7,41% dan terakhir 11,71%. Kontribusi positif pada sektor ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan masa awal PSBB di Gorontalo sebagian besar SKPD non pelayanan publik (sektor kesehatan dan keuangan) mewajibkan WFH (Work From Home) bagi pegawainya, anak – anak sekolah mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi melakukan pembelajaran jarak jauh dengan Daring (Dalam Jaringan) sehingga sebagian besar aktivitas masyarakat berada di rumah. Hal ini menyebabkan konsumsi masyarakat akan listrik dan LPG

meningkat karena peralatan yang digunakan hampir semuanya menggunakan listrik dan masyarakat cenderung lebih nyaman untuk mengkonsumsi masakan yang dibuat sendiri jika dibandingkan membeli dari luar.

*Informasi dan Komunikasi*

Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi ditunjang oleh aktivitas WFH oleh masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta aktivitas yang semula tatap muka dialihkan menjadi daring melalui aplikasi online yang membutuhkan jaringan internet. Banyak permintaan pulsa data dan pemasangan jaringan internet rumah baru untuk menunjang kegiatan tersebut. Sektor ini tumbuh 7,16% dibandingkan tahun lalu dengan share pertumbuhan 2,74% dari total PDRB Provinsi. Sektor ini tumbuh hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yang tumbuh 3,75% dan 3,26%.

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo meningkat jika dibandingkan pada Agustus 2019, dari yang semula 3,76% menjadi 4,28%. Fenomena ketenagakerjaan yang terjadi pada rentang waktu tersebut, antara lain pemberlakuan pembelajaran dalam jaringan, PT Multi Nabati yang kembali beroperasi, luasan panen tanaman padi dan jagung yang turun lebih dari 5 ribu hektar, jumlah kamar hotel yang terjual turun 53,78% dibanding periode sama tahun sebelumnya, pajak restoran turun 18% dan penumpang angkutan udara turun 80,10%, laut 98,94% dan darat 63,28%. Akumulasi dari kesemua hal tersebut merupakan akibat dari pelaksanaan PSBB untuk mencegah dan menekan laju penularan virus Covid-19, sehingga sektor pendukung dari sektor utama tersebut terutama UMKM dan petani mengalami tekanan hebat. Masyarakat dipaksa untuk segera beradaptasi dengan pandemi dan mencari alternatif pekerjaan bagi mereka yang mengalami cuti tanpa dibayar ataupun pemutusan hubungan kerja. Jika dilihat dari faktor TPT perkotaan dan pedesaan, TPT Perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yang semula Agustus 2019 berada pada angka 5,28% pada Agustus 2020 melonjak menjadi 6,42%.

**Indeks Gini**

Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo selama periode 3 tahun terakhir menunjukkan stagnansi penurunan dari target RPJMD yang sudah dipatok sebesar 0,36 pada akhir periode. Pada tahun 2020 Indeks Gini Gorontalo sebesar 0,406, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020. Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,390 mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan menurun sebesar 0,009 poin dari September 2019 sebesar 0,399. Gini Rasio di Perdesaan pada September 2020 sebesar 0,391, turun dibanding Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,392 dan dibanding Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,393. Dampak Covid-19 ternyata tidak hanya berdampak pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, tetapi juga lebih mempengaruhi masyarakat kalangan atas. Hal tersebut terlihat dari penurunan Gini Rasio yang berarti ketimpangan antara masyarakat miskin dan kaya semakin berkurang

**Kemiskinan**

Kemiskinan selalu dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, dimana dalam pengukurannya BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi Kebutuhan Dasar (Basic Need Approach) dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2020 sebesar 15,59%, naik sebesar 0,37 poin jika dibandingkan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 185,32 ribu jiwa, meningkat sebanyak lebih kurang 290 jiwa terhadap Maret 2020. Jika dibandingkan Garis Kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan maka garis kemiskinan di Perkotaan September 2020 sebesar Rp. 375.740 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di Perdesaan sebesar Rp. 373.911 per bulan. Faktor – faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan antara lain pada pertumbuhan PDRB TW III 2020 terhadap TW III 2019 kontraksi yang mencapai 0,07% jika dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,71%. Selain itu NTP pada bulan Juli sampai dengan September 2020 selalu berada di bawah angka 100, sehingga sangat berpengaruh pada share sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada PDRB menurut Lapangan Usaha. Selain itu pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 4,28 persen akibat dampak Covid-19 sehingga banyak para pekerja yang menjadi penganggur, sementara tidak bekerja dan bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorter hours) yang otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan.

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2021 dan 2022

***Global***, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Global pada tahun 2021 sebesar 4%, jika dibandingkan dengan laju perekonomian global tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%. Kinerja perekonomian dunia tahun ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan proyeksi sebelum Covid-19 yang diperkirakan masih tumbuh di kisaran 5%. Masih tingginya angka covid-19 di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Amerika Selatan seperti Brasil dan beberapa negara Eropa yang kembali melakukan lockdown di awal tahun ini mengisyaratkan bahwa ekonomi belum akan kembali pulih dalam waktu yang dekat. Di sisi lain masih terdapat optimisme dalam menghadapi pandemi ini, contoh Cina yang sudah membuka kembali baik jalur perdagangan maupun turis, Wuhan yang pada saat pandemi merupakan episentrum utama Korona telah merayakan tahun baru dengan kegiatan massal dimana hampir seluruh negara di dunia melarang warganya untuk keluar rumah dan berkerumun. Contoh yang lain adalah India dengan tracing, testing dan treatment nya yang begitu massif bisa menekan laju penularan dan membuat landai kurva penyebaran virus korona di negara tersebut.

Kembali bergeliatnya dua negara adidaya ekonomi tersebut memberikan secercah harapan bahwa kita sedang dalam masa recovery perekonomian. Selain itu pada Bulan Februari 2020 tercatat rebound pada Harga Minyak Dunia, yang menunjukkan bahwa sektor Industri, Manufaktur dan Pengolahan

dunia sudah mulai bangkit. Beberapa negara sudah mencabut status lockdown, meskipun ada beberapa pembatasan bagi warga negara tertentu yang belum bisa untuk masuk ke beberapa negara yang dianggap belum bisa mengatasi wabah di negara asalnya. Resesi global diproyeksi hanya akan terjadi pada 2020, untuk tahun 2021 perekonomian dunia sudah akan mulai tumbuh meskipun masih lambat

Angka 3,8% merupakan nilai pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan oleh Bank Dunia untuk tahun 2022 pada perekonomian global. Meski mengalami pemulihan, prospek perekonomian global ke depan masih diliputi ketidakpastian. Namun proses vaksinasi serta pengelolaan pandemic yang efektif menjadi kunci utama dalam pemulihan ekonomi ke depan. Menurut Lembaga internasional tersebbut negara maju diproyeksi bakal pulih dan tumbuh di kisaran 3,3% dan sebesar 3,5% di tahun 2022. Sedangkan untuk negara berkembang pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 5% di 2021 dan melemah di 4,2% di 2020 yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi China yang akan rebound pada tahun ini. Sebagai catatan untuk tahun 2020 ini negara Asia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif hanyalah China dan Vietnam, China dengan latar belakang manufaktur dan economy recovery yang cepat didukung oleh sumber daya yang besar, sedangkan Vietnam dengan keberhasilan Lockdown dan pembatasan sosial serta kemampuan dalam mengendalikan wabah Covid-19 ini.

***Ekonomi Nasional,*** Perekonomian Indonesia mengalami resesi pada TW IV karena pada 2 Triwulan sebelumnya mengalami kondisi minus selama dua kali berturut – turut. Secara *yoy* maka untuk Tahun 2020 Indonesia secara akumulatif nilai Pertumbuhan Ekonomi berada pada minus 2,07%. Lapangan Usaha yang masih mencatatkan pertumbuhan positif hanyalah sektor Pertanian, sektor lain seperti Pertambangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan lainnya mengalami pertumbuhan minus dibanding tahun sebelumnya. Jika melihat Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran, hanya Konsumsi Pemerintah saja yang mengalami Pertumbuhan Positif sebesar 1,94%, sedangkan sektor lain Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, PMTB, Ekspor Impor sama mengalami kontraksi. Jika melihat dari status Upper Middle Income Country, karena adanya pandemi Covid-19 ini Indonesia harus turun status dan peringkatnya menjadi Lower Middle Income Country. Kontaksi sebesar 2,07% merupakan yang pertama kalinya semenjak terjadinya Krisis Ekonomi 1998.

Bank Indonesia memperkirakan untuk 2021 outlook Pertumbuhan Ekonomi akan membaik dengan kisaran 4,8 – 5,8%. Pertumbuhan ekspor akan memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, sektor pariwisata yang mulai bergeliat akan memberikan kontribusi yang positif juga pada pembentukan PDRB meskipun laju kenaikannya tidak akan bisa setinggi seperti sebelum pandemic. Tetapi untuk Kuartal I 2021 diperkirakan masih minus, mengingat di Jawa yang memegang lebih dari 55% share Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro. Selain PPKM ada kombinasi lain yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi TW I yaitu kecenderungan inflasi awal tahun yang meningkat dan belum optimalnya belanja pemerintah. Kuncinya adalah vaksinasi menyeluruh kepada warga sehingga Herd Immunity akan bisa terbentuk dan seluruh aspek sosial ekonomi bisa berjalan seperti

semula. Optimisme ini juga didasari oleh *Low Based Effect* pembentukan PDB, dimana faktor pembanding pada tahun sebelumnya sangat rendah, sehingga dengan pembentuk kenaikan sedikit dari normal saja akan memberikan nilai pertumbuhan PDB yang tinggi.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 oleh IMF lebih optimis jika dibandingkan dengan Bank Dunia dengan mematok angka 6% sedangkan Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan PDB RI tahun depan di angka 4,8%. Hal ini didasari pada kebijakan makro ekonomi yang akomodatif dan dinamis seperti masih adanya alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan menggenjot sektor investasiyang memiliki dampak besar yang salah satunya adalah infrastruktur. Dari sisi moneter BI telah melakukan penurunan suku bunga acuan serta ikut berpartisipasi dalam menambal deficit anggaran lewat pembelian surat utang pemerintah. Era suku bunga rendah, tren pelemahan dolar AS dan imbal hasil berinvestasi di negara – negara maju yang rendah akan memicu adanya inflow ke negara berkembang, hal ini akan turut mendongkrak harga asset keuangan seperti saham. Selain itu pembukaan KEK baru di Batang, investasi Tesla untuk pembuatan mobil listrik serta penyediaan nikel dari tambang di Morowali Sulteng diperkirakan akan sangat bisa memberikan kontribusi positif pada perekonomian Indonesia pada 2022. Efek dari RUU cipta kerja juga akan mengundang investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan deregulasi kebijakan yang selama ini tumpang tindih dan birokrasi yang berbelit – belit.

***Ekonomi Gorontalo,*** Ekonomi Gorontalo pada TW I 2020 masih mencatatkan nilai yang positif, yaitu sebesar 4,06% hal ini didorong oleh musim panen yang jatuh pada TW IV 2019 dan dampak Covid belum berdampak pada TW I 2020. Berturut – turut setelahnya yaitu kontraksi minus 0,27, minus 0,07 dan minus 0,02. Resesi global yang melanda dunia dan juga Indonesia dirasakan oleh masyarakat Gorontalo, meskipun tidak separah dengan daerah lain jika dibandingkan dengan Jawa, Sumatra dan Kalimantan mengingat share terbesar PDRB Gorontalo adalah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Skenario optimis Perekonomian 2022 Gorontalo adalah dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat dengan pengalokasian APBN dan APBD yang pemanfaatannya tepat sasaran, kelanjutan pembangunan GORR, Revitalisasi Danau Limboto, Pembangunan Bolango Ulu dan SPAM Regional untuk Proyek Strategis Nasional yang ada di Gorontalo. Selain itu vaksinasi massal sudah selesai dilakukan di 2021 sehingga perekonomian mulai stabil dan normal. Dari kinerja sektor meningkatnya sektor daerah untuk komoditi jagung, molase, kelapa dan herbal diharapkan akan menopang pembentukan PDRB Gorontalo.

Berdasarkan kajian dari Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, ada sektor aman dan prioritas pendorong pemulihan ekonomi nasional dan Gorontalo. Berdasarkan kajian tersebut telah didapatkan sektor – sektor ekonomi prioritas dengan kontribusi PDB / ekspor yang tinggi. Asesment untuk Gorontalo adalah dengan melihat risiko penularan dan dampak ekonomi, LU pertanian dan Perdagangan Besar dan Eceran sangat potensial untuk dilakukan percepatan pemulihan terlebih dahulu. Di sisi lain kedua sektor tersebut juga merupakan sektor penyerap terbesar tenaga kerja di Gorontalo. Dengan demikian kembali aktifnya kedua sektor ekonomi tersebut diharapkan dapat

berdampak positif bagi pemulihan ekonomi Gorontalo dan ketenagakerjaan dengan risiko Kesehatan yang minimal.

Selain hal di atas perlu adanya sektor ekonomi prioritas yang didorong ke ekspor mengingat perbaikan perekonomian global yang diperkirakan akan terus berlanjut. Komoditas yang ada di Gorontalo yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah ekspor Tuna, farmasi herbal dan pariwisata yang akan booming kembali jika pandemi ini telah selesai, mengingat hampir semua warga terpaksa berada di rumah sepanjang 2020 dan masih adanya pembatasan di beberapa wilayah di 2021.

Dengan melihat kondisi global, proyeksi kondisi Indonesia secara umumnya dan langkah kebijakan pemerintah daerah pada tahun depan, maka prediksi pada tahun 2021 – 2022 Prospek Pertumbuhan Ekonomi akan menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sekarang. Skenario tersebut adalah vaksinasi massal sudah dilakukan menyeluruh kepada mereka yang memenuhi kriteria dan covid-19 sudah bukan menjadi alasan utama segala macam pembatasan sosial dan ekonomi, maka Indikator Makro Ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel. 3.1**
**Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2021 - 2022**

| Indikator | Proyeksi | |
|---|---|---|
| | 2021 | 2022 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 3,97 | **6,30 – 7,00** |
| Persentase Angka Kemiskinan | 15,01 | **14,91 – 14,33** |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,22 | **4,11 – 3,91** |
| Indeks Gini | 0,41 | **0,412 – 0,391** |
| IPM | 69,05 | **69,62** |

*Sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo (diolah)*

## 3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan

pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun Anggaran 2018 S/D 2022**

| No | Uraian | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **384.435.306.402,61** | **433.427.781.398,85** | **412.734.907.848,50** | **405.055.721.419,00** | **465.814.079.631,85** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 350.425.924.306,00 | 387.400.916.778,00 | 352.172.952.189,00 | 343.683.585.030,00 | 395.236.122.784,50 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 11.499.494.159,00 | 22.284.470.358,00 | 6.516.583.443,00 | 11.098.089.991,00 | 12.762.803.489,65 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 4.347.392.785,00 | 5.679.904.143,00 | 3.236.454.894,00 | 3.236.454.894,00 | 3.715.023.128,10 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 18.162.495.152,61 | 18.062.490.119,85 | 50.814.917.322,50 | 47.043.591.504,00 | 54.100.130.229,60 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.415.182.154.507,00** | **1.505.443.391.824,00** | **1.440.429.255.862,00** | **1.474.169.883.000,00** | **1.474.169.883.000,00** |
| 4.2.01.01 | Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan | *1.398.182.154.507,00* | *1.495.154.617.824,00* | *1.408.008.097.862,00* | *1.434.427.103.000,00* | *1.434.427.103.000,00* |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum - DBH | 21.620.422.061,00 | 15.785.726.900,00 | 19.918.910.232,00 | 19.505.759.000,00 | 19.505.759.000,00 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum - DAU | 1.006.924.707.000,00 | 1.043.126.752.000,00 | 944.270.446.000,00 | 940.639.321.000,00 | 940.639.321.000,00 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus - DAK | 369.637.025.446,00 | 436.242.138.924,00 | 443.818.741.630,00 | 474.282.023.000,00 | 474.282.023.000,00 |
| 4.2.02.02 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | *17.000.000.000,00* | *10.288.774.000,00* | *32.421.158.000,00* | *39.742.780.000,00* | *39.742.780.000,00* |
| 4.2.02.02.02 | Dana Penyesuaian | 17.000.000.000,00 | 10.288.774.000,00 | 32.421.158.000,00 | 39.742.780.000,00 | 39.742.780.000,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | **584.240.387,00** | **2.205.596.323,00** | **5.981.041.500,00** | **4.240.539.000,00** | **4.240.539.000,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 584.240.387,00 | 2.058.820.031,00 | 5.121.041.500,00 | 2.240.539.000,00 | 2.240.539.000,00 |
| 4.3.02 | Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | 146.776.292,00 | 860.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN DAERAH** | **1.800.201.701.296,61** | **1.941.076.769.545,85** | **1.859.145.205.210,50** | **1.883.466.143.419,00** | **1.944.224.501.631,85** |

Pada tahun 2020 komponen pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Ini diakibatkan oleh adanya pandemic Corona Virus Disease atau Covid-19 yang membuat komponen pendapatan mengalami refocusing dan terus berimbas pada tahun 2021. Begitupun pada komponen belanja dana transfer Dana Alokasi Umum mengalami penurunan, selain itu pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer terus mengalami kenaikan. Dari berbagai komponen pendapatan asli daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan.

### 3.2.2 Arah Kebiakan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada visi, misi dan program prioritas sebagaimana yang terkandung didalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan *money follow program* (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, mengacu kepada visi **"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera".** Realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun Anggaran 2018 s/d 2022**

| No | JUMLAH | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **1.394.073.603.686,44** | **1.498.377.121.331,41** | **1.351.126.306.053,31** | **1.514.345.717.050,48** | **1.509.492.665.692,78** |
| a | Belanja Pegawai | 591.082.116.703,00 | 724.616.535.883,00 | 722.371.240.522,00 | 609.488.097.817,92 | 652.701.591.153,78 |
| b | Belanja Barang dan Jasa | 557.467.166.522,00 | 449.360.525.132,41 | 349.438.278.841,31 | 542.921.556.799,56 | 490.140.021.230,00 |
| c | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| d | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| e | Belanja Hibah | 184.775.280.000,00 | 255.828.176.500,00 | 265.622.696.840,00 | 332.625.616.319,00 | 334.788.183.429,00 |
| f | Belanja Bantuan Sosial | 60.749.040.461,44 | 68.571.883.816,00 | 13.694.089.850,00 | 29.310.446.114,00 | 31.862.869.880,00 |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **280.499.513.762,54** | **280.120.727.914,31** | **183.356.206.243,36** | **157.273.374.210,00** | **149.095.156.389,00** |
| a | Belanja Tanah | 21.189.546.875,00 | 15.710.537.405,00 | 9.942.249.625,00 | 8.600.000.000,00 | 8.600.000.000,00 |
| b | Belanja Peralatan dan Mesin | 68.255.339.467,00 | 76.780.122.390,00 | 68.307.750.119,00 | 42.760.997.471,00 | 33.942.459.532,00 |
| c | Belanja Bangunan dan Gedung | 35.702.437.466,18 | 56.243.969.289,97 | 59.826.323.953,66 | 13.823.492.130,00 | 16.205.218.130,00 |
| d | Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi | 145.956.437.977,36 | 122.957.818.902,34 | 44.338.493.833,70 | 90.751.792.322,00 | 88.946.792.322,00 |
| f | Belanja Aset Tetap Lainnya | 9.395.751.977,00 | 8.428.279.927,00 | 941.388.712,00 | 1.337.092.287,00 | 1.400.686.405,00 |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **2.350.824.100,00** | **1.316.964.750,00** | **46.581.241.989,00** | **11.000.000.000,00** | **11.000.000.000,00** |
| | Belanja Tidak Terduga | 2.350.824.100,00 | 1.316.964.750,00 | 46.581.241.989,00 | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **151.241.037.931,00** | **159.644.177.543,00** | **210.315.094.888,00** | **206.233.535.330,52** | **249.636.679.550,08** |
| a | Belanja Bagi Hasil | 147.559.636.018,00 | 157.669.805.172,00 | 190.579.789.660,00 | 202.233.535.330,52 | 245.636.679.550,08 |
| b | Belanja Bantuan Keuangan | 3.681.401.913,00 | 1.974.372.371,00 | 19.735.305.228,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| | | **1.828.164.979.479,98** | **1.939.458.991.538,72** | **1.791.378.849.173,67** | **1.888.852.626.591,00** | **1.919.224.501.631,86** |

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

# Tabel 3.4

## Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 S/D 2022

| No | Uraian | JUMLAH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 | Tahun 2021 | Proyeksi Tahun 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **89.084.723.270,86** | **61.120.945.087,49** | **62.738.723.094,62** | **15.386.483.172,00** | - |
| a | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 89.084.223.270,86 | 61.121.445.087,49 | 62.738.723.094,62 | 10.616.901.909,00 | - |
| b | Pencairan dana cadangan | - | - | - | - | - |
| c | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - | - |
| d | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | 4.769.581.263,00 | - |
| e | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - |
| f | Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | - | - | - | - | - |
| g | Koreksi SILPA | 500.000,00 | - 500.000,00 | - | - | - |
| **3.2** | **Pengeluaran pembiayaan** | - | - | **10.000.000.000,00** | **10.000.000.000,00** | **25.000.000.000,00** |
| a | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | - | - | - | - | - |
| b | Penyertaan modal (investasi) daerah | - | - | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |
| c | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - |
| d | Pemberian pinjaman daerah | - | - | - | - | - |
| e | Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | - | - | - | - | - |
| | **JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO** | **89.084.723.270,86** | **61.120.945.087,49** | **52.738.723.094,62** | **5.386.483.172,00** | - **25.000.000.000,00** |

# BAB IV
# PRIORITAS
# DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2022

### 4.1.1 Visi dan Misi

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah penjabaran tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022. Sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 visi yang diusung untuk pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorotalo periode pemerintahan 2018-2022 adalah;

**"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera"**

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:

**Gorontalo Maju dan Unggul,** Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

**Gorontalo Sejahtera,** yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtaq, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan perolehan Opini Pengelolaan Keuangan WTP dari BPK RI, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Lima Misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientsikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut merupakan solusi dirumuskan untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi oleh oleh Provinsi Gorontalo pada periode pemerintahan sebelumnya, yang dikerucutkan menjadi Lima Isu Strategis, yaitu:

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

   Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi pehatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

   Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

   Tiga kelompok rumah tangga yang diperkira-kan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

   Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui:

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Penyediaan dan perluasan akses pangan: Pemberian bantuan pangan non tunai untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota.
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012- 2016 persentasenya cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.

Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.

Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

   Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

3. Infrastruktur dasar dan strategis.

   Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah,

seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outter Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

4. Kualitas sumber daya manusia.

   Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan.

   Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan *(good governance)*.

### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah di akhir periode kepemimpinan selama Lima tahun. Adapum Misi adalah penjabaran lebih lanjut yang berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian Visi. Adapun sebagai elaborasi dan Misi tersebut, dirumuskan dan ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan, yaitu:

Tabel. 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| **Visi : " Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"** | | |
| **Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan** | Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional | Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara |
| | Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB |
| | | Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan |

| | | |
|---|---|---|
| | | yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan |
| | Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan | Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana |
| **Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah** | Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi | Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah |
| **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil** | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan |
| **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia** | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia | Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan<br>Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat<br>Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq |
| | Penurunan angka kemiskinan | Menurunnya tingkat kemiskinan |
| | | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman |
| **Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani** | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih |

Kerangka logis hubungan antara Isu Strategis, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Hubungan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

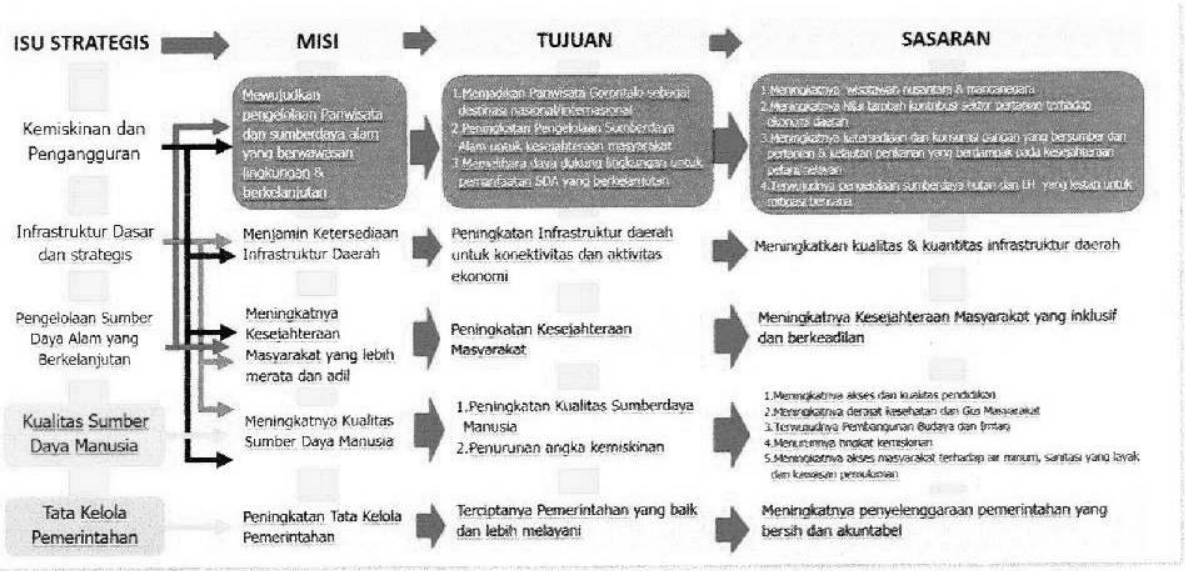


Strategi dan Arah Kebijakan selanjutnya perlu dirumuskan sebagai penjabaran dari masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam mencapai Sasaran dimaksud selama kurun waktu lima tahun. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan tersebut adalah:

1. **Sasaran; Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara**

   Untuk mencapai Sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata.

   Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

   - Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal;
   - Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;
   - Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata.

2. **Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**

   Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

   Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

   - Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
   - Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
   - Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
   - Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.

3. **Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan**

   Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

   Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

   - Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;

- Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
- Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
- Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.
- Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi (vi) Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melaui pengembangan Desa Mandiri Benih.
- Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasi-lokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.
- Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui : (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah

produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.

- Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.

**4. Sasaran; Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana**

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut:

- Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi;
- Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;
- Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;
- Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan;
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
- Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;

- Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana;
- Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.

**5. Sasaran; Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah**

Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan :

- Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
- Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;
- Mempercepat implementasi e-Government di seluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
- Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).
- Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan.

**6. Sasaran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan**

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan yang dilakukan melalui:

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
- Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
- Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;
- Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;

- Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
- Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;
- Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan;
- Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah.

**7. Sasaran; Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan**

Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
- Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
- Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
- Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya.
- Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu.

**8. Sasaran; Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pengelolaan kesehatan ibu, bayi (khususnya masalah stunting), balita, remaja, usia kerja dan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
- Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping.

**9. Sasaran; Meningkatnya Pembangunan Budaya dan Imtaq**

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;
- Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan.

**10. Sasaran; Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan**

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan institusi

implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

- Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

**11. Sasaran; Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman**

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

**12. Sasaran; Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:

- Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
- Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
- Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta

penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

- Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
- Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasam antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak;
- Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
- Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun international.
- Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang disajikan dengan cukup terperinci sebagai pendetilan dari Visi dan Misi, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan, yang dipopulerkan dengan Delapan Prioritas Daerah (8 PD), yaitu:

1. **Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan "Prodira" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga

pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global

2. **Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan "JAMKESTA" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.
3. **Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.
6. **Agama dan Budaya lebih semarak;** Sebagai daerah dengan filosofi "adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah" maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.
7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.
8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

## 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2022 adalah penjabaran berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam rangka menentukan arah pembangunan pada tahun 2022, di sektor-sektor pembangunan yang diproyeksikan akan berkontribusi optimal dalam pencapaian target daerah serta target sektoral. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan sebelumnya diawali dengan indentifikasi permasalahan yang dikerucutkan menjadi Isu Strategis yang dihadapi Provinsi Gorontalo di tahun 2020.

Prioritas pembangunan juga mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi komitmen nasional, bahkan global, dalam perumusan arah pembangunan yang akan ditetapkan.

### 4.2.1 Isu Strategis di Tahun 2020

Dalam konteks periode pembangunan lima tahunan Provinsi Gorontalo, yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, identifikasi permasalahan secara eksplisit telah dielaborasi berdasarkan masing-masing Sasaran dan diuraikan secara rinci pada Bab II (Sub-Bab 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD).

Berdasarkan data hasil capaian di tahun 2020 tersebut, dengan analisis yang empiris dan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil di lapangan, maka dapat dikerucutkan informasi permasalahan tersebut menjadi Isu Strategis yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di tahun 2020, yakni:

1. Pelemahan Kinerja Ekonomi Daerah (Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Konstruksi, Transportasi, Industri Pengolahan)

   Berdasarkan data terakhir terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, aktivitas ekonomi di masyarakat, terutama pada aspek pertanian, perikanan, pariwisata, konstruksi, transportasi, serta industri pengolahan mengalami pelemahan, sehingga berkontribusi cukup besar terhadap pelemahan kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka didominasi lulusan SMK karena terbatasnya diversifikasi usaha

   Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak *link-and-match* dengan SDM yang ada. Diversifikasi dunia usaha secara keseluruhan belum tersedia. Olehnya lulusan SMK yang yang telah dididik secara vokasi, dengan mengedepankan keterampilan, kesulitan memperoleh pekerjaan, segera setelah lulus dari pendidikan.
3. Infrastruktur dasar dan konektivitas belum memadai

   Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar belum cukup memadai untuk mendukung peningkatan aktivitas di masyarakat, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial. Ketersediaan konektivitas yang menghubungkan antar lokasi, juga belum cukup layak, baik kualitas maupun kuantitas.
4. Tingkat kemiskinan masih tinggi

   Meningkatnya persentase kemiskinan di Gorontalo, terkontribusi dari beberapa aspek pengukuran yang juga mengalami pelemahan. Di antaranya Pertumbuhan Ekonomi yang terkontraksi, penurunan Nilai Tukar Petani (NTP), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat, dan laju inflasi umum relative rendah.
5. Rendahnya Kualitas SDM, Rata-rata Lama Sekolah, Guru dan terbatasnya Sarana Prasarana pendidikan

   Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2020 mengalami kanaikan dibanding tahun 2019, namun jika dicermati lebih mendalam terhadap komponen pembentuk IPM tersebut, pertumbuhan yang dialami masih masih belum optimal untuk mendukung perkembangan kualitas pendidikan yang diharapkan. Hal ini merupakan dampak dari rendahnya kualitas tenaga pengajar dan sarana prasarana pendukung.
6. Eksploitasi alam berlebihan berpotensi kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati, budaya sehingga resiko tinggi bencana

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan konsekuensi, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, merupakan hal yang masih belum mendapatkan perhatian dan penindakan tegas di Provinsi Gorontalo. Kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati semakin terancam dengan adanya hal ini. Sehingga efek domino berupa ancaman bencana alam, senantiasa mengintai yang dapat terjadi kapan saja.

Di sisi lain, infrastruktur yang adaptif terhadap kebencanaan di Gorontalo juga belum memadai untuk menjadi perangkat yang dapat menghindarkan masyarakat Gorontalo dari ancaman bencana.

### 4.2.2 Internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) menjadi dasar dalam menginternalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu wilayah otonom yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sangat kuat dalam mendukung pencapaian taget tujuan MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) nasional ke depan. Komitmen implementasinya didasarkan pada kemampuan dan komitmen kuat daerah dalam merealisasikan seluruh target tersebut sampai tahun 2030 dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2018, Provinsi Gorontalo telah merampungkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkenjutan Di Provinsi Gorontalo sebagai dokumen rencana kerja 5 (lima)

tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo tahun 2005-2025, dan merupakan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selain itu juga diuraikan kebijakan berdasarkan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan rencana aksi daerah tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat daerah maupun nasional, memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs secara bersama.

Dengan munculnya pendemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, maka sudah barang tentu akan berdampak pula pada pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan dimensi ruang dan waktu yang terukur. Dari 17 Tujuan yang hendak dicapai, masing-masing menderita dampak yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar dan tingkat keberhasilan yang ditentukan. Secara umum dalam skala global, dampak dari Covid-19 terhadap masing-masing Tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut, di antaranya:

- Tujuan Tanpa Kemiskinan

  Pada Tujuan pertama ini ketahanan kelas menengah perlu mendapat perhatian lebih, karena setengah dari konsumsi dan pajak nasional ditopang dan dibayarkan oleh kelas menengah. Penurunan kesejahteraan terjadi di semua kelompok pendapatan, konsumsi per kapita rata-rata seluruh desil mengalami penurunan.
- Tujuan Tanpa Kelaparan

  Pada Tujuan ini, aspek Pangan dan Gizi yang merupakan aspek yang paling berkontribusi terhadapnya dapat dikatakan sedang menghadapi krisis. Oleh karena menurunnya aktivitas ekonomi (kendapa proses produksi, PHK), menurunnya daya beli masyarakat (penurunan pendapatan masyarakat, kemiskinan meningkat), dan terganggunya lalu lintas transportasi dan logistik (rantai pasok pangan dan akses pangan terkendala), mengakibatkan penurunan ketahanan pangan, penurunan akses dan kualitas konsumsi pangan, serta menurunnya produktivitas SDM Pertanian (penurunan NTP dan pendapatan produsen pangan skala kecil).
- Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

  Isu strategis pada Tujuan ini yaitu manajemen data kasus kurang sistematis. Data yang terlaporkan belum merupakan cerminan kondisi aktual. Pemilahan data yang terkumpul belum maksimal (misal: gender, usia, dst). Kemudian kapasitas tes untuk deteksi Covid-19 yang masih sangat terbatas. Eksekusi peningkatan kualitas fasilitasi kesehatan dan pengadaan alat kesehatan cenderung lambat.
- Tujuan Pendidikan Berkualitas

  Aspek yang paling terdampak pada Tujuan ini adalah *outcome*/hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat memberikan efek tidak langsung terhadap peningkatan tingkat *drop out*, kemampuan membaca dan berhitung menurun. Kendala utama yang menjadi penyebab yaitu penerapan

kebijakan belajar jarak jauh melalui mekanisme daring (*online*). Kebijakan ini dalam prosesnya mengalami beberapa hambatan, yaitu tenaga pendidik yang belum siap dalam menyusun materi pembelajaran jarak jauh, cakupan akses internet yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri, serta infrastruktur IT dan biaya internet yang memberatkan sebagian besar keluarga miskin dan rentan.

- Tujuan Kesetaraan Gender

  Dampak yang dirasakan dalam rangka kampanye pengarus utamaan gender adalah pada; (1) Layanan Deteksi Dini; perempuan dan kelompok rentan memiliki beban yang kian berat dengan berlakunya pembatasan sosial dan kondisi keterbatasan ekonomi. (2) Akses Layanan kesehatan reproduksi serta (3) beban perempuan dalam rumah tangga yang semakin berat selama masa karantina di rumah.

- Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau

  Komoditas energi populer di awal abad ini, yaitu bahan bakar berbasis fosil secara global mengalami penurunan harga cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi sehingga berimbas permintaan terhadap bahan bakar turun. Hal ini terjadi juga di Indonesia, dengan situasi yang hampir sama. Pencapaian energi bersih dan terjangkau melalui pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menemui tantangan yang cukup hebat dikarenakan harga bahan bakar fosil yang masih sangat diakrabi masyarakat luas mengalami penurunan harga.

- Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

  Pertumbuhan ekonomi nasional sudah barang tentu mengalami penurunan. Capaian Tahun 2020, mengalami kontraksi sebesar -2,07% dibandingkan tahun 2019 (*Y-to-Y*). di Provinsi Gorontalo juga terdampak hal yang sama, di mana mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,02% dibanding tahun 2019 (*Y-to-Y*).

  Hal ini dikarenakan semua pelaku ekonomi terdampak oleh pandemic Covid-19. (1) Rumah tangga; pendapatan berkurang dikarenakan PHK dan/atau pembatasan pergerakan, daya beli menurun, harga barang harian cenderung naik. (2) Badan Usaha; permintaan barang dan jasa mengalami penurunan baik perdagangan domestic maupun aktivitas ekspor impor, harus mengambil kebijakan PHK terhadap karyawan, hingga gangguan rantai pasok. (3) Pemerintah; pendapatan negara mengalami penurunan sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global. (4) Lembaga Keuangan; terjadi volatilitas di pasar keuangan, nilai tukar rupiah terdepresi, hingga perbankan dan lembaga keuangan lainnya berpotensi mengalami permasalahan likuiditas dan *insolvency*.

### 4.2.3 Internalisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka

percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan, maka dilakukan melalui:

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupn politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah; (2) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (3) Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (4) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

### 4.2.4 Internalisasi Rencana Aksi Nasional-Gerakan Rumah Kaca (RAN-GRK)

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) diterbitkan sebagai Perpres No. 61/2011 menjabarkan target penurunan emisi GRK ke dalam 5 bidang/sektor utama, yaitu: (i)

Kehutanan dan Lahan Gambut, (ii) Pertanian; (iii) Energi dan Transportasi; (iv) Industri, serta (v) Pengelolaan Limbah. Kegiatan yang diidentifikasi terdiri atas: 66 kegiatan inti, 66 kegiatan pendukung, dan 24 kegiatan tentang pendataan di bidang informasi perubahan iklim, lingkungan hidup, kelautan dan data lintas bidang. Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK tersebut diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2011 di Jakarta oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang dihadiri pula oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Kementerian/Lembaga terkait, serta mitra pembangunan.

Sesuai amanat Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) pada tahun 2010, khususnya pasal 8 ayat 1, yang meminta Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam upaya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi di daerah (dokumen perencanaan RAD GRK). Penyusunan RAD-GRK telah diinisiasi beberapa waktu setelah ditetapkannya RAN-GRK, dengan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2012. *Update* data termutakhir terkait substansi GRK dituangkan dalam revisi RAD-GRK pada tahun 2019. Pemutakhiran dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pihak seperti para ahli dari berbagai perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, Kementerian/Lembaga, dan terutama dengan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Internalisasi RAD-GRK Provinsi Gorontalo ini diharapkan dapat mendorong penyesuaian arah kebijakan perencanaan daerah dalam merespon dan mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu juga dapat menjadi acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menentukan prioritas program pembangunan, terutama kegiatan inti dan kegiatan pendukung sesuai dengan tugas dan fungsi bidangnya dalam merespon pengurangan emisi GRK.

### 4.2.5 Penanganan Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Standar yang dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sejak 2007 - 2013, angka prevalensi stunting tetap tinggi dan terjadi lintas kelompok pendapatan (Gambar 1.1). Data Riskesdas 2013 menemukan 37,2% atau sekitar 9 juta anak balita mengalami stunting. Pada 2018, Riskesdas mencatat penurunan prevalensi stunting pada balita ke 30,8%. Namun demikian, angka ini masih tergolong tinggi.

Sejalan dengan inisiatif Percepatan Pencegahan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Pada tataran kebijakan, pemerintah

memberikan perhatian besar terhadap pencegahan stunting. Indikator dan target pencegahan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.

Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Upaya konvergensi akan terwujud apabila:

1. Program/kegiatan Nasional, daerah, dan desa sebagai penyedia layanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai kewenangan.
2. Layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif tersedia dan dapat diakses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan).
3. Kelompok sasaran prioritas menggunakan dan mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.

Upaya konvergensi percepatan pecegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.

Pada tahap perencanaan, konvergensi diarahkan pada upaya penajaman proses perencanaan dan penganggaran regular yang berbasis data dan informasi faktual agar program dan kegiatan yang disusun lebih tepat sasaran melalui: (i) pelaksanaan analisis situasi awal; (ii) pelaksanaan rembuk stunting; dan (iii) penyusunan rencana kerja. Analisis situasi awal dan rembuk stunting dilakukan untuk mengetahui kondisi stunting di wilayah kabupaten/kota, penyebab utama, dan identifikasi program/kegiatan yang selama ini sudahkelompok sasaran, sumber pendanaan2 dan lokasi upaya percepatan pencegahan stunting di daerah, yang kemudian diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahap pelaksanaan, konvergensi diarahkan pada upaya untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu di lokasi yang telah disepakati bersama, termasuk

didalamnya mendorong penggunaan dana desa untuk percepatan pencegahan stunting dan mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Sedangkan pada tahap pemantauan dan evaluasi, konvergensi dilakukan melalui pelaksanaan pemantauan yang dilakukan bersama dengan menggunakan mekanisme dan indikator yang terkoordinasikan dengan baik secara berkelanjutan. Sehingga hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan upaya percepatan pencegahan stunting dan memberikan masukan bagi tahap perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

### 4.2.7 Tema RKPD dan Fokus Pembangunan Tahun 2022

Tema RKPD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2022, merupakan rumusan solusi yang diperoleh dalam rangka menjawab permasalahan di seluruh sektor pembangunan yang ada di masyarakat pada tahun 2020. Potret realita di lapangan akan lebih kongkrit tergambar, saling berkorespondensi antara permasalahan dengan solusi yang dirumuskan. Tema RKPD merupakan gambaran dari fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Fokus pembangunan tersebut telah mempertimbangkan isu strategis tahun 2020, Tujuan dan Sasaran pembangunan 2022 yang mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, serta berpedoman pada RKP 2022 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Perumusan Tema RKPD juga mempertimbangkan internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Pengarusutamaan Gender (PUG), Rencana Aksi Nasional-Gerakan Rumah Kaca (RAN-GRK), serta komitmen nasional penanganan *Stunting*. Berdasarkan rujuan dan beberapa referensi tersebut, dirumuskan Tema untuk RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah:

Gambar 4.2: Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2022

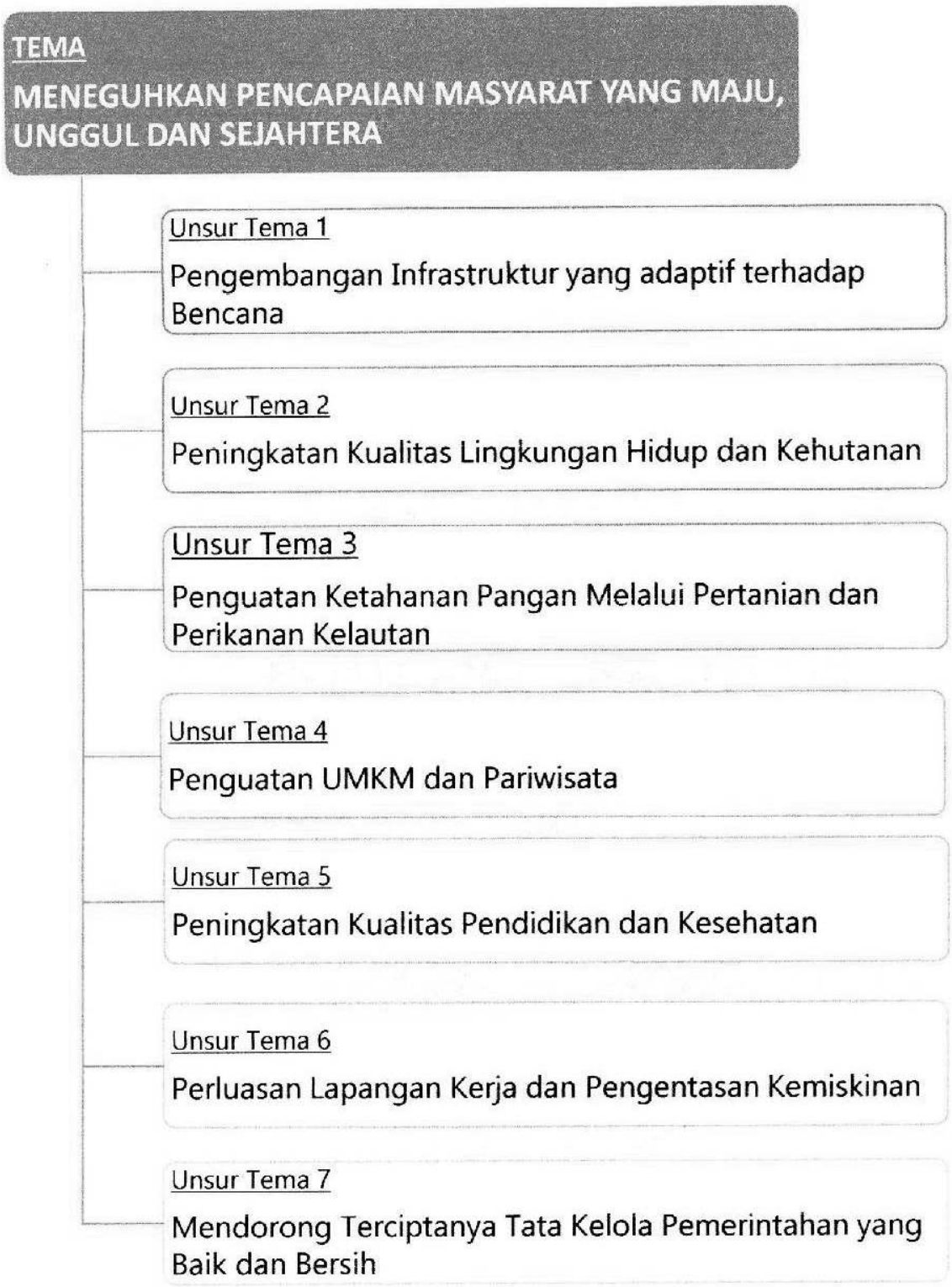


Tema yang ditetapkan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Unsur Tema, guna mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit tentang fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tema RKPD dan fokus pembangunan tahun 2022 yang diterjemahkan dalam Unsur Tema, merupakan pengerucutan dari sekian banyak komponen pembangunan di daerah, dalam menyikapi kondisi pasca pandemi Covid-19 yang dengan optimis diperkirakan akan berakhir di tahun 2021 nanti.

**Unsur tema 1: Pengembangan Infrastruktur yang adaptif terhadap Bencana**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang pada daerah bantaran sungai dan hulu
2. Percepatan Perampungan RTRW
3. Penyusunan Dokumen Pengurangan Resiko Bencana
4. Pelatihan SDM Kebencanaan
5. Desa Tangguh Bencana
6. Pelatihan Evakuasi Bencana
7. Mendorong peran multi sektor dalam penanganan bencana (Skema CSR)
8. Peningkatan Jalan Mantap Provinsi
9. Penunjang Operasional Bus Perintis
10. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
11. Penerangan Jalan Umum (PJU)
12. Pembagunan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan dan Keamanan
13. Penertiban Bidang Transportasi Jasa angkutan
14. Penyediaan Lahan untuk Infratruktur Strategis Nasional dan Provinsi

**Unsur tema 2: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas pengelolaan sektor kehutanan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
2. Pengelolaan Limbah B3
3. Penataan Manajemen Persampahan dan TPA (Evaluasi dan Pendampingan)
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Galian C di badan Sungai Prioritas
5. Pengembangan Informasi Geologi untuk Mendukung Geopark
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
7. Penguatan Kapasitas Desa Rawan Bencana
8. Peningkatan Kapasitas Aparat Penjagaan dan Pengamanan Kawasan Hutan
9. Penguatan Kelompok Masyarakat pemanfaatan HHBK
10. Mendorong Perhutanan Sosial

**Unsur tema 3: Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian dan Perikanan Kelautan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan, dengan mendorong sektor pertanian dan perikanan kelautan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Mendorong Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Fokus pada Padi, Jagung, Cabe dan Bawang)
2. Mendorong Produksi Perikanan dan Kelautan
3. Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
4. Mendorong pasca panen pertanian
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Perikanan (Pelaku Utama, Pelaku Usaha Pertanian dan Korporasi Petani)
6. Paket Korporasi Petani: Identifikasi Gapoktan dan Komoditas, Sosialisasi, Pendampingan (Pembentukan Kelembagaan yg berbadan hukum, Penguatan Manajemen Kelembagaan, Teknis Budidaya, Promosi dan Pemasaran)
7. Mempertahakan populasi ternak
8. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pembangunan Gudang)
9. Pekarangan Pangan Lestari (PPL)

**Unsur tema 4: Penguatan UMKM dan Pariwisata**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan aspek UMKM, utamanya pengusaha lokal. Penguatan pada sektor pariwisata juga menjadi fokus pembangunan di tahun terakhir RPJMD. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Pengembangan Pusat Informasi
2. Promosi pariwisata
3. Pengembangan Destinasi Wisata untuk mendukung pengembangan Geopark
4. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan TIK pada Destinasi Wisata
5. Penataan Amenitas pada Destinasi Wisata Prioritas dan Geopark
6. Inventarisasi Keragaman Geologi dan Geoheritage
7. Sertifikasi SDM Kepariwisataan
8. Pengembangan Desa Wisata
9. Peningkatan Atraksi bernuansa kearifan lokal
10. Penguatan SDM, Pengawasan dan Pembinaan UKM dan Koperasi
11. Peningkatan kemitraan, memperluas promosi dan pemasaran usaha, sosialisasi kredit perbankan bagi UMKM
12. Perampungan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Lanjutan)
13. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dekranasda)
14. Pembangunan UMKM Mart
15. Pembinaan terhadap pengusaha retail

**Unsur tema 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia, utamanya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

10. Penguatan terhadap Lulusan (Database Alumni, Sertifikasi Kompetensi)
11. Penguatan terhadap Proses Pembelajaran (Silabi, Metode Belajar, Sarpras Pendukung, Layanan Konseling, Assessment peserta didik, Revitalisasi Perpustakaan, Language center, Pembinaan rutin kepada orang tua peserta didik)
12. Penguatan terhadap Manajemen Sekolah
13. Regulasi Perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus
14. Sarpras Sekolah Luar Biasa (SLB)
15. Ketersediaan Guru SLB (Ahli dalam mengajar anak berkebutuhan khusus)
16. Dua SMA Unggulan di Dua Zona (Pilot Project)
17. Penguatan Prakerin
18. Rekrutmen guru produktif
19. Piloting persiapan BLUD SMK (Kesiapan Administratif, Business Plan, Unit Produksi)
20. Penguatan Soft Skill
21. Perpustakaan Buka 24 Jam
22. Penguatan Organisasi Kepemudaan (Pramuka, Paskibraka, Kirab Pemuda)
23. Pembinaan Pemuda melalui organisasi kepemudaan
24. Latihan Dasar Kepemimpinan
25. *Penguatan* PPLP, KONI
26. Kemitraan dengan pendidikan tinggi dalam keberlanjutan pembinaan olahraga
27. Beasiswa atlit berprestasi
28. Upaya Promotif dan Preventif, Penguatan dan Pemerataan SDM Kesehatan (kegiatan promotif, preventif, dan kuratif), Akreditasi Puskesmas, Updating PISPK
29. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
30. Pembinaan karakter SDM Puskesmas
31. Penguatan Manajemen Rumah Sakit
32. Perbaikan dan Penguatan Tata Kelola Sistem Rujukan Tingkat Lanjut
33. Penguatan Labkesda
34. Kemitraan dalam standarisasi fasilitas kesehatan mandiri
35. Dukungan dan Fasilitasi terhadap pengembangan RS Tombulilato (Skema Hibah Barang/Uang/Penguatan Kapasitas)
36. Identifikasi kesiapsiagaan (SDM, Kesiapan masyarakat, Sarpras, dst)
37. Buffer stock obat-obatan, Sarpras, ketersediaan SDM, Puskesmas Pembantu (Pustu)
38. Pemanfaatan Grand Design Kependudukan
39. Orientasi KB pasca melahirkan
40. Dukungan terhadap Pelatihan Pra Nikah

41. Penguatan Koordinasi dalam rangka implementasi RA Kependudukan

**Unsur tema 6: Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada menjamin ketersediaan lapangan kerja di masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Adapun daam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. Penyediaan Mahyani
2. Pengurangan Kawasan Kumuh
3. Air Minum dan Sanitasi
4. Drainase pemukiman, persampahan, jalan kawasan pemukiman (Kawasan Kumuh)
5. Kemandirian Pangan (Rumah Pangan) di setiap mahyani
6. Penguatan pengelolaan Database Fakir Miskin (dorong pemanfaatan e-JPS)
7. Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS
8. Baksos NKRI per bulan
9. Perahu Fiber 3 GT bermesin tempel (Target Keluarga Miskin)
10. Optimalisasi Motor Cool Box yang telah tersedia di masyarakat
11. Penyediaan prasarana budidaya perikanan air laut dan tawar (danau)
12. Pemagangan Dalam Negeri

**Unsur tema 7: Mendorong Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Unsur Tema ini menitikberatkan pada peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun dalam mendukung unsur tema dimaksud, penguatan dilakukan pada beberapa aspek, yakni:

1. peningkatan kualitas budaya kerja
2. Penataan kembali Organisasi PD
3. pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta)
4. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran
5. Penataan jabatan fungsional tertentu (JFT)
6. Pelatihan Assessor
7. Penyelenggaraan Diklat Teknis terpusat
8. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Kediklatan
9. Dukungan pelatihan untuk Pengelola Barang/Jasa
10. Perbaikan tata kelola perizinan
11. Penguatan SDM teknis

Mengacu pada penjabaran Tema dan Unsur Tema beserta titik berat dari masing-masing penjabaran dimaksud, maka dapat dipetakan bahwa untuk prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, Prioritas Daerah yang mendapatkan penguatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4: Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2022

### 4.2.7 Program Prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Penentuan Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dirumuskan berdasarkan Tema RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 yang sebelumnya telah ditetapkan. Program-program ini secara runut merupakan elaborasi langsung dari Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2022.

Nomenklatur Program pada Tahun 2022 mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2022 adalah:

Tabel 4.2
Program Prioritas RKPD Tahun 2022

| No | Program Prioritas Pembangunan | SKPD Pelaksana | Pagu Anggaran (Rp.) |
|---|---|---|---|
| Prioritas Daerah 3: Infrastruktur yang Lebih Merata | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sasaran; Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah** | | | |
| 1. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 10,636,079,999 |
| 2. | Program Pengembangan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2,667,756,864 |
| 3. | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 37,734,878,986 |
| 4. | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan | |
| 5. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Diskominfo & Statistik | |
| **Sasaran; Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman** | | | |
| 1. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3,811,738,045 |
| 2. | Program Pengembangan Perumahan | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 2,137,711,963 |
| 3. | Program Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 13,750,509,892 |
| **Prioritas Daerah 4: Ekonomi Kerakyatan yang Lebih Meningkat** | | | |
| **Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dan Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan** | | | |
| 1. | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 1,190,681,311 |
| 2. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6,173,615,007 |
| 3. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1,784,484,399 |
| 4. | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 3,668,367,407 |
| 5. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Pangan | 1,230,066,611 |
| 6. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Pangan | 456,639,775 |
| 7. | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Pangan | 302,982,684 |
| 8. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Dinas Pertanian | 11,509,677,227 |
| 9. | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Dinas Pertanian | 220,913,747 |
| 10. | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 568,978,620 |
| **Sasaran; Menurunnya tingkat kemiskinan** | | | |
| 1. | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan | 1,429,541,151 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Perempuan & Perlindungan Anak | |
| 2. | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 3,703,048,416 |
| 3. | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 20,068,290,742 |
| 4. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 62,458,756 |
| 5. | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 395,635,089 |
| 6. | Program Kesejahteraan Rakyat | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | |
| 7. | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 1,088,199,493 |
| 8. | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 343,178,373 |
| **Sasaran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan** | | | |
| 1. | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 178,186,611 |
| 2. | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 466,851,104 |
| 3. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 359,776,710 |
| 4. | Program Pengembangan UMKM | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 1,219,373,936 |
| 5. | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 2,039,652,215 |
| 6. | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan | 2,462,161,803 |
| 7. | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 1,343,376,483 |
| **Prioritas Daerah 7: Pariwisata yang Lebih Mendunia** | | | |
| **Sasaran; Meningkatnya Wisatawan Nusantara & Mancanegara** | | | |
| 1. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata | 1,480,908,689 |
| 2. | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Pariwisata | 1,510,586,665 |
| 3. | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Dinas Pariwisata | 435,433,011 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Dinas Pariwisata | 528,064,631 |
| **Prioritas Daerah 8: Lingkungan yang Lebih Lestari** | | | |
| **Sasaran; Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana** | | | |
| 1. | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6,805,626,557 |
| 2. | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1,148,244,202 |
| 3. | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3,003,380,110 |
| 5. | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | Dinas Penanaman Modal ESDM Transmigrasi | 315,229,765 |
| 6. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 441,612,497 |
| 7. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 60,849,215 |
| 8. | Program Pengelolaan Hutan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 5,043,863,146 |
| 9. | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 101,299,655 |
| 10 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1,142,648,741 |

### 4.2.7 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah

Keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan cerminan dari harmonisasi dan sinergitas arah pembangunan di pusat dan di daerah. Hal ini menjadi penting, agar pembangunan daerah tidak menuju ke arah yang berlawanan dengan arah pembangunan nasional. Fokus dan prioritas pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, mengambil tema:

**"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**

Dengan kembali memberikan porsi penguatan ke semua Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional), yang terdiri dari 7 (Tujuh) Prioritas.

Adapun beberapa keselarasan perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dicermati sebagai berikut:

**Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022 Provinsi Gorontalo**

Tabel 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022

| Agenda Pembangunan RPJMN 2020- | Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022 |
|---|---|

| 2024 (Prioritas Nasional) | |
|---|---|
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat |
| | Pariwisata lebih Mendunia |
| Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | - |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Pendidikan yang Lebih Berkualitas |
| | Kesehatan lebih Prima |
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Agama dan Budaya Lebih Semarak |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur lebih Merata |
| Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Lingkungan Hidup lebih Lestari |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintahan lebih Melayani |

**Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2022 dengan RKPD 2022 Provinsi Gorontalo**

Keselarasan prioritas pembangunan antara RKP 2022 dengan RKPD 2022 Provinsi Gorontalo merupakan keseragaman pola pikir dalam menentukan prioritas pembangunan mana yang mendapatkan penguatan pada Tahun 2022. Keseragaman tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2022 dengan RKPD 2022

| Prioritas Pembangunan yang mendapat penguatan pada Tahun 2022 | |
|---|---|
| Prioritas Nasional | Prioritas Daerah |
| Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1) | Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat (PD 4) |
| Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan (PN 2) | Pariwisata lebih Mendunia (PD 7) |
| Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3) | - |
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4) | Pariwisata lebih Mendunia (PD 7) |
| Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5) | Infrastruktur lebih Merata (PD 3) |
| Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6) | Lingkungan lebih lestari (PD 8) |
| Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7) | - |

**Keselarasan Program Prioritas RKP 2022 dengan RKPD 2022 Provinsi Gorontalo**

| No | Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) | Program Prioritas RKP 2022 | Program Prioritas RKPD Prov. Gorontalo 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan | Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) | Pengelolaan Aspek Kegeologian |
| | | | Pengelolaan Energi Terbarukan |
| | | Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| | | Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan | Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |
| | | | Penanganan Kerawanan Pangan |
| | | | Pengawasan Keamanan Pangan |
| | | | Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | | | Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
| | | Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan | Pengelolaan Perikanan Tangkap |
| | | | Pengelolaan Perikanan Budidaya |
| | | | Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | | Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Dan Koperasi | Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting |
| | | | Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian |
| | | | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi |
| | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |
| | | | Program Pengembangan UMKM |
| | | Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri | Perencanaan Dan Pembangunan Industri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (TKDN) | |
| | | | Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen |
| | | Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi | Pemasaran Pariwisata |
| | | | Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| | | | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial |
| | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | Program Kesejahteraan Rakyat |
| 2 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Pembangunan Wilayah Sulawesi | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| | | | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| 3 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial | - |
| | | Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| 4 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan | Infrastruktur Pelayanan Dasar | Penyelenggaraan Jalan |
| | | | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | | | Pengembangan Permukiman |
| | | Infrastruktur Ekonomi | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Pelayanan Dasar | | Penyediaan Air Minum |
| | | Infrastruktur Perkotaan | Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | | Pengembangan Perumahan |
| | | | Kawasan Permukiman |
| | | Energi Dan Ketenagalistrikan | Pengelolaan Ketenagalistrikan |
| | | Transformasi Digital | Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| 5 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| | | | Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |
| | | | Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) |
| | | | Pengelolaan Hutan |
| | | | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya |
| | | | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) |
| | | Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim | Penanggulangan Bencana |
| | | Pembangunan Rendah Karbon | - |

# BAB V
# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula.

Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Untuk tahun 2022, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional).

Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema "Meneguhkan Pencapaian Masyarakat yang Maju, Unggul dan Sejahtera", dengan 7 (Tujuh) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Pengembangan Infrastruktur yang adaptif terhadap Bencana
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian dan Perikanan Kelautan
- Penguatan UMKM dan Pariwisata
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
- Mendorong Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun 2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

A. Kawasan lindung nasional dan provinsi
    1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari :

a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
e) Kawasan Teluk Tomini.

2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari :
a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

B. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:
a) kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
b) kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
c) kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :
d) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :
- hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
- hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
- hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.

e) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone;
f) Kawasan peruntukan pertanian
(1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
- Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;
- Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
- Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Kecamatan-Kecamatan: Marisa, lemito, Paguat, Patilanggio, Randangan, Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
- Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.

(2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:

- Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
- Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
- Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
- Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.

(3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:

a. Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
b. Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan;
e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.

g) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :

(1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi :

- Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo,paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
- Kecamatan-kecamatan: suwawa,kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
- Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
- Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.

(2) Kawasan budidaya tambak

- pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
- pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.

(3) Kawasan budidaya perikanan laut

- budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
- budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

h) Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.;

i) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:

- kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
- kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;
- kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.

j) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:

- Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
- Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
- Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
- Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
- Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
- Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
- Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
- Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
- Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
- Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;

- Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
- Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;

k) Kawasan peruntukan permukiman

(1) Kawasan permukiman perkotaan :

- kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
- bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);
- pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh)Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

(2) Kawasan permukiman pedesaan :

- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

l) Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi :

- TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
- TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan
- TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

# BAB VI
# RENCANA KERJA
# DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2022. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2022.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah. Adapun pendanaan perencanaan pembangunan Tahun 2022 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Lampiran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **263,116,620,810** | | | | | | | **262,864,455,422** | |
| **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **204,634,115,440** | | | | | | 100 % | **204,510,723,936** | |
| **1** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Perdataan, Monitoring dan Evaluasi program | Dokumen | | Dokumen | 15 Dokumen | **1,739,963,256** | | | | | | 15 Dokumen | **1,600,000,000** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Renstra, Renja, DPA, RKA, LKPJ, LPPD, Sakip, Profil Pendidikan, Perjanjian Kinerja, Data Sektor, Cascading, Rencana Aksi, Buku Saku, Kalender Pendiidkan, Dokumen Emonev | 15 Dokumen | | | 15 Dokumen | 1,739,963,256 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | Stakeholder Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota | 15 Dokumen | 1,600,000,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Dikbudpora Provinsi Gorontalo dan Masyarakat | Laporan | | Laporan | 4 Laporan | **197,454,867,708** | | | | | | 4 Laporan | **197,454,867,492** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji Dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 197,352,256,756 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Dikbudpora Provinsi Gorontalo dan Masyarakat | 12 Bulan | 197,352,256,756 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | DPA<br>Laporan<br>RKA | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Lapora | | | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Lapora | 102,610,952 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Dikbudpora Provinsi Gorontalo dan Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Lapora | 102,610,736 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Pendidikan, pelatihan, bimtek dan sosialisasi) Dinas Dikbudpora | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **111,498,000** | | | | | | 12 Bulan | **114,248,000** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pelatihan Bimtek | 4 Orang | | | 4 Orang | 111,498,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Stakeholder Pendidikan Provinsi dan Kab./Kota | 4 Orang | 114,248,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Dikbudpora | Paket | | Paket | 5 Paket | **360,301,810** | | | | | | 5 Paket | **365,465,000** | |
| 1 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | AC<br>Laptop<br>LCD<br>Printer | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit | | | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit | 360,301,810 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | Bidang dan Bagian Program | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit | 365,465,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Dikbudpora | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **4,967,484,666** | | | | | | 12 Bulan | **4,976,143,444** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jasa Layanan Kantor | 12 BULAN | | | 12 BULAN | 4,967,484,666 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | Bidang dan Bagian Umum dan Kepegawaian | 12 BULAN | 4,976,143,444 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | Presentase Angka Partisipasi Sekolah | % | | % | 75 % | **58,388,505,439** | | | | | | 75 % | **58,259,731,536** | |
| **1** | **01** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas** | Jumlah Pesert Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMA/SLB | Orang | | Orang | 1462 Orang | **29,356,566,565** | | | | | | 1462 Orang | **29,356,737,640** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 11 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Pembangunan Perpustakaan | 1 Paket | | | 1 Paket | 287,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 1 Paket | 288,000,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 12 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Pembangunan Aula Serbaguna | 2 Paket | | | 2 Paket | 611,000,198 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 2 Paket | 610,000,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 45 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Boarding SLB<br>Man Ikhsan Cendekia<br>SMA Dwiwarna<br>SMA Wirabakti | 215 Orang<br>88 Orang<br>48 Orang<br>32 Orang | | | 215 Orang<br>88 Orang<br>48 Orang<br>32 Orang | 4,295,124,600 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 215 Orang<br>88 Orang<br>48 Orang<br>32 Orang | 4,295,125,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | **49** | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Lomba Debat Bahasa<br>Lomba FLS2N<br>Lomba KOSN<br>Lomba KSN<br>Lomba LKSN | 90 Orang<br>240 Orang<br>220 Orang<br>100 Orang<br>130 Orang | | | 90 Orang<br>240 Orang<br>220 Orang<br>100 Orang<br>130 Orang | 472,579,022 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 90 Orang<br>240 Orang<br>220 Orang<br>100 Orang<br>130 Orang | 472,749,068 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 50 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Guru Tidak Tetap SMA<br>Pegawai Tidak Tetap SMA Non S1<br>Pegawai Tidak Tetap SMA S1<br>Petugas Layanan Khusus SMA | 666 Orang<br>139 Orang<br>175 Orang<br>161 Orang | | | 666 Orang<br>139 Orang<br>175 Orang<br>161 Orang | 23,441,827,210 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 666 Orang<br>139 Orang<br>175 Orang<br>161 Orang | 23,441,827,636 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 51 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Penerima Beasiswa Guru | 12 Orang | | | 12 Orang | 191,123,035 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 12 Orang | 191,123,309 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.01 | 52 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Koordinasi Dan Konsultasi Program GTK Pemantauan SNP Sekolah Di Daerah Khusus<br>Supervisi Manajerial Dan Akademik | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 57,912,500 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 57,912,627 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **02** | 1.02 | | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** | Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan SMK | % | | % | 100 % | **24,546,904,579** | | | | | | 100 % | **24,117,959,449** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 33 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Mesin Penggiling Pakan<br>Mesin Perikanan Air Tawar<br>Mesin Rotari<br>Traktor | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Unit | | | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Unit | 1,651,665,108 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | SMK SE PROVINSI GORONTALO | 1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>2 Unit | 1,664,500,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 37 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Praktek Kerja Industri SMK | 1120 Orang | | | 1120 Orang | 942,801,627 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | SMK SE PROVINSI GORONTALO | 1120 Orang | 500,004,553 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 41 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Lomba FLS2N<br>Lomba Kompetensi Siswa<br>Lomba KOSN<br>Penguatan Pendidikan Karakter | 36 Orang<br>40 Orang<br>27 Orang<br>39 Orang | | | 36 Orang<br>40 Orang<br>27 Orang<br>39 Orang | 908,827,259 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | SMK SE PROVINSI GORONTALO | 36 Orang<br>40 Orang<br>27 Orang<br>39 Orang | 909,843,788 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 42 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Guru Tidak Tetap SMK<br>Petugas Layanan Khusus<br>Tenaga Administrasi Sekolah Non S1<br>Tenaga Administrasi Sekolah S1 | 630 Orang<br>117 Orang<br>96 Orang<br>125 Orang | | | 630 Orang<br>117 Orang<br>96 Orang<br>125 Orang | 20,856,737,592 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | SMK SE PROVINSI GORONTALO | 630 Orang<br>117 Orang<br>96 Orang<br>125 Orang | 20,856,737,795 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 1 | 01 | 02 | 1.02 | 43 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Beasiswa Bagi Guru Dan Tenaga Kepndidikan | 18 Orang | | | 18 Orang | 186,872,993 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pendidikan Berkualitas | SMK SE PROVINSI GORONTALO | 18 Orang | 186,873,313 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Pendidikan Khusus** | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang menerima insentif/tunjangan | Orang | | Orang | 210 Orang | **4,485,034,295** | | | | | | 210 Orang | **4,785,034,447** | |
| 1 | 01 | 02 | 1.03 | 49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Guru Tidak Tetap<br>Instruktur Sekolah Luar Biasa<br>Petugas Layanan Khusus<br>Tenaga Administrasi Sekolah Non S1<br>Tenaga Administrasi Sekolah S1 | 139 Orang<br>11 Orang<br>24 Orang<br>12 Orang<br>13 Orang | | | 139 Orang<br>11 Orang<br>24 Orang<br>12 Orang<br>13 Orang | 4,485,034,295 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan Berkualitas | GTK Non PNS di Satuan Pendidikan Khusus se provinsi Gorontalo | 139 Orang<br>11 Orang<br>24 Orang<br>12 Orang<br>13 Orang | 4,785,034,447 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | Presentase Angka Partisipasi Sekolah | % | | % | 75 % | **93,999,931** | | | | | | 75 % | **93,999,950** | |
| **1** | **01** | **03** | 1.01 | | **Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah** | Jumlah Pesert Minat Bakat/ Kreatifitas/ prestasi Siswa SMA/SLB | Orang | | Orang | 1462 Orang | **93,999,931** | | | | | | 1462 Orang | **93,999,950** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 01 | 03 | 1.01 | 04 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah | Kurikulum SMA | 1 Kurikulum | | | 1 Kurikulum | 93,999,931 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa/Siswi SMA dan SLB | 1 Kurikulum | 93,999,950 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **9,318,012,365** | | | | | | | **3,318,000,572** | |
| **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga | orang | | orang | 791 orang | **948,012,508** | | | | | | 791 orang | **948,010,572** | |
| **2** | **19** | **02** | 1.01 | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi** | Jumlah kegiatan Paskibraka | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **781,059,331** | | | | | | 1 Kegiatan | **781,057,747** | |
| 2 | 19 | 02 | 1.01 | 04 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Pasukan Pengibar Bendera | 45 Orang | | | 45 Orang | 781,059,331 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Siswa, Peserta Paskibraka 318 Orang dan TNI/Polri | 45 Orang | 781,057,747 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **19** | **02** | 1.02 | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi** | Seleksi PPAN,PPAP, Kirab Pemuda, Pemuda kreatif dan KPN Nasional dan Internasional | Orang | | Orang | 120 Orang | **166,953,177** | | | | | | 120 Orang | **166,952,825** | |
| 2 | 19 | 02 | 1.02 | 02 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | JPI<br>PPAN | 37 Orang<br>13 Orang | | | 37 Orang<br>13 Orang | 166,953,177 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan Berkualitas | Peserta Pemuda PPAN, JPI dan KPN | 37 Orang<br>13 Orang | 166,952,825 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga | orang | | orang | 791 orang | **8,369,999,857** | | | | | | 791 orang | **2,369,990,000** | |
| **2** | **19** | **03** | 1.01 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Jumlah peserta olahraga Tradisional | Orang | | Orang | 465 Orang | **1,310,729,750** | | | | | | 465 Orang | **310,730,000** | |
| 2 | 19 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Festivsl Olahraga Rekreasi Tingkat Provinsi<br>Lomba Olahraga Tradisional (HORNAS)<br>Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,310,729,750 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan Berkualitas | Masyarakat | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 310,730,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **19** | **03** | 1.03 | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional** | Jumlah Atlet berprestasi | Orang | | Orang | 1342 Orang | **891,768,728** | | | | | | 1342 Orang | **891,760,000** | |
| 2 | 19 | 03 | 1.03 | 03 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | Pra POPNAS | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 891,768,728 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan Berkualitas | Atlet, Pelatih dan Official | 1 Kegiatan | 891,760,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **19** | **03** | 1.04 | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | Jumlah atlet yang dibina | Atlit | | Atlit | 100 Atlit | **6,167,501,379** | | | | | | 100 Atlit | **1,167,500,000** | |
| 2 | 19 | 03 | 1.04 | 03 | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Anggar<br>Karate<br>Sepak Takraw<br>Silat<br>Taekwondo<br>Tenis Meja | 6 Atlet<br>10 Atlet<br>16 Atlet<br>5 Atlet<br>6 Atjlet<br>7 Atlet | | | 6 Atlet<br>10 Atlet<br>16 Atlet<br>5 Atlet<br>6 Atjlet<br>7 Atlet | 6,167,501,379 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Atlet, Pelatih dan Official | 6 Atlet<br>10 Atlet<br>16 Atlet<br>5 Atlet<br>6 Atjlet<br>7 Atlet | 1,167,500,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **3,121,424,975** | | | | | | | **3,121,382,707** | |
| **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | Persentase peningkatan layanan keagamaan, ada dan budaya | % | | % | 100 % | **440,266,712** | | | | | | 100 % | **440,286,605** | |
| **2** | **22** | **02** | 1.02 | | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi** | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Cagar Budaya | | Cagar Budaya | 10 Cagar Budaya | **440,266,712** | | | | | | 10 Cagar Budaya | **440,286,605** | |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah adat/tradisi dan nilai budaya yang terdokumentasi<br>Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional dan internasional | 14 Dokumen<br>5 Dokumen | | | 14 Dokumen<br>5 Dokumen | 181,709,473 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Agama Budaya Semarak | Siswa SMA/SMK dan Masyarakat | 14 Dokumen<br>5 Dokumen | 181,709,528 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 02 | 1.02 | 02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Lomba Pekan Budaya Nasional<br>Pelatihan/BIMTEK | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 258,557,239 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Agama Budaya Semarak | Siswa SMA/SMK dan Masyarakat | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 258,577,077 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | persentase patisipan ketahanan sosial dan ketahanan budaya | % | | % | 100 % | **946,863,820** | | | | | | 100 % | **946,800,000** | |
| **2** | **22** | **03** | 1.01 | | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Gelar Budaya Daerah pada event / lomba kesenian di luar daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 4 Kegiatan | **946,863,820** | | | | | | 4 Kegiatan | **946,800,000** | |
| 2 | 22 | 03 | 1.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah<br>Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara | 1 Paket<br>1 Paket | | | 1 Paket<br>1 Paket | 946,863,820 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Agama Budaya Semarak | Siswa, Mahasiswa, Seniman Seni Rupa, Guru dan Masyarakat umum | 1 Paket<br>1 Paket | 946,800,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **22** | **05** | | | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan | % | | % | 12,67 % | **391,783,566** | | | | | | 12,67 % | **391,784,102** | |
| **2** | **22** | **05** | 1.01 | | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi** | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | % | | % | 12.67 % | **391,783,566** | | | | | | 12.67 % | **391,784,102** | |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | 01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Olimpiade/Kompetisi Sejarah Tingkat Provinsi<br>Sosialisasi Pelestarian Sejarah Purbakala<br>Verifikasi Objek Benda Cagar Budaya | 1 Kegiatan<br>1 Kegaitan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegaitan<br>1 Kegiatan | 216,459,590 | | | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Agama Budaya Semarak | Cagar Budaya di Kabupaten/ Kota | 1 Kegiatan<br>1 Kegaitan<br>1 Kegiatan | 216,459,782 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 05 | 1.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | Bimtek Pendataan Bagi Cagar Budaya Kab/Kota<br>Penetapan/Pemeringkatan Cagar Budaya | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 175,323,976 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Agama Budaya Semarak | Cagar Budaya di Kabupaten/ Kota | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 175,324,320 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **2** | **22** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **1,342,510,877** | | | | | | 100 % | **1,342,512,000** | |
| **2** | **22** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan Museum Provinsi** | Barang Koleksi Museum Provinsi | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **1,342,510,877** | | | | | | 12 Bulan | **1,342,512,000** | |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu | Barang Koleksi Museum Provinsi | 24 Paket | | | 24 Paket | 253,199,836 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Agama Budaya Semarak | Presentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur | 24 Paket | 253,200,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 02 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | BIMTEK Edukator/Pemandu Museum<br>BIMTEK Konserfator<br>BIMTEK Registrasi Koleksi Museum | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 779,031,080 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Agama Budaya Semarak | Presentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 779,032,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | 22 | 06 | 1.01 | 04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | CCTV<br>Kotak Kaca Objek<br>Kursi Biro<br>Lemari Penyimpanan<br>Lemari Untuk Ruang Pamer<br>Meja 1/2 Biro<br>Worksation | 1 Paket<br>5 Buah<br>6 Buah<br>3 Buah<br>5 Buah<br>6 Buah<br>1 Paket | | | 1 Paket<br>5 Buah<br>6 Buah<br>3 Buah<br>5 Buah<br>6 Buah<br>1 Paket | 310,279,961 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Agama Budaya Semarak | Presentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur | 1 Paket<br>5 Buah<br>6 Buah<br>3 Buah<br>5 Buah<br>6 Buah<br>1 Paket | 310,280,000 | Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **102,992,868,110** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **27,561,915,994** | | | | | | 100 % | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen RENJA, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **1,545,136,678** | | | | | | 5 Dokumen | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen RENJA, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD<br>Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah | 5 Dokumen<br>1 Rapat | | | 5 Dokumen<br>1 Rapat | 1,965,454,860 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima<br>Kesehatan Prima | 0 | 5 Dokumen<br>1 Rapat | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah hasil RISKESNAS Isu-Isu Strategis Kesehatan yang diseminasikan untuk kebutuhan perencanaan program dan kebijakan kesehatan<br>Jumlah pelaksanaan pemutakhiran data profil kesehatan | 1 Kegiatan<br>4 Kegiatan | | | 1 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 562,409,248 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 1 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen laporan keuangan dan TLHP | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **19,701,610,453** | | | | | | 2 Dokumen | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 19,500,000,231 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 201,610,222 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 2 Laporan | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya Pelayanan Administrasi SDM Aparatue Sesuai Tugas Dan Fungsi | % | | % | 100 % | **618,182,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya melalui Diklat/Bimtek Dikes<br>Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya melalui Diklat/Bimtek UPTD Labkesda | 15 Orang<br>5 Orang | | | 15 Orang<br>5 Orang | 618,182,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 15 Orang<br>5 Orang | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan prasarana Perangkat Daerah | % | | % | 0100 % | **2,304,607,056** | | | | | | 0100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dikes<br>Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD Labkesda | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 2,304,607,056 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 %<br>100 % | 0 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **3,392,379,807** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase layanan dan manajemen Adminstrasi perkantoran Dikes<br>Persentase layanan dan manajemen Adminstrasi perkantoran UPTD Labkesda | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 3,392,379,807 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 %<br>100 % | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Jumlah FKTP yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Permenkes 75/2014 | Unit | | Unit | 93 Unit | **73,824,569,630** | | | | | | 93 Unit | **0** | |
| **1** | **02** | **02** | 1.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat Kesehatanuntuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | | % | 100 % | **5,808,070,679** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Layanan Labkesda | 5 Layanan | | | 5 Layanan | 3,801,197,836 | | | | Kesehatan Prima | 0 | 5 Layanan | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase instalasi farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin | 77 % | | | 77 % | 2,006,872,843 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 77 % | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 1.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | Presentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | % | | % | 100 % | **67,232,529,104** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Kab/Kota memperoleh dukungan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Risiko akibat krisis kesehatan | 6 Kabupaten /Kota | | | 6 Kabupaten /Kota | 3,766,443,744 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima<br>Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase Jumlah kasus KLB/Wabah yang ditangani 1 x 24 jam | 100 % | | | 100 % | 889,607,908 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 0 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Julah Ibu Hamil Berisiko yang didampingi selama masa kehamilan oleh mahasiswa dan Dasawisma<br>Jumlah bidan yang dilatih penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi<br>Jumlah kab/ kota yang 100% puskesmasnya mencapai UCI | 545 Ibu Hamil<br>35 Bidan<br>6 Kabupaten /Kota | | | 545 Ibu Hamil<br>35 Bidan<br>6 Kabupaten /Kota | 406,420,841 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 545 Ibu Hamil<br>35 Bidan<br>6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Ibu Hamil KEK dan balita kurang gizi yang endapat makanan tambahan | 500 Bumil dab Balita | | | 500 Bumil dab Balita | 1,815,559,425 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 500 Bumil dab Balita | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Kab/kota yang 80% PKm nya menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar | 6 Kabupaten /Kota | | | 6 Kabupaten /Kota | 94,410,182 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Persentase sarana air minum dan sanitasi lingkungan yang dilakukan pengawasan | 73 % | | | 73 % | 342,139,127 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 73 % | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Penyakit menular yang ditemukan dan ditangani<br>Jumlah Populasi umumyang dilakukan deteksi dinifaktor risiko PTM | 200 Penyakit<br>100 Populasi | | | 200 Penyakit<br>100 Populasi | 1,697,127,738 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 200 Penyakit<br>100 Populasi | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji | Jumlah pelaksanaan Monev Istithaah kesehatan haji | 4 Kali | | | 4 Kali | 105,499,005 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 4 Kali | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Kab/Kota yang memiliki 50% PKM yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa<br>Jumlah Siswa SMA/SMK/Sederajat yang memahami Bahaya Rokok dan Napza di sekolah | 6 Kabupaten /Kota<br>165 Siswa | | | 6 Kabupaten /Kota<br>165 Siswa | 518,737,703 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota<br>165 Siswa | 0 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen PERDA yang direvisi<br>Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan terpadu<br>Jumlah penanganan keluhan jaminan kesehatan<br>Jumlah penduduk yang enerima manfaat JKN<br>Jumlah RS yang dilakukan MoU dalam pelayanan pasien Rujukan ke luar daerah | 0 Dokumen<br>3600 Jiwa<br>3 Penanganan<br>205584 jiwa<br>0 RS | | | 0 Dokumen<br>3600 Jiwa<br>3 Penanganan<br>205584 jiwa<br>0 RS | 56,920,025,961 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 0 Dokumen<br>3600 Jiwa<br>3 Penanganan<br>205584 jiwa<br>0 RS | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah kab/kota yang memperoleh penguatan program pelayanan kesehatan primer | 6 Kabupaten /Kota | | | 6 Kabupaten /Kota | 2,559,779,342 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | 1.04 | | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah FKTL yang dilakukan penguatan akses pelayanan kesehatan di FKTL | RS Kelas C dan D | | RS Kelas C dan D | 6 RS Kelas C dan D | **783,969,847** | | | | | | 6 RS Kelas C dan D | **0** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah FKTL yang dilakukan penguatan akses pelayanan kesehatan di FKTL | 6 RS Keals C dan D | | | 6 RS Keals C dan D | 783,969,847 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 RS Keals C dan D | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase Kab/Kota yang sudah memiliki pemetaan perencanaan dan distribusi nakes di FKTP | % | | % | 80,6 % | **347,014,834** | | | | | | 80,6 % | **0** | |
| **1** | **02** | **03** | 1.01 | | **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi** | Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi yang terencana | Kabupaten /Kota | | Kabupaten/Kota | 6 Kabupaten /Kota | **199,666,816** | | | | | | 6 Kabupaten /Kota | **0** | |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | 02 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen Perencanaan dan distribusi Nakes di FKTP dan FKTL tingkat Provinsi Gorontalo | 6 Kabupaten /Kota | | | 6 Kabupaten /Kota | 199,666,816 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | 1.02 | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | Berkembangnya mutu dan meningkatnya kompetensi Teknis Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi | % | | % | 100 % | **147,348,018** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Nakes Teladan tingkat Provinsi yang di seleksi mengikuti nakes teladan | 54 Nakes | | | 54 Nakes | 147,348,018 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 54 Nakes | 0 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 04 | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar | % | | % | 70 % | **322,347,652** | | | | | | 70 % | **0** | |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | | **Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)** | Terbitnya Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | Kabupaten /Kota | | Kabupaten/Kota | 6 Kabupaten /Kota | **322,347,652** | | | | | | 6 Kabupaten /Kota | **0** | |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Persentase produk dan alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat | 86 % | | | 86 % | 322,347,652 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 86 % | 0 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 05 | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dan CSR | % | | % | 75 % | **937,020,000** | | | | | | 75 % | **0** | |
| 1 | 02 | 05 | 1.01 | | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah Penyebarluasan informasi PHBS dan isu isu kesehatan melalui media elektronik dan media cetak | Kabupaten /Kota | | Kabupaten/Kota | 6 Kabupaten /Kota | **937,020,000** | | | | | | 6 Kabupaten /Kota | **0** | |
| 1 | 02 | 05 | 1.01 | 01 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Penyebarluasan informasi PHBS dan isu isu kesehatan melalui media elektronik dan media cetak | 6 Kabupaten /Kota | | | 6 Kabupaten /Kota | 937,020,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 6 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Kesehatan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **284,084,176** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif | % | | % | 80 % | **72,996,176** | | | | | | 80 % | **0** | |
| **2** | **14** | **02** | 1.01 | | **Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** | Adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara terpadu dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk | Tahun | | Tahun | 1 Tahun | **72,996,176** | | | | | | 1 Tahun | **0** | |
| 2 | 14 | 02 | 1.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Dokumen Grand Desain Kependudukan Tingkat Provinsi Gorotalo | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 72,996,176 | | | | Kesehatan Prima | 0 | 1 Dokumen | 0 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif | % | | % | 80 % | **211,088,000** | | | | | | 80 % | **0** | |
| **2** | **14** | **03** | 1.02 | | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** | Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Ormas dalam pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | % | | % | 80 % | **211,088,000** | | | | | | 80 % | **0** | |
| 2 | 14 | 03 | 1.02 | 01 | Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah bidan yang dilatih pelayanan pelayanan KB pasca persalinan | 20 Bidan | | | 20 Bidan | 173,572,000 | | | | Kesehatan Prima | 0 | 20 Bidan | 0 | Dinas Kesehatan |
| 2 | 14 | 03 | 1.02 | 02 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah fasilitator kesehatan reproduksi remaja yang dilatih | 137 Fasilitator | | | 137 Fasilitator | 37,516,000 | | | | Kesehatan Prima | 0 | 137 Fasilitator | 0 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **77,734,914,041** | | | | | | | **102,492,882,854** | |
| **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **47,392,770,144** | | | | | | 100 % | **61,088,641,922** | |
| **1** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Perencanaan | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | **727,269,085** | | | | | | 1 dokumen | **927,949,705** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renja, RKA, LAKIP, LKPJ dan LPPD | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 727,269,085 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 1 dokumen | 927,949,705 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Tersusunnya Dokumen Keuangan | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | **20,286,689,700** | | | | | | 1 dokumen | **21,484,689,735** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Biaya Gaji/Tunjangan ASN | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 19,684,340,980 | | | | Kesehatan Prima | 0 | 1 dokumen | 20,682,340,960 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 602,348,720 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 1 dokumen | 802,348,755 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi | org | | org | 25 org | **521,902,482** | | | | | | 25 org | **976,002,482** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya melalui Diklat/Bimtek RSUD Ainun Habibie | 25 org | | | 25 org | 521,902,482 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 25 org | 976,002,482 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi | % | | % | 100 % | **671,732,121** | | | | | | 100 % | **700,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase layanan dan manajemen Adminstrasi perkantoran RSUD Ainun Habibie | 100 % | | | 100 % | 671,732,121 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 700,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **6,185,176,756** | | | | | | 100 % | **7,000,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyelesaian Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran RSUD Ainun Habibie | 100 % | | | 100 % | 6,185,176,756 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 7,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **01** | 1.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | | | **19,000,000,000** | | | | | | | **30,000,000,000** | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Persentase Kualitatas Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis dan Penunjang | 100 % | | | 100 % | 19,000,000,000 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Pendapatan dari BLUD | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 30,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | Persentase Sarana Prasara dan alat (SPA) sesuai standar dan capaian Retribusi RSU Ainun Habibie | % | | % | 100 % | **22,927,493,963** | | | | | | 100 % | **33,049,550,998** | |
| **1** | **02** | **02** | 1.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi** | Persentase Sarana Prasara dan alat (SPA) sesuai standar dan capaian Retribusi RSU Ainun Habibie | % | | % | 100 % | **22,927,493,963** | | | | | | 100 % | **33,049,550,998** | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah sarana prasarana RS Provinsi yang dibangun/ditingkatkan | 100 % | | | 100 % | 3,660,877,117 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 4,000,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | 09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Saspras RS yang dilakukan pemeliharaan | 100 % | | | 100 % | 8,532,826,163 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 10,339,344,212 | Dinas Kesehatan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 02 | 02 | 1:01 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase kualitas Pelayanan Medik RSUD dr. Hasri Ainun Habibie | 100 % | | | 100 % | 10,733,790,683 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 18,710,206,786 | Dinas Kesehatan |
| **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie | % | | % | 100 % | **7,414,649,934** | | | | | | 100 % | **8,354,689,934** | |
| **1** | **02** | **03** | 1.02 | | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi** | Persentase capaian Retribusi RSU Ainun Habibie | % | | % | 100 % | **7,414,649,934** | | | | | | 100 % | **8,354,689,934** | |
| 1 | 02 | 03 | 1:02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah medis, paramedis dan penunjang medis yang kontrakkerjakan dan ditingkatkan pengetahuan/ketrampilannya | 100 % | | | 100 % | 7,414,649,934 | Kab. Gorontalo, Limboto, Dutulanaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Kesehatan Prima | 0 | 100 % | 8,354,689,934 | Dinas Kesehatan |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **103,161,446,356** | | | | | | | **0** | |
| **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **29,815,729,125** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **03** | **01** | 1:01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | Keg | | Keg | 6 Keg | **1,530,514,631** | | | | | | 6 Keg | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 1:01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 3 Keg | | | 3 Keg | 933,216,234 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 3 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 1:01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 1 Keg | | | 1 Keg | 597,298,397 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 1:02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | Keg | | Keg | 1 Keg | **22,573,700,146** | | | | | | 1 Keg | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 1 Keg | | | 1 Keg | 22,373,700,956 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 1 keg | | | 1 keg | 199,999,190 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentase Peningkatan Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 1 keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Prosentase Pelayanan Jasa admin perkantoran | % | | % | 100 % | **766,018,154** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek | 150 Orang | | | 150 Orang | 766,018,154 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur | 150 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | Keg | | Keg | 3 Keg | **1,753,038,220** | | | | | | 3 Keg | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 3 Keg | | | 3 Keg | 1,753,038,220 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur | 3 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah kegiatan yang dilaksanakan | Keg | | Keg | 3 Keg | **3,192,457,974** | | | | | | 3 Keg | **0** | |
| 1 | 03 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prosentase Pelayanan Jasa admin perkantoran | 100 % | | | 100 % | 3,192,457,974 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentase Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur | 100 % | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun | m | | m | 3500 m | **10,636,079,999** | | | | | | 3500 m | **0** | |
| **1** | **03** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun | m | | m | 3500 m | **6,116,525,356** | | | | | | 3500 m | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Dok Perencanaan dan Pengawasan untuk bangunan pegendali banjir | 6 Dok | | | 6 Dok | 308,564,579 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 6 Dok | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Jumlah Panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun | 900 m | | | 900 m | 3,150,535,805 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 900 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun | 3500 m | | | 3500 m | 2,608,438,972 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 3500 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Jumlah Panjang Pengamanan Sungai/Tebing yang dibangun | 3500 m | | | 3500 m | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 3500 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 59 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Jumlah Panjang Tanggul pengaman pantai yang dibangun | 900 m | | | 900 m | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 900 m | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.01 | 63 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | Jumlah Keg. Wokshop, Koordinasi dan sosialiasasi SDA lintas sektoral | 3 Keg | | | 3 Keg | 48,986,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pengaman sungai dan Pantai sesuai standart yang dibangun (M) | 3 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **02** | 1.02 | | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Luas Jaringan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan | Ha | | Ha | 11074 Ha | **4,519,554,643** | | | | | | 11074 Ha | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Dok. data base SDA dan dok, perencanaan serta pengawasan | 8 Dok | | | 8 Dok | 463,069,720 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap | 8 Dok | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Luas Sawah YAng direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya | 11074 Ha | | | 11074 Ha | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap | 11074 Ha | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 02 | 1.02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Jumlah Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara | 11074 Ha | | | 11074 Ha | 4,056,484,923 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Layanan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap | 11074 Ha | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | Jumlah jiwa yang terlayani air bersih | jiwa | | jiwa | 3988 jiwa | **3,811,738,045** | | | | | | 3988 jiwa | **0** | |
| **1** | **03** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** | Jumlah Jiwa Yang terlayani Air Bersih | Jiwa | | Jiwa | 3988 Jiwa | **3,811,738,045** | | | | | | 3988 Jiwa | **0** | |
| 1 | 03 | 03 | 1.01 | 08 | Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi | Jumlah jiwa yang yang terlayani air bersih | 3988 jiwa | | | 3988 jiwa | 3,811,738,045 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Cakupan layanan air minum | 3988 jiwa | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** | Persentase Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan Volume Sampah yang Dikelola | % | | % | 100 % | **6,805,626,557** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **03** | **04** | 1.01 | | **Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional** | Persentase Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi dan Volume Sampah yang Dikelola | orang | | orang | 650 orang | **6,805,626,557** | | | | | | 650 orang | **0** | |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 06 | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan | Jumlah Volume Sampah Yang Dikelola | 25880 Ton | | | 25880 Ton | 5,345,841,487 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Jumlah Masyarakat yang tersosialisai dan pelatihan pengelolaan Persampahan | 25880 Ton | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 07 | Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat yang tersosialisai dan pelatihan pengelolaan Persampahan | 650 Orang | | | 650 Orang | 1,353,106,668 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Jumlah Masyarakat yang tersosialisai dan pelatihan pengelolaan Persampahan | 650 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 04 | 1.01 | 08 | Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | Jumlah Masyarakat yang tersosialisai dan pelatihan pengelolaan Persampahan | 650 Orang | | | 650 Orang | 106,678,402 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Jumlah Masyarakat yang tersosialisai dan pelatihan pengelolaan Persampahan | 650 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi | jiwa | | jiwa | 7180 jiwa | **1,148,244,202** | | | | | | 7180 jiwa | **0** | |
| **1** | **03** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi** | Jumlah Jiwa Yang terlayani Sanitasi | jiwa | | jiwa | 7180 jiwa | **1,148,244,202** | | | | | | 7180 jiwa | **0** | |
| 1 | 03 | 06 | 1.01 | 04 | Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah jiwa yang terlayani sanitasi | 7180 jiwa | | | 7180 jiwa | 1,148,244,202 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Cakupan Layanan Sanitasi | 7180 jiwa | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **07** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan | Kawasan | | Kawasan | 1 Kawasan | **2,667,756,864** | | | | | | 1 Kawasan | **0** | |
| **1** | **03** | **07** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi** | Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan | Kws | | Kws | 1 Kws | **2,667,756,864** | | | | | | 1 Kws | **0** | |
| 1 | 03 | 07 | 1.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan | 1 Kws | | | 1 Kws | 1,623,165,880 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 1 Kws | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 07 | 1.01 | 03 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan | 1 kws | | | 1 kws | 750,548,185 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 1 kws | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 07 | 1.01 | 04 | Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah kawasan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan yang dibangun/ditingkatkan | 1 kws | | | 1 kws | 294,042,799 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 1 kws | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun | Unit | | Unit | 1 Unit | **5,493,264,877** | | | | | | 1 Unit | **0** | |
| **1** | **03** | **08** | 1.01 | | **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** | Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasaran Gedung Perkantoran yang dibangun | Unit | | Unit | 1 Unit | **5,493,264,877** | | | | | | 1 Unit | **0** | |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 01 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun | 1 unit | | | 1 unit | 4,124,848,307 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Presentase dalam Kondisi Baik | 1 unit | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 08 | 1.01 | 02 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | Jumlah Gedung serta Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran yang dibangun | 1 unit | | | 1 unit | 1,368,416,570 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Presentase dalam Kondisi Baik | 1 unit | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **09** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum | Kawasan | | Kawasan | 1 Kawasan | **1,969,731,064** | | | | | | 1 Kawasan | **0** | |
| **1** | **03** | **09** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum | kws | | kws | 1 kws | **1,969,731,064** | | | | | | 1 kws | **0** | |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum | 1 kws | | | 1 kws | 1,384,638,879 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 1 kws | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 09 | 1.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Kawasan yang terfasilitasi Layanan Umum | 1 kws | | | 1 kws | 585,092,185 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Presentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik | 1 kws | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | Kondisi Mantap Jalan | % | | % | 65,20 % | **37,734,878,986** | | | | | | 65,20 % | **0** | |
| **1** | **03** | **10** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** | Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan | km | | km | 9.50 km | **37,734,878,986** | | | | | | 9.50 km | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan | 10 Dok | | | 10 Dok | 7,971,873,804 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 10 Dok | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 05 | Pembangunan Jalan | Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang Dibangun/ Ditingkatkan | 9.50 Km | | | 9.50 Km | 16,810,064,116 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 9.50 Km | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara secara berkala | 2 Km | | | 2 Km | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 2 Km | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Jumlah Panjang Jalan Provinsi yang rutin dipelihara | 50 km | | | 50 km | 8,271,363,051 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 50 km | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Jumlah Panjang Jembatan Provinsi yang Dibangun/Diganti | 1 Bh | | | 1 Bh | 3,545,469,755 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 1 Bh | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 10 | 1.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara | 300 M | | | 300 M | 1,136,108,260 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis | 300 M | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **11** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | Persentase peningkatan pelayanan jasa konstruksi | % | | % | 100 % | **879,789,439** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **03** | **11** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** | Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi | % | | % | 100 % | **501,115,700** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Jasa Konstruksi yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 240 Orang | | | 240 Orang | 353,885,960 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi SDM Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | 240 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 11 | 1.01 | 07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | JUmlah Badan Usaha yang Berkualitas | 105 Orang | | | 105 Orang | 147,229,740 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi SDM Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | 105 Orang | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **11** | 1.02 | | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** | Persentase Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi | % | | % | 100 % | **378,673,739** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 1 | 03 | 11 | 1.02 | 03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Kegiatan | 3 Keg | | | 3 Keg | 378,673,739 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi SDM Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi | 3 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | Jumlah laporan pemanfaatan dan egalisasi rencana umum dan rencana rinci tata ruang | laporan | | laporan | 6 laporan | **2,198,607,198** | | | | | | 6 laporan | **0** | |
| **1** | **03** | **12** | 1.01 | | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** | Jumlah Laporan | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **645,330,177** | | | | | | 6 Laporan | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang | 1 Perda | | | 1 Perda | 268,698,900 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 1 Perda | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 12 | 1.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Laporan | 4 Kabupaten /Kota | | | 4 Kabupaten /Kota | 376,631,277 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 4 Kabupaten /Kota | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | 1.02 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** | Jumlah Laporan | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **611,089,917** | | | | | | 6 Laporan | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | 03 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang | 3 Keg | | | 3 Keg | 383,756,478 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 3 Keg | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 1.02 | 04 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Laporan | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 227,333,439 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 6 Laporan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | 1.03 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | Jumlah Laporan | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **449,302,965** | | | | | | 6 Laporan | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 324,302,965 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 6 Laporan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1 | 03 | 12 | 1.03 | 02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | Jumlah Laporan | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 500,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 6 Laporan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | **03** | **12** | 1.04 | | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi** | Jumlah Laporan | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **492,884,139** | | | | | | 6 Laporan | **0** | |
| 1 | 03 | 12 | 1.04 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah Laporan | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 492,884,139 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Persentasi Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi | 6 Laporan | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **8,877,362,641** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **10** | **03** | | | **PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM** | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | Bidang | | Bidang | 22 Bidang | **8,655,871,674** | | | | | | 22 Bidang | **0** | |
| **2** | **10** | **03** | 1.01 | | **Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi** | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | Bidang Tanah | | Bidang Tanah | 22 Bidang Tanah | **8,655,871,674** | | | | | | 22 Bidang Tanah | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 10 | 03 | 1.01 | 01 | Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | 22 Bidang Tanah | | | 22 Bidang Tanah | 8,655,871,674 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | 22 Bidang Tanah | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **2** | **10** | **04** | | | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | Bidang | | Bidang | 22 Bidang | **221,490,967** | | | | | | 22 Bidang | **0** | |
| **2** | **10** | **04** | 1.01 | | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | Bidang Tanah | | Bidang Tanah | 22 Bidang Tanah | **221,490,967** | | | | | | 22 Bidang Tanah | **0** | |
| 2 | 10 | 04 | 1.01 | 01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | 22 Bidang Tanah | | | 22 Bidang Tanah | 221,490,967 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Jumlah Bidang Tanah yang tersedia untuk Pembangunan | 22 Bidang Tanah | 0 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **24,167,668,576** | | | | | | | **46,807,342,787** | |
| **1** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **8,279,446,721** | | | | | | 100 % | **14,750,000,000** | |
| **1** | **04** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | Laporan | | Laporan | 7 Laporan | **490,765,684** | | | | | | 7 Laporan | **700,000,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 148,721,684 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Pemerintah Daerah | 3 Laporan | 200,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 342,044,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Pemerintah Daerah | 4 Laporan | 500,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | **5,788,001,965** | | | | | | 1 Laporan | **6,300,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 5,741,687,454 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Pemerintah | 12 Bulan | 6,000,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 46,314,511 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Pemerintah | 1 Laporan | 300,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek | Orang | | Orang | 5 Orang | **71,392,000** | | | | | | 5 Orang | **250,000,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN | 5 Orang | | | 5 Orang | 71,392,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Aparatur Sipil Negara | 5 Orang | 250,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **464,436,295** | | | | | | 1 Kegiatan | **4,000,000,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 464,436,295 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Seluruh ASN/ Staf | 1 Kegiatan | 4,000,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Prosentase Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **1,464,850,777** | | | | | | 100 % | **3,500,000,000** | |
| 1 | 04 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prosentasi Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 1,464,850,777 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN dan Tenaga Pelayanan Umum | 100 % | 3,500,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | Jumlah Unit Rumah yang terbangun/rehab bagi Korban bencana alam dan dampak pembangunan provinsi | unit | | unit | 5 unit | **2,137,711,963** | | | | | | 5 unit | **10,257,342,787** | |
| **1** | **04** | **02** | 1.01 | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | Jumlah Dokumen kegiatan yang dilaksanakan | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **633,796,649** | | | | | | 2 Dokumen | **1,477,986,710** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen kegiatan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 438,631,073 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 1 Dokumen | 450,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 02 | Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 0 Laporan | | | 0 Laporan | 0 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 0 Laporan | 322,843,355 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.01 | 04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 0 Laporan | | | 0 Laporan | 0 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 0 Laporan | 505,143,355 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1:01 | 05 | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen kegiatan yang dilaksanakan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 195,165,576 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 1 Dokumen | 200,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **02** | 1:02 | | **Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | Laporan | | Laporan | 3 Laporan | **763,983,822** | | | | | | 3 Laporan | **1,789,153,193** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 01 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 284,664,987 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 1 Laporan | 300,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 02 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 0 Laporan | | | 0 Laporan | 0 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 0 Laporan | 355,114,273 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 03 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 256,073,122 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 1 Laporan | 300,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 04 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 223,245,713 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 1 Laporan | 250,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 05 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 0 Laporan | | | 0 Laporan | 0 | Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 0 Laporan | 307,319,460 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 02 | 1.02 | 06 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan | 0 Laporan | | | 0 Laporan | 0 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 0 Laporan | 276,719,460 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **04** | **02** | 1.03 | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi** | Jumlah Unit Rumah yang terbangun atau Rehab bagi korban bencana alam provinsi | Unit | | Unit | 5 Unit | **739,931,492** | | | | | | 5 Unit | **6,990,202,884** | |
| 1 | 04 | 02 | 1.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Unit Rumah yang di rehab bagi korban bencana | 0 Unit | | | 0 Unit | 0 | Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Masyarakat Korban Bencana | 0 Unit | 2,942,455,931 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 02 | 1.03 | 02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen kegiatan yang dilaksanakan | 0 Dokumen | | | 0 Dokumen | 0 | Kab. Pohuwato Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Infrastruktur Merata | Masyarakat Korban Bencana | 0 Dokumen | 1,047,746,953 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 02 | 1.03 | 04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Unit Rumah Hunian yang dibangun bagi korban bencana alam | 5 Unit | | | 5 Unit | 739,931,492 | Kab. Bone Bolango, Bulawa, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Masyarakat Korban Bencana | 5 Unit | 3,000,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | Persentase Luasan Kawasan yang di tangani | Ha | | Ha | 24 Ha | **13,750,509,892** | | | | | | 24 Ha | **21,800,000,000** | |
| **1** | **04** | **03** | 1.01 | | **Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha** | Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaksanakan | Laporan | | Laporan | 11 Laporan | **4,077,748,636** | | | | | | 11 Laporan | **4,100,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 02 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh | Jumlahh Laporan Kegiatan Sosialisasi Sadar Kumu | 9 Laporan | | | 9 Laporan | 899,503,041 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Piloliyanga Kab. Boalemo, Tilamuta, Hungayonaa Kab. Gorontalo, Limboto, Bolihuangga Kab. Gorontalo, Limboto. Dutulanaa Kab. Gorontalo, Limboto, Bongohulawa Kab. Gorontalo, Telaga, Mongolato Kab. Gorontalo, Telaga, Dulohupa Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Leato Selatan Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Donggala | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Kesehatan Prima | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 9 Laporan | 900,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 1.01 | 09 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 3,178,245,595 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat | 3 Laporan | 3,200,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | **04** | **03** | 1.02 | | **Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha** | Luasan Kawasan yang ditangani | Ha | | Ha | 38 Ha | **9,672,761,256** | | | | | | 38 Ha | **17,700,000,000** | |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Dokumen Perencanaan (Master Plan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bone Bolango, Review RP3KP) yang dilaksanakan | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 1,393,373,002 | Kab. Bone Bolango, Kabila, Padengo Kab. Bone Bolango, Kabila, Pauwo Kab. Bone Bolango, Suwawa, Bube Baru | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 2 Dokumen | 1,400,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 03 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Unit Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh | 50 Unit | | | 50 Unit | 2,553,771,654 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 50 Unit | 10,500,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 1 | 04 | 03 | 1.02 | 07 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani | 38 Ha | | | 38 Ha | 5,725,616,600 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Piloliyanga Kab. Boalemo, Tilamuta, Hungayonaa | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Infrastruktur Merata | Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 38 Ha | 5,800,000,000 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **11,354,934,098** | | | | | | | **12,025,327,807** | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **7,436,632,967** | | | | | | 100 % | **7,280,128,467** | |
| **1** | **05** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **88,543,100** | | | | | | 1 Dokumen | **108,542,819** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 53,981,491 | Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 63,981,721 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 34,561,609 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 44,561,098 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **4,744,767,484** | | | | | | 1 Dokumen | **5,229,942,615** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Biaya Gaji/Tunjangan ASN | 14 Bulan | | | 14 Bulan | 4,600,000,211 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN dan Laporan Keuangan | 14 Bulan | 5,075,193,696 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 144,767,273 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN dan Laporan Keuangan | 1 Dokumen | 154,748,919 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan | Orang | | Orang | 20 Orang | **489,244,000** | | | | | | 20 Orang | **278,894,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM aparaturyang mengikuti Bimtekdan Diklat Kesekretariatan | 20 Orang | | | 20 Orang | 489,244,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo | 20 Orang | 278,894,000 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariatan OPD | Persen | | Persen | 100 Persen | **1,174,957,864** | | | | | | 100 Persen | **840,228,494** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Ketersediaan Sarpras Kesekretariat OPD | 100 Persen | | | 100 Persen | 1,174,957,864 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 Persen | 840,228,494 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | Persen | | Persen | 100 Persen | **939,120,519** | | | | | | 100 Persen | **822,520,539** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pelayanan Administrasi Perkatoran | 100 Persen | | | 100 Persen | 939,120,519 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 822,520,539 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 02 | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP | % | | % | 100 % | **3,509,051,931** | | | | | | 100 % | **4,235,949,801** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Patroli Rawan Trantibum,Tertib ASN, dan Pam Obvit Aset Daerah | Laporan | | Laporan | 30 Laporan | **3,176,210,855** | | | | | | 30 Laporan | **3,785,056,559** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Deteksi Dini<br>Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit Aset Daerah<br>Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub | 8 Kali<br>30 Laporan<br>75 Laporan<br>4 Laporan | | | 8 Kali<br>30 Laporan<br>75 Laporan<br>4 Laporan | 2,308,813,077 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 8 Kali<br>30 Laporan<br>75 Laporan<br>4 Laporan | 2,748,813,226 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-hari Keagamaan | 8 Laporan | | | 8 Laporan | 1,085,771,866 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 8 Laporan | 1,165,771,866 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 03 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi | Jumlah Peserta Rakor Trantibum | 50 Orang | | | 50 Orang | 15,639,371 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 50 Orang | 35,639,414 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Operasi Penanganan PGOT | 4 Kegiatan | | | 4 Kegiatan | 99,489,764 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 4 Kegiatan | 109,490,422 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih : - Kesemaptaan - Bela Diri - Marching Band<br>Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan) | 50 Orang<br>750 Orang | | | 50 Orang<br>750 Orang | 173,353,191 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 50 Orang<br>750 Orang | 253,353,191 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 02 | 1.01 | 06 | Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Jumlah Personil Satlinmas | 100 Personil | | | 100 Personil | 36,029,519 | Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Lokasi Rawan Trantibum, Onyek Vital, Dan Aset Daerah | 100 Personil | 54,874,373 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **02** | 1.02 | | **Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur** | Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **292,098,527** | | | | | | 6 Laporan | **394,298,619** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Pegawasan Perda/Pergub Provinsi | 10 Kali | | | 10 Kali | 60,624,635 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Masyarakat,ASN dan Badan Usaha | 10 Kali | 80,624,080 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| 1 | 05 | 02 | 1.02 | 03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 231,473,692 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Masyarakat,ASN dan Badan Usaha | 6 Laporan | 313,674,539 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **02** | 1.03 | | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi** | Jumlah Peserta Rakor PPNS | Orang | | Orang | 50 Orang | **40,742,549** | | | | | | 50 Orang | **56,594,623** | |
| 1 | 05 | 02 | 1.03 | 01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Peserta Rakor PPNS | 50 Orang | | | 50 Orang | 40,742,549 | Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi | 50 Orang | 56,594,623 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran | % | | % | 100 % | **409,249,200** | | | | | | 100 % | **509,249,539** | |
| **1** | **05** | **04** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran** | Jumlah Kejadian Kebakaran | Persen | | Persen | 100 Persen | **409,249,200** | | | | | | 100 Persen | **509,249,539** | |
| 1 | 05 | 04 | 1.01 | 04 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Kejadian Kebakaran | 24 Kejadian | | | 24 Kejadian | 409,249,200 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemukimanan Warga dan Lahan | 24 Kejadian | 509,249,539 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **12,185,693,475** | | | | | | | **7,750,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **9,182,313,365** | | | | | | 100 % | **3,100,000,000** | |
| **1** | **05** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **548,183,084** | | | | | | 5 Dokumen | **600,000,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan kegiatan yang dilaksanakan Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu | 35 Dokumen 100 Persen | | | 35 Dokumen 100 Persen | 548,183,084 | Kota Gorontalo, Kota Timur, Padebuolo | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pariwisata Mendunia | - | 35 Dokumen 100 Persen | 600,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Sesuai SAP | SAP | | SAP | 1 SAP | **6,631,144,726** | | | | | | 1 SAP | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Thd Pelayanan Administrasi Keuangan | 100 Persen | | | 100 Persen | 6,574,778,380 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 100 Persen | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 56,366,346 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 5 Dokumen | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Presentase Pegawai Yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana | persentase | | persentase | 100 persentase | **103,040,000** | | | | | | 100 persentase | **0** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana | 100 Persen | | | 100 Persen | 103,040,000 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pariwisata Mendunia | - | 100 Persen | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Presentase Ketersediaam Sarana & Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaan | persen | | persen | 100 persen | **1,125,385,554** | | | | | | 100 persen | **2,000,000,000** | |
| 1 | 05 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Perawatan & Operasional Pemeliharaannya | 100 Persen | | | 100 Persen | 1,125,385,554 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pariwisata Mendunia | 0 | 100 Persen | 2,000,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Dokumen Kepegawaian | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **774,560,001** | | | | | | 5 Dokumen | **500,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Sarana Prasarana | 100 Persen | | | 100 Persen | 774,560,001 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | - | 100 Persen | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | Prorporsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana | % | | % | 80 % | **3,003,380,110** | | | | | | 80 % | **4,650,000,000** | |
| **1** | **05** | **03** | 1.01 | | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi** | Dokumen RPB | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **492,749,476** | | | | | | 1 Dokumen | **700,000,000** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi | Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 492,749,476 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pariwisata Mendunia | 0 | 1 Dokumen | 700,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) | Jumlah Lokasi Rawan Bencana | 20 Desa | | | 20 Desa | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pariwisata Mendunia | 0 | 20 Desa | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | 1.02 | | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana** | Dokumen PRB | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **1,399,216,377** | | | | | | 1 Dokumen | **2,000,000,000** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 01 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | Jumlah Dokumen RPB, KRB dan RAD, Serta Perda PB | 4 Dokumen | | | 4 Dokumen | 551,284,018 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 4 Dokumen | 700,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana | Jumlah masyarakat yg teredukasi | 460 Orang | | | 460 Orang | 458,951,352 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 460 Orang | 800,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 07 | Penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah Dokumen Penilaian Kerusakan dan Kerugian serta Kebutuhan Pasca Bencana | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 388,981,007 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 1 Dokumen | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana | Rata-Rata Penanganan Saat Terjadi Bencana | 6 jam | | | 6 jam | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 6 jam | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1 | 05 | 03 | 1.02 | 10 | Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | | 0 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | 1.03 | | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | Rata-Rata Penanganan Saat Terjadi Bencana | Jam | | Jam | 6 Jam | **1,000,395,549** | | | | | | 6 Jam | **1,450,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 02 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | Rata-rata penanganan saat terjadi bencana | 3 Jam | | | 3 Jam | 357,738,388 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 3 Jam | 350,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Persentase stok logistik dan peralatan bencana yang tertata | 100 Persen | | | 100 Persen | 417,096,161 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 100 Persen | 600,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 1.03 | 05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Rapat Koordinasi Rata-rata Penyajian Data Kejadian | 2 Kali 4 Jam | | | 2 Kali 4 Jam | 225,561,000 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | - | 2 Kali 4 Jam | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **1** | **05** | **03** | 1.04 | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | Jumlah Dunia Usaha/ Lembaga Ormas terkait | lembaga/ormas | | lembaga/ormas | 100 lembaga/ormas | **111,018,708** | | | | | | 100 lembaga/ormas | **500,000,000** | |
| 1 | 05 | 03 | 1.04 | 03 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Jumlah Dunia usaha, LSM/ormas yang terlibat | 100 Dunia UsahaLSM /Ormas | | | 100 Dunia UsahaLSM /Ormas | 111,018,708 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pariwisata Mendunia | - | 100 Dunia UsahaLSM /Ormas | 500,000,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **13,129,492,571** | | | | | | | **14,771,970,493** | |
| **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **5,310,485,027** | | | | | | 100 % | **5,533,361,518** | |
| **8** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan | Dok | | Dok | 4 Dok | **147,082,622** | | | | | | 4 Dok | **161,790,871** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 01 | 1:01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Penyusunan Dokumen Evaluasi<br>Persentase Keselarasan Pelaksanaan Program Dengan Dokumen Perencanaan | 4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>100 % | | | 4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>100 % | 147,082,622 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Kesbang dan Politik Provinsi/Kab/Kota, Instansi Terkait | 4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>100 % | 161,790,871 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1:02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan | % | | % | 100 % | **4,342,631,732** | | | | | | 100 % | **4,311,570,647** | |
| 8 | 01 | 01 | 1:02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 4,232,281,304 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 12 Bulan | 4,190,185,553 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 01 | 1:02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Sesuai SAP | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 110,350,428 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 2 Dokumen | 121,385,094 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1:05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **50,118,000** | | | | | | | **130,000,000** | |
| 8 | 01 | 01 | 1:05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat sesuai rencana | 8 Orang | | | 8 Orang | 50,118,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Aparatur Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo | 8 Orang | 130,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1:06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Presentase ketersediaan Sarana Prasarana dan operasional pemeliharaan | % | | % | 100 % | **236,343,105** | | | | | | 100 % | **350,000,000** | |
| 8 | 01 | 01 | 1:06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase ketersediaan Sarana Prasarana dan operasional pemeliharaan | 100 % | | | 100 % | 236,343,105 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | SKPD Badan Kesbang & Politik Prov. Gtlo | 100 % | 350,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **01** | 1:08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah Jasa Kantor Tersedia Tepat Waktu | Jasa | | Jasa | 8 Jasa | **534,309,568** | | | | | | 8 Jasa | **580,000,000** | |
| 8 | 01 | 01 | 1:08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa kantor tersedia tepat waktu | 8 Jasa | | | 8 Jasa | 534,309,568 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 8 Jasa | 580,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | Persentase capaian penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air | % | | % | 100 % | **261,378,191** | | | | | | 100 % | **150,000,000** | |
| **8** | **01** | **02** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | Jumlah Peserta Rapat | Orang | | Orang | 100 Orang | **261,378,191** | | | | | | 100 Orang | **150,000,000** | |
| 8 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Peserta Sosialisasi Terlaksananya Pelaksanaan Hari Besar Nasional | 100 Orang 4 Kegiatan | | | 100 Orang 4 Kegiatan | 261,378,191 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa | 100 Orang 4 Kegiatan | 150,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | Persentase angka partisipasi politik masyarakat | % | | % | 82 % | **1,557,613,011** | | | | | | 82 % | **2,052,133,078** | |
| **8** | **01** | **03** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Parpol Dalam Proses Demokrasi | Orang | | Orang | 50 Orang | **1,557,613,011** | | | | | | 50 Orang | **2,052,133,078** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 03 | 1:01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Masyarakat yang diberi pemahaman Politik melalui Tatap Muka dan Media Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik | 50 Orang 10 Parpol | | | 50 Orang 10 Parpol | 1,215,199,179 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Ormas, Aktifis Perempuan dan Mahasiswa | 50 Orang 10 Parpol | 1,222,133,078 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | 1:01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 129,394,825 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Ormas, Aktifis Perempuan dan Mahasiswa | 6 Dokumen | 130,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 03 | 1:01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Pelaksanaan Monitoring | 7 Kali | | | 7 Kali | 213,019,007 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Ormas, Aktifis Perempuan dan Mahasiswa | 7 Kali | 700,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | persentase patisipan ketahanan sosial dan ketahanan budaya | % | | % | 100 % | **2,340,010,048** | | | | | | 100 % | **2,400,000,000** | |
| **8** | **01** | **04** | 1:01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | Jumlah LSM/Ormas Yang Diberikan Penguatan Data Base LSM/Orma | LSM/Ormas | | LSM/Ormas | 20 LSM/Ormas | **2,340,010,048** | | | | | | 20 LSM/Ormas | **2,400,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 04 | 1.01 | 01 | Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah LSM/Ormas Yang Diberikan Penguatan | 20 LSM/Ormas | | | 20 LSM/Ormas | 2,340,010,048 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | LSM dan Ormas | 20 LSM/Ormas | 2,400,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA** | persentase patisipan ketahanan sosial dan ketahanan budaya | % | | % | 100 % | **412,183,904** | | | | | | 100 % | **623,412,391** | |
| **8** | **01** | **05** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | Jumlah Peserta Sosialisasi | Orang | | Orang | 20 Orang | **412,183,904** | | | | | | 20 Orang | **623,412,391** | |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Laporan | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 430,980,382 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | Pelaku Ekonomi, Pedagang, Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional, Masyarakat dan Instansi Terkait Serta Pelajar SMA Dan SMK, ASN dan Instansi Terkait | 12 Dokumen | 474,079,394 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 05 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Peserta Kegiatan | 40 Org | | | 40 Org | 508,289,184 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pelaku Ekonomi, Pedagang, Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional, Masyarakat dan Instansi Terkait Serta Pelajar SMA Dan SMK, ASN dan Instansi Terkait | 40 Org | 559,118,082 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 05 | 1:01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Peserta Sosialisasi P4GN | 200 Orang | | | 200 Orang | 27,263,985 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pelaku Ekonomi, Pedagang, Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional, Masyarakat dan Instansi Terkait Serta Pelajar SMA Dan SMK, ASN dan Instansi Terkait | 200 Orang | 200,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | Persentase potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani secara terpadu | % | | % | 100 % | **3,247,822,390** | | | | | | 100 % | **4,013,063,506** | |
| **8** | **01** | **06** | 1:01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | Terwujudnya Stabilitas Daerah | % | | % | 100 % | **3,247,822,390** | | | | | | 100 % | **4,013,063,506** | |
| 8 | 01 | 06 | 1:01 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Tim TPKS<br>Jumlah rapat yang dilaksanakan | 3 Dokumen 2 Kali | | | 3 Dokumen 2 Kali | 311,439,011 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, Forum-Forum Untuk Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini Demi Terwujudnya Stabilitas Daerah | 3 Dokumen 2 Kali | 725,791,869 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | 1:01 | 02 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Kerja | 1 Dokumen 1 Kali | | | 1 Dokumen 1 Kali | 51,286,671 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, Forum-Forum Untuk Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini Demi Terwujudnya Stabilitas Daerah | 1 Dokumen 1 Kali | 120,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Jumlah Rapat Kerja FKDM | 1 Dokumen 1 Kali | | | 1 Dokumen 1 Kali | 30,359,489 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, Forum-Forum Untuk Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini Demi Terwujudnya Stabilitas Daerah | 1 Dokumen 1 Kali | 250,000,000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Peserta Kegiatan Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah kepada Pemerintah Pusat | 100 Orang 100 % | | | 100 Orang 100 % | 2,236,407,333 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, Forum-Forum Untuk Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini Demi Terwujudnya Stabilitas Daerah | 100 Orang 100 % | 2,236,407,333 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8 | 01 | 06 | 1.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Jumlah Rapat | 6 Kali | | | 6 Kali | 618,329,886 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama, Forum-Forum Untuk Deteksi Dini dan Kewaspadaan Dini Demi Terwujudnya Stabilitas Daerah | 6 Kali | 680,864,304 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **42,050,204,251** | | | | | | | **125,000,000** | |
| **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **15,150,258,404** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **1** | **06** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, monev dan pelaporan yang dihasilkan | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | **679,715,903** | | | | | | 2 Laporan | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, monev dan pelaporan yang dihasilkan | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 679,715,903 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pemerintah Daerah | 2 Laporan | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | Orang | | Orang | 120 Orang | **10,273,736,637** | | | | | | 120 Orang | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | 120 Orang | | | 120 Orang | 10,123,737,110 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | ASN | 120 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 149,999,527 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | ASN | 12 Bulan | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Bimbingan Teknis dan Pelatihan | Orang | | Orang | 12 Orang | **97,332,000** | | | | | | 12 Orang | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pelatihandan bimbingan teknis | 12 Orang | | | 12 Orang | 97,332,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah | 12 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Perlengkapan Kantor | Paket | | Paket | 1 Paket | **3,343,159,728** | | | | | | 1 Paket | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | | | 1 Paket | 3,343,159,728 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 1 Paket | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Sarana dan Prasarana | Paket | | Paket | 1 Paket | **756,314,136** | | | | | | 1 Paket | **0** | |
| 1 | 06 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | | | 1 Paket | 756,314,136 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 1 Paket | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | Jumlah lokasi komunitas adat terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial | Lokasi | | Lokasi | 3 Lokasi | **1,429,541,151** | | | | | | 3 Lokasi | **125,000,000** | |
| **1** | **06** | **02** | 1.01 | | **Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | jumlah pelayanan, pengawasan dan perizinan PSDBS (UGB dan PUB) | Pelaku Usaha | | Pelaku Usaha | 12 Pelaku Usaha | **63,500,000** | | | | | | 12 Pelaku Usaha | **125,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 1:01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah pelayanan, pengawasan dan perijinan UGB/PUB | 12 Pelaku Usaha | | | 12 Pelaku Usaha | 63,500,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha/Dunia Usaha | 12 Pelaku Usaha | 125,000,000 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **02** | 1:02 | | **Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi** | Jumlah TKSM yang diberdayakan | Orang | | Orang | 550 Orang | **1,366,041,151** | | | | | | 550 Orang | **0** | |
| 1 | 06 | 02 | 1:02 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah TKSM yang diberdayakan Tersusunnya Data Base Corporate Social Responsibility (CSR), SLRT, dan LK3 di Provinsi Gorontalo | 550 Orang 3 Lembaga | | | 550 Orang 3 Lembaga | 3,566,380,255 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyakarat (TKSM) | 550 Orang 3 Lembaga | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 02 | 1:02 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Jumlah Karang Taruna dan LKSA yang diberdayakan Terlaksananya Bantuan Hibah Uang ke Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo | 18 Lembaga 25 Lembaga | | | 18 Lembaga 25 Lembaga | 1,305,530,200 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyakarat (TKSM) | 18 Lembaga 25 Lembaga | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **03** | | | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | Persentase PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk KPO | % | | % | 88 % | **163,384,759** | | | | | | 88 % | **0** | |
| **1** | **06** | **03** | 1:01 | | **Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal** | Jumlah Tuna Sosial dan KPO yang memperoleh Pelayanan Pendampingan Sosial | orang | | orang | 25 orang | **163,384,759** | | | | | | 25 orang | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 03 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Tuna Sosial dan KPO yang Memperoleh Pelayanan Pendampingan Sosial | 25 orang | | | 25 orang | 163,384,759 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti | 25 orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | Persentase PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dalam lembaga dan LKS termasuk KPO | % | | % | 88 % | **3,703,048,416** | | | | | | 88 % | **0** | |
| **1** | **06** | **04** | 1.01 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti** | | | | | | **237,897,628** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.01 | 04 | Penyediaan Alat Bantu | Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas<br>Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas<br>Bantuan Kebutuhan Dasar untuk Penyandang Disabilits Mental<br>Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar dan Sandang bagi Lembaga Penyedia Layanan Disabilitas | 6 lembaga/LKS<br>68 orang<br>20 orang<br>6 lembaga/LKS | | | 6 lembaga/LKS<br>68 orang<br>20 orang<br>6 lembaga/LKS | 237,897,628 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial | 6 lembaga/LKS<br>68 orang<br>20 orang<br>6 lembaga/LKS | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1** | **06** | **04** | 1.02 | | **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti** | Bantuan sosial bahan permakanan kepada LKSA, LPKS dan RPSA<br>Bantuan sandang untuk RPSA dan LPKS | LKSA | | LKSA | 40 LKSA | **839,661,041** | | | | | | 40 LKSA | **0** | |
| 1 | 06 | 04 | 1.02 | 13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Bantuan Hibah Uang Kepada LKS Ummu Syahidah<br>Bantuan Permakanan Kepada Lembaga Kesejahteraan Anak (Panti Asuhan)<br>Bantuan Permakanan Kepada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak (ABH) Ummu Syahidah<br>Bantuan Permakanan Kepada RPSA Amal Sholeh<br>Bantuan Sandang bagi LPKS Ummu Syahidah/RPSA Amal Sholeh | 3 kali<br>35 LKSA<br>3 kali<br>3 kali<br>40 anak | | | 3 kali<br>35 LKSA<br>3 kali<br>3 kali<br>40 anak | 839,661,041 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), RPSA dan LPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial | 3 kali<br>35 LKSA<br>3 kali<br>3 kali<br>40 anak | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **1 06 04 1.03** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti** | | | | | | **1,013,600,500** | | | | | | | **0** | |
| 1 06 04 1.03 07 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Bantuan Hibah Uang Kepada Komda Lanjut Usia<br>Bantuan Reunifikasi/Pemulasaran bagi Lanjut Usia<br>Bantuan Sosial dalam rangka HLUN<br>Bantuan Sosial Kepada Penyedia Layanan Lanjut Usia Terlantar<br>Layanan PSTW Griya Jannati | 1 lembaga<br>5 orang<br>70 lansia<br>4 LKS<br>1 lembaga | | | 1 lembaga<br>5 orang<br>70 lansia<br>4 LKS<br>1 lembaga | 1,013,600,500 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | lanjut usia terlantar yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial | 1 lembaga<br>5 orang<br>70 lansia<br>4 LKS<br>1 lembaga | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1 06 04 1.05** | **Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti** | Bantuan Sosial Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor | Lembaga | | Lembaga | 1 Lembaga | **1,611,889,247** | | | | | | 1 Lembaga | **0** | |
| 1 06 04 1.05 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Bantuan Sosial Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor Ummu Syahidah | 1 Lembaga | | | 1 Lembaga | 1,611,889,247 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Korban Penyalahgunaan Napza | 1 Lembaga | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1 06 05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan | KK | | KK | 80 KK | **20,068,290,742** | | | | | | 80 KK | **0** | |
| **1 06 05 1.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi** | Tersedianya data PMKS Kab/Kota penerima program bantuan perlindungan jaminan sosial | KK | | KK | 90000 KK | **20,068,290,742** | | | | | | 90000 KK | **0** | |
| 1 06 05 1.02 01 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | 38,009,777,682 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat<br>Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif | | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 06 05 1.02 02 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang diberdayakan | 216 KK | | | 216 KK | 2,126,803,802 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat<br>Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif | 216 KK | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **1 06 06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga | % | | % | 95 % | **796,101,361** | | | | | | 95 % | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi** | Tersedianya relawan penanggulangan bencana yang terampil dan handal dalam penanganan pengungsi di lokasi bencana | Orang | | Orang | 250 Orang | **796,101,361** | | | | | | 250 Orang | **0** | |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Bantuan Operasional Dapur Umum untuk Penampungan Pengungsi<br>Bantuan Operasional Sekretariat Kampung Siaga Bencana (KSB)<br>Peningkatan Kapasitas Petugas<br>Jumlah Daerah Resiko Terdampak yang mendapatkan pendampingan kesiapsiagaan bencana oleh KSB | 2 Paket<br>250 Orang<br>5 Lokasi | | | 2 Paket<br>250 Orang<br>5 Lokasi | 500,408,125 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat Korban Bencana | 2 Paket<br>250 Orang<br>5 Lokasi | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 06 | 1.01 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | 295,693,236 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat Korban Bencana | | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 1 | 06 | 07 | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | Jumlah lokasi komunitas adat terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan sosial | Lokasi | | Lokasi | 3 Lokasi | **739,579,418** | | | | | | 3 Lokasi | **0** | |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | | **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi** | | | | | | **739,579,418** | | | | | | | **0** | |
| 1 | 06 | 07 | 1.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan yang memperoleh Pelayanan Sosial penerima bantuan dana tali asih | 67 Orang | | | 67 Orang | 739,579,418 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Keluarga Pahlawan Perintis Kemerdekaan, para Veteran serta Pemuda dan Masyarakat | 67 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **2,876,317,671** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | Persentase ARG dalam APBD | % | | % | 6,33 % | **2,318,224,391** | | | | | | 6,33 % | **0** | |
| **2** | **08** | **02** | 1.01 | | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi** | Jumlah Aparatur perangkat daerah yang di Latih PPRG | SKPD | | SKPD | 25 SKPD | **330,386,820** | | | | | | 25 SKPD | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 1.01 | 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilatih PPRG | 25 SKPD | | | 25 SKPD | 660,773,640 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat Ekonomi Kerakyatan Meningkat | SKPD | 25 SKPD | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **02** | 1.02 | | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi** | Jumlah PEKKA yang beri Bantuan Indutri Rumahan | Orang | | Orang | 34 Orang | **1,651,185,055** | | | | | | 34 Orang | **0** | |
| 2 | 08 | 02 | 1.02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah PEKKA yang diberi bantuan usaha | 34 Orang | | | 34 Orang | 1,651,185,055 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Perempuan Kepala Keluarga | 34 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **02** | 1.03 | | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi** | Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapat penguatan kapasitas | lembaga | | lembaga | 7 lembaga | **336,652,516** | | | | | | 7 lembaga | **0** | |
| 2 | 08 | 02 | 1.03 | 01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang mendapat penguatan kapasitas Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 7 Lembaga 40 Orang | | | 7 Lembaga 40 Orang | 336,652,516 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat dan Lembaga | 7 Lembaga 40 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi | % | | % | 0,02 % | **62,458,756** | | | | | | 0,02 % | **0** | |
| **2** | **08** | **04** | 1.03 | | **Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Dudi yang mendukung Pembangunan Daerah dalam Urusan PPPA | DUDI | | DUDI | 20 DUDI | **62,458,756** | | | | | | 20 DUDI | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 08 | 04 | 1.03 | 01 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah DUDI yang mendukung pembangunan daerah urusan PPPA | 20 DUDI | | | 20 DUDI | 62,458,756 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Dunia Usaha dan Dunia Industri | 20 DUDI | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi | % | | % | 0,02 % | **99,999,435** | | | | | | 0,02 % | **0** | |
| **2** | **08** | **05** | 1.01 | | **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi** | Tersusunnya Dokumen SIGA | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **99,999,435** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 2 | 08 | 05 | 1.01 | 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Tersusunnya Dokumen SIGA | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 99,999,435 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Forum Data | 1 Dokumen | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | Persentase Forum Anak yang dibentuk serta lembaga Layanan Perlindungan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif | % | | % | 85 % | **395,635,089** | | | | | | 85 % | **0** | |
| **2** | **08** | **07** | 1.02 | | **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah Anak Korban kekerasan yang terlayani | orang | | orang | 15 orang | **395,635,089** | | | | | | 15 orang | **0** | |
| 2 | 08 | 07 | 1.02 | 03 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah anak korban kekerasan yang terlayani<br>Jumlah kab/kota yang diadvokasi melaksanakan KLA<br>Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan edukasi pencegahan kekerasa terhadap perempuan | 15 Orang<br>1 Kab/Kota<br>60 Orang | | | 15 Orang<br>1 Kab/Kota<br>60 Orang | 395,635,089 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat dan Pemerintah Daerah | 15 Orang<br>1 Kab/Kota<br>60 Orang | 0 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **29,144,389,223** | | | | | | | **16,761,204,253** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **6,404,364,250** | | | | | | 100 % | **6,331,666,840** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | **214,290,037** | | | | | | 6 Dokumen | **214,290,264** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 214,290,037 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Biro Pemerintahan dan Kesra | 6 Dokumen | 214,290,264 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | **5,100,878,574** | | | | | | | **5,100,878,571** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase layanan kesejahteraan ASN | 100 % | | | 100 % | 5,100,878,574 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Biro Pemerintahan dan Kesra | 100 % | 5,100,878,571 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM yang mengikuti bimtek | Orang | | Orang | 10 Orang | **160,022,000** | | | | | | 10 Orang | **160,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah SDM yang mengikuti bimtek | 10 Orang | | | 10 Orang | 160,022,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Biro Pemerintahan dan Kesra | 10 Orang | 160,000,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah sarana prasarana yang diadakan | Paket | | Paket | 4 Paket | **433,171,628** | | | | | | 4 Paket | **360,496,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan sarana kantor | 4 Paket | | | 4 Paket | 433,171,628 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Biro Pemerintahan dan Kesra | 4 Paket | 360,496,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase layanan administrasi perkantoran | % | | % | 100 % | **496,002,011** | | | | | | 100 % | **496,002,005** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase peningkatan layanan perkantoran | 100 % | | | 100 % | 496,002,011 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Biro Pemerintahan dan Kesra | 100 % | 496,002,005 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (rapat koordinasi) | % | | % | 100 % | **187,409,581** | | | | | | 100 % | **187,409,746** | |
| **4** | **01** | **02** | 1.02 | | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | Persentase penyusunan dokumen pelayanan | OPD | | OPD | 6 OPD | **187,409,581** | | | | | | 6 OPD | **187,409,746** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah SPM OPD | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 187,409,581 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat se Provinsi Gorontalo | 6 Dokumen | 187,409,746 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | Persentase Pemasangan Pilar Batas Daerah yang terpasang, koordinasi pelaksanaan PATEN, Dekonsentrasi dan TP | % | | % | 100 % | **1,583,045,229** | | | | | | 100 % | **1,583,045,795** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **03** | 1.01 | | **Pelaksanaan Tugas Pemerintahan** | Jumlah pilar batas yang terpasang | Pilar | | Pilar | 3 Pilar | **502,850,501** | | | | | | 3 Pilar | **502,850,646** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Penataan Wilayah | Jumlah dokumen penamaan rupabumi (toponimi) di Kab/Kota Jumlah pilar batas yang terpasang | 1 Dokumen 10 Pilar | | | 1 Dokumen 10 Pilar | 502,850,501 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah Provinsi, Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen 10 Pilar | 502,850,646 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **03** | 1.02 | | **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | Jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan dan urusan lainnya | % | | % | 100 % | **825,609,025** | | | | | | 100 % | **825,609,149** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Persentase layanan administrasi Kepala Daerah, DPRD | 10 Laporan | | | 10 Laporan | 339,999,956 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemda Kab/Kota | 10 Laporan | 340,000,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 02 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | Jumlah Laporan Pengembangan Otonomi Daerah | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 249,999,993 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemda Kab/Kota | 2 Laporan | 250,000,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 03 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah dokumen LPPD | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 235,609,076 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Instansi Vertikal dan Pemda Kab/Kota | 1 Dokumen | 235,609,149 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **03** | 1.03 | | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | MoU dan Perjanjian Kerja sama | Laporan | | Laporan | 3 Laporan | **254,585,703** | | | | | | 3 Laporan | **254,586,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.03 | 01 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | Persentase penataan MoU dan Perjanjian Kerja sama | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 254,585,703 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 3 Laporan | 254,586,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT** | Persentase intensitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Bidang Kesra | % | | % | 100 % | **20,969,570,163** | | | | | | 100 % | **8,659,081,872** | |
| **4** | **01** | **04** | 1.01 | | **Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual** | Jumlah Kegiatan Mental Spiritual yang difasilitasi Sarana dan Prasarananya | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | **12,310,489,894** | | | | | | 5 Kegiatan | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 04 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | Jumlah hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan<br>Jumlah Jamaah Calon Haji / Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Yang Di Fasilitasi<br>Jumlah Kafilah Provinsi Gorontalo Yang Mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional Yang Difasilitasi<br>Jumlah Kegiatan Adat dan Budaya Yang Dilaksanakan<br>Jumlah Pembina Keagamaan / Penyelenggara Ibadah Yang dibiayai | 12 Kegiatan<br>981 Orang<br>74 Orang<br>20 Kegiatan<br>350 Orang | | | 12 Kegiatan<br>981 Orang<br>74 Orang<br>20 Kegiatan<br>350 Orang | 12,310,489,894 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Agama Budaya Semarak | Masyarakat, Lembaga, Ormas dan Yayasan Keagamaan Di Provinsi Gorontalo | 12 Kegiatan<br>981 Orang<br>74 Orang<br>20 Kegiatan<br>350 Orang | 0 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **04** | 1.02 | | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar** | Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan | Kegiatan | | Kegiatan | 3 Kegiatan | **8,559,082,159** | | | | | | 3 Kegiatan | **8,559,081,872** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.02 | 01 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan | 3 Kegiatan | | | 3 Kegiatan | 8,559,082,159 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah | 3 Kegiatan | 8,559,081,872 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | **01** | **04** | 1.03 | | **Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar** | Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan | Kegiatan | | Kegiatan | 2 Kegiatan | **99,998,110** | | | | | | 2 Kegiatan | **100,000,000** | |
| 4 | 01 | 04 | 1.03 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dikoordinasi dan disinkronisasikan | 2 Kegiatan | | | 2 Kegiatan | 99,998,110 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah | 2 Kegiatan | 100,000,000 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **5,711,822,643** | | | | | | | **5,471,497,263** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **4,853,866,028** | | | | | | 100 % | **4,361,433,036** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan biro | Laporan | | Laporan | 10 Laporan | **261,839,626** | | | | | | 10 Laporan | **196,894,484** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan, koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan biro | 10 Laporan | | | 10 Laporan | 261,839,626 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pemerintah Melayani | Program dan Kegiatan Biro | 10 Laporan | 196,894,484 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | Kali | | Kali | 14 Kali | **3,699,988,484** | | | | | | 14 Kali | **3,699,988,484** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | 14 Kali | | | 14 Kali | 3,699,988,484 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Seluruh ASN Biro | 14 Kali | 3,699,988,484 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek. | Orang | | Orang | 10 Orang | **25,440,000** | | | | | | 10 Orang | **29,450,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya melalui diklat/bimtek. | 10 Orang | | | 10 Orang | 25,440,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pemerintah Melayani | Seluruh ASN & PTT Biro | 10 Orang | 29,450,000 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan prasarana Perkantoran | % | | % | 100 % | **533,242,560** | | | | | | 100 % | **86,990,723** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan prasarana Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 533,242,560 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pemerintah Melayani | Gedung dan Peralatan Kantor | 100 % | 86,990,723 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Kebutuhan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Biro | % | | % | 100 % | **333,355,358** | | | | | | 100 % | **348,109,345** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Kebutuhan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Biro | 100 % | | | 100 % | 333,355,358 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | SEluruh ASN dan PTT Biro | 100 % | 348,109,345 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi | % | | % | 100 % | **253,314,297** | | | | | | 100 % | **491,341,813** | |
| **4** | **01** | **06** | 1.01 | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian** | Jumlah Kegiatan Rakorev, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakor TPID dan Rapat Pengendalian bidang Jumlah Kegiatan Rakorev, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakor TPID dan Rapat Pengendalian bidang Ekonomi | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | **238,464,297** | | | | | | 5 Kegiatan | **253,314,313** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 1. Jumlah Kegiatan Rakorev, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakor TPID dan Rapat Pengendalian bidang Ekonomi<br>2. Jumlah Koordinasi/ Monev/ Pengendalian, konsultasi, penyusunan Buku Indikator Ekonomi dan penggunaan aplikasi SiagadiniGo | 5 Kegiatan<br>4 Kegiatan | | | 5 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 476,928,594 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | Seluruh Masyarakat Gorontalo | 5 Kegiatan<br>4 Kegiatan | 506,628,626 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **06** | 1.03 | | **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD** | Pelaksanaan Rakor BUMD, Rakor Jasa Keuangan, Rakor Aneka Usaha, dan Koordinasi/Monev BUMD/Jasa Keuangan/Aneka Usaha dan RUPS | Kegiatan | | Kegiatan | 5 Kegiatan | **14,850,000** | | | | | | 5 Kegiatan | **238,027,500** | |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Pelaksanaan Rakor BUMD, Rakor Jasa Keuangan, Rakor Aneka Usaha, dan Koordinasi/Monev BUMD/Jasa Keuangan/Aneka Usaha dan RUPS | 5 Kegiatan | | | 5 Kegiatan | 9,900,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Seluruh Masyarakat Gorontalo | 5 Kegiatan | 138,027,500 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| 4 | 01 | 06 | 1.03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Pelaksanaan Rakor BLUD dan Koordinasi/Monev BLUD | 2 Kegiatan | | | 2 Kegiatan | 4,950,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Seluruh Masyarakat Gorontalo | 2 Kegiatan | 100,000,000 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **4** | **01** | **08** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN** | Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota | Dokumen | | Dokumen | 3 Dokumen | **604,642,318** | | | | | | 3 Dokumen | **618,722,414** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | | **Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah** | Jumlah pelaksanaan PraRapim, Rapim, Rakorev dan Rakor kegiatan strategis. | Kegiatan | | Kegiatan | 4 Kegiatan | **604,642,318** | | | | | | 4 Kegiatan | **618,722,414** | |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 01 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Jumlah pelaksanaan PraRapim, Rapim, Rakorev dan Rakor kegiatan strategis. | 4 Kegiatan | | | 4 Kegiatan | 401,837,031 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pemerintah Melayani | Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja APBN | 4 Kegiatan | 449,639,997 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| 4 | 01 | 08 | 1.01 | 03 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | Jumlah SKPD mengikuti pendampingan penginputan DPA SKPD ke aplikasi e-monep | 34 SKPD | | | 34 SKPD | 202,805,287 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Pemerintah Melayani | Seluruh OPD Provinsi Gorontalo,Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja APBN | 34 SKPD | 169,082,417 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **2,023,375,220** | | | | | | | **3,440,379,688** | |
| **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih | % | | % | 35,74 % | **1,343,376,483** | | | | | | 35,74 % | **2,390,379,688** | |
| **2** | **07** | **03** | 1.01 | | **Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi** | Jumlah tenaga kerja yang dilatih | Orang | | Orang | 45 Orang | **1,278,376,806** | | | | | | 45 Orang | **2,140,379,688** | |
| 2 | 07 | 03 | 1.01 | 01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah pencari kerja yang dimagangkan Jumlah tenaga kerja yang dilatih | 150 Orang 45 Orang | | | 150 Orang 45 Orang | 1,278,376,806 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pencari Kerja Usia Produktif di Kabupaten/Kota | 150 Orang 45 Orang | 2,140,379,688 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **07** | **03** | 1.03 | | **Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah** | Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih | Wira Usaha | | Wira Usaha | 5 Wira Usaha | **64,999,677** | | | | | | 5 Wira Usaha | **250,000,000** | |
| 2 | 07 | 03 | 1.03 | 01 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah | Jumlah Tenaga Kerja Produktif yang dilatih | 5 Wirausaha | | | 5 Wirausaha | 64,999,677 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Wira Usaha Baru | 5 Wirausaha | 250,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | Persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja | % | | % | 23,85 % | **99,999,626** | | | | | | 23,85 % | **100,000,000** | |
| **2** | **07** | **04** | 1.03 | | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja | Orang | | Orang | 500 Orang | **99,999,626** | | | | | | 500 Orang | **100,000,000** | |
| 2 | 07 | 04 | 1.03 | 02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja | 500 Orang | | | 500 Orang | 99,999,626 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pencari Kerja Usia Produktif di Kabupaten/Kota | 500 Orang | 100,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | Persentase peningkatan perusahaan yang menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja | % | | % | 6 % | **429,999,434** | | | | | | 6 % | **600,000,000** | |
| **2** | **07** | **05** | 1.02 | | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan | Kasus | | Kasus | 50 Kasus | **79,999,796** | | | | | | 50 Kasus | **150,000,000** | |
| 2 | 07 | 05 | 1.02 | 02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kasus Perselisihan/Sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan<br>Jumlah perusahaan yang ikut Program Jamsostek<br>Jumlah Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan | 50 Kasus<br>450 Perusahaan<br>10 Perusahaan | | | 50 Kasus<br>450 Perusahaan<br>10 Perusahaan | 79,999,796 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pengusaha dan Pekerja | 50 Kasus<br>450 Perusahaan<br>10 Perusahaan | 150,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **07** | **05** | 1.03 | | **Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)** | Jumlah Dokumen UMP | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **349,999,638** | | | | | | 1 Dokumen | **450,000,000** | |
| 2 | 07 | 05 | 1.03 | 01 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) | Jumlah Dokumen UMP<br>Jumlah Perusahaan yang menerapkan upah minimum Provinsi | 1 Dokumen<br>650 Perusahaan | | | 1 Dokumen<br>650 Perusahaan | 349,999,638 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Tenaga Kerja dan Perusahaan | 1 Dokumen<br>650 Perusahaan | 450,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **07** | **06** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN** | Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan | % | | % | 7,56 % | **149,999,677** | | | | | | 7,56 % | **350,000,000** | |
| **2** | **07** | **06** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan** | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan | Perusahaan | | Perusahaan | 150 Perusahaan | **149,999,677** | | | | | | 150 Perusahaan | **350,000,000** | |
| 2 | 07 | 06 | 1.01 | 01 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan | 150 Perusahaan | | | 150 Perusahaan | 149,999,677 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Perusahaan | 150 Perusahaan | 350,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **18,627,227,796** | | | | | | | **20,930,823,362** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **17,809,104,688** | | | | | | 100 % | **19,779,064,005** | |
| **2** | **18** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen Evaluasi | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **429,404,363** | | | | | | 5 Dokumen | **1,038,809,614** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 256,387,182 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | SKPD Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi | 3 Dokumen | 652,775,130 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| 2 | 18 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan dokumen Evaluasi | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 173,017,181 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | SKPD Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi | 5 Dokumen | 386,034,484 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SAP | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **15,104,035,632** | | | | | | 1 Dokumen | **14,718,319,628** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji yang di bayarkan Tunjagan Kinerja ASN yang dibayarkan | 14 Bulan 12 Bulan | | | 14 Bulan 12 Bulan | 15,002,019,628 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | SKPD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 14 Bulan 12 Bulan | 14,518,319,628 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| 2 | 18 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan SAP | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 102,016,004 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | SKPD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi | 1 Dokumen | 200,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana | % | | % | 100 % | **79,184,000** | | | | | | 100 % | **181,248,000** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana | 100 % | | | 100 % | 79,184,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | SKPD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | 100 % | 181,248,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah sarana prasarana yang tersedia | Sarpras | | Sarpras | 20 Sarpras | **787,423,636** | | | | | | 20 Sarpras | **1,587,423,637** | |
| 2 | 18 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sarana prasarana yang tersedia | 20 Sapras | | | 20 Sapras | 1,574,847,272 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Dinas PM ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | 20 Sapras | 3,174,847,274 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu | Jasa Kantor | | Jasa Kantor | 6 Jasa Kantor | **1,409,057,057** | | | | | | 6 Jasa Kantor | **2,253,263,126** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu Persentase administrasi UPT BLK tertata dengan baik | 6 Jasa Kantor 100 % | | | 6 Jasa Kantor 100 % | 1,409,057,057 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | SKPD Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo | 6 Jasa Kantor 100 % | 2,253,263,126 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | Persentase peningkatan jumlah investor | % | | % | 98 % | **99,998,675** | | | | | | 98 % | **250,999,000** | |
| **2** | **18** | **02** | 1.02 | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi** | Jumlah dokumen potensi investasi | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **99,998,675** | | | | | | 1 Dokumen | **250,999,000** | |
| 2 | 18 | 02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi | Jumlah dokumen potensi investasi | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 99,998,675 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | PNS dan Investor | 1 Dokumen | 250,999,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | Persentase peningkatan jumlah investo | % | | % | 98 % | **179,865,010** | | | | | | 98 % | **200,560,522** | |
| **2** | **18** | **03** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Jumlah Investor yang berminat | Investor | | Investor | 2 Investor | **179,865,010** | | | | | | 2 Investor | **200,560,522** | |
| 2 | 18 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi | Jumlah Investor yang berminat | 2 Investor | | | 2 Investor | 179,865,010 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Investor dan pelaku usaha | 2 Investor | 200,560,522 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | Jumlah Realisasi Investasi | Trilyun | | Trilyun | 10,145 Trilyun | **388,259,801** | | | | | | 10,145 Trilyun | **500,000,000** | |
| **2** | **18** | **04** | 1.02 | | **Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan | izin dan non izin | | izin dan non izin | 520 izin dan non izin | **388,259,801** | | | | | | 520 izin dan non izin | **500,000,000** | |
| 2 | 18 | 04 | 1.02 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan | 1 Dokumen 520 izin dan non izin | | | 1 Dokumen 520 izin dan non izin | 388,259,801 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pemerintah Melayani | Berbagai Institusi Perintah, PMA, PMDN, BUMN/BUMD dan Masyarakat | 1 Dokumen 520 izin dan non izin | 500,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | Jumlah realisasi investasi | Trilyun | | Trilyun | 10,145 Trilyun | **149,999,622** | | | | | | 10,145 Trilyun | **200,199,835** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **18** | **05** | 1.01 | | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi** | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | PMA/PMDN | | PMA/PMDN | 65 PMA/PMDN | **149,999,622** | | | | | | 65 PMA/PMDN | **200,199,835** | |
| 2 | 18 | 05 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahan PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi | 67 PMA/PMDN | | | 67 PMA/PMDN | 149,999,622 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | PMA, PMDN, PMDN Non Fasilitas, Pelaku investasi swasta mumi, BUMN/BUMD | 67 PMA/PMDN | 200,199,835 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **29** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | | **2,465,762,771** | | | | | | | **4,441,322,550** | |
| **3** | **29** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN** | Persentase pemenuhan air bersih di daerah sulit air | % | | % | 50 % | **568,978,620** | | | | | | 50 % | **1,300,979,036** | |
| **3** | **29** | **02** | 1.02 | | **Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi** | | | | | | **568,978,620** | | | | | | | **1,300,979,036** | |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah titik bor air tanah | 3 sumur bor | | | 3 sumur bor | 568,978,620 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat didaerah sulit air | 3 sumur bor | 1,300,979,036 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | **29** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA** | Persentase usaha pertambangan yang telah melaksanakan pertambangan yang baik dan benar | % | | % | 82,91 % | **493,354,893** | | | | | | 82,91 % | **700,353,680** | |
| **3** | **29** | **03** | 1.01 | | **Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil** | Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi | IUP | | IUP | 82 IUP | **493,354,893** | | | | | | 82 IUP | **700,353,680** | |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah penyelidikan Geologi Teknik yang menunjang infrastruktur | 1 Laporan dan Peta | | | 1 Laporan dan Peta | 199,799,961 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) | 1 Laporan dan Peta | 400,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Rekomendasi Teknis untuk perizinan usaha pertambangan<br>Jumlah usaha pertambangan yang dibina dan diawasi (laporan) | 41 Rekomtek<br>82 IUP | | | 41 Rekomtek<br>82 IUP | 293,554,932 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) | 41 Rekomtek<br>82 IUP | 300,353,680 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | **29** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN** | Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan | % | | % | 92 % | **315,229,765** | | | | | | 92 % | **415,239,834** | |
| **3** | **29** | **05** | 1.04 | | **Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi** | Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | **315,229,765** | | | | | | 1 Laporan | **415,239,834** | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan hasil pengawasan PLTS Terpusat<br>Jumlah laporan hasil pengawasan terhadap Badan Usaha Daerah dan Non Badan Usaha penyedia energi | 1 Laporan<br>1 Laporan | | | 1 Laporan<br>1 Laporan | 315,229,765 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Badan usaha dan Masyarakat | 1 Laporan<br>1 Laporan | 415,239,834 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | **29** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN** | Persentase peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan | % | | % | 92 % | **1,088,199,493** | | | | | | 92 % | **2,024,750,000** | |
| **3** | **29** | **06** | 1.06 | | **Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan** | Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik | RTS | | RTS | 396 RTS | **1,088,199,493** | | | | | | 396 RTS | **2,024,750,000** | |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | 02 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapatkan akses listrik | 396 RTS | | | 396 RTS | 1,088,199,493 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Rumah Tangga Miskin | 396 RTS | 2,024,750,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | **32** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | **343,178,373** | | | | | | | **900,319,711** | |
| **3** | **32** | **03** | | | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase peningkatan pembangunan di kawasan transmigrasi | % | | % | 88 % | **178,938,656** | | | | | | 88 % | **400,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **32** | **03** | 1.01 | | **Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi | Kawasan | | Kawasan | 1 Kawasan | **178,938,656** | | | | | | 1 Kawasan | **400,000,000** | |
| 3 | 32 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan transmigrasi | 1 Kawasan | | | 1 Kawasan | 357,877,312 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Transmigrasi | 1 Kawasan | 800,000,000 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **3** | **32** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi yang mandiri | % | | % | 80,25 % | **164,239,717** | | | | | | 80,25 % | **500,319,711** | |
| **3** | **32** | **04** | 1.01 | | **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan** | Jumlah warga transmigrasi yang mandiri | Orang | | Orang | 225 Orang | **164,239,717** | | | | | | 225 Orang | **500,319,711** | |
| 3 | 32 | 04 | 1.01 | 02 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman | Jumlah warga transmigrasi yang mandiri | 225 Orang | | | 225 Orang | 164,239,717 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Masyarakat Trasnmigrasi | 225 Orang | 500,319,711 | Dinas Penanaman Modal Energi Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **50,000,323** | | | | | | | **0** | |
| **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | Persentase aparatur pengelola kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota yang diberikan peningkatan kualitas | % | | % | 100 % | **50,000,323** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **12** | **02** | 1.02 | | **Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan** | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kab / Kota | | Kab / Kota | 6 Kab / Kota | **50,000,323** | | | | | | 6 Kab / Kota | **0** | |
| 2 | 12 | 02 | 1.02 | 04 | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6 Kab / Kota | | | 6 Kab / Kota | 50,000,323 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Penduduk Provinsi Gorontalo | 6 Kab / Kota | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **9,737,457,692** | | | | | | | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **7,111,786,770** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **2** | **13** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monev | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **199,636,969** | | | | | | 5 Dokumen | **0** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monev | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 199,636,969 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 5 Dokumen | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | **6,074,139,186** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 6,023,736,222 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 12 Bulan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai SOP | 5 Laporan | | | 5 Laporan | 50,402,964 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 5 Laporan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **45,464,223** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 7,702,223 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 1 Laporan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 01 | 1.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat / bimtek | 12 Orang | | | 12 Orang | 37,762,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 12 Orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | **118,968,000** | | | | | | | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan | 10 Unit | | | 10 Unit | 118,968,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 10 Unit | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | **673,578,392** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 13 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa kantor yang tersedia | 5 Jasa | | | 5 Jasa | 673,578,392 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Sipil Negara | 5 Jasa | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA** | Persentase desa yang ditingkatkan statusnya | % | | % | 9,2 % | **244,998,102** | | | | | | 9,2 % | **0** | |
| **2** | **13** | **03** | 1.01 | | **Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi** | Prsentase desa yang meningkat statusnya | % | | % | 11.5 % | **244,998,102** | | | | | | 11.5 % | **0** | |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang kedudukannya dilintas Kab/Kota | 3 Lembaga | | | 3 Lembaga | 162,998,504 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 3 Lembaga | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 03 | 1.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana yang ada di tiap Kawasan | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 81,999,598 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 3 Dokumen | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya | % | | % | 9,2 % | **976,330,552** | | | | | | 9,2 % | **0** | |
| **2** | **13** | **04** | 1.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** | prsentase desa berkembang | % | | % | 11.5 % | **976,330,552** | | | | | | 11.5 % | **0** | |
| 2 | 13 | 04 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Kabupaten yang terbentuk dan optimalnya kelembagaan BP-SPAMS di Desa | 5 Kabupaten | | | 5 Kabupaten | 106,661,934 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Desa / Kelurahan se-Provinsi, Tenaga Pendamping Professional Dana Desa, & Badan Pengelola SPAMS | 5 Kabupaten | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 04 | 1:01 | 08 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Laporan evaluasi perkembangan desa Jumlah Pemenang Lomba Desa Tingkat Provinsi | 6 Dokumen 3 Desa / Kelurahan | | | 6 Dokumen 3 Desa / Kelurahan | 487,575,006 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Desa / Kelurahan se-Provinsi, Tenaga Pendamping Professional Dana Desa, & Badan Pengelola SPAMS | 6 Dokumen 3 Desa / Kelurahan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 04 | 1:01 | 12 | Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengendalian dana desa | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 382,093,612 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Desa / Kelurahan se-Provinsi, Tenaga Pendamping Professional Dana Desa, & Badan Pengelola SPAMS | 2 Laporan | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | Persentase desa yang ditingkatkan statusnya | % | | % | 9,2 % | **1,404,342,268** | | | | | | 9,2 % | **0** | |
| **2** | **13** | **05** | 1:01 | | **Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Presentase desa yang meningkat statusnya | % | | % | 11.5 % | **1,404,342,268** | | | | | | 11.5 % | **0** | |
| 2 | 13 | 05 | 1:01 | 01 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi dalam pembinaan tata kelola pemerintahan Desa sesuia UU Desa | 5 Kabupaten | | | 5 Kabupaten | 119,980,232 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 5 Kabupaten | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Desa Lokasi Stunting di Provinsi Gorontalo | 3 Kabupaten | | | 3 Kabupaten | 226,392,115 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 3 Kabupaten | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Desa/Kelurahan yang dikembangkan Kapasitas Kerjasama | 6 Lembaga Kab / Kota | | | 6 Lembaga Kab / Kota | 54,996,372 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 6 Lembaga Kab / Kota | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Pokmas dan Bumdes yang Di Dampingi<br>Jumlah Pokmas dan Bumdes yang Di Dampingi | 5 Bumdes<br>15 Pokmas | | | 5 Bumdes<br>15 Pokmas | 124,006,085 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 5 Bumdes<br>15 Pokmas | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah masyarakat dan inovator yang ditingkatkan pemahamannya tentang pendayagunaan TTG | 20 Orang | | | 20 Orang | 106,665,399 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 20 Orang | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2 | 13 | 05 | 1.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Presentase terlaksananya peran PKK | 100 % | | | 100 % | 772,302,065 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat | 100 % | 0 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **10,188,844,813** | | | | | | | **12,441,390,324** | |
| **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **8,199,155,743** | | | | | | 100 % | **8,260,307,924** | |
| **2** | **09** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan | persen | | persen | 100 persen | **428,411,804** | | | | | | 100 persen | **517,655,924** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA) yang tersedia<br>Jumlah Laporan Evaluasi OPD yang tersedia | 4 Dokumen<br>3 Dokumen | | | 4 Dokumen<br>3 Dokumen | 428,411,804 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pegawai | 4 Dokumen<br>3 Dokumen | 517,655,924 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan | persen | | persen | 100 persen | **7,045,337,939** | | | | | | 100 persen | **6,604,412,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 65 aparat | | | 65 aparat | 6,952,458,041 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pegawai | 65 aparat | 6,500,000,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan keuangan OPD | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 92,879,898 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pegawai | 1 Dokumen | 104,412,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **74,952,000** | | | | | | | **150,000,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek (Dinas dan UPTD) | 25 Aparat | | | 25 Aparat | 74,952,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pegawai Lingkup Dinas Pangan | 25 Aparat | 150,000,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD) | persen | | persen | 100 persen | **305,899,185** | | | | | | 100 persen | **536,580,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang tersedia | 1 tahun | | | 1 tahun | 305,899,185 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | pegawai | 1 tahun | 536,580,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (Dinas dan UPTD) | persen | | persen | 100 persen | **344,554,815** | | | | | | 100 persen | **451,660,000** | |
| 2 | 09 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Dokumen Kepegawaian yang tersedia (Dinas dan UPTD)<br>Jumlah Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu | 6 Dokumen<br>1 tahun | | | 6 Dokumen<br>1 tahun | 344,554,815 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | 0 | 6 Dokumen<br>1 tahun | 451,660,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat | Ton | | Ton | CPP 50 & CPM 200 Ton | **0** | | | | | | CPP 50 & CPM 200 Ton | **242,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **02** | 1.01 | | **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi** | Tersedianya Lantai Jemur yang memadai | unit | | unit | 10 unit | **0** | | | | | | 10 unit | **242,000,000** | |
| 2 | 09 | 02 | 1.01 | 02 | Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur | Jumlah Lantai Jemur | 10 unit | | | 10 unit | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha, Poktan, Gapoktan | 10 unit | 242,000,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | Harga Pembelian Pemerintah di tingkat Produsen | > HRP | | > HRP | Beras & Jagung > HRP | **1,230,066,611** | | | | | | Beras & Jagung > HRP | **2,854,984,000** | |
| **2** | **09** | **03** | 1.01 | | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan dan Jumlah Komoditas Pangan dengan Harga Stabil | ton | | ton | 5 ton | **254,768,519** | | | | | | 5 ton | **1,300,772,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat yang dibina dalam upaya stabilisasi harga ditingkat konsumen.<br>Jumlah komoditi pangan strategis dengan harga yang stabil | 0 pupm<br>5 komoditi | | | 0 pupm<br>5 komoditi | 122,489,388 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani, Poktan, Gapoktan | 0 pupm<br>5 komoditi | 166,782,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 03 | 1.01 | 05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah cadangan pangan masyarakat yang disalurkan kepada Gapoktan<br>Jumlah dokumen data dan informasi pasokan dan harga pangan<br>Jumlah Toko Tani Indonesia Center | 5 Ton<br>2 laporan<br>1 unit | | | 5 Ton<br>2 laporan<br>1 unit | 132,279,131 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani, Poktan, Gapoktan | 5 Ton<br>2 laporan<br>1 unit | 1,133,990,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **03** | 1.02 | | **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi** | Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat kelompok Lumbung Pangan | Ton | | Ton | 16 Ton | **279,591,264** | | | | | | 16 Ton | **685,872,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.02 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | Jumlah cadangan pangan masyarakat kelompok Lumbung Pangan<br>Jumlah cadangan pangan pemerintah | 0 Ton<br>16 Ton | | | 0 Ton<br>16 Ton | 279,591,264 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Poktan/Gapoktan dan Masyarakat yang terkena bencana dan di daerah rawan pangan | 0 Ton<br>16 Ton | 685,872,000 | Dinas Pangan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **09** | **03** | 1.04 | | **Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi** | Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina dan Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman | KRPL | | KRPL | 10 KRPL | **695,706,828** | | | | | | 10 KRPL | **868,340,000** | |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 01 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dibina<br>Jumlah Promosi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman | 10 KRPL<br>2 kegiatan | | | 10 KRPL<br>2 kegiatan | 606,790,259 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarkat, KWT, Stakeholder terkait. | 10 KRPL<br>2 kegiatan | 736,098,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 03 | 1.04 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Jumlah Laporan Analisis Pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan PPH<br>Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya | 2 laporan<br>10 orang | | | 2 laporan<br>10 orang | 88,916,569 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarkat, KWT, Stakeholder terkait. | 2 laporan<br>10 orang | 132,242,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | Jumlah masyarakat miskin beban pengeluaran pangan pada daerah rawan pangan | paket | | paket | 2000 paket | **456,639,775** | | | | | | 2000 paket | **641,452,900** | |
| **2** | **09** | **04** | 1.01 | | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi** | Jumlah tenaga Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangananalis yang ditingkatkan kompetensinya | laporan | | laporan | 7 laporan | **75,559,969** | | | | | | 7 laporan | **113,716,900** | |
| 2 | 09 | 04 | 1.01 | 01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan<br>Jumlah tenaga analis yang ditingkatkan kompetensinya | 6 dokumen<br>5 orang | | | 6 dokumen<br>5 orang | 75,559,969 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Stakeholder terkait | 6 dokumen<br>5 orang | 113,716,900 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **04** | 1.02 | | **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi** | Jumlah Daerah Rawan Pangan yang ditangani Ketersediaan Pangannya | paket | | paket | 1500 paket | **381,079,806** | | | | | | 1500 paket | **527,736,000** | |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi | Jumlah bantuan di daerah rawan pangan (kronis/transien) | 1500 paket | | | 1500 paket | 274,539,834 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat Miskin di daerah rawan pangan | 1500 paket | 318,593,000 | Dinas Pangan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 09 | 04 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kios Akses Pangan Masyarakat (20 kios) | 7 LKD | | | 7 LKD | 106,539,972 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat Miskin di daerah rawan pangan | 7 LKD | 209,143,000 | Dinas Pangan |
| **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | Jumlah sertifikat mutu dan keamanan pangan segar yang dikeluarkan | Sertifikat/Registrasi | | Sertifikat/Registrasi | 5 Sertifikat/Registrasi | **302,982,684** | | | | | | 5 Sertifikat/Registrasi | **442,645,500** | |
| **2** | **09** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Dokumen Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | sertifikat | | sertifikat | 6 sertifikat | **302,982,684** | | | | | | 6 sertifikat | **442,645,500** | |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi | Jumlah Dokumen Kelembagaan Keamanan Pangan | 6 sertifikat | | | 6 sertifikat | 220,594,879 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha dan Stakeholder Terkait | 6 sertifikat | 322,740,000 | Dinas Pangan |
| 2 | 09 | 05 | 1.01 | 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 6 Dokumen | | | 6 Dokumen | 82,387,805 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha dan Stakeholder Terkait | 6 Dokumen | 119,905,500 | Dinas Pangan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **32,672,713,922** | | | | | | | **36,342,014,981** | |
| **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **31,194,964,090** | | | | | | 100 % | **31,392,014,981** | |
| **2** | **11** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah laporan perencanaan, pengangaran dan laporan monitoring dan evaluasi | Laporan | | Laporan | 6 Laporan | **1,015,754,347** | | | | | | 6 Laporan | **1,050,000,000** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 815,708,271 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | Lingkup DLHK dan instansi terkait kab/kota | 4 Laporan | 800,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | 11 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 200,046,076 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | Lingkup DLHK dan instansi terkait kab/kota | 2 Laporan | 250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **11** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah gaji dan tunjangan pegawai | bulan | | bulan | 12 bulan | **26,352,641,804** | | | | | | 12 bulan | **26,342,014,981** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 bulan | | | 12 bulan | 26,192,015,628 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | Aparatur DLHK Provinsi Gorontalo | 12 bulan | 26,192,014,981 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | 11 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan OPD yang sesuai SAP | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 160,626,176 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | Aparatur DLHK Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 150,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan | unit | | unit | 31 unit | **1,707,612,359** | | | | | | 31 unit | **2,000,000,000** | |
| 2 | 11 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia dan dikembangkan (Dinas dan KPH) | 31 unit | | | 31 unit | 1,707,612,359 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Seluruh ASN dan PTT DLHK Provinsi Gorontalo | 31 unit | 2,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa kantor yang tersedia (Dinas dan KPH) | jasa kantor | | jasa kantor | 18 jasa kantor | **2,118,955,580** | | | | | | 18 jasa kantor | **2,000,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa kantor yang tersedia (Dinas dan KPH) | 18 jasa kantor | | | 18 jasa kantor | 2,118,955,580 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Seluruh ASN dan PTT DLHK Provinsi Gorontalo | 18 jasa kantor | 2,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | Indeks Kualitas air dan udara | Indeks | | Indeks | 44,6/ 98,87 Indeks | **441,612,497** | | | | | | 44,6/ 98,87 Indeks | **1,550,000,000** | |
| **2** | **11** | **03** | 1.01 | | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup** | laporan status mutu air dan udara | titik | | titik | 39 titik | **175,217,097** | | | | | | 39 titik | **1,250,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Laporan status mutu air dan udara<br>Laporan status mutu air & udara | 24 titik sungai<br>5 sungai | | | 24 titik sungai<br>5 sungai | 175,217,097 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Sungai lintas kabupaten/kota, sungai strategis (sumber baku air minum), Danau Limboto dan untuk pemantauan kualitas udara ambient fokus pada pemukiman, pusat perdagangan, perkantoran dan transportasi | 24 titik sungai<br>5 sungai | 1,250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **03** | 1.02 | | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** | Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang disusun | dokumen | | dokumen | 3 dokumen | **266,395,400** | | | | | | 3 dokumen | **300,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 03 | 1.02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah dokumen informasi kinerja lingkungan hidup yang disusun | 3 dokumen | | | 3 dokumen | 266,395,400 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Mootilango, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Buntulia, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Instansi dan stakeholder terkait se-Provinsi Gorontalo | 3 dokumen | 300,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)** | Indeks Kualitas air dan udara | indeks | | indeks | 44,6/98.87 indeks | **60,849,215** | | | | | | 44,6/98.87 indeks | **200,000,000** | |
| **2** | **11** | **05** | 1.01 | | **Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Persentase Kinerja pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan | persen | | persen | 75 persen | **60,849,215** | | | | | | 75 persen | **200.000.000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 05 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan limbah B3 | 12 fasyankes | | | 12 fasyankes | 60,849,215 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | RSUD dan fasilitas kesehatan di Provinsi Gorontalo | 12 fasyankes | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | indeks Kualitas Air dan Udara | indeks | | indeks | 44,6/98,87 indeks | **328,088,494** | | | | | | 44,6/98,87 indeks | **450,000,000** | |
| **2** | **11** | **06** | 1.01 | | **Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi** | Prosentase peningkatan kinerja pelaksanaan administrasi proses amdal oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | % | | % | 70 % | **328,088,494** | | | | | | 70 % | **450,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Komisi Penilai Amdal (KPA) yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah pelaku usaha yang ditingkatkan pemahamannya tentang ketentuan dan kewajiban izin lingkungan | 5 KPA<br>80 orang | | | 5 KPA<br>80 orang | 141,382,333 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | - Komisi Penilai Amdal (KPA) 6 kab/kota dan kegiatan pemerintah serta usaha kecil yang berkewajiban melakukan pelaporan terhadap izin lingkungan, pemrakarsa kegiatan, KPA Kab Pohuwato dan KPA Kab Gorontalo Utara. | 5 KPA<br>80 orang | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 06 | 1.01 | 03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 29 usaha/kegiatan | | | 29 usaha/kegiatan | 186,706,161 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | - Komisi Penilai Amdal (KPA) 6 kab/kota dan kegiatan pemerintah serta usaha kecil yang berkewajiban melakukan pelaporan terhadap izin lingkungan, pemrakarsa kegiatan, KPA Kab Pohuwato dan KPA Kab Gorontalo Utara. | 29 usaha/kegiatan | 250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **08** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | indeks Kualitas air dan udara | indeks | | | indeks | 44,6/98,87 indeks | **302,040,122** | | | | | 44,6/98,87 indeks | **2,250,000,000** | |
| **2** | **11** | **08** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya | orang | | | orang | 200 orang | **302,040,122** | | | | | 200 orang | **2,250,000,000** | |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah kelompok kampung iklim yang terbentuk | 5 kelompok | | | 5 kelompok | 192,092,373 | Kab. Pohuwato, Marisa, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat dan Kelompok Kampung Iklim yang terbentuk | 5 kelompok | 250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 08 | 1.01 | 02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah masyarakat yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya | 200 orang | | | 200 orang | 109,947,749 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat dan Kelompok Kampung iklim yang terbentuk | 200 orang | 2,000,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **09** | | | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | Persentase SDM yang ditingkatkan kapasitasnya | % | | % | 21,41 % | **219,999,892** | | | | | | 21,41 % | **350,000,000** | |
| **2** | **11** | **09** | 1.01 | | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi** | Jumlah lokasi penilaian Adipura dan Sekolah Adiwiyata | kab/kota | | kab/kota | 6 kab/kota | **219,999,892** | | | | | | 6 kab/kota | **350,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 11 | 09 | 1.01 | 01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi penilaian Adipura<br>Jumlah lokasi penilaian Sekolah Adiwiyata | 6 kab/kota<br>25 sekolah | | | 6 kab/kota<br>25 sekolah | 219,999,892 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Marisa, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Suwawa, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Kwandang, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | 6 kabupaten/kota dan 25 sekolah | 6 kab/kota<br>25 sekolah | 350,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | **11** | **10** | | | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | Persentase kasus LHK yang diselesaikan | % | | % | 57,97 % | **125,159,612** | | | | | | 57,97 % | **150,000,000** | |
| **2** | **11** | **10** | 1.01 | | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi** | Jumlah laporan pemantauan dan pengawasan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta jumlah laporan penyelesaian tindak pidana LHK | Laporan | | Laporan | 4 Laporan | **125,159,612** | | | | | | 4 Laporan | **150,000,000** | |
| 2 | 11 | 10 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | Jumlah kasus LHK yang tertangani dan laporan hasil penanganan kasus | 4 Laporan | | | 4 Laporan | 125,159,612 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Lemito, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Para pihak | 4 Laporan | 150,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **28** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN** | | | | | | **6,629,742,466** | | | | | | | **10,570,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **28** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN** | Jumlah pelaku usaha di dalam kawasan hutan yang di verifikasi dan di fasilitasi | Pelaku Usaha | | Pelaku Usaha | 120 Pelaku Usaha | **5,043,863,146** | | | | | | 120 Pelaku Usaha | **7,720,000,000** | |
| **3** | **28** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi** | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan | Laporan | | Laporan | 56 Laporan | **200,000,120** | | | | | | 56 Laporan | **650,000,000** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan | Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan pengawasan pemegang IPPKH | 56 Laporan | | | 56 Laporan | 200,000,120 | Kab. Pohuwato, Popayato Timur, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Bonepantai, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Mitra bidang kehutanan | 56 Laporan | 650,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **03** | 1.03 | | **Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung** | Jumlah dokumen pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan | IPHHBK | | IPHHBK | 40 IPHHBK | **199,999,756** | | | | | | 40 IPHHBK | **450,000,000** | |
| 3 | 28 | 03 | 1.03 | 03 | Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan | Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan Pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan | 2 lokasi 40 IPHHBK | | | 2 lokasi 40 IPHHBK | 199,999,756 | Kab. Pohuwato, Popayato, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Bonepantai, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat sekitar hutan, koperasi dan pemegang IPHHK/IPHHBK/ IUIPHHK/Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan | 2 lokasi 40 IPHHBK | 450,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **03** | 1.04 | | **Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara** | Luas lahan yang direhabilitasi | Ha | | Ha | 405 Ha | **2,259,026,046** | | | | | | 405 Ha | **3,220,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1:04 | 04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas lahan yang direhabilitasi (DAS) | 345 Ha | | | 345 Ha | 2,091,901,314 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat sekitar hutan | 345 Ha | 2,500,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3 | 28 | 03 | 1:04 | 06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Luas lahan yang direhabilitasi dengan metode agroforestry dan hutan rakyat | 60 Ha | | | 60 Ha | 167,124,732 | Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat sekitar hutan | 60 Ha | 720,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **03** | 1:05 | | **Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi** | Jumlah operasi pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan | kali | | kali | 24 kali | **324,931,730** | | | | | | 24 kali | **450,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah operasi pengamanan dan perlindungan hutan yang dilaksanakan | 24 kali | | | 24 kali | 216,039,596 | Kab. Pohuwato, Popayato, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Lemito, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Marisa, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Atinggola, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Anggrek, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Para pihak dan stakeholder bidang kehutanan dan lahan | 24 kali | 300,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 3 | 28 | 03 | 1.05 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah penurunan titik api karhutla | 10 titik hotspot | | | 10 titik hotspot | 108,892,134 | Kab. Pohuwato, Lemito, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Sumalata, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Para pihak dan stakeholder bidang kehutanan dan lahan | 10 titik hotspot | 150,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **03** | 1.06 | | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)** | Jumlah komoditas HHBK yang dikembangkan pada wilayah PH | komoditas | | komoditas | 13 komoditas | **1,825,178,290** | | | | | | 13 komoditas | **2,500,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 03 | 1:06 | 03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | Jumlah komoditas HHBK yang dikembangkan pada KPH | 13 komoditas | | | 13 komoditas | 1,825,178,290 | Kab. Boalemo, Dulupi, Tangga Jaya Kab. Boalemo, Botumoita, Botumoito Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat sekitar hutan | 13 komoditas | 2,500,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **03** | 1:07 | | **Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun** | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan dan peredaran hasil hutan | Laporan | | Laporan | 3 Laporan | **234,727,204** | | | | | | 3 Laporan | **450,000,000** | |
| 3 | 28 | 03 | 1:07 | 02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Laporan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 234,727,204 | Kab. Pohuwato, Popayato Barat, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Bonepantai, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Tolinggula, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Mitra bidang kehutanan | 3 Laporan | 450,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **04** | | | **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA** | Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi (ha) | Ha | | Ha | 1000 Ha | **101,299,655** | | | | | | 1000 Ha | **250,000,000** | |
| **3** | **28** | **04** | 1:03 | | **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam** | Jumlah laporan perkembangan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | **101,299,655** | | | | | | 1 Laporan | **250,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 04 | 1:03 | 05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah laporan data dan informasi tentang potensi di wilayah KEE | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 101,299,655 | Kab. Pohuwato, Popayato, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | Masyarakat di wilayah KEE | 1 Laporan | 250,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN** | Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi | Ha | | Ha | 1000 Ha | **341,930,924** | | | | | | 1000 Ha | **1,400,000,000** | |
| **3** | **28** | **05** | 1:01 | | **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan** | Luas wilayah perhutanan sosial yang dikelola | Ha | | Ha | 200 Ha | **341,930,924** | | | | | | 200 Ha | **1,400,000,000** | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah penyuluh kehutanan dan SDM kehutanan yang dilatih | 50 orang | | | 50 orang | 199,430,934 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) - Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan | 50 orang | 200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 28 | 05 | 1.01 | 03 | Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial | Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial | 1000 Ha | | | 1000 Ha | 142,499,990 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Lingkungan Lestari | - Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) - Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang kehutanan | 1000 Ha | 1,200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **3** | **28** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)** | Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi | Ha | | Ha | 1000 Ha | **1,142,648,741** | | | | | | 1000 Ha | **1,200,000,000** | |
| **3** | **28** | **06** | 1.01 | | **Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Luas areal DAS prioritas dan hutan rakyat yang direhabilitas | Ha | | Ha | 60 Ha | **1,142,648,741** | | | | | | 60 Ha | **1,200,000,000** | |
| 3 | 28 | 06 | 1.01 | 02 | Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS | Penanaman tanaman hutan dan MPTS di kawasan hutan dan lahan | 333 Ha | | | 333 Ha | 1,142,648,741 | Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Suwawa Selatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Lingkungan Lestari | Masyarakat sekitar DAS | 333 Ha | 1,200,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **11,643,678,711** | | | | | | | **22,140,550,451** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **7,306,444,247** | | | | | | 100 % | **8,311,899,899** | |
| **2** | **15** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | Dokumen | | Dokumen | 7 Dokumen | **646,212,000** | | | | | | 7 Dokumen | **634,884,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi | 7 Dokumen | | | 7 Dokumen | 646,212,000 | | | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 7 Dokumen | 634,884,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah laporan keuangan OPD | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | **5,167,892,160** | | | | | | 12 Laporan | **5,589,722,011** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | 1 Tahun | | | 1 Tahun | 5,087,281,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Tahun | 5,513,310,851 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan OPD | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 80,611,160 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 12 Laporan | 76,411,160 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek | Orang | | Orang | 12 Orang | **110,818,000** | | | | | | 12 Orang | **145,054,000** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek | 12 Orang | | | 12 Orang | 110,818,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 12 Orang | 145,054,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | -Jumlah sapras kantor yang tersedia | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **823,855,851** | | | | | | 1 Kegiatan | **1,412,102,700** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah sapras kantor yang tersedia | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 823,855,851 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Kegiatan | 1,412,102,700 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **557,666,236** | | | | | | 1 Kegiatan | **530,137,188** | |
| 2 | 15 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 557,666,236 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Perhubungan | 1 Kegiatan | 530,137,188 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi | % | | % | 80,8 % | **4,086,502,000** | | | | | | 80,8 % | **13,573,480,088** | |
| **2** | **15** | **02** | 1.02 | | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** | Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi | Ruas Jalan | | Ruas Jalan | 1 Ruas Jalan | **730,398,000** | | | | | | 1 Ruas Jalan | **1,325,066,488** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.02 | 02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi | 1 Ruas Jalan | | | 1 Ruas Jalan | 730,398,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Masyarakat pengguna jalan | 1 Ruas Jalan | 1,325,066,488 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B** | | | | | | **0** | | | | | | | **7,500,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.03 | 03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | | | 7,500,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.05 | | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** | Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ | Ruas Jalan | | Ruas Jalan | 2 Ruas Jalan | **1,652,750,000** | | | | | | 2 Ruas Jalan | **2,151,230,000** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi | Jumlah Laporan hasil pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu lintas | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 459,750,000 | | | | Infrastruktur Merata | Masyarakat dan pengguna jasa transportasi | 12 Laporan | 418,790,000 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 1.05 | 02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ | 2 Ruas Jalan | | | 2 Ruas Jalan | 1,193,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Masyarakat dan pengguna jasa transportasi | 2 Ruas Jalan | 1,732,440,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.08 | | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah lintasan perintis yang di layani | Lintasan | | Lintasan | 5 Lintasan | **1,668,354,000** | | | | | | 5 Lintasan | **2,547,183,600** | |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah lintasan perintis yang dilayani | 5 Lintasan | | | 5 Lintasan | 1,435,640,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi | 5 Lintasan | 2,295,907,600 | Dinas Perhubungan |
| 2 | 15 | 02 | 1.08 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | Jumlah Penerbian izin Angkutan secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab/Kota | 5 Kali | | | 5 Kali | 232,714,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi | 5 Kali | 251,276,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **02** | 1.13 | | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah aplikasi layanan publik | Aplikasi | | Aplikasi | 1 Aplikasi | **35,000,000** | | | | | | 1 Aplikasi | **50,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 15 | 02 | 1.13 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah aplikasi layanan publik | 1 Aplikasi | | | 1 Aplikasi | 35,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Para pelaku jasa transportasi | 1 Aplikasi | 50,000,000 | Dinas Perhubungan |
| **2** | **15** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi | % | | % | 68 % | **250,732,464** | | | | | | 68 % | **255,170,464** | |
| **2** | **15** | **03** | 1.06 | | **Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas** | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapras perhubungan | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | **250,732,464** | | | | | | 12 Laporan | **255,170,464** | |
| 2 | 15 | 03 | 1.06 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapras perhubungan | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 250,732,464 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Masyarakat pengguna jasa transportasi | 12 Laporan | 255,170,464 | Dinas Perhubungan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **15,153,184,178** | | | | | | | **19,738,982,132** | |
| **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **9,766,898,413** | | | | | | 100 % | **13,401,781,799** | |
| **2** | **16** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | **218,120,342** | | | | | | | **218,122,323** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan dokumen perencanaan Program Kegiatan SKPD | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 134,388,946 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Mitra OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat | 3 Dokumen | 134,390,004 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Program Kegiatan SKPD | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 83,731,396 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Mitra OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat | 3 Dokumen | 83,732,319 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentasi Pelaporan Program Kegiatan SKPD | % | | % | 100 % | **5,089,665,072** | | | | | | 100 % | **5,610,570,723** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan Pegawai | 100 % | | | 100 % | 4,629,442,762 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Mitra OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat | 100 % | 5,150,348,211 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 460,222,310 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Mitra OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat | 12 Dokumen | 460,222,512 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **137,661,979** | | | | | | | **137,662,153** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah PPID Provinsi Gorontalo<br>Jumlah SDM Aparatur SKPD<br>Jumlah SDM Pengelolaan Data Statistik<br>Jumlah SDM Pengelola TIK Provinsi Goronalo<br>Jumlah SDM Sandi Berklasifikasi | 50 Orang<br>5 Orang<br>50 Orang<br>150 Orang<br>6 Orang | | | 50 Orang<br>5 Orang<br>50 Orang<br>150 Orang<br>6 Orang | 137,661,979 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Dinas Kominfo dan Statistik dan OPD Pemerintah Prov. Gorontalo | 50 Orang<br>5 Orang<br>50 Orang<br>150 Orang<br>6 Orang | 137,662,153 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | **1,703,894,803** | | | | | | | **1,703,893,103** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentasi sarana dan prasarana pekantoran | 100 % | | | 100 % | 1,703,894,803 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik dan Masyarakat | 100 % | 1,703,893,103 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | **2,617,556,217** | | | | | | | **5,731,533,497** | |
| 2 | 16 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 2,617,556,217 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo dan Mitra OPD | 12 Bulan | 5,731,533,497 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | Meningkatnya infrastruktur dan akses jaringan e-Government | titik akses,%,layanan,domain | | titik akses,%,layanan,domain | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **1,929,724,922** | | | | | | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **1,929,724,995** | |
| **2** | **16** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi** | Persentasi Jumlah sosialisasi Pemanfaatan Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) dan lembaga Komunikasi sosial dan Infomasi yang diberdayakan | % | | % | 100 % | **1,929,724,922** | | | | | | 100 % | **1,929,724,995** | |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah sosialisasi Pemanfaatan Internet CAKAP (Cerdas, Kreatif dan Produktif) | 5 Kabupaten 25 Desa | | | 5 Kabupaten 25 Desa | 1,159,797,110 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Siswa , Masyarakat dan StackHolder | 5 Kabupaten 25 Desa | 1,159,797,047 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| 2 | 16 | 02 | 1.01 | 12 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah lembaga Komunikasi sosial dan Infomasi yang diberdayakan | 150 KIM | | | 150 KIM | 769,927,812 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Siswa , Masyarakat dan StackHolder | 150 KIM | 769,927,948 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | Meningkatnya infrastruktur dan akses jaringan e-Government | titik akses,%,layanan,domain | | titik akses,%,layanan,domain | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **3,456,560,843** | | | | | | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **4,407,475,338** | |
| **2** | **16** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | Persentasi pengembangan aplikasi | % | | % | 100 % | **150,000,000** | | | | | | 100 % | **150,000,000** | |
| 2 | 16 | 03 | 1.01 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah domain di provinsi gorontalo | 38 Layanan | | | 38 Layanan | 150,000,000 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas Kominfo dan Statistik | 38 Layanan | 150,000,000 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **16** | **03** | 1.02 | | **Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi** | Persentasi Jumlah titik akses internet dan Layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government | % | | % | 100 % | **3,306,560,843** | | | | | | 100 % | **4,257,475,338** | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 01 | Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government | 38 Layanan | | | 38 Layanan | 62,586,614 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas KomInfo dan Statistik | 38 Layanan | 62,586,814 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Infrastruktur Jaringan E-Government Sewa Internet | 330 Titik Akses Internet 1 Tahun | | | 330 Titik Akses Internet 1 Tahun | 3,243,974,229 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Pegawai Dinas KomInfo dan Statistik | 330 Titik Akses Internet 1 Tahun | 4,194,888,524 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **20** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | **537,188,715** | | | | | | | **537,188,817** | |
| **2** | **20** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **537,188,715** | | | | | | 5 Dokumen | **537,188,817** | |
| **2** | **20** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi** | Jumlah ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **537,188,715** | | | | | | 5 Dokumen | **537,188,817** | |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah laporan penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan daerah | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 171,270,564 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Dinas KomInfo dan Statistika, SKPD Pemerintah Prov. Gorontalo | 2 Dokumen | 171,270,665 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD | 1 Server 2 Pengolah Data 1 Dokumen | | | 1 Server 2 Pengolah Data 1 Dokumen | 179,732,721 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Dinas KomInfo dan Statistika, SKPD Pemerintah Prov. Gorontalo | 1 Server 2 Pengolah Data 1 Dokumen | 179,732,722 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| 2 | 20 | 02 | 1.01 | 04 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah laporan hasil monev dan pengawasan data sektor di SKPD | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 186,185,430 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | Dinas KomInfo dan Statistika, SKPD Pemerintah Prov. Gorontalo | 3 Dokumen | 186,185,430 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **132,264,869** | | | | | | | **132,264,991** | |
| **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | Meningkatnya infrastruktur dan akses jaringan e-Government | titik akses,%,layanan,domain | | titik akses,%,layanan,domain | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **132,264,869** | | | | | | 310,80,36,50 titik akses,%,layanan,domain | **132,264,991** | |
| **2** | **21** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi** | | | | | | **132,264,869** | | | | | | | **132,264,991** | |
| 2 | 21 | 02 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 132,264,869 | Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Tinelo Ayula | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Infrastruktur Merata | KDH/WKDH, Pimpinan Setda, dan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo | 12 Laporan | 132,264,991 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **17,469,806,366** | | | | | | | **1,025,781,960** | |
| **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **14,938,796,679** | | | | | | 100 % | **1,025,781,960** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | **1,049,181,853** | | | | | | | **1,025,781,960** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD<br>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat | 7 Dokumen<br>8 Dokumen | | | 7 Dokumen<br>8 Dokumen | 1,049,181,853 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Dinas Koperindag Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, pelaku usaha | 7 Dokumen<br>8 Dokumen | 1,025,781,960 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **9,673,730,283** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 9,523,730,282 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | SKPD | 12 Bulan | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 150,000,001 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | SKPD | 1 Dokumen | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM Aparatur yang di latih | ASN | | ASN | 20 ASN | **219,723,922** | | | | | | 20 ASN | **0** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM Aparatur yang di latih | 20 ASN | | | 20 ASN | 219,723,922 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | ASN | 20 ASN | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Peresentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD | % | | % | 100 % | **2,635,731,323** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peresentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD | 100 % | | | 100 % | 2,635,731,323 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | SKPD | 100 % | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase pelayanan jasa administresi perkantoran Dinas Kumperindag | % | | % | 100 % | **1,360,429,298** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pelayanan Jasa Administarsi Kantor<br>Persentase Pelayanan Jasa Administarsi Kantor UPTD BPSMB | 100 %<br>100 % | | | 100 %<br>100 % | 1,360,429,298 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | SKPD | 100 %<br>100 % | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | Jumlah Koperasi Berprestasi | Koperasi Berprestasi | | Koperasi Berprestasi | 10 Koperasi Berprestasi | **306,821,326** | | | | | | 10 Koperasi Berprestasi | **0** | |
| **2** | **17** | **03** | 1.01 | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | **306,821,326** | | | | | | | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 1.01 | 01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan<br>Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan<br>Jumlah pemeriksaan KSP/USP<br>Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih | 7 Dokumen<br>10 Koperasi<br>10 Koperasi<br>1 Tim Satgas | | | 7 Dokumen<br>10 Koperasi<br>10 Koperasi<br>1 Tim Satgas | 306,821,326 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Koperasi | 7 Dokumen<br>10 Koperasi<br>10 Koperasi<br>1 Tim Satgas | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi | koperasi aktif & koperasi berprestasi | | koperasi aktif & koperasi berprestasi | 708 & 10 koperasi aktif & koperasi berprestasi | **178,186,611** | | | | | | 708 & 10 koperasi aktif & koperasi berprestasi | **0** | |
| **2** | **17** | **05** | 1.01 | | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | **178,186,611** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 17 | 05 | 1.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan<br>Jumlah Revitalisasi Koperasi | 150 Koperasi<br>10 Koperasi | | | 150 Koperasi<br>10 Koperasi | 178,186,611 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Koperasi | 150 Koperasi<br>10 Koperasi | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan | KUKM | | KUKM | 1250 KUKM | **466,851,104** | | | | | | 1250 KUKM | **0** | |
| **2** | **17** | **06** | 1.01 | | **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan | KUKM | | KUKM | 1500 KUKM | **466,851,104** | | | | | | 1500 KUKM | **0** | |
| 2 | 17 | 06 | 1.01 | 01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan | 1500 KUKM | | | 1500 KUKM | 466,851,104 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Koperasi dan UKM | 1500 KUKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas | UKM | | UKM | 50 UKM | **359,776,710** | | | | | | 50 UKM | **0** | |
| **2** | **17** | **07** | 1.01 | | **Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan** | Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran | UKM | | UKM | 200 UKM | **359,776,710** | | | | | | 200 UKM | **0** | |
| 2 | 17 | 07 | 1.01 | 01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah UKM yang dimagangkan<br>Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktivitas dan pemasaran | 6 UKM<br>200 UKM | | | 6 UKM<br>200 UKM | 359,776,710 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | UMKM | 6 UKM<br>200 UKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | Jumlah UMKM yang di bina | UKM | | UKM | 50 UKM | **1,219,373,936** | | | | | | 50 UKM | **0** | |
| **2** | **17** | **08** | 1.01 | | **Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah** | | | | | | **1,219,373,936** | | | | | | | **0** | |
| 2 | 17 | 08 | 1.01 | 01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah<br>Jumlah UMKM yang dibina | 20 Produk UKM/IKM<br>50 UKM | | | 20 Produk UKM/IKM<br>50 UKM | 1,219,373,936 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | UMKM | 20 Produk UKM/IKM<br>50 UKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **3,514,463,939** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | Jumlah Perdagangan antar Pulau | Kali | | Kali | 3360 Kali | **1,190,681,311** | | | | | | 3360 Kali | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **30** | **04** | 1.02 | | **Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan** | Jumlah Operasi Pasar | Kali | | Kali | 150 Kali | **949,576,120** | | | | | | 150 Kali | **0** | |
| 3 | 30 | 04 | 1.02 | 02 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Operasi Pasar | 150 Kali | | | 150 Kali | 949,576,120 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Gorontalo | 150 Kali | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **04** | 1.03 | | **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya** | | | | | | **241,105,191** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 30 | 04 | 1.03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | Jumlah Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi | 17 Kali | | | 17 Kali | 241,105,191 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Produsen, Distributor, Toko Pengecer Pupuk Bersubsidi serta Petani/Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK | 17 Kali | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | Jumlah Ekspor | Komoditi | | Komoditi | 10 Komoditi | **284,130,413** | | | | | | 10 Komoditi | **0** | |
| **3** | **30** | **05** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi** | Jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan | Komoditi | | Komoditi | 10 Komoditi | **284,130,413** | | | | | | 10 Komoditi | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 30 | 05 | 1.01 | 01 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Komoditi Produk Eksport yang dipromosikan<br>Jumlah UKM yang memahami prosedur eksport<br>Misi dagang eksport dan antar pulau | 10 Komoditi<br>20 calon eksportir<br>1 misi dagang | | | 10 Komoditi<br>20 calon eksportir<br>1 misi dagang | 284,130,413 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha, UMKM, Eksportir | 10 Komoditi<br>20 calon eksportir<br>1 misi dagang | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | Jumlah Perdagangan antar Pulau | Kali | | Kali | 3360 Kali | **2,039,652,215** | | | | | | 3360 Kali | **0** | |
| **3** | **30** | **06** | 1.01 | | **Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | **952,512,491** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.01 | 01 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen | 80 Kasus | | | 80 Kasus | 952,512,491 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha Dan Konsumen | 80 Kasus | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | 1.02 | | **Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | **969,208,005** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 02 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang | 1200 Kali | | | 1200 Kali | 695,274,499 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 0 | 1200 Kali | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 30 | 06 | 1.02 | 03 | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang | 30 Pelaku Usaha | | | 30 Pelaku Usaha | 273,933,506 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | 0 | 30 Pelaku Usaha | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **30** | **06** | 1.03 | | **Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota** | | | | | | **117,931,719** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 30 | 06 | 1.03 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumlah pelaku usaha yang diawasi | 120 Pelaku Usaha | | | 120 Pelaku Usaha | 117,931,719 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha dan Konsumen | 120 Pelaku Usaha | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **2,617,507,203** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | Jumlah IKM yang Dibina | IKM | | IKM | 15139 IKM | **2,462,161,803** | | | | | | 15139 IKM | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **31** | **02** | 1.01 | | **Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi** | | | | | | **2,462,161,803** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Industri Agro Terpadu | 1 Industri Agro | | | 1 Industri Agro | 449,052,183 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Industri Kecil dan Menengah | 1 Industri Agro | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan | 50 IKM | | | 50 IKM | 759,458,452 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Industri Kecil dan Menengah | 50 IKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi | 70 IKM | | | 70 IKM | 950,953,429 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Industri Kecil dan Menengah | 70 IKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | 31 | 02 | 1.01 | 06 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi | 20 IKM | | | 20 IKM | 302,697,739 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Industri Kecil dan Menengah | 20 IKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | Data Informasi IKM | Sistem Informasi IKM | | Sistem Informasi IKM | 1 Sistem Informasi IKM | **155,345,400** | | | | | | 1 Sistem Informasi IKM | **0** | |
| **3** | **31** | **04** | 1.01 | | **Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)** | | | | | | **155,345,400** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 31 | 04 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Data Informasi IKM | 1 Sistem Informasi IKM | | | 1 Sistem Informasi IKM | 155,345,400 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Industri Kecil dan Menengah | 1 Sistem Informasi IKM | 0 | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **8,527,592,446** | | | | | | | **10,353,880,209** | |
| **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **8,312,200,707** | | | | | | 100 % | **9,630,141,304** | |
| **2** | **23** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | **187,706,823** | | | | | | | **235,501,339** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi | 10 Dokumen | | | 10 Dokumen | 187,706,823 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Pemerintah Melayani | Lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo | 10 Dokumen | 235,501,339 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | **7,065,975,611** | | | | | | | **8,074,754,619** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | | | 100 % | 7,051,705,596 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Pegawai Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 100 % | 8,051,705,596 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 2 | 23 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | 14,270,015 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Pegawai Di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 12 Dokumen | 23,049,023 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | **46,573,392** | | | | | | | **216,189,751** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Kearsipan dan Perpustakaan yang baik dan benar | 100 % | | | 100 % | 46,573,392 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | 2 Bidang dan 1 Sekretariat | 100 % | 216,189,751 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Pada Sekretaris, Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **1,011,944,881** | | | | | | 12 Bulan | **1,103,695,595** | |
| 2 | 23 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran pada Sekretaris, Bidang Kearsipan dan Bid. Perpustakaan. | 100 % | | | 100 % | 3,035,834,643 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | Lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo | 100 % | 3,311,086,785 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | Presentasi partisipasi siswa dalam kegiatan gemar membaca | % | | % | 100 % | **204,055,647** | | | | | | 100 % | **414,716,200** | |
| **2** | **23** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi** | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Peserta | | Peserta | 60 Peserta | **11,043,151** | | | | | | 60 Peserta | **199,900,000** | |
| 2 | 23 | 02 | 1.01 | 06 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah peserta bimtek pengelolaan perpustakaan sekolah dan pustakawan | 60 Peserta | | | 60 Peserta | 11,043,151 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pendidikan Berkualitas | Tenaga Pengelola Perpsutakaan | 60 Peserta | 199,900,000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **02** | 1.02 | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi** | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Desa/Kel | | Desa/Kel | 10 Desa/Kel | **193,012,496** | | | | | | 10 Desa/Kel | **214,816,200** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 2 | 23 | 02 | 1.02 | 04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Terlaksananya Kegiatan pengembangan literasi berbasis Inklusi Sosial | 10 Desa/Kel | | | 10 Desa/Kel | 193,012,496 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pendidikan Berkualitas | Jumlah Pengunjung Perpustakaan, Layanan Perpustakaan Keliling | 10 Desa/Kel | 214,816,200 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **23** | **03** | | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | Presentasi partisipasi siswa dalam kegiatan gemar membaca | % | | % | 100 % | **11,336,092** | | | | | | 100 % | **309,022,705** | |
| **2** | **23** | **03** | 1.01 | | **Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi** | Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam | Judul | | Judul | 100 Judul | **11,336,092** | | | | | | 100 Judul | **309,022,705** | |
| 2 | 23 | 03 | 1.01 | 01 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya cetak karya rekam | 100 Judul | | | 100 Judul | 11,336,092 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan Berkualitas | Penulis Buku, Jumlah Buku | 100 Judul | 309,022,705 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **335,574,313** | | | | | | | **900,000,000** | |
| **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | Presentase penataan arsip statis dan dinamis | % | | % | 100 % | **263,428,079** | | | | | | 100 % | **600,000,000** | |
| **2** | **24** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi** | | | | | | **191,998,011** | | | | | | | **300,000,000** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.01 | 01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Terlaksananya Pencipta dan Penggunaan Arsip Dinamis Sesuai Kaidah | 78 Orang | | | 78 Orang | 191,998,011 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Provinsi | 78 Orang | 300,000,000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **24** | **02** | 1.02 | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi** | | | | | | **71,430,068** | | | | | | | **300,000,000** | |
| 2 | 24 | 02 | 1.02 | 02 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses arsip sesuai Kaidah | 200 Dokumen | | | 200 Dokumen | 71,430,068 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Provinsi | 200 Dokumen | 300,000,000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **2** | **24** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | Presentase penataan arsip statis dan dinamis | % | | % | 100 % | **72,146,234** | | | | | | 100 % | **300,000,000** | |
| **2** | **24** | **03** | 1.01 | | **Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun** | Terlaksananya Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip | OPD | | OPD | 18 OPD | **72,146,234** | | | | | | 18 OPD | **300,000,000** | |
| 2 | 24 | 03 | 1.01 | 01 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Terlaksananya Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip | 18 OPD | | | 18 OPD | 72,146,234 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Provinsi | 18 OPD | 300,000,000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **29,568,264,030** | | | | | | | **47,352,567,046** | |
| **3** | **25** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **16,652,412,109** | | | | | | 100 % | **19,153,745,491** | |
| **3** | **25** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Terselenggaranya (empat kegiatan perencanaan) ; 3 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan ; kegiatan operasional untuk menunjang perencanaan serta membangun/peningkatan sistem informasi perikanan (kegiatan) | Dokumen | | Dokumen | 4 Dokumen | **640,547,493** | | | | | | 4 Dokumen | **765,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Kelautan dan Perikanan Terselenggaranya Forum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Terselenggaranya Koordinasi / Konsultasi Program Kelautan dan Perikanan Di Pusat dan Antar Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi Data Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Terselennggaranya Operasional Perencanaan dan Monitoring Evaluasi | 10 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun | | | 10 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun | 479,759,958 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Pemerintah dan Tenaga Ahli | 10 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun | 500,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan<br>Terfasilitasinya Pertemuan dan Pengimputan Serta Studi Banding LPPD / LAKIP / e-Proposal<br>Terfasilitasinya Pertemuan dan Pengimputan Teppa/e-Monep/Aplikasi Integrasi/SIPD<br>Terlaksananya Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Kelautan dan Perikanan<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kelautan dan Perikanan Tahun 2022<br>Terlaksananya Temu Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI) | 10 Dokumen<br>3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 10 Dokumen<br>3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 160,787,535 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Pemerintah dan Tenaga Ahli | 10 Dokumen<br>3 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 265,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **11,097,573,891** | | | | | | 1 Dokumen | **11,097,573,902** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN (Tunjangan Kinerja Daerah PNS) | 14 Bulan<br>13 Bulan | | | 14 Bulan<br>13 Bulan | 10,947,573,836 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparat Pemerintah | 14 Bulan<br>13 Bulan | 10,947,573,902 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Terselenggaranya kegiatan Bimtek Perbendaharaan, Perpajakan, Keuangan, Penyusunan Laporan Keuangan dan Koordinasi Pelaporan Keuangan DAK Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan keuangan dan Tersedianya dokumen keuangan SKPD Terselenggaranya Pembinaan dan Evaluasi Keuangan pada UPTD Penghasil PAD | 3 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | | | 3 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 150,000,055 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparat Pemerintah | 3 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan | 150,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur | % | | % | 100 % | **124,024,000** | | | | | | 100 % | **210,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelolah Kepegawaian (Aplikasi e-Kinerja, Kepegawaian, Kearsipan, dll) Terlenggaranya Bimtek, Pelatihan, Pertemuan Tkt SKPD Lingkup Pemprov Gorontalo Terselenggaranya Pembinaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Terselenggarnaya Monitoring dan Evaluasi Kearsipan yang ada di UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo | 20 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 20 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 124,024,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur Pemerintah dan Masyarakat umum | 20 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 210,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur | % | | % | 100 % | **2,110,383,455** | | | | | | 100 % | **3,481,171,589** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan serta Pemeliharaan Kantor | 83 Paket | | | 83 Paket | 2,110,383,455 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Pentadu Timur Kab. Boalemo, Tilamuta, Lamu Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tenda Kab. Bone Bolango, Bulango Selatan, Ayula Tilango Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Ketapang | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparat Pemerintah dan Masyarakat Umum | 83 Paket | 3,481,171,589 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase peningkatan layanan Administrasi, sarana Prasarana dan SDM Aparatur | % | | % | 100 % | **2,679,883,270** | | | | | | | 100 % | **3,600,000,000** | |
| 3 | 25 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Kendaraan Roda 3 dan Roda 2 Operasional PP Tilamuta Terselenggaranya Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) di UPT Terselenggaranya pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Unit 1 Kegiatan 100 % | | | 1 Unit 1 Kegiatan 100 % | 2,679,883,270 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparat Pemerintah dan Masyarakat Umum | 1 Unit 1 Kegiatan 100 % | 3,600,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL** | Presentase kawasan konservasi ,pesisir dan jasa kelautan yang terkelola | % | | % | 100 % | **762,613,562** | | | | | | | 100 % | **2,169,420,000** | |
| **3** | **25** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi** | Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola | % | | % | 100 % | **492,673,808** | | | | | | | 100 % | **1,105,860,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 02 | 1.01 | 02 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Terfasilitasinya Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPZKK<br>Terlaksananya FGD dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi<br>Terlaksananya Konsultasi Teknis Penyusunan Dokumen RPZKK<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi<br>Terlaksananya Rakortek, evaluasi dan Sinergitas Program KKP, Konsultasi Teknis Penyusunan RPZKK | 8 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 8 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 492,673,808 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan, Pelaku Usaha, Masyarakat Pesisir | 8 Orang<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,105,860,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **02** | 1.03 | | **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** | Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola | % | | % | 100 % | **269,939,754** | | | | | | 100 % | **1,063,560,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 02 | 1.03 | 02 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Terfasilitasinya Jasa Tenaga Penunjang Pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<br>Tersedianya Papan Informasi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut<br>Tersedianya Tanda Batas Konservasi Perairan | 12 Bulan<br>1 Unit<br>2 Unit | | | 12 Bulan<br>1 Unit<br>2 Unit | 269,939,754 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan, Pelaku Usaha, Masyarakat Pesisir | 12 Bulan<br>1 Unit<br>2 Unit | 1,063,560,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | Prosentasi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan | % | | % | 12,52 % | **6,173,615,007** | | | | | | 12,52 % | **16,116,592,088** | |
| **3** | **25** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil** | Prosentasi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin pelaku usaha di bidang perikanan | % | | % | 15.65 % | **4,176,425,203** | | | | | | 15.65 % | **9,638,650,088** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 03 | 1.01 | 01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Produksi perikanan tangkap<br>Terlaksananya Pertemuan Log Book Seluruh Indonesia, Pertemuan PIPP Seluruh Indonesia, ertemuan WPPNRI Seluruh Indonesia, alidasi Nasional Statistik Perikanan Tangkap<br>Tersedianya data dan informasi sumber daya ikan<br>Terselenggaranya Kegiatan Sinkronisasi Data Statistik Perikanan Tangkap<br>Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi Program Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan<br>Terselenggaranya Koordinasi Penerapan e Log Book Tk. Provinsi | 129817 Ton<br>4 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 129817 Ton<br>4 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 213,577,355 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 129817 Ton<br>4 Kegiatan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 600,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 03 | 1:01 | 03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi perikanan tangkap<br>Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program, Kegiatan dan Anggaran<br>Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Operasional Bantuan Kapal Perikanan, Pendampingan dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sarana Usaha Penangkapan Ikan,<br>Penyerahan Paket Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap<br>Terlaksananya Pembangunan Perahu Fiber 3GT Bermesin Tempel 15 PK<br>Terselenggaranya Temu Usaha dan Pelayanan Publik Operasional Kapal Perikanan | 129817 Ton<br>2 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>40 Unit<br>1 Kegiatan | | | 129817 Ton<br>2 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>40 Unit<br>1 Kegiatan | 3,962,847,848 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 129817 Ton<br>2 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>40 Unit<br>1 Kegiatan | 9,038,650,088 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | 1:03 | | **Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT** | Jumlah Kawasan Perikanan Terpadu /KPT | Kawasan | | Kawasan | 8 Kawasan | **340,438,935** | | | | | | 8 Kawasan | **380,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | 01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Pendapatan Nelayan<br>Terlaksananya Cek Fisik Kapal Perikanan di Provinsi Gorontalo<br>Terselenggaranya Kegiatan Gerai Fasilitasi Penerbitan Izin Sampai dengan 10 GT<br>Terselenggaranya Konsultasi Dan Koordinasi Pusat dalam rangka penerbitan izin Kapal<br>Terselenggaranya Penerbitan Izin Kapal, Andon dan STKA<br>Terselenggaranya Sosialisasi Perizinan Implementasi Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai 12 M | 4211837 Rp./bln<br>6 Kabupaten /Kota<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 4211837 Rp./bln<br>6 Kabupaten /Kota<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 225,243,493 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 4211837 Rp./bln<br>6 Kabupaten /Kota<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 200,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 03 | 1.03 | 03 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Pendapatan Nelayan<br>Tersedianya Iuran Jaminan/Asuransi bagi Nelayan<br>Terselenggaranya Rapat Evaluasi Pemanfaatan Asuransi Nelayan dan SeHAT Nelayan | 4211837 300 Orang<br>1 Kegiatan | | | 4211837 300 Orang<br>1 Kegiatan | 115,195,442 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 4211837 300 Orang<br>1 Kegiatan | 180,000,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **03** | 1.06 | | **Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi** | Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan | % | | % | 100 % | **1,656,750,869** | | | | | | 100 % | **6,097,942,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 02 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan Terselenggaranya kegiatan kesyahbandaran dan Keselamatan berlayar Terselenggaranya Rapat Teknis Kepala Pelabuhan, Pertemuan Operator PIPP Seluruh Indonesia, Rapat Koordinasi Kesyahbandaraan dan Teman SPB, Rapat Teknis Evaluasi Kepelabuhanan, Penyusunan Anggaran DAK, | 100 %<br>3 Kegiatan<br>5 Kegiatan | | | 100 %<br>3 Kegiatan<br>5 Kegiatan | 881,526,270 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Pentadu Timur Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Tenda Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Ketapang | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 100 %<br>3 Kegiatan<br>5 Kegiatan | 4,915,036,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 03 | 1.06 | 03 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Presentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan Terlaksananya Monitoring Unit Usaha Pelabuhan Binaan, Koordinasi dan Konsultasi PPN Kwandang Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan Terselenggaranya Pelayanan Kepelabuhanan PPI Tenda, PPI Tilamuta dan PPI Gentuma Terselenggaranya rangka Rapat Teknis dan Evaluasi Kepelabuhanan, Koordinasi Sistem Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Survei Harga Kegiatan DAK, Pertemuan Operator PIPP Seluruh Indonesia, Rapat Teknis Kepala Pelabuhanan seluruh Indonesia | 100 %<br>2 Kegiatan<br>2 Paket<br>1 Tahun<br>5 Kegiatan | | | 100 %<br>2 Kegiatan<br>2 Paket<br>1 Tahun<br>5 Kegiatan | 775,224,599 | Kab. Boalemo, Tilamuta, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Hulonthalangi, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Gentuma Raya, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Nelayan/Pelaku Usaha Perikanan Tangkap | 100 %<br>2 Kegiatan<br>2 Paket<br>1 Tahun<br>5 Kegiatan | 1,182,906,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | Jumlah benih ikan/benur udang unggul | Juta Ekor | | Juta Ekor | 7,5 Juta Ekor | **1,784,484,399** | | | | | | 7,5 Juta Ekor | **3,173,556,461** | |
| **3** | **25** | **04** | 1.05 | | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut** | Jumlah benih ikan/benur udang unggul (juta ekor) | Juta/ekor | | Juta/ekor | 18 Juta/ekor | **1,784,484,399** | | | | | | 18 Juta/ekor | **3,173,556,461** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 03 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau<br>Terlaksananya Desimininasi Pembesaraan Nila Saline di Tambak Masyarakat<br>Tersedianya peralatan dan obat-obatan untuk perbenihan | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,224,475,254 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pembudidaya Ikan | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,642,300,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 04 | 1.05 | 04 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau<br>Terlaksananya Konsultasi Kegiatan Perikanan Budidaya Air Laut<br>Terlaksananya Validasi dan Pengendalian Data Sektor Perikanan Budidaya<br>Tersedianya sarana pendukung perbenihan<br>Terselenggaranya Identifikasi, Monev, Supervisi dan Pembinaan Kegiatan Bantuan Sarana Budidaya ikan laut dan payau | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Paket<br>3 Kegiatan | | | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Paket<br>3 Kegiatan | 239,943,720 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pembudidaya Ikan | 4097973 Rp/bln<br>1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>1 Paket<br>3 Kegiatan | 1,149,515,461 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 04 | 1:05 | 05 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau<br>Tersedianya perasional Balai Benih Ikan<br>Tersedianya sarana budidaya air tawar (pakan dan Obat-obatan)<br>Verifikasi, Monitoring dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Payau & Tawar | 4097973 Rp/bln<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | | | 4097973 Rp/bln<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | 320,065,425 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pembudidaya Ikan | 4097973 Rp/bln<br>1 Tahun<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | 381,741,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | Presentase Optimalisasi pengawasan Sumberdaya Kelautan & Perikanan di 2 wilayah Perairan Provinsi Gorontalo Teluk Tomini dan Laut Sulawesi | % | | % | 100 % | **526,771,546** | | | | | | 100 % | **526,958,606** | |
| **3** | **25** | **05** | 1:01 | | **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil** | Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi) | % | | % | 100 % | **526,771,546** | | | | | | 100 % | **526,958,606** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 01 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pos Pengawas SDKP yang beroperasi<br>Terlaksananya Operasional Kapal Pengawas di dua WPP<br>Terlaksananya Operasi Pengawasan SDKP di Wilayah Laut Sulawesi dan Teluk Tomini<br>Terlaksananya Operasi Pengawasan SDKP di Wilayah Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi<br>Terlaksana Pemeliharaan Bangunan Pos Pengawas | 4 Pos<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Tahun | | | 4 Pos<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Tahun | 183,238,662 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan | 4 Pos<br>12 Bulan<br>12 Bulan<br>1 Kegiatan<br>1 Tahun | 183,536,716 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 | 25 | 05 | 1.01 | 02 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Operasi Pengawasan Pelaku Usaha dan Sistem Pemasaran Hasil Perikanan<br>Jumlah Operasi Pengawasan SDKP di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<br>Terlaksananya Operasi Pengawasan Pelaku Usaha dan Sistem Pemasaran Hasil Perikanan<br>Terlaksananya Operasi Pengawasan SDKP di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | | | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 230,842,256 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan | 1 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan<br>12 Bulan | 230,557,260 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 05 | 1:01 | 04 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah Pokmaswas yang di Bina<br>Pelaksanaan koordinasi Program Pengawasan SDKP<br>Terfasilitasinya Insentif POKMASWAS | 30 Kelompok<br>1 Kali<br>15 Pokmaswas | | | 30 Kelompok<br>1 Kali<br>15 Pokmaswas | 112,690,628 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan | 30 Kelompok<br>1 Kali<br>15 Pokmaswas | 112,864,630 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya | % | | % | 15 % | **3,668,367,407** | | | | | | 15 % | **6,212,294,400** | |
| **3** | **25** | **06** | 1:02 | | **Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar** | Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikananan yang berdaya saing Per Tahunnya | % | | % | 15 % | **1,870,181,847** | | | | | | 15 % | **1,630,813,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 25 | 06 | 1.02 | 02 | Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Nilai Konsumsi ikan masyarakat Tahun 2022<br>Terlaksananya Kegiatan Inhouse Training<br>Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi ke Pusat, Pelatihan Peningkatan SDM (Analis), Studi Lembaga LsPro, Temu Teknis Kepala LPPMHP<br>Tersedianya Bahan Baku Ikan untuk Bazar Perikanan<br>Tersedianya Bantuan Bahan Pangan Ikan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)<br>Terselenggaranya kegiatan Kaji Terap Produk Olahan Perikanan<br>Terselenggaranya Monitoring Evaluasi, Pembinaan dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Bahan Pangan Ikan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pelaksanaan Bazar Perikanan | 59.9 kg/kapt/thn<br>1 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>8 Bulan<br>10 Bulan<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | | | 59.9 kg/kapt/thn<br>1 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>8 Bulan<br>10 Bulan<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | 1,870,181,847 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur, UPI/UKM Pengolahan dan Masyarakat Umum | 59.9 kg/kapt/thn<br>1 Kegiatan<br>4 Kegiatan<br>8 Bulan<br>10 Bulan<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan | 1,630,813,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| **3** | **25** | **06** | 1.03 | | **Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Nilai persentase kenaikan ketersediaan stock ikan pertahun | % | | % | 2 % | **1,798,185,560** | | | | | | 2 % | **4,581,481,400** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 25 06 1.03 02 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan<br>Jumlah Pengadaan Booth Container Pemasar Hasil Perikanan<br>Jumlah Pengadaan coolbox dan perlengkapan Sarana Pemasaran Ikan (motor bercoolbox)<br>Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pusat<br>Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sistem Logistik Ikan Nasional dan Pengumpulan Data Logistik Hasil Perikanan<br>Terselenggaranya Temu Usaha Pelaku Pemasaran Produk Perikanan | 4262835 Rp/bln<br>10 Unit<br>40 Unit<br>1 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan | | | 4262835 Rp/bln<br>10 Unit<br>40 Unit<br>1 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,309,985,520 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur, UPI/UKM Pengolahan dan Masyarakat Umum | 4262835 Rp/bln<br>10 Unit<br>40 Unit<br>1 Kegiatan<br>3 Kegiatan<br>1 Kegiatan | 1,853,680,400 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 3 25 06 1.03 03 | Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Teerfasilitasinya Pembuatan Sistim Katalog Digital Pemasaran Produk Perikanan Gorontalo (Web System)<br>Terlaksananya Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan lintas daerah (Pameran Kelautan Perikanan Tk. Nasional)<br>Terlaksananya Fasilitasi Lomba Masak Serba Ikan Tkt Provinsi dan Nasional<br>Terlaksananya Informasi Penyiaran Logistik Ikan<br>Terlaksananya Pengembangan Sistim Informasi Jaringan Logistik Ikan Berbasis Aplikasi Digital<br>Terlaksananya Pengumpulan dan monitoring ketersediaan stok dan data harga ikan di Kab/Kota<br>Terlesenggarnya Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) | 1 Paket<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan<br>6 Paket<br>1 Paket<br>1 Kegiatan<br>6 Lokasi | | | 1 Paket<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan<br>6 Paket<br>1 Paket<br>1 Kegiatan<br>6 Lokasi | 488,200,040 | Kab. Boalemo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pohuwato, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bone Bolango, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gorontalo Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur, UPI/UKM Pengolahan dan Masyarakat Umum | 1 Paket<br>1 Kegiatan<br>2 Kegiatan<br>6 Paket<br>1 Paket<br>1 Kegiatan<br>6 Lokasi | 2,727,801,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 13,014,978,905 | | | | | | | 12,834,203,413 | |
| 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | 8,559,985,909 | | | | | | 100 % | 8,532,908,382 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 435,542,959 | | | | | | | 457,928,547 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 1,742,171,836 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 5 Dokumen | 1,831,714,188 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 6,486,233,848 | | | | | | | 6,494,795,627 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 6,310,855,469 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 1 Dokumen | 6,310,848,227 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 350,756,758 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 1 Dokumen | 367,894,800 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 35,002,000 | | | | | | | 36,752,100 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi | 7 Orang | | | 7 Orang | 70,004,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 7 Orang | 73,504,200 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 756,085,962 | | | | | | | 745,388,806 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Tersedianya Sarana Prasaran Perkantoran | 24 Paket | | | 24 Paket | 756,085,962 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 24 Paket | 745,388,806 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 847,121,140 | | | | | | | 798,043,302 | |
| 3 | 26 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 847,121,140 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Pegawai Dinas Pariwisata | 12 Bulan | 798,043,302 | Dinas Pariwisata |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | Jumlah obyek wisata yang difasilitasi/dikembangkan | Objek Wisata | | Objek Wisata | 3 Objek Wisata | **1,980,908,689** | | | | | | 3 Objek Wisata | **1,703,562,525** | |
| **3** | **26** | **02** | 1.01 | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi** | | | | | | **958,450,850** | | | | | | | **1,003,787,400** | |
| 3 | 26 | 02 | 1.01 | 03 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi | jumlah obyek wisata yang ditata | 3 Obyek Wisata | | | 3 Obyek Wisata | 1,916,901,700 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 3 Obyek Wisata | 2,007,574,800 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 1.03 | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi** | | | | | | **802,326,818** | | | | | | | **501,858,000** | |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi | jumlah obyek wisata yang ditata | 3 Obyek Wisata | | | 3 Obyek Wisata | 350,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 3 Obyek Wisata | 315,000,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 02 | 1.03 | 06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi | Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi/Sinkronisasi/ Masyarakat Sadar Wisata | 50 Orang | | | 50 Orang | 452,326,818 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 50 Orang | 186,858,000 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **02** | 1.04 | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | | | **220,131,021** | | | | | | | **197,917,125** | |
| 3 | 26 | 02 | 1.04 | 03 | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Orang Yang Mengikuti Rakornis | 100 Orang | | | 100 Orang | 220,131,021 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 100 Orang | 197,917,125 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan | Promosi | | Promosi | 4 Promosi | **1,510,586,665** | | | | | | 4 Promosi | **1,586,061,118** | |
| **3** | **26** | **03** | 1.01 | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi** | | | | | | **1,510,586,665** | | | | | | | **1,586,061,118** | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah promosi pariwisata dalam dan luar negeri | 8 Kali | | | 8 Kali | 587,788,140 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 8 Kali | 617,106,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Pengolahan data dan informai pariwisata | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 378,033,960 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 1 Dokumen | 396,952,500 | Dinas Pariwisata |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 26 | 03 | 1.01 | 04 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Media / bahan/ kegiatan pemasaran pariwisata | 3 Media | | | 3 Media | 544,764,565 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 3 Media | 572,002,618 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif | % | | % | 100 % | **435,433,011** | | | | | | 100 % | **457,205,070** | |
| **3** | **26** | **04** | 1.01 | | **Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif** | | | | | | **435,433,011** | | | | | | | **457,205,070** | |
| 3 | 26 | 04 | 1.01 | 02 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Potensial | 100 Orang | | | 100 Orang | 435,433,011 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 100 Orang | 457,205,070 | Dinas Pariwisata |
| **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | Persentase peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif | % | | % | 100 % | **528,064,631** | | | | | | 100 % | **554,466,318** | |
| **3** | **26** | **05** | 1.01 | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan** | | | | | | **528,064,631** | | | | | | | **554,466,318** | |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 04 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | Jumlah Pelatihan SDm Yang Terlatih | 80 Orang | | | 80 Orang | 236,538,822 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 80 Orang | 248,367,000 | Dinas Pariwisata |
| 3 | 26 | 05 | 1.01 | 07 | Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata | Jumlah Pelatihan dan SDM yang terlatih | 40 Orang | | | 40 Orang | 291,525,809 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pariwisata Mendunia | Masyarakat / Wisatawan | 40 Orang | 306,099,318 | Dinas Pariwisata |
| **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **53,549,644,524** | | | | | | | **0** | |
| **3** | **27** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **37,917,542,151** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **3** | **27** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (dokumen) | dokumen | | dokumen | 12 dokumen | **1,682,947,576** | | | | | | 12 dokumen | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan | 8 Dok | | | 8 Dok | 817,015,723 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur | 8 Dok | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 4 dokumen | | | 4 dokumen | 865,931,853 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur | 4 dokumen | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan SKPD (dokumen) | dokumen | | dokumen | 1 dokumen | **31,575,498,960** | | | | | | 1 dokumen | **0** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 31,425,498,960 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | aparatur | | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan SKPD (dokumen) | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 150,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | aparatur | 1 dokumen | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat (Orang) | orang | | orang | 30 orang | **428,479,673** | | | | | | 30 orang | **0** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat (Orang) | 30 orang | | | 30 orang | 428,479,673 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur | 30 orang | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Sarana Prasarana Perkantoran (Paket) | paket | | paket | 1 paket | **433,879,993** | | | | | | 1 paket | **0** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sarana Prasarana Perkantoran (Paket) | 1 paket | | | 1 paket | 433,879,993 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Aparatur | 1 paket | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | **3,796,735,949** | | | | | | | **0** | |
| 3 | 27 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase tersedianya layanan dan manajemen adminisrasi (%) | 100 persen | | | 100 persen | 3,796,735,949 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | aparatur | 100 persen | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Produksi Jagung 2%/tahun | Ton | | Ton | 819866 Ton | **11,894,677,227** | | | | | | 819866 Ton | **0** | |
| **3** | **27** | **02** | 1.01 | | **Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian** | Jumlah alat dan mesin pertanian (Unit) | unit | | unit | 2790 unit | **2,300,297,186** | | | | | | 2790 unit | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Alat pasca panen Tanaman pangan<br>Jumlah alat Pengering Kopra Putih<br>Jumlah Alat Pengolahan Gula Semut dari Nira Aren<br>Jumlah motor sayur<br>Kegiatan Pelayanan Brigade Alsintan<br>Luasan bajak gartis | 6 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>5 unit<br>1 Paket<br>300 ha | | | 6 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>5 unit<br>1 Paket<br>300 ha | 2,300,297,186 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Petani dan kelompok Tani | 6 unit<br>1 unit<br>1 unit<br>5 unit<br>1 Paket<br>300 ha | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | 1.02 | | **Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman** | Jumlah benih Jagung yang disalurkan (Ha) | Ha | | Ha | 79696 Ha | **4,548,008,547** | | | | | | 79696 Ha | **0** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura | Jumlah Benih Cabe Rawit<br>jumlah Benih Pepaya<br>Jumlah Bibit Duku<br>jumlah Bibit Jambu Kristal<br>kegiatan Benih Unggul Bermutu<br>Kegiatan Bufferstock Aneka Benih Sayuran Dataran Rendah<br>Kegiatan pengawasan benih hortikultura | 20 sachet<br>833 sachet<br>1000 pohon<br>1000 pohon<br>1 paket<br>1 paket<br>1 kegiatan | | | 20 sachet<br>833 sachet<br>1000 pohon<br>1000 pohon<br>1 paket<br>1 paket<br>1 kegiatan | 1,424,983,025 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani,Kelompok Tani, Penangkar benih | 20 sachet<br>833 sachet<br>1000 pohon<br>1000 pohon<br>1 paket<br>1 paket<br>1 kegiatan | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 03 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan | Baffuerstock Benih Jagung Hibrida<br>Benih Dasar Padi<br>Benih Sumber Padi<br>Bufferstock Benih Padi Inbrida<br>Pencanangan Tanaman Pangan | 22500 kg<br>100 kg<br>25 kg<br>30000 kg<br>1 keg | | | 22500 kg<br>100 kg<br>25 kg<br>30000 kg<br>1 keg | 2,423,262,996 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani,Kelompok Tani, Penangkar benih | 22500 kg<br>100 kg<br>25 kg<br>30000 kg<br>1 keg | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 1.02 | 04 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan | Intensifikasi Tanaman Kakao<br>Jumlah Bibit Cengkeh<br>Jumlah wilayah yang diawasi peredaran benih perkebunan | 1 kegitan<br>1000 bibit<br>6 kab/kota | | | 1 kegitan<br>1000 bibit<br>6 kab/kota | 699,762,526 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani,Kelompok Tani, Penangkar benih | 1 kegitan<br>1000 bibit<br>6 kab/kota | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | 1.05 | | **Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi** | Jumlah Kelahiran ternak (ekor) : | ekor | | ekor | 66 ekor | **3,132,461,450** | | | | | | 66 ekor | **0** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 02 | 1.05 | 01 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | jumlah Obat-Obatan dan vaksin ternak<br>Jumlah Pakan HMT Kambing<br>jumlah Pakan HMT Sapi<br>Jumlah Pakan Konsentrat Kambing<br>Jumlah Pakan Konsentrat Sapi<br>Jumlah pakan Unggas | 1 paket<br>27375 kg<br>314412 kg<br>3482 kg<br>43852 kg<br>1 Paket | | | 1 paket<br>27375 kg<br>314412 kg<br>3482 kg<br>43852 kg<br>1 Paket | 3,132,461,450 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Peternak dan Kelompok ternak | 1 paket<br>27375 kg<br>314412 kg<br>3482 kg<br>43852 kg<br>1 Paket | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **02** | 1.07 | | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain** | Jumlah bibit ternak sapi yang disalurkan (ekor) | ekor | | ekor | 1150 ekor | **1,913,910,044** | | | | | | 1150 ekor | **0** | |
| 3 | 27 | 02 | 1.07 | 01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah bibit ternak sapi yang disalurkan (ekor) | 100 ekor | | | 100 ekor | 1,751,342,044 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Peternak dan kelompok peternak | 100 ekor | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 02 | 1.07 | 02 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain | Jumlah Pakan Ternak Ayam Starter | 7500 kg | | | 7500 kg | 162,568,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Peternak dan kelompok peternak | 7500 kg | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | Produksi Jagung 2%/tahun | Ton | | Ton | 819866 Ton | **220,913,747** | | | | | | 819866 Ton | **0** | |
| **3** | **27** | **03** | 1.01 | | **Penataan Prasarana Pertanian** | Jumlah benih Jagung yang disalurkan (Ha) | Ha | | Ha | 79696 Ha | **220,913,747** | | | | | | 79696 Ha | **0** | |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 09 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | TerlaksananyaVerifikasi, Monitoring & EvaluasiKeg.Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier, pembangunanembung, pembangunan irigasi perpompaan terlaksannya kegiatan AUPT/AUTS | 6 kab/kota<br>6 kab | | | 6 kab/kota<br>6 kab | 220,913,747 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok Tani | 6 kab/kota<br>6 kab | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 03 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | | | | | | 0 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | Petani dan kelompok Tani | | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | Populasi Sapi 2.5% | Ekor | | Ekor | 1600 Ekor | **985,192,865** | | | | | | 1600 Ekor | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **3** | **27** | **04** | 1.01 | | **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | Jumlah ternak yang tertangani (ekor) | ekor | | ekor | 170 ekor | **466,980,781** | | | | | | 170 ekor | **0** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah Uji sampel | 180 ekor | | | 180 ekor | 466,980,781 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Peternak dan kelompok ternak | 180 ekor | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **04** | 1.03 | | **Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan** | Jumlah Pengujian/Pemeriksaan Penyakit Hewan (sampel) | ekor | | ekor | 900 ekor | **518,212,084** | | | | | | 900 ekor | **0** | |
| 3 | 27 | 04 | 1.03 | 03 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | jumlah Uji sampel | 180 sampel | | | 180 sampel | 518,212,084 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Peternak dan kelompok Ternak | 180 sampel | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Produksi Jagung 2%/tahun | Ton | | Ton | 819866 Ton | **851,716,765** | | | | | | 819866 Ton | **0** | |
| **3** | **27** | **05** | 1.01 | | **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi** | Persentase Tingkat Serangan OPT Tanaman Pangan (maks 3%) | persen | | persen | 3 persen | **851,716,765** | | | | | | 3 persen | **0** | |
| 3 | 27 | 05 | 1.01 | 01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persentase Tingkat Serangan OPT (maks 3%) | 3 % | | | 3 % | 851,716,765 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok petani | 3 % | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | Produksi Jagung 2%/tahun | Ton | | Ton | 819866 Ton | **1,679,601,769** | | | | | | 819866 Ton | **0** | |
| **3** | **27** | **07** | 1.01 | | **Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian** | Jumlah penyuluh yang menerima insentif (orang) | orang | | orang | 77 orang | **334,417,609** | | | | | | 77 orang | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 3 | 27 | 07 | 1:01 | 01 | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN | Jumlah penyuluh yang menerima insentif (orang) | 77 org | | | 77 org | 334,417,609 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok tani | 77 org | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **07** | 1.02 | | **Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian** | Jumlah metodologi penyuluhan (metodologi) | metode | | metode | 6 metode | **1,161,760,181** | | | | | | 6 metode | **0** | |
| 3 | 27 | 07 | 1:02 | 01 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | Jumlah metodologi penyuluhan (metodologi) | 6 meodelogi | | | 6 meodelogi | 1,161,760,181 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok tani | 6 meodelogi | 0 | Dinas Pertanian |
| 3 | 27 | 07 | 1:02 | 02 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | Evaluasi aktivitas non farm dan skema peluang pasar<br>Jumlah penyuluh pertanian yang meningkatkapasitasnya<br>Materi penyuluhan pertanian | 2 dokumen<br>162 org<br>4432 dokumen | | | 2 dokumen<br>162 org<br>4432 dokumen | 0 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok tani | 2 dokumen<br>162 org<br>4432 dokumen | 0 | Dinas Pertanian |
| **3** | **27** | **07** | 1:03 | | **Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan** | Jumlah kelompok tani yang dikukuhkan (Poktan) | kelompok | | kelompok | 364 kelompok | **183,423,979** | | | | | | 364 kelompok | **0** | |
| 3 | 27 | 07 | 1:03 | 01 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | Jumlah kelompok tani yang dikukuhkan (Poktan) | 364 Poktan | | | 364 Poktan | 183,423,979 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Ekonomi Kerakyatan Meningkat | Petani dan kelompok tani | 364 Poktan | 0 | Dinas Pertanian |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **7,705,555,802** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase penyusunan dokumen pelayanan | % | | % | 100 % | **4,444,863,396** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Tersusun | Dokumen | | Dokumen | 8 Dokumen | **196,495,971** | | | | | | 8 Dokumen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 87,558,829 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | SDM di Lingkungan Biro Hukum | 5 Dokumen | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA - SKPD Tersusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 67,529,900 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | SDM di Lingkungan Biro Hukum | 1 Dokumen | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 41,407,242 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | SDM di Lingkungan Biro Hukum | 1 Dokumen | 0 | Biro Hukum |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Laksanakan | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | **3,704,045,634** | | | | | | 2 Laporan | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Di Berikan Gaji dan Tunjangan | 31 Orang | | | 31 Orang | 3,605,734,682 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | SDM di Lingkungan Biro Hukum | 31 Orang | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 98,310,952 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | SDM di Lingkungan Biro Hukum | 3 Laporan | 0 | Biro Hukum |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di Penuhi | Orang | | Orang | 20 Orang | **119,506,700** | | | | | | 20 Orang | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang di Sediakan | 1 Paket | | | 1 Paket | 19,153,480 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN dan PTT dilingkungan Biro Hukum | 1 Paket | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Diklat | 20 Orang | | | 20 Orang | 100,353,220 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN dan PTT dilingkungan Biro Hukum | 20 Orang | 0 | Biro Hukum |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **161,993,400** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 1 Paket | | | 1 Paket | 29,932,400 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN dan PTT dalam rangka penataan Admnitsrasi Umum serta Pelayanan Urusan Perkantoran di Lingkungan BViro Hukum | 1 Paket | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan | 1 Tahun | | | 1 Tahun | 132,061,000 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | | ASN dan PTT dalam rangka penataan Admnitsrasi Umum serta Pelayanan Urusan Perkantoran di Lingkungan BViro Hukum | 1 Tahun | 0 | Biro Hukum |
| **4** | **01** | **01** | 1.07 | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Paket | | Paket | 1 Paket | **41,387,691** | | | | | | 1 Paket | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga | 1 Unit/Kendaraan | | | 1 Unit/Kendaraan | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kantor Biro Hukum | 1 Unit/Kendaraan | 0 | Biro Hukum |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 01 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di adakan | 1 Paket | | | 1 Paket | 41,387,691 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kantor Biro Hukum | 1 Paket | 0 | Biro Hukum |
| **4 01 01** 1.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Sediakan | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **132,708,000** | | | | | | 12 Bulan | **0** | |
| 4 01 01 1.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di laksanakan | 100 % | | | 100 % | 4,800,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kantor Biro Hukum | 100 % | 0 | Biro Hukum |
| 4 01 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Peralatan kantor yang disediakan | 1 Paket | | | 1 Paket | 127,908,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Kantor Biro Hukum | 1 Paket | 0 | Biro Hukum |
| **4 01 01** 1.09 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **88,726,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **0** | |
| 4 01 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 5 PakUnit/Kendaraanet | | | 5 PakUnit/Kendaraanet | 10,000,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN dan PTT dilingkungan Biro Hukum | 5 PakUnit/Kendaraanet | 0 | Biro Hukum |
| 4 01 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 78,726,000 | | [DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | | ASN dan PTT dilingkungan Biro Hukum | 12 Bulan | 0 | Biro Hukum |
| **4 01 05** | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun | Ranperda & Pergub/SK | | Ranperda & Pergub/SK | 10 dan 300 Ranperda & Pergub/SK | **3,260,692,406** | | | | | | 10 dan 300 Ranperda & Pergub/SK | **0** | |
| **4 01 05** 1.01 | **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | Produk Hukum Daerah yang disusun | Pergub | | Pergub | 300 Pergub | **986,788,373** | | | | | | 300 Pergub | **0** | |
| 4 01 05 1.01 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | Jumlah Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah yang ditetapkan | 300 SK/Pergub | | | 300 SK/Pergub | 155,700,624 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Lembaga , Instasi dan Masyarakat | 300 SK/Pergub | 0 | Biro Hukum |
| 4 01 05 1.01 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Ranperda / Perda | 10 Ranperda | | | 10 Ranperda | 121,849,191 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Lembaga , Instasi dan Masyarakat | 10 Ranperda | 0 | Biro Hukum |
| 4 01 05 1.01 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya yang di Dokumentasikan Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya yang di Sosialisasikan | 450 Produk Hukum 300 Orang | | | 450 Produk Hukum 300 Orang | 185,075,452 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Lembaga , Instasi dan Masyarakat | 450 Produk Hukum 300 Orang | 0 | Biro Hukum |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 04 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang di Fasilitasi dan di Evaluasi | 6 KAB/KOTA | | | 6 KAB/KOTA | 524,163,106 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Lembaga , Instasi dan Masyarakat | 6 KAB/KOTA | 0 | Biro Hukum |
| **4** | **01** | **05** | 1.02 | | **Fasilitasi Bantuan Hukum** | Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggara Pemerintah dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin | % | | % | 100 % | **2,273,904,033** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pendampingan dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang di Tangani | 6 Laporan | | | 6 Laporan | 1,750,953,417 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat Miskin | 6 Laporan | 0 | Biro Hukum |
| 4 | 01 | 05 | 1.02 | 02 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | Jumlah Advokat OBH yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas, Jumlah OBH yang di Pantauy dan di Evaluasi dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantua Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kasus Penyelenggaraan Bantuan Hukum Jumlah Pasangan Suami Istri yang Mengikuti Sidang Itsbat Nikah | 75 orang 6 Laporan 200 Pasutri | | | 75 orang 6 Laporan 200 Pasutri | 522,950,616 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | | Penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat Miskin | 75 orang 6 Laporan 200 Pasutri | 0 | Biro Hukum |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **5,287,147,168** | | | | | | | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **4,311,473,342** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan | Persen | | Persen | 100 Persen | **84,016,208** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan | 8 Dokumen | | | 8 Dokumen | 252,048,624 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Gorontalo | 8 Dokumen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Persen | | Persen | 100 Persen | **3,700,000,057** | | | | | | 100 Persen | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 100 Persen | | | 100 Persen | 3,700,000,057 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Gorontalo | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | | Persen | 100 Persen | **56,800,000** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Program/Kegiatan biro pengadaan | 100 Persen | | | 100 Persen | 170,400,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Gorontalo | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | | Persen | 100 Persen | **470,657,077** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran pada Biro Pengadaan | 100 Persen | | | 100 Persen | 470,657,077 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | ASN dan PTT Biro Pengadaan Barang dan Jasa Prov. Gorontalo | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **07** | | | **PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA** | Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa Provinsi Gorontalo | Dokumen | | Dokumen | 1 Dokumen | **975,673,826** | | | | | | 1 Dokumen | **0** | |
| **4** | **01** | **07** | 1.01 | | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa | OPD | | OPD | 32 OPD | **543,132,629** | | | | | | 32 OPD | **0** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 01 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket yang diKlarifikasi & di Verifikasi | 215 Paket Kegiata | | | 215 Paket Kegiata | 60,200,708 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Seluruh Pelaku Pengadaan di Lingkunga Pemerintah Provinsi Gorontalo | 215 Paket Kegiata | 0 | Biro Pengadaan |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket yang di Klarifikasi & di Verifikasi | 215 Paket Kegiata | | | 215 Paket Kegiata | 346,205,406 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Seluruh Pelaku Pengadaan di Lingkunga Pemerintah Provinsi Gorontalo | 215 Paket Kegiata | 0 | Biro Pengadaan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 07 | 1.01 | 03 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket yang Klarifikasi & di Verifikasi | 215 Paket Kegiata | | | 215 Paket Kegiata | 136,726,515 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Seluruh Pelaku Pengadaan di Lingkunga Pemerintah Provinsi Gorontalo | 215 Paket Kegiata | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **07** | 1.02 | | **Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik** | Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dan Tersedianya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | | Persen | 100 Persen | **161,808,178** | | | | | | 100 Persen | **0** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | Persentase Pelaksanaan Tender melalui SPSE (e-Tendering dan e-Pruchasing) | 100 Persen | | | 100 Persen | 64,286,285 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 02 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Aplikasi e-Catalog Lokal Aplikasi e-Catalog Lokal Persentase Pendampingan serta Penerapan Regulasi | 1 Aplikasi 3 Kategori 100 Persen | | | 1 Aplikasi 3 Kategori 100 Persen | 69,793,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo | 1 Aplikasi 3 Kategori 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| 4 | 01 | 07 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pelaksanaan Tender melalui SPSE (e-Tendering dan e-Purchasing) | 100 Persen | | | 100 Persen | 27,728,893 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ dan Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | **01** | **07** | 1.03 | | **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** | Penguatan Kelembagaan PBJ/Jumlah OPD yang Dilakukan Pendampingan | Provinsi | | Provinsi | 1 Provinsi | **270,733,019** | | | | | | 1 Provinsi | **0** | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 01 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah SDM yang Ditingkatkan | 30 Orang | | | 30 Orang | 81,056,211 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ, Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan UKPBJ Kab/Kota | 30 Orang | 0 | Biro Pengadaan |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 02 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Pendampingan dan Penerapan Regulasi | 100 Persen | | | 100 Persen | 123,793,314 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ, Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan UKPBJ Kab/Kota | 100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 07 | 1.03 | 03 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah PBJ yang Ditingkatkan<br>Persentase Layanan Konsultasi PBJP<br>Persentase Pendampingan dan Penerapan Regulasi | 32 OPD<br>100 Persen<br>100 Persen | | | 32 OPD<br>100 Persen<br>100 Persen | 65,883,494 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Personil UKPBJ, Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan UKPBJ Kab/Kota | 32 OPD<br>100 Persen<br>100 Persen | 0 | Biro Pengadaan |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **18,947,642,082** | | | | | | | **20,368,744,050** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **18,947,642,082** | | | | | | 100 % | **20,368,744,050** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **130,144,227** | | | | | | 100 % | **139,933,856** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah | 8 Dokumen | | | 8 Dokumen | 112,349,718 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa dan Pegawai dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo | 8 Dokumen | 120,788,106 | Biro Umum |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 17,794,509 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa dan Pegawai dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo | 3 Laporan | 19,145,750 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Gaji Dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Administrasi Laporan Keuangan | % | | % | 100 % | **8,727,795,464** | | | | | | 100 % | **9,302,380,124** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 17,227,816,394 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | ASN dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo | 12 Bulan | 18,519,902,624 | Biro Umum |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 227,774,534 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | ASN dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 244,857,624 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.03 | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | **166,734,116** | | | | | | 100 % | **179,239,175** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Asset Dan Bantuan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Terinventarisir<br>Jumlah Dokumen Asset Lingkup Sekretariat Daerah | 11 Laporan<br>1 Dokumen | | | 11 Laporan<br>1 Dokumen | 166,734,116 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa | 11 Laporan<br>1 Dokumen | 179,239,175 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Persentasi Administrasi Kepegawaian | % | | % | 100 % | **179,748,000** | | | | | | 100 % | **193,229,100** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM Yang Ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya Melalui Diklat/Bimtek | 45 Laporan | | | 45 Laporan | 179,748,000 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pegawai dilingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo | 45 Laporan | 193,229,100 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Umum Yang Dilaksanakan | % | | % | 100 % | **2,266,214,827** | | | | | | 100 % | **2,436,180,939** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 25 Paket | | | 25 Paket | 2,266,214,827 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa | 25 Paket | 2,436,180,939 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | | % | 100 % | **2,063,707,127** | | | | | | 100 % | **2,218,485,162** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Tersedianya Layanan Dan Manajemen Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 2,063,707,127 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | | | Pemerintah Melayani | Unit-unit Kerja Setda | 100 % | 2,218,485,162 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | | % | 100 % | **4,151,811,746** | | | | | | 100 % | **4,463,197,627** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara | 22 Unit | | | 22 Unit | 948,933,200 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Gedung dan Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional | 22 Unit | 1,020,103,190 | Biro Umum |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase hasil pemeliharaan gedung/peralatan kantor | 100 % | | | 100 % | 3,202,878,546 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | | | Pemerintah Melayani | Gedung dan Peralatan Kantor dan Kendaraan Dinas Operasional | 100 % | 3,443,094,437 | Biro Umum |
| **4** | **01** | **01** | 1.14 | | **Fasilitasi Keprotokolan** | Jumlah Kegiatan Keprotokolan Yang DiFasilitasi | % | | % | 100 % | **1,261,486,575** | | | | | | 100 % | **1,356,098,068** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 01 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinegritas Pemerintah Povinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya dan Jumlah Kegiatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Yang Dilaksanakan | 80 Laporan | | | 80 Laporan | 454,776,560 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya serta Pengguna Barang/Jasa | 80 Laporan | 488,884,802 | Biro Umum |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 02 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan dan Dokumen | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 494,660,000 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya serta Pengguna Barang/Jasa | 1 Dokumen | 531,759,500 | Biro Umum |
| 4 | 01 | 01 | 1.14 | 03 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | Jumlah Laporan Dan Dokumen | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 312,050,015 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya serta Pengguna Barang/Jasa | 1 Dokumen | 335,453,766 | Biro Umum |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **39,478,589,305** | | | | | | | **42,439,483,500** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **39,478,589,305** | | | | | | 100 % | **42,439,483,500** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Administrasi Keuangan | % | | % | 100 % | **7,261,971,552** | | | | | | 100 % | **7,812,209,662** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 7,261,971,552 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN dan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah | 12 Bulan | 7,812,209,662 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.11 | | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | % | | % | 100 % | **1,439,781,028** | | | | | | 100 % | **1,542,206,435** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 569,918,456 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Bulan | 601,546,000 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.11 | 04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Dana Operasional Penunjang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 1,154,821,800 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Bulan | 1,241,433,435 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| **4** | **01** | **01** | 1.12 | | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | Persentase Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | % | | % | 100 % | **30,776,836,725** | | | | | | 100 % | **33,085,067,403** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah<br>Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah | 3 Paket<br>12 Kali | | | 3 Paket<br>12 Kali | 4,226,367,445 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa | 3 Paket<br>12 Kali | 4,543,345,832 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 3 Paket<br>12 Kali | | | 3 Paket<br>12 Kali | 3,725,977,464 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa | 3 Paket<br>12 Kali | 4,005,424,700 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| 4 | 01 | 01 | 1.12 | 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah<br>Jumlah Kegiatan Kedinasan Wakil Kepala Daerah<br>Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo<br>Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan<br>Pelayanan Umum Kegiatan Pemerintahan | 95 Laporan<br>88 Laporan<br>152 Laporan<br>1 Paket<br>5 Kali | | | 95 Laporan<br>88 Laporan<br>152 Laporan<br>1 Paket<br>5 Kali | 22,824,491,816 | Kota Gorontalo, Dumbo Raya, Botu | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pengguna Barang/Jasa | 95 Laporan<br>88 Laporan<br>152 Laporan<br>1 Paket<br>5 Kali | 24,536,296,871 | Pimpinan Sekretariat Daerah |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **7,807,096,396** | | | | | | | **8,286,189,125** | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **6,690,107,864** | | | | | | 100 % | **6,973,989,125** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan | Dokumen | | Dokumen | 12 Dokumen | **5,194,729,114** | | | | | | 12 Dokumen | **5,396,468,375** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 3,299,701,108 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN | | 3,299,701,059 | Badan Penghubung |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi | 100 % | | | 100 % | 1,846,428,006 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN | 100 % | 2,048,167,316 | Badan Penghubung |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan | 3 dokumen | | | 3 dokumen | 48,600,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN | 3 dokumen | 48,600,000 | Badan Penghubung |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan; Jumlah Penyelenggaraan Rapat | Kegiatan | | Kegiatan | 6 Kegiatan | **1,042,336,750** | | | | | | 6 Kegiatan | **1,077,870,750** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Terpenuhi | 28 paket | | | 28 paket | 928,188,750 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparatur Perangkat Daerah, Gedung Kantor | 28 paket | 894,190,750 | Badan Penghubung |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 114,148,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparatur Perangkat Daerah, Gedung Kantor | | 183,680,000 | Badan Penghubung |
| **4** | **01** | **01** | 1.09 | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Kegiatan | | Kegiatan | 1 Kegiatan | **453,042,000** | | | | | | 1 Kegiatan | **499,650,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Hasil Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor | 100 % | | | 100 % | 453,042,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Barang Milik Daerah | 100 % | 499,650,000 | Badan Penghubung |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | Persentase Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga melalui Promosi dan Penyebar Luasan Informasi | % | | % | 100 % | **380,790,000** | | | | | | 100 % | **556,200,000** | |
| **4** | **01** | **02** | 1.01 | | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal | Orang | | Orang | 10 Orang | **380,790,000** | | | | | | 10 Orang | **556,200,000** | |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya | 1 kegiatan | | | 1 kegiatan | 761,580,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | ASN | 1 kegiatan | 1,112,400,000 | Badan Penghubung |
| **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH** | Persentase Kerjasama Dengan Beberapa Lembaga melalui Promosi dan Penyebar Luasan Informasi | % | | % | 100 % | **736,198,532** | | | | | | 100 % | **756,000,000** | |
| **4** | **01** | **03** | 1.02 | | **Pelaksanaan Otonomi Daerah** | Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Paket | | Paket | 1 Paket | **736,198,532** | | | | | | 1 Paket | **756,000,000** | |
| 4 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | Persentase Pelayanan Pada Kantor Penghubung yang Terpenuhi | 100 % | | | 100 % | 736,198,532 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN, Kepala Daerah, Anggota DPRD | 100 % | 756,000,000 | Badan Penghubung |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **6,164,834,080** | | | | | | | **32,500,000,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **4,964,827,245** | | | | | | 100 % | **15,000,000,000,000** | |
| **4** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Dokumen | | Dokumen | 5 Dokumen | **172,162,571** | | | | | | 5 Dokumen | **2,500,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | 5 dok | | | 5 dok | 172,162,571 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 5 Dokumen | 5 dok | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **4,177,296,059** | | | | | | 12 Bulan | **5,000,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang Di Berikan Gaji dan Tunjangan | 26 Orang | | | 26 Orang | 4,000,000,285 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 12 Bulan, 26 Orang, 4 Laporan | 26 Orang | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 177,295,774 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 12 Bulan, 26 Orang, 4 Laporan | 12 Bulan | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Diklat | Orang | | Orang | 20 Orang | **141,246,000** | | | | | | 20 Orang | **2,500,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Diklat | 20 Orang | | | 20 Orang | 141,246,000 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 20 Orang | 20 Orang | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran | % | | % | 100 % | **250,660,581** | | | | | | 100 % | **2,500,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 1 Paket | | | 1 Paket | 250,660,581 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 1 Paket | 1 Paket | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Tersedianya Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **223,462,034** | | | | | | 100 % | **2,500,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di laksanakan | 100 Persen | | | 100 Persen | 223,462,034 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 100 % | 100 Persen | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENATAAN ORGANISASI** | Persentase layanan informasi penyelenggaraan pemerintah | % | | % | 100 % | **1,200,006,835** | | | | | | 100 % | **17,500,000,000,000** | |
| **4** | **01** | **02** | 1.01 | | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | Tersusunnya dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah | OPD | | OPD | 32 OPD | **450,005,792** | | | | | | 32 OPD | **5,000,000,000,000** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 1:01 | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Tersusunnya dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah | 32 OPD | | | 32 OPD | 150,000,085 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | 32 OPD Dan 6 Kab/Kota | 32 OPD | 0 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:01 | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | ersusunnya dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah kab/kota | 6 kab/kota | | | 6 kab/kota | 150,000,297 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | 32 OPD Dan 6 Kab/Kota | 6 kab/kota | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan | Tersusunnya dokumen analisis jabatan dan ABK, Evaluasi jabatan, Standar kompetensi Jabatan | 6 kab/kota 15 OPD | | | 6 kab/kota 15 OPD | 150,005,410 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | 32 OPD Dan 6 Kab/Kota | 6 kab/kota 15 OPD | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | **01** | **02** | 1:02 | | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | Terlaksananya fasilitasi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja | Area Perubahan | | Area Perubahan | 8 Area Perubahan | **750,001,043** | | | | | | 8 Area Perubahan | **12,500,000,000,000** | |
| 4 | 01 | 02 | 1:02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemprov Gorontalo dan Pembinaan Kab/Kota | 1 Laporan 2 Kegiatan | | | 1 Laporan 2 Kegiatan | 150,000,174 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota | 1 Laporan 2 Kegiatan | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Terlaksananya fasilitasi dan monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja | 1 Pedoman 6 kab/kota 32 OPD 2 dok | | | 1 Pedoman 6 kab/kota 32 OPD 2 dok | 150,000,061 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota | 1 Pedoman 6 kab/kota 32 OPD 2 dok | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:02 | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Terlaksananya fasilitasi peningkatan Budaya Kerja dan Budaya Organisasi (Tim RB, dan Agen perubahan) | 2 Kegiatan 1 pedoman | | | 2 Kegiatan 1 pedoman | 150,000,247 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota | 2 Kegiatan 1 pedoman | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:02 | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Terlaksananya penyusunan Peta Proses Bisnis, SOP | 15 dok 15 SOP 1 Peta Probis Pemda | | | 15 dok 15 SOP 1 Peta Probis Pemda | 150,000,234 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota | 15 dok 15 SOP 1 Peta Probis Pemda | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| 4 | 01 | 02 | 1:02 | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Terlaksananya fasilitasi penyusunan dokumen pengusulan dan monev Inovasi Pelayanan Publik, | 1 SKM 3 PROPOSAL 15 SP 1 dok pelayanan pemda | | | 1 SKM 3 PROPOSAL 15 SP 1 dok pelayanan pemda | 150,000,327 | | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Pemerintah Melayani | 32 OPD Provinsi dan 6 Kab/Kota | 1 SKM 3 PROPOSAL 15 SP 1 dok pelayanan pemda | 2,500,000,000,000 | Biro Organisasi |
| **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **8,273,697,753** | | | | | | | **8,273,698,148** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **4** | **01** | **05** | | | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | Presentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | % | | % | 100 % | **8,273,697,753** | | | | | | 100 % | **8,273,698,148** | |
| **4** | **01** | **05** | 1.01 | | **Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan** | Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Perda oleh Pimpinan dan Anggota DPRD | perda | | perda | 10 perda | **8,273,697,753** | | | | | | 10 perda | **8,273,698,148** | |
| 4 | 01 | 05 | 1.01 | 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Perda | 45 Anggota | | | 45 Anggota | 8,273,697,753 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Masyarakat | 45 Anggota | 8,273,698,148 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **75,105,400,389** | | | | | | | | **80,291,794,494** | |
| **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **43,695,013,825** | | | | | | 100 % | **46,738,057,459** | |
| **4** | **02** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi | laporan | | laporan | 6 laporan | **208,449,147** | | | | | | 6 laporan | **208,449,415** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi | 6 laporan | | | 6 laporan | 208,449,147 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif & Legislatif | 6 laporan | 208,449,415 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan | dok | | dok | 3 dok | **32,653,319,785** | | | | | | 3 dok | **32,826,445,486** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 32,480,172,597 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Legislatif & Eksekutif | | 32,653,297,942 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumleh Dokumen Laporan Administrasi dan Keuangan | 3 laporan | | | 3 laporan | 173,147,188 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Legislatif & Eksekutif | 3 laporan | 173,147,544 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bimtek | orang | | orang | 15 orang | **315,545,886** | | | | | | 15 orang | **315,547,660** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bimtek | 15 org | | | 15 org | 315,545,886 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Legislatif | 15 org | 315,547,660 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah unit, sarana yang direncanakan, diadakan | % | | % | 100 % | **6,003,986,856** | | | | | | 100 % | **8,873,900,681** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit, sarana yang direncanakan, diadakan | 100 % | | | 100 % | 6,003,986,856 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif & Legislatif | 100 % | 8,873,900,681 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **1,822,854,585** | | | | | | 100 % | **1,822,854,585** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 3,645,709,170 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | Eksekutif & Legislatif | 100 % | 3,645,709,170 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **01** | 1.16 | | **Layanan Adminstrasi DPRD** | | | | | | **2,690,857,566** | | | | | | | **2,690,859,632** | |
| 4 | 02 | 01 | 1.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | 2,690,857,566 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif & Legislatif | | 2,690,859,632 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | % | | % | 100 % | **31,410,386,564** | | | | | | 100 % | **33,553,737,035** | |
| **4** | **02** | **02** | 1.01 | | **Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD** | Jumlah Draft Ranperda yang dibahas | perda | | perda | 10 perda | **6,539,345,402** | | | | | | 10 perda | **6,539,345,414** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Draft Ranperda yang dibahas | 10 perda | | | 10 perda | 13,078,690,804 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Legislatif | 10 perda | 13,078,690,828 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.04 | | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | % | | % | 100 % | **14,957,701,102** | | | | | | 100 % | **14,957,701,095** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Pelaksanaan Konsultasi, Studi Banding, Diklat dan Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD | 45 Anggota | | | 45 Anggota | 12,117,291,846 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Legislatif | 45 Anggota | 12,117,291,845 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah kerjasama dengan Media Massa dan Media Elektronik | 8 MoU | | | 8 MoU | 2,840,409,256 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Legislatif | 8 MoU | 2,840,409,250 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.05 | | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | % | | % | 100 % | **8,296,558,626** | | | | | | 100 % | **10,439,903,808** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah | 96 laporan | | | 96 laporan | 2,852,599,727 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Masyarakat | 96 laporan | 2,852,599,909 | Sekretariat DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 1.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah pelaksanaan Reses | 3 kali | | | 3 kali | 5,443,958,899 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Masyarakat | 3 kali | 7,587,303,899 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.07 | | **Pembahasan Kerja Sama Daerah** | Jumlah Laporan kegiatan protokol dan aspirasi dalam hal pelayanan terhadap kegiatan Dewan | laporan | | laporan | 152 laporan | **284,059,264** | | | | | | 152 laporan | **284,060,985** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.07 | 02 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Laporan kegiatan protokol dan aspirasi dalam hal pelayanan terhadap kegiatan Dewan | 152 laporan | | | 152 laporan | 284,059,264 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Masyarakat | 152 laporan | 284,060,985 | Sekretariat DPRD |
| **4** | **02** | **02** | 1.08 | | **Fasilitasi Tugas DPRD** | Presentase Laporan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya | % | | % | 100 % | **1,332,722,170** | | | | | | 100 % | **1,332,725,733** | |
| 4 | 02 | 02 | 1.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Presentase Laporan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya | 20 laporan | | | 20 laporan | 1,332,722,170 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Eksekutif dan Legislatif | 20 laporan | 1,332,725,733 | Sekretariat DPRD |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | **19,966,656,894** | | | | | | | **20,841,600,000** | |
| **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **14,613,610,699** | | | | | | 100 % | **15,166,600,000** | |
| **5** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi | % | | % | 100 % | **1,343,258,376** | | | | | | 100 % | **1,491,600,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi | 1 Forum, 3 Dokumen | | | 1 Forum, 3 Dokumen | 1,087,784,930 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | BAPPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan DPRD | 1 Forum, 3 Dokumen | 1,210,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 255,473,446 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | BAPPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan DPRD | 1 Kegiatan | 281,600,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN | % | | % | 100 % | **10,051,963,192** | | | | | | 100 % | **10,100,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | 86 orang | | | 86 orang | 9,981,966,308 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparatur BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | 86 orang | 10,000,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan | 3 Laporan | | | 3 Laporan | 69,996,884 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparatur BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | 3 Laporan | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui diklat/bimtek | orang | | orang | 100 orang | **269,999,233** | | | | | | 100 orang | **375,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal | 100 Orang | | | 100 Orang | 269,999,233 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparatur BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | 100 Orang | 375,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit) | Paket | | Paket | 10 Paket | **1,837,873,766** | | | | | | 10 Paket | **2,000,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 10 Paket | | | 10 Paket | 1,837,873,766 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparat BAPPPEDA Provinsi Gorontalo | 10 Paket | 2,000,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran | Bulan | | Bulan | 12 Bulan | **1,110,516,132** | | | | | | 12 Bulan | **1,200,000,000** | |
| 5 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peningkatan Layanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 1,110,516,132 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Aparat BAPPEDA dan stakeholder lain | 12 Bulan | 1,200,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD | % | | % | 100 % | **1,351,917,958** | | | | | | 100 % | **1,490,000,000** | |
| **5** | **01** | **02** | 1.01 | | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | Persentase Kesesuaian RKPD dengan Renstra PD dan RPJMD | % | | % | 100 % | **620,758,024** | | | | | | 100 % | **715,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan Tahunan<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan | 2 Peraturan Gubernur<br>2 Dokumen | | | 2 Peraturan Gubernur<br>2 Dokumen | 620,758,024 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi Gorontalo | 2 Peraturan Gubernur<br>2 Dokumen | 715,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 1.02 | | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | **351,919,716** | | | | | | | **375,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 % | | | 100 % | 351,919,716 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi dan Stakeholder lainnya | 100 % | 375,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **02** | 1.03 | | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **379,240,218** | | | | | | 2 Dokumen | **400,000,000** | |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 174,379,061 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Provinsi, Bappeda dan OPD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 200,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 02 | 1.03 | 03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Tahun 2021 | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 204,861,157 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Provinsi, Bappeda dan OPD Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 200,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD | % | | % | 100 % | **4,001,128,237** | | | | | | 100 % | **4,185,000,000** | |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **01** | **03** | 1.01 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | % | | % | 100 % | **1,694,003,301** | | | | | | 100 % | **1,800,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 400,242,635 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 450,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 186,338,389 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 200,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 120,525,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 150,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 690,599,559 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 700,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.01 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 296,297,718 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi & Kabupaten/Kota, Kementerian & Lembaga, Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya | 1 Laporan | 300,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | 1.02 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | % | | % | 100 % | **1,268,119,677** | | | | | | 100 % | **1,290,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 410,620,012 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 420,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 417,499,654 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 420,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 440,000,011 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 450,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **01** | **03** | 1.03 | | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | | % | 100 % | **1,039,005,259** | | | | | | 100 % | **1,095,000,000** | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 282,868,890 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 300,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur | 1 Berita Acara/OPD | | | 1 Berita Acara/OPD | 94,432,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Berita Acara/OPD | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 03 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 137,981,360 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 150,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 313,586,009 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 320,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 06 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan | 1 Berita Acara/OPD | | | 1 Berita Acara/OPD | 98,392,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Berita Acara/OPD | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 01 | 03 | 1.03 | 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 111,745,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Mitra perencanaan (Prov, OPD Kab/Kota), mitra Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan | 125,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **1,789,019,395** | | | | | | | **1,580,000,000** | |
| **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti | % | | % | 100 % | **1,789,019,395** | | | | | | 100 % | **1,580,000,000** | |
| **5** | **05** | **02** | 1.01 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** | Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | % | | % | 100 % | **311,061,367** | | | | | | 100 % | **130,000,000** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Pengkajian Peraturan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 311,061,367 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 130,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | **02** | 1.02 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** | Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | % | | % | 100 % | **915,901,546** | | | | | | 100 % | **700,000,000** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Kajian Aspek Sosial | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 366,412,188 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 06 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi | 1 Kegiatan | | | 1 Kegiatan | 503,828,121 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Kegiatan | 500,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.02 | 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Kajian Partisipasi Masyarakat Sekitar Geopark | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 45,661,237 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | **02** | 1.03 | | **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan** | Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | % | | % | 100 % | **295,350,006** | | | | | | 100 % | **350,000,000** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 04 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 151,504,490 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 150,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Geopark | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 84,525,316 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.03 | 13 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo | 1 Produk | | | 1 Produk | 59,320,200 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo | 1 Produk | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **5** | **05** | **02** | 1.04 | | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi | % | | % | 100 % | **266,706,476** | | | | | | 100 % | **400,000,000** | |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 03 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 207,201,374 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Semua OPD yang ada di kabupaten kota se-provinsi Gorontalo,serta PeruruanTinggi, LPPM, pelaku usaha dan masyarakat | 1 Dokumen | 300,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | 05 | 02 | 1.04 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 59,505,102 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Semua OPD yang ada di kabupaten kota se-provinsi Gorontalo,serta PeruruanTinggi, LPPM, pelaku usaha dan masyarakat | 1 Dokumen | 100,000,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 02 | KEUANGAN | | | | | | 289,196,938,440 | | | | | | | 314,816,632,518 | |
| 5 02 01 | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **53,433,018,885** | | | | | | 100 % | **57,157,218,977** | |
| 5 02 01 1.01 | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | Dokumen | | Dokumen | 9 Dokumen | **1,236,042,608** | | | | | | 9 Dokumen | **741,234,745** | |
| 5 02 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 756,109,022 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan dan Stakeholder | 5 Dokumen | 486,528,967 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 02 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah | 3 Dokumen | | | 3 Dokumen | 479,933,586 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan dan Stakeholder | 3 Dokumen | 254,705,778 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 02 01 1.02 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase layanan administrasi keuangan | % | | % | 100 % | **45,244,918,487** | | | | | | 100 % | **49,769,410,767** | |
| 5 02 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase layanan administrasi keuangan | 100 % | | | 100 % | 45,144,918,878 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | 100 % | 49,659,410,767 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 02 01 1.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | JUmlah dokumen laporan keuangan | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 99,999,609 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | 5 Dokumen | 110,000,000 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 02 01 1.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | orang | | orang | 47 orang | **279,702,101** | | | | | | 47 orang | **307,672,243** | |
| 5 02 01 1.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat | 47 Orang | | | 47 Orang | 279,702,101 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo | 47 Orang | 307,672,243 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 02 01 1.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase penyediaan sarana dan prasarana | % | | % | 100 % | **2,520,332,479** | | | | | | 100 % | **2,765,798,537** | |
| 5 02 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peresentase penyediaan sarana dan prasarana | 100 % | | | 100 % | 2,520,332,479 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo | 100 % | 2,765,798,537 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**
**Provinsi Gorontalo**
**Tahun 2022**

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Prosentase layanan administrasi perkantoran | % | | % | 100 % | **4,152,023,210** | | | | | | 100 % | **3,573,102,685** | |
| 5 | 02 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase layanan administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 4,152,023,210 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Bidang-bidang, UPTD dan Samsat Badan Keungan | 100 % | 3,573,102,685 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah | % | | % | 100 % | **227,667,517,274** | | | | | | 100 % | **250,433,075,628** | |
| **5** | **02** | **02** | 1.01 | | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | Jumlah Perda APBD dan pergub penjabaran APBD yang disusun | Dokumen | | Dokumen | 2 Dokumen | **975,024,696** | | | | | | 2 Dokumen | **1,071,249,571** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAs | 2 dokumen | | | 2 dokumen | 174,999,839 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo | 2 dokumen | 192,500,108 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1:01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 174,999,469 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo | 2 Dokumen | 192,499,238 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1:01 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD yang disusun | 1 Perda dan 1 Pergub | | | 1 Perda dan 1 Pergub | 448,863,580 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo | 1 Perda dan 1 Pergub | 493,750,353 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1:01 | 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda Perubahan APBD dan Pergub Perubahan Penjabaran APBD yang disusun | 1 Perda dan 1 Pergub | | | 1 Perda dan 1 Pergub | 176,161,808 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD, TAPD, dan DPRD Provinsi Gorontalo | 1 Perda dan 1 Pergub | 192,499,872 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **02** | 1:02 | | **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** | Jumlah Ranperda APBD Kab/Kota sesuai dengan regulasi yang berlaku | kabupaten /kota | | kabupaten/kota | 6 kabupaten /kota | **124,950,700** | | | | | | 6 kabupaten /kota | **137,445,054** | |
| 5 | 02 | 02 | 1:02 | 08 | Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | 6 Kab/Kota dan 18 SK | | | 6 Kab/Kota dan 18 SK | 124,950,700 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | APBD kabupaten/kota | 6 Kab/Kota dan 18 SK | 137,445,054 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **02** | **02** | 1.03 | | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | Jumlah hasil verifikasi SPM SKPD sesuai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD | SKPD | | SKPD | 32 SKPD | **1,199,995,067** | | | | | | 32 SKPD | **1,319,999,975** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah dokumen pengelolaan kas daerah | 32 OPD | | | 32 OPD | 249,639,661 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD dan Masyarakat | 32 OPD | 274,603,912 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah dokumen anggaran kas dan SPD | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 369,564,464 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD dan Masyarakat | 2 Dokumen | 406,525,981 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 368,200,051 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD dan Masyarakat | 1 Dokumen | 405,020,090 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1.03 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah dokumen kerjasama | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 212,590,891 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD dan Masyarakat | 2 Dokumen | 233,849,992 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **02** | 1.04 | | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | Jumlah Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun | Dokumen LKPD | | Dokumen LKPD | 1 Dokumen LKPD | **999,925,994** | | | | | | 1 Dokumen LKPD | **1,099,999,577** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai SAP yang disusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 297,569,984 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 327,391,666 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 412,249,153 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi Gorontalo | 1 Dokumen | 453,479,057 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 1.04 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah regulasi tentang akuntansi yang disusun | 1 Regulasi | | | 1 Regulasi | 290,106,857 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD Provinsi Gorontalo | 1 Regulasi | 319,128,854 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **02** | 1.05 | | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | Jumlah kab/kota yang mendapat bantuan | kab/kota dan parpol | | kab/kota dan parpol | 6 kab/kota dan parpol | **223,971,867,139** | | | | | | 6 kab/kota dan parpol | **246,369,053,853** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Kabupaten Kota yang memperoleh bantuan keuangan | 6 Kab/Kota | | | 6 Kab/Kota | 15,000,000,000 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten, kota dan partai politik | 6 Kab/Kota | 16,500,000,000 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 02 | 1.05 | 10 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi | Jumlah Kabupaten Kota yang memperoleh bagi hasil | 6 Kab/Kota | | | 6 Kab/Kota | 208,971,867,139 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Kabupaten, kota dan partai politik | 6 Kab/Kota | 229,869,053,853 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **02** | 1.06 | | **Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** | Jumlah sistem pengelolaan keuangan yang tersedia | SKPD | | SKPD | 32 SKPD | **395,753,678** | | | | | | 32 SKPD | **435,327,598** | |
| 5 | 02 | 02 | 1.06 | 02 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah sistem pengelolaan keuangan yang tersedia | 32 OPD | | | 32 OPD | 395,753,678 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | SKPD se-Provinsi Gorontalo | 32 OPD | 435,327,598 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah | % | | % | 100 % | **1,727,019,530** | | | | | | 100 % | **1,870,004,631** | |
| **5** | **02** | **03** | 1.01 | | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | Jumlah laporan asset milik daerah yang disusun | Dokumen BMD | | Dokumen BMD | 5 Dokumen BMD | **1,727,019,530** | | | | | | 5 Dokumen BMD | **1,870,004,631** | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | Jumlah buku Standarisasi Harga yang disusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 364,225,539 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan dan Stakeholder | 1 Dokumen | 400,630,348 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen kebijakan yang diterbitkan | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 385,871,504 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan dan Stakeholder | 1 Dokumen | 394,759,397 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 1.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah buku standarisasi barang dan jasa yang disusun | 1 Dokumen BMD | | | 1 Dokumen BMD | 976,922,487 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Badan Keuangan dan Stakeholder | 1 Dokumen BMD | 1,074,614,886 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | % | | % | 7 % | **6,369,382,751** | | | | | | 7 % | **5,356,333,282** | |
| **5** | **02** | **04** | 1.01 | | **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | % | | % | 7 % | **6,369,382,751** | | | | | | 7 % | **5,356,333,282** | |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | Jumlah dokumen NJKB tahun berjalan yang disusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 371,743,403 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Masyarakat wajib pajak | 1 Dokumen | 408,919,107 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | JUmlah dokumen pelaksanaan rapat koordinasi pendapatan daerah | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 725,881,895 | Kota Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Masyarakat wajib pajak | 1 Dokumen | 798,469,758 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah dokumen objek pajak daerah tahun berjalan yang disusun | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | 314,300,976 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Masyarakat wajib pajak | 1 Dokumen | 345,731,428 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah dokumen monitoringdan evaluasi samsat | 5 Dokumen | | | 5 Dokumen | 372,606,138 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Masyarakat wajib pajak | 5 Dokumen | 409,876,732 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| 5 | 02 | 04 | 1.01 | 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Persentase target PKB dan BBNKB yang tercapai | 100 % | | | 100 % | 4,584,850,339 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | Masyarakat wajib pajak | 100 % | 3,393,336,257 | Badan Keuangan Provinsi Gorontalo |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **11,530,530,293** | | | | | | | **2,479,998,779** | |
| **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **9,353,864,225** | | | | | | 100 % | **523,909,594** | |
| **5** | **03** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan monitoring dan evaluasi | Dokumen | | Dokumen | 6 Dokumen | **217,040,409** | | | | | | 6 Dokumen | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi | 6 Dok/lap | | | 6 Dok/lap | 217,040,409 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Anggaran serta adanya Laporan Monitoring dan Evauasi Badan Kepegawaian Daerah | 6 Dok/lap | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan | Laporan | | Laporan | 2 Laporan | **7,990,873,465** | | | | | | 2 Laporan | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai | 12 bulan | | | 12 bulan | 7,860,381,004 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah | 12 bulan | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen laporan administrasi dan keuangan | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 130,492,461 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah | 2 Laporan | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Meningkatnya Kompetensi ASN dalam pengelolaan kegiatan asessment | % | | % | 100 % | **57,060,000** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek | 5 orang | | | 5 orang | 57,060,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompetensinya melalui Diklat/bimtek | 5 orang | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran | % | | % | 100 % | **564,980,757** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 5 | 03 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah unit/ paket) Presentase layanan dan manajemen administrasi perkantoran | 6 Unit/paket 100 % | | | 6 Unit/paket 100 % | 564,980,757 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran | 6 Unit/paket 100 % | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Presentase Layanan dan Manajemen Administrasi Perkantoran | % | | % | 100 % | **523,909,594** | | | | | | 100 % | **523,909,594** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah unit/ paket)<br>meningkatnya pelayanan sekretariat badan kepegawaian daerah<br>Presentase layanan dan manajemen administrasi perkantoran | 6 Unit/Paket<br>100 %<br>100 % | | | 6 Unit/Paket<br>100 %<br>100 % | 523,909,594 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo | 6 Unit/Paket<br>100 %<br>100 % | 523,909,594 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | Indeks kepuasan layanan Manajemen PNS | % | | % | 94 % | **2,176,666,068** | | | | | | 94 % | **1,956,089,185** | |
| **5** | **03** | **02** | 1.01 | | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | Jumlah layanan manajemen PNS | % | | % | 100 % | **1,161,836,489** | | | | | | 100 % | **1,161,836,489** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo | | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Jumlah Calon Praja yang mengikuti Seleksi Penerimaan Praja IPDN<br>Jumlah Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan ASN | 400 Orang<br>500 org | | | 400 Orang<br>500 org | 637,379,436 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo | 400 Orang<br>500 org | 637,379,436 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Spritual<br>Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Pekan Olahraga Korpri (POR KORPRI)<br>Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan Tata Upacara Persemayaman | 2800 Orang<br>150 Orang<br>196 Orang | | | 2800 Orang<br>150 Orang<br>196 Orang | 579,742,170 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani<br>Pemerintah Melayani | Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo | 2800 Orang<br>150 Orang<br>196 Orang | 579,742,170 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Arsip Kepegawaian yang terpelihara<br>Jumlah Layanan Manajemen PNS | 6000 Arsip<br>1 Layanan | | | 6000 Arsip<br>1 Layanan | 234,585,968 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Peningkatan kinerja PNS di seluruh lini pemda provinsi Gorontalo | 6000 Arsip<br>1 Layanan | 234,585,968 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **02** | 1.02 | | **Mutasi dan Promosi ASN** | Terwujudnya birokrasi yang handal dan akuntabel berdasarkan merit sistem | % | | % | 100 % | **594,252,696** | | | | | | 100 % | **594,252,696** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/ Persetujuan Surat Perintah Penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota, Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB | 750 SK/Persetujuan | | | 750 SK/Persetujuan | 171,714,645 | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi Kepegawaian | 750 SK/Persetujuan | 171,714,645 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Terlaksananya proses pelayanan kenpa dan pensiun otomatis PNS Provinsi Gorontalo | 2500 SK | | | 2500 SK | 163,966,493 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi Kepegawaian | 2500 SK | 163,966,493 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan pelaksana dan ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kompetensi jabatan pelaksana<br>Jumlah ASN yang Mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, dan Ujian Peningkatan Pendidikan<br>Jumlah Jabatan yang diisi melalui seleksi terbuka<br>Jumlah Laporan Jaybatan JPT, Administrator Pengawas dan Fungsional di Provinsi Gorontalo | 150 orang<br>150 Orang<br>5 Jabatan<br>2 Laporan | | | 150 orang<br>150 Orang<br>5 Jabatan<br>2 Laporan | 258,571,558 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Pemerintah Melayani | Meningkatnya Sistem Pelayanan Melalui Pemanfaatan Teknologi informasi Kepegawaian | 150 orang<br>150 Orang<br>5 Jabatan<br>2 Laporan | 258,571,558 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | **03** | **02** | 1.03 | | **Pengembangan Kompetensi ASN** | Meningkatnya kualitas ASN | % | | % | 100 % | **246,435,018** | | | | | | 100 % | **100,000,000** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 02 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar | | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Studi Tugas Belajar dan izin belajar | 27 orang | | | 27 orang | 246,435,018 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar | 27 orang | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Pemberian Bantuan Studi Tugas Belajar dan Izin Belajar | | 100,000,000 | Badan Kepegawaian Daerah |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **03** | **02** | 1.04 | | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | Terlaksananya Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | org | | org | 25 org | **174,141,865** | | | | | | 25 org | **100,000,000** | |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Aparatur yang dilayani kenaikan gaji berkala, Karpeg, Karis/Karsu, SKP Tahunan, Taspen, Cuti, Satya Lencana, KPE , dan TKD | 3100 orang | | | 3100 orang | 72,525,515 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Jumlah Aparatur yang dilayani Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Karis/Karsu, | 3100 orang | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 04 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai | | | | | | 0 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Jumlah Aparatur yang dilayani Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Karis/Karsu, | | 100,000,000 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | 03 | 02 | 1.04 | 07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS | 25 orang | | | 25 orang | 101,616,350 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Jumlah Aparatur yang dilayani Kenaikan Gaji Berkala, Karpeg, Karis/Karsu, | 25 orang | 0 | Badan Kepegawaian Daerah |
| **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **17,549,925,934** | | | | | | | **18,598,856,000** | |
| **5** | **04** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **14,036,398,109** | | | | | | 100 % | **13,350,000,000** | |
| **5** | **04** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD | dokumen | | dokumen | 5 dokumen | **500,388,590** | | | | | | 5 dokumen | **500,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD | 5 dokumen | | | 5 dokumen | 500,388,590 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Organisasi Perangkat Daerah Badan Diklat | 5 dokumen | 500,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| **5** | **04** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi dan Keuangan SKPD | dokumen | | dokumen | 2 dokumen | **8,552,426,386** | | | | | | 2 dokumen | **7,600,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | | | 100 % | 8,333,193,798 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Seluruh ASN Badan Diklat Organisasi Perangkat Daerah Badan Diklat | 100 % | 7,500,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 5 | 04 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Adminstrasi dan Keuangan SKPD | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 219,232,588 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Seluruh ASN Badan Diklat Organisasi Perangkat Daerah Badan Diklat | 2 Dokumen | 100,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **04** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek | orang | | orang | 12 orang | **117,508,000** | | | | | | 12 orang | **250,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek | 12 orang | | | 12 orang | 117,508,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | ASN Badan Diklat | 12 orang | 250,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| **5** | **04** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase Pemenuhan Sarana dan PrasaranaPerkantoran yang tersedia | % | | % | 100 % | **3,828,237,196** | | | | | | 100 % | **3,500,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia | 100 % | | | 100 % | 3,828,237,196 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | Organisasi Perangkat Daerah Badan Diklat | 100 % | 3,500,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| **5** | **04** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Pemenuhan Jasa Kantor yang tersedia tepat waktu | % | | % | 100 % | **1,037,837,937** | | | | | | 100 % | **1,500,000,000** | |
| 5 | 04 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan jasa kantor yang tersedia tepat waktu | 100 % | | | 100 % | 1,037,837,937 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | Organisasi Perangkat Daerah | 100 % | 1,500,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | persentase peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi teknis, fungsional dan sosiocultural | % | | % | 21,56 % | **3,513,527,825** | | | | | | 21,56 % | **5,248,856,000** | |
| **5** | **04** | **02** | 1.01 | | **Pengembangan Kompetensi Teknis** | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis | orang | | orang | 150 orang | **567,929,037** | | | | | | 150 orang | **950,000,000** | |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah dokumen AKD yang dihasilkan | 2 Dokumen | | | 2 Dokumen | 167,929,259 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | ASN Provinsi Gorontalo ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo ASN Pengguna Diklat | 2 Dokumen | 200,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 5 | 04 | 02 | 1.01 | 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Teknis | 150 orang | | | 150 orang | 399,999,778 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pemerintah Melayani | ASN Provinsi Gorontalo ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo ASN Pengguna Diklat | 150 orang | 750,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| **5** | **04** | **02** | 1.02 | | **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional** | Persentase Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | % | | % | 31.35 % | **2,945,598,788** | | | | | | 31.35 % | **4,298,856,000** | |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Jumlah Karya Tulis yang di dokumentasikan<br>Jumlah kegiatan penjamin mutu pendukung akreditasi/reakreditasi lembaga diklat<br>Jumlah WI dan Fasilitator yang meningkat kapasitas dan kompetensinya<br>Jumlah WI yang mengikuti orasi ilmiah<br>Persentase Aplikasi Sistem Informasi Kediklatan Yang Bangun/ Dikembangkan | 2 dokumen<br>2 dokumen<br>15 orang<br>2 orang<br>100 % | | | 2 dokumen<br>2 dokumen<br>15 orang<br>2 orang<br>100 % | 849,332,144 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Provinsi Gorontalo ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo ASN Pengguna Diklat | 2 dokumen<br>2 dokumen<br>15 orang<br>2 orang<br>100 % | 1,102,670,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 05 | Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga | Jumlah Perjanjian kerja sama penyelenggaraan diklat yang tandatangani | 6 dokumen | | | 6 dokumen | 99,998,368 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Provinsi Gorontalo ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo ASN Pengguna Diklat | 6 dokumen | 200,000,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 5 | 04 | 02 | 1.02 | 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional<br>Jumlah Calon ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan prasyaratan jabatan<br>Jumlah Pejabat Eselon III yang memenuhi standar kompetensi jabatan<br>Jumlah Pejabat Eselon IV yang memenuhi standar kompetensi jabatan | 120 orang<br>18 orang<br>40 orang<br>40 orang | | | 120 orang<br>18 orang<br>40 orang<br>40 orang | 1,996,268,276 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Provinsi Gorontalo ASN Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo ASN Pengguna Diklat | 120 orang<br>18 orang<br>40 orang<br>40 orang | 2,996,186,000 | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **18,906,440,281** | | | | | | | **0** | |
| **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan | % | | % | 100 % | **15,975,108,634** | | | | | | 100 % | **0** | |
| **6** | **01** | **01** | 1.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Dokumen Evaluasi | Dok | | Dok | 8 Dok | **192,940,730** | | | | | | 8 Dok | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan | 1 Dok | | | 1 Dok | 121,308,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 1 Dok | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi | 8 Dok | | | 8 Dok | 71,632,730 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 8 Dok | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | **13,836,270,079** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | | | 12 Bulan | 13,761,260,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 12 Bulan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan | 2 Laporan | | | 2 Laporan | 75,010,079 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 2 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.05 | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | **500,000,123** | | | | | | | **0** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek, Diklat dan Workshop | 30 orang | | | 30 orang | 500,000,123 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 30 orang | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.06 | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran | Paket | | Paket | 9 Paket | **819,381,408** | | | | | | 9 Paket | **0** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 9 Paket | | | 9 Paket | 819,381,408 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 9 Paket | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **01** | 1.08 | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran | % | | % | 100 % | **626,516,294** | | | | | | 100 % | **0** | |
| 6 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 626,516,294 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | ASN Lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo | 100 % | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja OPD Ketagori BB | PD | | PD | 25 PD | **2,233,601,258** | | | | | | 25 PD | **0** | |
| **6** | **01** | **02** | 1.01 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | Laporan Audit Kinerja | Laporan | | Laporan | 4 Laporan | **1,960,887,772** | | | | | | 4 Laporan | **0** | |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan Audit Kinerja<br>Laporan Pemeriksaan Kas dan Persediaan Akhir Tahun<br>Laporan Pemeriksaan Reguler OPD<br>Probity Audit Tahap Pelaksanaan dan Pemanfaatan<br>Probity Audit Tahap Penandatanganan Kontrak<br>Probity Audit Tahap Perencanaan dan Tahap Persiapan | 4 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | | | 4 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 1,073,220,158 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 4 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS | 40 Laporan | | | 40 Laporan | 174,999,684 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 40 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Reviu Laporan Kinerja | Reviu DAK<br>Reviu KUA PPAS<br>Reviu LKIP OPD<br>Reviu LKIP Provinsi<br>Reviu LKPD<br>Reviu LPPD Provinsi<br>Reviu Renja OPD<br>Reviu RKA OPD<br>Reviu RKPD | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan | | | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan | 450,660,515 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 8 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>33 Laporan<br>33 Laporan<br>1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 05 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Laporan EKPPD Kabupaten/Kota<br>Laporan Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota<br>Laporan Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota<br>Monitoring Dana Desa | 6 Laporan<br>6 Laporan<br>6 Laporan<br>5 Laporan | | | 6 Laporan<br>6 Laporan<br>6 Laporan<br>5 Laporan | 284,835,469 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 6 Laporan<br>6 Laporan<br>6 Laporan<br>5 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah laporan hasil koordinasi dan pengawasan dalam rangka sinergitas pengawasan tingkat provinsi, regional dan nasional | 12 Kali | | | 12 Kali | 224,448,000 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 12 Kali | 0 | Inspektorat |

# Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
## Provinsi Gorontalo
## Tahun 2022

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021 | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Target 2022 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 6 | 01 | 02 | 1.01 | 07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan s/d Tahun Berjalan | 70 % | | | 70 % | 289,334,025 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo | 70 % | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **02** | 1.02 | | **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** | Jumlah pengaduan (kasus) yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus | Laporan | | Laporan | 12 Laporan | **272,713,486** | | | | | | 12 Laporan | **0** | |
| 6 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah pengaduan (kasus) yang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus | 12 Laporan | | | 12 Laporan | 272,713,486 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | 0 | 12 Laporan | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | Jumlah Kasus Korupsi | | | | 0 | **697,730,389** | | | | | | 0 | **0** | |
| **6** | **01** | **03** | 1.01 | | **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** | Jumlah SKPD di Provinsi Gorontalo yang menerapkan SPIP pada level berkembang | OPD | | OPD | 33 OPD | **127,703,287** | | | | | | 33 OPD | **0** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.01 | 01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah SKPD di Provinsi Gorontalo yang menerapkan SPIP pada level berkembang | 33 OPD | | | 33 OPD | 127,703,287 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo | 33 OPD | 0 | Inspektorat |
| **6** | **01** | **03** | 1.02 | | **Pendampingan dan Asistensi** | Jumlah Laporan Hasil Edukasi Publik dan Inspeksi Berkala | Laporan | | Laporan | 1 Laporan | **570,027,102** | | | | | | 1 Laporan | **0** | |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik<br>Jumlah Laporan Monev Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Penilaian Zona Integritas | 6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | | | 6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 159,987,888 | | | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo | 6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Laporan Gratifikasi<br>Jumlah Laporan RAD PPK<br>Jumlah Laporan Verifikasi LHKSN/LHKPN | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | | | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 125,120,551 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| 6 | 01 | 03 | 1.02 | 04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Laporan Hasil Edukasi Publik dan Inspeksi Berkala | 1 Laporan | | | 1 Laporan | 284,918,663 | | [DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Pemerintah Melayani | OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo | 1 Laporan | 0 | Inspektorat |
| | | | | | | | | | **TOTAL** | | | | | | | | | | |

# BAB VII
# Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan tahun 2022 ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagaimana berikut:

**Tabel 6.1**
**Target Indikator Kinerja Utama**
**Provinsi Gorontalo**

| No | Indikator Kinerja | Capaian 2020 | Target 2022 | Target Nasional 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi | -0,02 | 6,3 – 7,0 | 5,4 – 6,0 |
| 2. | Indeks Gini | 0,406 | 0,412 – 0,391 | 0,376 – 0,378 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia | 68,68 | 69,62 | 73,44 – 73,48 |
| 4. | Persentase Angka Kemiskinan | 15,22 | 14,91 – 14,33 | 8,5 – 9,0 |
| 5. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,28 | 4,11 - 3,91 | 5,5 – 6,2 |
| 6. | PDRB per kapita AHB (juta Rp) | 31,83 | 37.560.000 | - |
| 7. | Pendapatan Daerah (Rp, trilyun ) | 2,006 | 1,914 | - |
| 8. | Indeks Reformasi Birokrasi | B | BB | - |

*Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo

**Tabel 6.2**
**Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**
**Provinsi Gorontalo**

| No. | Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi** | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi % | 4,06 | -0,02 | 5,97 – 6,62 | 6,3 – 7,0 |
| 1.2 | IPM | 68,49 | 68,68 | 68,45 – 68,95 | 69,62 |
| 1.3 | PDRB per kapita AHB (Juta Rp) | 41,150 | 41,725 | 41,725 | 41,725 |
| 1.4 | Laju inflasi provinsi (%) | 2,87 | 0,81 | 2 – 3 | 2 – 3 |
| 1.5 | Indeks Gini | 0,410 | 0,406 | 0,415 – 0,380 | 0,412 – 0,391 |
| 1.6 | Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, trilyun ) | | 1,914 | 2,27 | 2,27 |
| 1,7 | Persentase penduduk miskin (%) | 15,31 | 15,22 | 16,01 – 15,05 | 14,91 – 14,33 |
| **Fokus Kesejahteraan Sosial** | | | | | |
| **2** | **Pendidikan** | | | | |
| 2.1 | Angka melek huruf (%) | 99,86 | 99,86 | 99,98 | 100 |
| 2.2 | Angka rata-rata lama sekolah (Belajar) | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,90 |
| 2.3 | Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%) | 78,75 | 78,75 | 77,63 | 78% |
| **3** | **Kesehatan** | | | | |
| 3.1 | Usia Harapan Hidup | 67,93 | 67,93 | 67,92 | 68 |
| **Fokus Seni Budaya** | | | | | |
| **4** | **Kebudayaan** | | | | |
| 4.1 | Jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo | 7 | 7 | 3 | 3 |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **Pelayanan Urusan Wajib** | | | | | |
| **5** | **Keluarga Berencana** | | | | |
| 5.1 | Angka Kelahiran Total (*Fertility Rate*) | 2,5 | 2,5 | 2.45 | 2.40 |



| KARO HUKUM | KEPALA BAPPEDA | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Pekerjaan Umum** | | | | |
| 6.1 | Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%) | 59,20 | 59,20 | 65,20 | 70 |
| 6.2 | Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) | 197,02 | 197,02 | 267,519 | 278 |
| **7** | **Perumahan** | | | | |
| 7.1 | Prosentase cakupan akses air minum yang layak (%) | 86,43 | 86,43 | 81,00 | 83,02 |
| 7.2 | Persentase cakupan akses sanitasi layak (%) | 76,71 | 76,71 | 67,71 | 69,41 |
| 7.3 | Persentase penurunan luas Kawasan kumuh (%) | 86 | 86 | 40 | 20 |
| **8** | **Lingkungan Hidup** | | | | |
| 9.1 | Meningkatnya indeks kualitas lingkungan | 74,93 | 74,93 | 73,39 | 73,61 |
| **9** | **Sosial** | | | | |
| 9.1 | Penduduk Miskin (Ribu Orang) | 186,03 | 186,03 | 188.153 | 185.391 |
| **10** | **Ketenagakerjaan** | | | | |
| 10.1 | Tingkat pengangguran terbuka (%) | 4,06 | 4,06 | 4,92 – 4,01 | 4,11 - 3,91 |
| **11** | **Pemerintahan** | | | | |
| 11.1 | Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat) | B | B | BB | BB |
| 11,2 | Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | B | B | BB | BB |
| 11,3 | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 11,4 | Survey kepuasan masyarakat (%) | 75,24 | 75,24 | 75 | 80 |
| 11.2 | Indeks tata kelola Pemerintahan | N/A | N/A | 6,07 | 6,16 |
| **12** | **Ketahanan Pangan** | | | | |
| 12.1 | Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan | 69,23 | 69,23 | 66,6 | 66,89 |
| 12.2 | Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi) | 89,3 | 89,3 | 84,4 | 86 |
| **13** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | | | | |
| 13.1 | Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal) | 31 | 31 | 97 | 88 |
| **14** | **Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| 14.1 | Indeks E-Government | 3,41 | 3,41 | 3,83 | 3,85 |
| **15** | **Penanggulangan Bencana** | | | | |
| 15.1 | Indeks resiko bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00) | 0,48 – 0,83 | 0,48 – 0,83 | 0,37 – 0,71 | 0,37 – 0,65 |
| **Pelayanan Urusan Pilihan** | | | | | |
| **16** | **Pertanian** | | | | |



| KARO HUKUM | KEPALA BAPPEDA | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 103,44 | 103,44 | 105,63 | 106,40 |
| 16.2 | Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah) | 16.021,90 | 16.021,90 | 13.813,97 | 14.228,39 |
| 16.3 | Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT) | 98,21 | 98,21 | 104,12 | 104,42 |
| **17** | **Kehutanan** | | | | |
| 17.1 | Luas lahan kritis (Ha) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **18** | **Pariwisata** | | | | |
| 18.1 | Wisatawan Mancanegara (orang) | 11.173 | 11.173 | 7.599 | 7.937 |
| 18.2 | Wisatawan Nusantara (kunjungan) | 1.304.254 | 1.304.254 | 722.879 | 759.023 |
| **19** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| 19.1 | Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN) | 98,21 | 98,21 | 101,70 | 102,01 |



| KARO HUKUM | KEPALA BAPPEDA | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# BAB VIII
# PENUTUP

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun terakhir dari lima tahun perencanaan pembangunan pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2022, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembangunan daerah. Prinsip dan Kaidah dimaksud adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo serta elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.
2. Untuk memaksimalkan pendanaan pembangunan, kontribusi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri harus senantiasa dioptimalkan, sekaligus juga agar berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
4. Untuk mengoptimalkan integrasi, sinergitas, sinkronisasi, harmonisasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja PD masing-masing dengan mempedomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022.
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renja PD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing – masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.
6. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.

7. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota, maka RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022.

**GUBERNUR GORONTALO**

**RUSLI HABIBIE**